



PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2021



PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang:** a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Ketentuan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

29. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standart Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

53. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
55. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
56. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
57. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
58. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1);
63. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Aplikasi e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 23), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

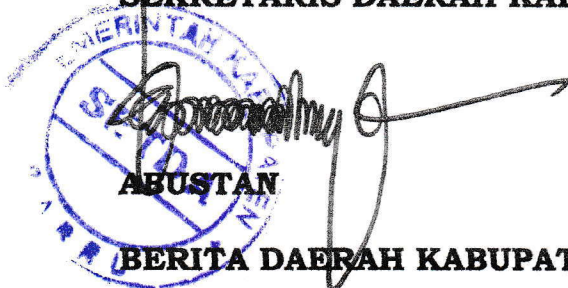
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 16 Agustus 2021



Diundangkan di Barru
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 25

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. Urgensi perencanaan pembangunan diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Barru untuk periode satu tahun. RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke V (ke-lima) atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 yang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda perubahan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru tahun 2021 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan

prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam Perubahan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD Tahun 2021 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Barru, diantaranya yakni : (1) Dokumen ini merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; (2) RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); (3) RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (3) RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, didapatkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021. Asumsi tersebut meliputi kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan, maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2021.

Selanjutnya, disamping asumsi tersebut diatas, pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan memerhatikan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dan berdasarkan pasal 345 disebutkan bahwa tahapan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 disusun dengan tahapan : (a) penyusunan rancangan perubahan RKPD, (b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD, dan (c) penetapan.

Pertimbangan lainnya berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 pasal 348 ayat dua menjelaskan bahwa dalam perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dalam APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2021 menunjukkan beberapa perkembangan yang tidak bersesuaian dengan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan. Asumsi-asumsi tersebut terdiri dari :

1. Refocusing terutama DBH, DAU, dan DAK fisik dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya berupa ancaman yang membahayakan stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian khususnya UMKM.
2. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) berdasarkan hasil audit BPK RI. Seiring dengan pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga melaksanakan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Salah satu bagian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah ditetapkan penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2020 yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan target awal pada asumsi kerangka pendanaan atau hal-hal yang berkenaan dengan perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru inilah yang menjadi latar belakang Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2021 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 15. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6056);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

29. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);

37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
40. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standart Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di

- Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 58. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 59. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

62. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
63. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
64. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1);

69. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Aplikasi e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 27);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Barru tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- a) Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2021 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;
- b) Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 juga harus mengacu berbagai substansi dalam Perubahan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Perubahan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan harus menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi atau dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barru. Wilayah Kabupaten Barru yang secara administrative berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan sangat perlu memperhatikan arah pembangunan propinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Barru.
- c) Perubahan RKPD Kabupaten Barru dan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan pelaksanaan Tahun Keempat Perubahan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.
- d) Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap PD. Sebagai bagian dari langkah pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RENJA-PD, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RENJA-PD Tahun 2021.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
4. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota; dan
5. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesaian prioritas program dan kegiatan Tahun 2021;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021, Perubahan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Barru Tahun 2021 ;

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD 2016-2021, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

Bab ini memaparkan rancangan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah kebijakan keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Bab ini menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2020 dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021
TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1 Indikator Kinerja Makro Nasioanl

Perbaikan ekonomi di berbagai daerah diperkirakan terus berlanjut pada triwulan II 2021 meski tidak setinggi prakiraan sebelumnya. Perbaikan ekonomi ditopang kinerja ekspor daerah yang diperkirakan terus mengalami perbaikan seiring permintaan eksternal yang menguat, terutama dari Tiongkok dan Amerika Serikat, disertai harga komoditas yang meningkat. Perbaikan kinerja ekspor tersebut mendorong kinerja lapangan usaha (LU) tradable di daerah, seperti Industri Pengolahan berbasis sumber daya alam (SDA) di Sumatera dan Kalimantan, Pertambangan di Sulampua, serta Industri Pengolahan di Jawa. Sementara itu, perbaikan konsumsi domestik diperkirakan berlanjut sesuai dengan pola musiman perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meskipun masih relatif terbatas akibat pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih luas untuk mengendalikan penyebaran kasus COVID-19, termasuk pengetatan pembatasan mobilitas antardaerah selama periode HBKN. Kenaikan ekspor dan perbaikan konsumsi juga mendorong kinerja investasi nonbangunan, dengan berlanjutnya peningkatan kapasitas produksi manufaktur di berbagai daerah. Sementara itu, pengerjaan berbagai proyek infrastruktur Pemerintah dan swasta yang masih berlanjut turut menopang kinerja investasi bangunan sepanjang triwulan II 2021. Sementara konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat didorong stimulus fiskal Pemerintah di tengah masih terbatasnya realisasi belanja fiskal daerah.

Meningkatnya permintaan eksternal mendorong perbaikan kinerja LU utama daerah, terutama LU primer dan sekunder berorientasi ekspor. Kinerja LU Pertanian diperkirakan tetap tumbuh,

meski lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Perkembangan tersebut dipengaruhi produksi tanaman bahan makanan (tabama) yang lebih rendah karena pergeseran panen padi yang telah mencapai puncaknya pada akhir triwulan sebelumnya, di tengah naiknya permintaan industri makanan berorientasi ekspor terhadap bahan baku dari subLU Perkebunan. LU Pertambangan berorientasi ekspor juga menopang perbaikan pertumbuhan, didorong tetap kuatnya permintaan eksternal dan peningkatan harga komoditas tambang global. Permintaan eksternal juga menopang kinerja LU Industri Pengolahan, di tengah peningkatan permintaan domestik yang masih relatif terbatas. Sejalan dengan kinerja investasi, kinerja LU Konstruksi ditopang oleh erlanjutnya pengerjaan proyek-proyek Pemerintah dan swasta. Sementara itu, kinerja LU Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) diperkirakan mengalami perbaikan sesuai dengan pola musiman HBKN Idul Fitri meski tidak sekuat perkiraan sebelumnya karena berlanjutnya pembatasan mobilitas.

Perbaikan ekonomi daerah diperkirakan terus berlanjut di seluruh wilayah untuk keseluruhan 2021, meski lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pada triwulan III 2021 diperkirakan lebih rendah, dipengaruhi oleh permintaan domestik yang menurun sejalan dengan kebijakan pembatasan mobilitas di sejumlah daerah untuk mengendalikan penyebaran kasus COVID-19. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat pada triwulan IV 2021 didorong peningkatan mobilitas dengan didukung akselerasi vaksinasi, berlanjutnya stimulus kebijakan, dan terus meningkatnya kinerja ekspor. Ekspor produk SDA maupun manufaktur diperkirakan terus menguat sejalan dengan pemulihan ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat. Dari sisi domestik, konsumsi swasta diperkirakan membaik secara gradual sejalan dengan meluasnya program vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol COVID-19, serta dukungan

stimulus dan belanja fiskal daerah yang meningkat pada paruh kedua 2021. Demikian pula investasi, terutama didorong oleh kelanjutan proyek hilirisasi di Sulampua dan perbaikan kinerja manufaktur di Jawa, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur Pemerintah. Sejalan dengan hal ini, sejumlah LU utama di daerah diperkirakan membaik, meskipun LU terkait pariwisata di wilayah Balinusra diperkirakan masih terbatas. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2021 diprakirakan menjadi lebih rendah yakni berada pada kisaran 3,5%-4,3% dari proyeksi sebelumnya yang berada di kisaran 4,1%-5,1%. Ke depan, strategi pengembangan LU Industri Pengolahan perlu terus diperkuat, khususnya peran industri teknologi menengah-tinggi, untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di tengah berlanjutnya pandemi, arus digitalisasi yang meningkat pesat mendorong naiknya permintaan terhadap produk-produk berteknologi menengah tinggi, terutama yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut memacu industri berteknologi menengahtinggi pulih lebih cepat dibandingkan industri teknologi menengah dan rendah. Dengan demikian, strategi pengembangan LU Industri Pengolahan perlu dilakukan secara end to-end dengan mengedepankan pada pengembangan produk manufaktur ekspor bernilai tambah tinggi, mendorong local value chains (LVC) yang juga mendukung substitusi impor, sekaligus dapat mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Penguatan strategi pengembangan industri pengolahan tersebut diulas secara lengkap pada Bagian 3 Isu Strategis: “Mempercepat Pemulihan dan Penguatan Struktur Industri Manufaktur melalui Implementasi Paket Kebijakan dan Peningkatan Iklim Usaha, untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Transaksi Berjalan”. Di sisi inflasi, realisasi inflasi di seluruh wilayah pada triwulan II 2021 tetap rendah. Rendahnya tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh melambatnya tekanan inflasi di Jawa dan Sulampua, seiring menurunnya tekanan inflasi volatile food (VF),

sementara inflasi VF di Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra mengalami sedikit peningkatan. Hingga akhir 2021 inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$. Prakiraan ini sejalan dengan perbaikan permintaan domestik, meski tidak setinggi perkiraan sebelumnya dengan pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19 terutama pada awal triwulan III 2021. Sementara itu, pasokan pangan diperkirakan tetap terjaga disertai minimalnya kendala produksi dan distribusi. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI dan TPID), termasuk menjaga pasokan selama implementasi kebijakan pembatasan mobilitas.

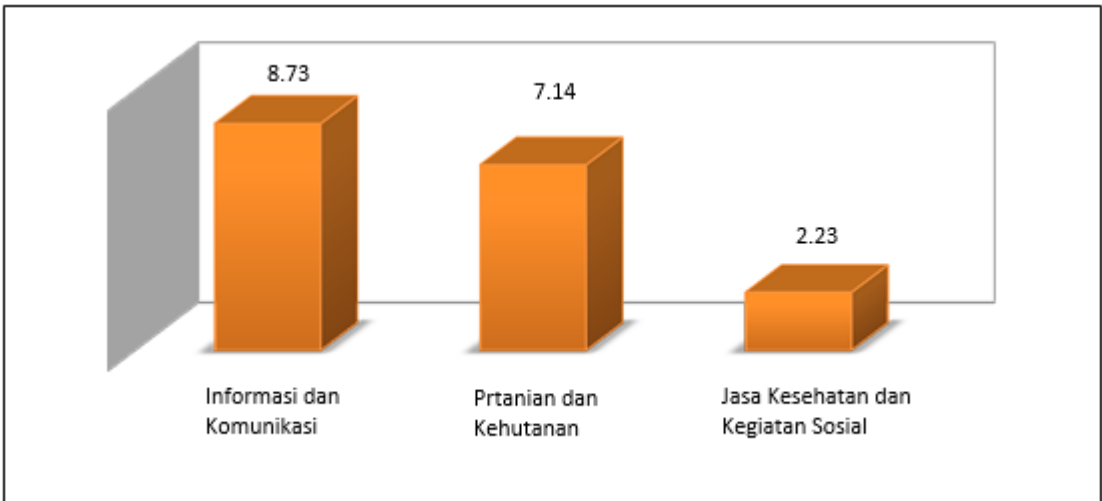
2.1.2 Indikator Kinerja Makro Provinsi

Pandemi Covid-19 masih melanda dunia tak terkecuali seluruh wilayah Indonesia. Pandemi ini menyebabkan ekonomi Sulawesi Selatan berkontraksi sejak triwulan II-2020 hingga saat ini. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I- 2021 dibanding triwulan I-2020 tumbuh negatif atau kontraksi sebesar 0,21 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,73 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,14 persen; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,32 persen dan Real Estate sebesar 1,17 persen. Sementara kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kontraksi terdalam adalah kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar - 18,04 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,42 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,67 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,05 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 0,04 persen. Grafik 3 jenis lapangan usaha dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi

terbesar di provinsi Sulawesi Selatan pada Triwulan I-2021 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1

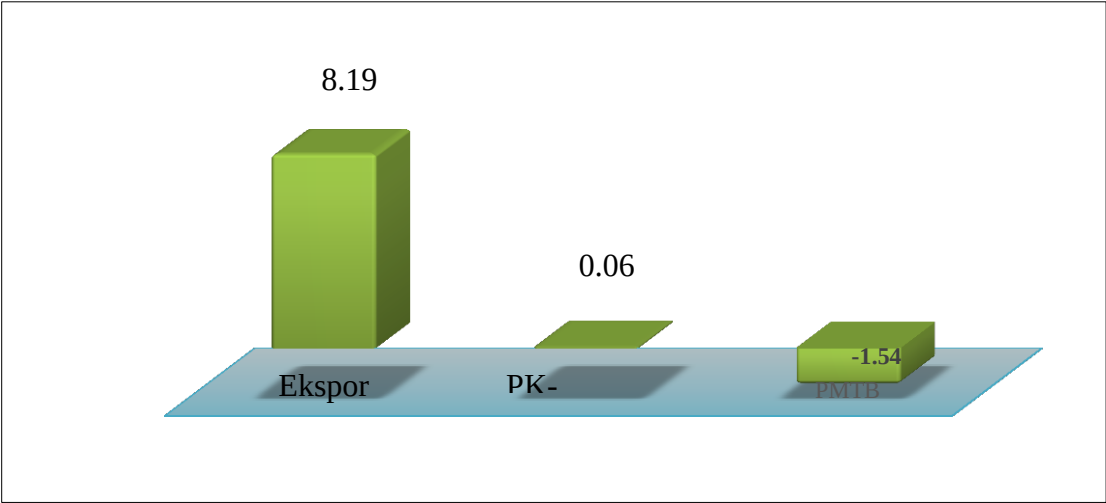
Pertumbuhan PDRB pada 3 (Tiga) Jenis Lapangan Usaha dengan
Pertumbuhan Positif Pada Triwulan I-2021 (*y-o-y*)



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 yang tercatat -0,21 persen. Hal ini disebabkan kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Konsumsi Rumah Tangga (LNPRT) dan Ekspor Barang dan Jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,19 persen; diikuti oleh komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Konsumsi Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 0,06 persen. Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar -1,54 Persen; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -3,52 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar -3,61 persen. Data tiga jenis komponen pengeluaran terbesar selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik 2.2
Pertumbuhan Beberapa Komponen
Pengeluaran Triwulan I-2020 (*y-o-y*)



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 yang tercatat -0,21 persen. Hal ini disebabkan kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran Lembaga NonProfit yang Melayani Konsumsi Rumah Tangga (LNPRT) dan Ekspor Barang dan Jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,19 persen; diikuti oleh komponen Pengeluaran Lembaga NonProfit yang Melayani Konsumsi Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 0,06 persen. Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar -1,54 Persen; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -3,52 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar -3,61 persen. Data tiga jenis komponen pengeluaran terbesar selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran Triwulan I-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov.Sulsel,2021

Capaian Inflasi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 1,49 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD Pokok Tahun 2021 sebesar 3,0+1,0. Penurunan terutama dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang tertahan akibat pembatasan fisik dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Aktivitas ekonomi yang menurun juga berdampak pada aktivitas bisnis dan permintaan dunia usaha terhadap barang dan jasa.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan penghitungan dan tahun dasar baru tahun 2018 (2018 = 100) hasil SBH 2018, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan pada Juni 2021 terjadi deflasi sebesar 0,25 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,13 pada Mei 2021 menjadi 106,87 pada Juni 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Juni 2021) sebesar 1,41 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 1,49 persen. Selengkapnya pada table berikut.

Tabel 2.1
IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 5 Kota Juni 2021,
Tahun Kelender 2021, dan Tahun Provinsi Sulawesi Selatan

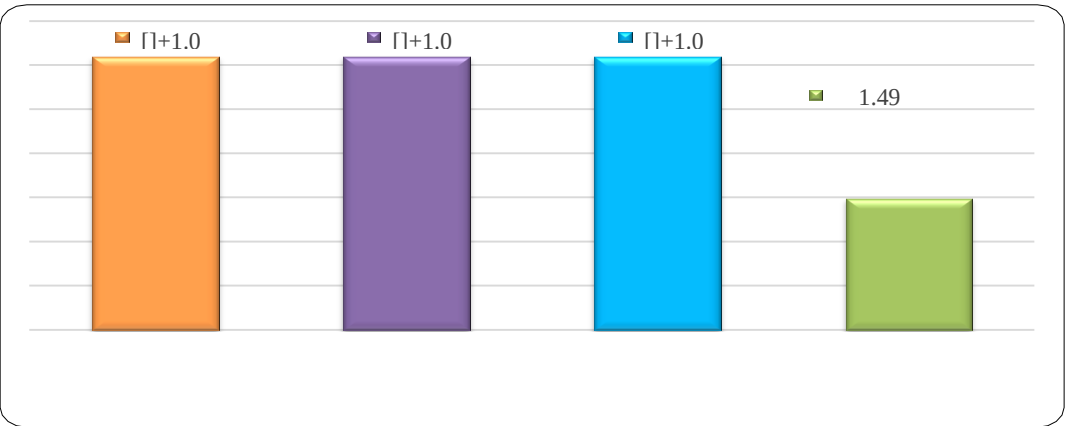
No.	KELOMPOK	IHK Juni 2020	IHK Mei 2021	IHK Juni 2021	Tingkat Inflasi Juni 2021 1)	Tingkat Inflasi Tahun Kelender 2021 2) (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke tahun 3) (%)	Andil Inflasi Juni 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Umum	105,29	107,13	106,87	-0,25	1,41	1,49	-0,250
1.	Makanan, minuman, dan tembaka	107,42	111,69	110,89	-0,71	3,01	3,23	- 0,212
2.	Pakaian dan alas kaki	106,01	107,64	107,46	-0,17	0,81	1,36	- 0,015
3.	Perusahaan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	101,12	102,89	102,93	0,04	1,81	1,79	0,006
4.	Perlengkapan, peralatan, dan pemeriharaan rutin rummah tangga	104,21	105,19	105,23	0,03	0,59	0,98	0,002
5.	kesehatan	106,82	108,18	108,20	0,01	0,46	1,29	0,0002
6.	Transportasi	105,87	104,98	104,44	-0,51	0,25	-1,35	-0,058
7.	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	99,85	100,14	100,14	0,00	0,11	0,29	0,000
8.	Rekreasi, olahraga, dan budaya	103,56	101,88	101,88	0,00	0,12	0,30	0,000
9.	Pendidikan	102,37	101,88	101,88	0,00	0,00	-0,48	0,000
10.	Penyediaan makannan dan minum/restoran	106,08	106,88	106,89	0,01	0,57	0,77	0,001
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	110,56	112,54	112,94	0,36	0,74	2,15	0,027

Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasi Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan Juni, BPS 2021

Deflasi gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan pada Juni 2021 sebesar 0,25 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya sebagian indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,71 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,51 persen; sementara beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 persen.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan III 2021 dapat meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran $3,0\% \pm 1,0\%$ (yoy). Terkait hal tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan akan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien.

Grafik 2.4
Target Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia kerja bulan Februari 2021 sebanyak 6.783.049 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.433.714 orang dengan komposisi 4.176.800 adalah penduduk yang bekerja dan 256.914 orang penduduk yang menganggur. Dibandingkan Februari 2020, jumlah angkatan kerja terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 45.524 orang. Jumlah orang yang bekerja bertambah sebanyak 38.876 orang, sebaliknya jumlah orang yang menganggur bertambah sebanyak 6.648 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2021 sebesar 65,36 persen. TPAK Februari 2021 lebih rendah 0,03 poin dibandingkan Februari 2020. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang juga menurun.

Tabel 2. 2
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Sulawesi Selatan Feb.2020- Feb.2021

No	Kegiatan Utama	Februari 2020	Februari 2021	Perubahan Februari 2020 - Februari 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)=(5)
1	Penduduk Usia Kerja	6.709.949	6.783.049	73.100
2	Angkatan Kerja	4.388.190	4.433.714	45.524
	Bekerja	4.137.924	4.176.800	38.876
	Menganggur	250.266	256.914	6.648
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,40	65,36	-0.03
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,70	5,79	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Pada Februari 2021, TPAK laki-laki sebesar 81,62 persen sementara TPAK perempuan hanya 50,11 persen. Dibandingkan Februari 2020, TPAK laki-laki menurun sebesar-1,66 poin sedangkan TPAK perempuan meningkat sebesar 1,48 poin. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik 2.5
Perkemangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Selatan Februari 2020- Februari 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Februari 2020, TPT Sulawesi Selatan sebesar 570 persen, mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2020 yang besarnya 5,79 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada kelompok wanita pada Bulan Februari 2020 sebesar 6,59 persen mengalami penurunan pada Bulan Februari 2021 sebesar 0,43%. Sementara tingkat pengangguran pada kelompok laki-laki di periode yang sama menunjukkan peningkatan sebesar 0,47%, hal ini berarti bahwa sector lapangan pekerjaan yang umumnya menyerap tenaga kerja pria berkurang di

banding lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja wanita. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
Sulawesi Selatan Tahun 2021

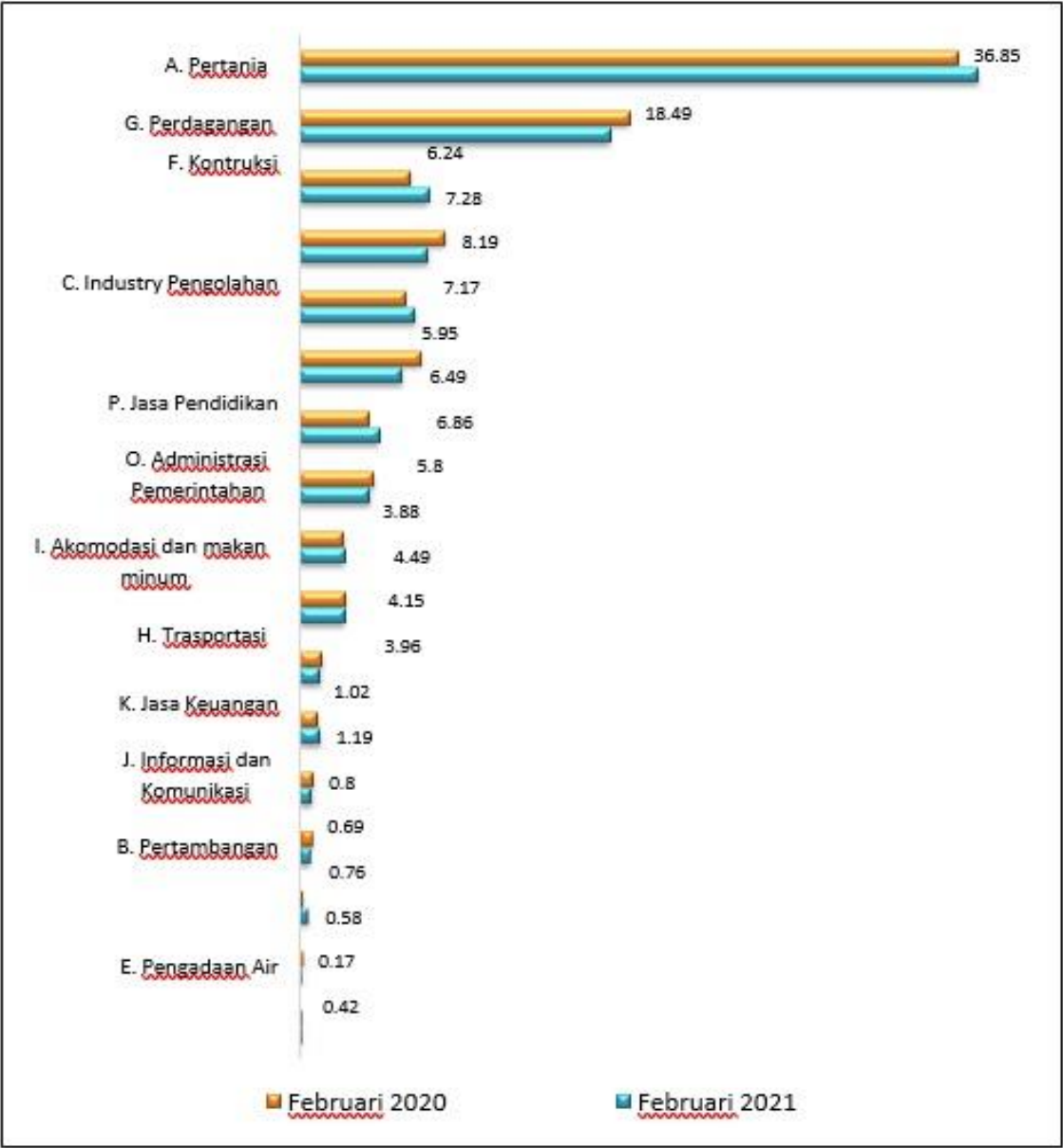


Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2021, TPT dari tamatan SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 10,49 persen, kemudian disusul dari tamatan Sekolah Menengah Atas sebesar 9,54 persen. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2021, penduduk Sulawesi Selatan paling banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 37,98 persen yang mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2020 yang menunjukkan nilai sebesar 36,85 persen. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,41 persen, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 7,17 persen. Sedangkan tiga sector dengan sertapan tenaga kerja terkecil di Provinsi Sulawesi selatan adalah sektor pengadaan air, pengadaan listrik dan gas serta sector real estate yang tidak mengalami perubahan serapan

tenaga kerja dari periode februari 2020 hingga februari 2021 sebesar 0,11 persen. Selengkapnya terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2020 - Februari 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan bulan Maret2021 menunjukkan nilai 794,98 ribu jiwa dengan Persentase Penduduk

Miskin 8,78 persen, menurun 0,21 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 8,99 persen dan meningkat 0,06 persen poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 8,72 persen.

Secara absolut selama periode Maret 2020 – Maret 2021, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan 17,7 ribu jiwa, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 9,55 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,28 dan 0,08 poin persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Selatan
Periode September 2019 - September 2020

Daerah/Tahun	Jumlah	Persentase
	(Ribuan Jiwa)	
-1	-2	-3
Perkotaan		
Maret-2020	173,80	4,49
Sept 2020	195,08	4,92
Maret-2021	191,50	4,77
Perubahan Maret 2020-Maret 2021	17,7	0,28
Perubahan Sept 2020-Maret 2021	-3,58	-0,15
Perdesaan		
Maret-2020	603,03	11,97
Sept 2020	605,16	12,25
Maret-2021	593,48	12,05
Perubahan Maret 2020-Maret 2021	-9,55	0,08
Perubahan Sept 2020-Maret 2021	-11,68	0,20
Kota + Desa		
Maret-2020	776,83	8,72
Sept 2020	800,24	8,99
Maret-2021	784,98	8,87
Perubahan Maret 2020-Maret 2021	8,15	0,06
Perubahan Sept 2020-Maret 2021	-15,26	-0,21

Sumber : Profil Kemiskinan Sulsel, Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Maret 2021

Peningkatan penduduk miskin pada maret Tahun 2021 dibanding maret 2020 lebih dipengaruhi oleh pandemic covid-19 di Sulawesi Selatan pada bulan Maret. Penduduk miskin diprediksikan akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat pengangguran terbuka dan kontraksinya pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun di Sulawesi Selatan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama Maret 2020 – Maret 2021, Garis Kemiskinan di Sulawesi selatan mengalami kenaikan, yaitu dari Rp 350.264,- per kapita per bulan menjadi Rp 372.491,- per kapita per bulan atau naik 6,35 persen. Peningkatan kemiskinan pada awal pandemic covid-19 diakibatkan dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), yang berdampak pada pembatasan pada aktivitas perekonomian seperti penutupan aktifitas perdagangan dan public, dan memengaruhi pendapatan penduduk. Kondisi pandemi ini memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, dampak yang lebih dalam paling dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) dan tingkat keparahan (ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin) dari kemiskinan. Adapun Indeks Kedalamam Kemiskinan dan Indeks Keparaham Kemiskinan periode Maret 2020 – Maret 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
 Kemiskinan (P2) di Sulawesi Selatan menurut Daerah, Maret
 2020 - Maret 2021

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
1	2	3	4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret - 2020	0,694		1,528
Sept - 2020	0,810	2,323	1,650
Maret - 2021	0,788	2,06	1,489
		0	
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret - 2020	0,157	0,568	0,389
Sept - 2020	0,177	0,682	0,457
	0,179	0,52	0,372

Sumber : Profil Kemiskinan Sulsel, Badan Pusat Statistik Prov. SulSel
 Maret 2021

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Perkembangan Gini Rasio di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Maret 2020 -Maret 2021 untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,008 poin yaitu dari 0,384 pada Maret 2020 menjadi 0,392 pada Maret 2021. Sedangkan di daerah pedesaan, nilai Gini Ratio mengalami penurunan sebesar 0,018 poin di mana pada Maret 2020 sebesar 0,356 menjadi 0,338 pada Maret 2021. Namun secara keseluruhan (Perkotaan + Pedesaan) Gini Rasio mengalami sedikit penurunan dari periode maret 2020 yang sebesar0,389 menjadi sebesar 0,382. Selengkapnya pada tabel berikut.

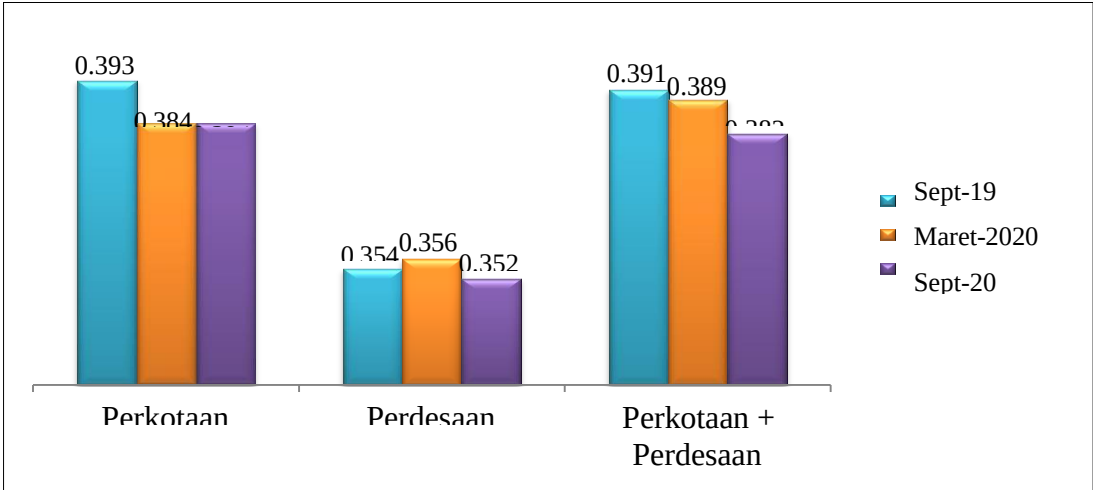
Tabel 2. 5
Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah,Periode
Maret - 2020 hingga Maret - 2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2020	0,384	0,356	0,389
Sept 2020	0,384	0,352	0,382
Maret 2021	0,392	0,338	0,382

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Pada perbandingan tingkat ketimpangan antara penduduk diperkotaan dengan penduduk dipedesaan menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan diperkotaan pada periode Maret 2020 hingga Maret 2021, kondisi ini dipengaruhi oleh penduduk dengan pendapatan tertinggi serta penduduk dengan pendapatan terendah umumnya berada pada daerah perkotaan, dengan tingkat variasi lapang pekerjaan yang lebih nayak di daerah perkotaan di banding pedesaan. Selengkapnya terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7
Perkembangan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan
Maret 2020 - Maret 2021

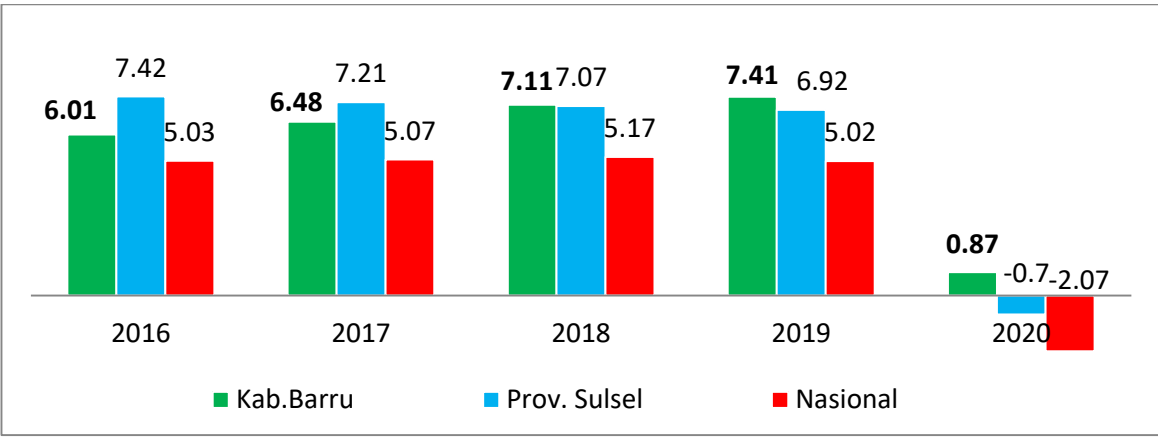


Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2020

2.1.3 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru

Pandemic covid 19 mempengaruhi semua sektor, yang kemudian berimbas dengan terjadinya kontraksi perekonomian. Capaian 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi bertumbuh negatif diangka -2,07 untuk nasional, sementara Provinsi berada pada angka -0,70. Walaupun dihampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami kontraksi, Kabupaten Barru masih mampu tumbuh positif meskipun tumbuh melambat dipengaruhi oleh produktivitas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang tetap meningkat. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020

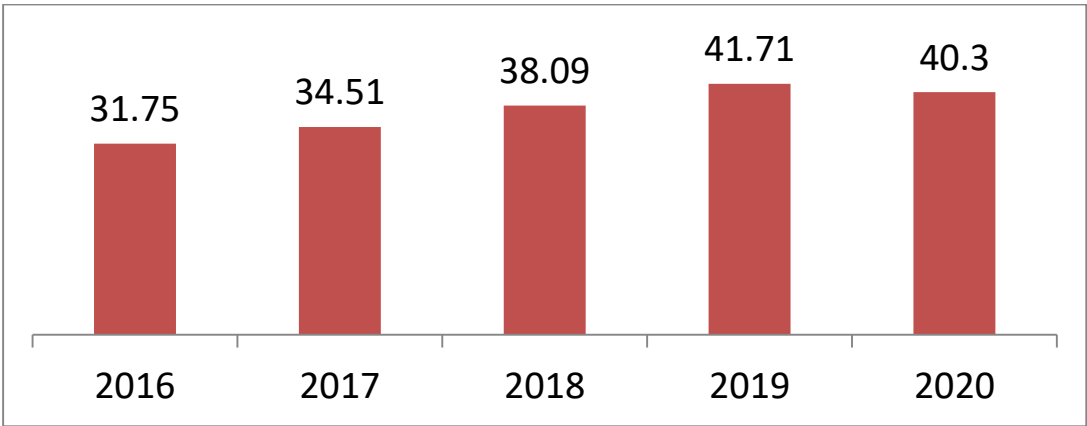


Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (HB) terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) mengalami peningkatan dari Rp. 31.807.380 pada tahun 2016 menjadi Rp. 42.470.000 pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru semakin meningkat.

Grafik 2.9
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru
Tahun 2016 s.d Tahun 2020



Sumber : BPS Tahun 2021

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli masyarakat.

Data laju inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

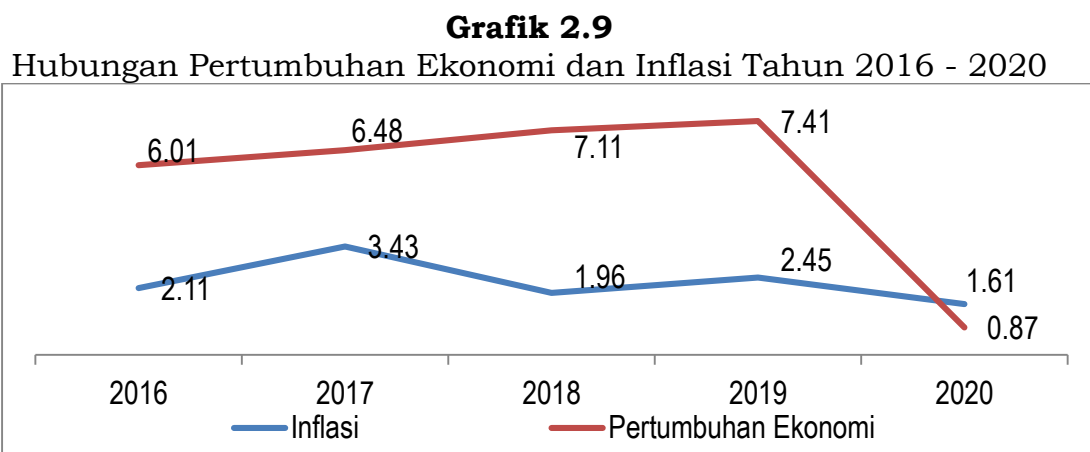
Tabel 2.6
Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bulukumba	1,48	4,66	3,85	2,25	2,30
2	Kab. Bone	1,5	5,54	4,69	1,64	1,89
3	Kota Makassar	3,18	2,11	3,48	2,43	2,13
4	Kota Pare-pare	2,11	3,43	1,96	2,45	1,61
5	Kota Palopo	2,74	3,95	4,19	1,91	1,21

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 di hampir seluruh kota di Sulawesi Selatan. Tertinggi terjadi di Kabupaten Bone dan Bulukumba. Namun pada tahun 2020 rata – rata inflasi berada pada kisaran 2,30 – 1,20.

Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Barru dengan inflasi 1.58 – 2.45 masih dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi antara 6.01 – 7.14 pada rentang tahun 2016 - 2019. Dengan inflasi senilai tersebut masih dapat mendorong sektor rill untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan dengan baik. Namun pada tahun 2020 karena dampak COvid 19 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 0,87 persen dan inflasi juga turun di tahun 2020 menjadi 1,61 persen. Secara rinci hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Triwulan I Tahun 2021

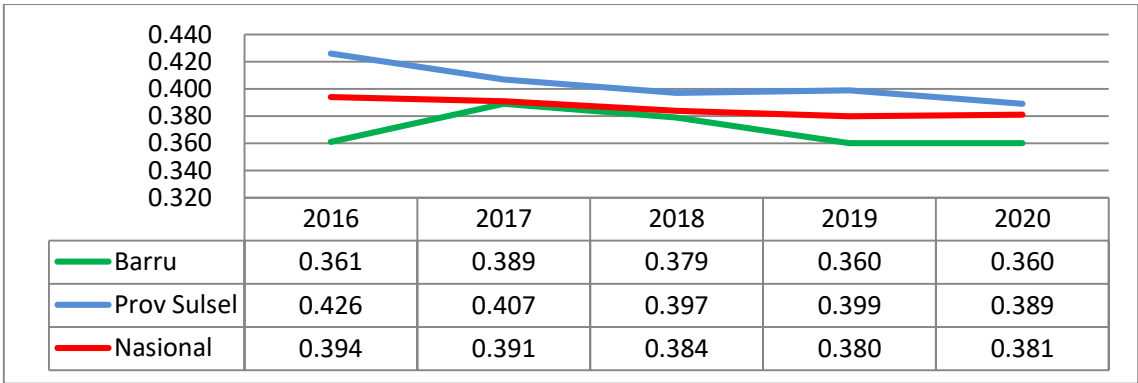
Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan

dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator- Indikator MakroEkonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

- 1. $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 2. $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- 3. $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10
Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru
Tahun 2016 – 2020



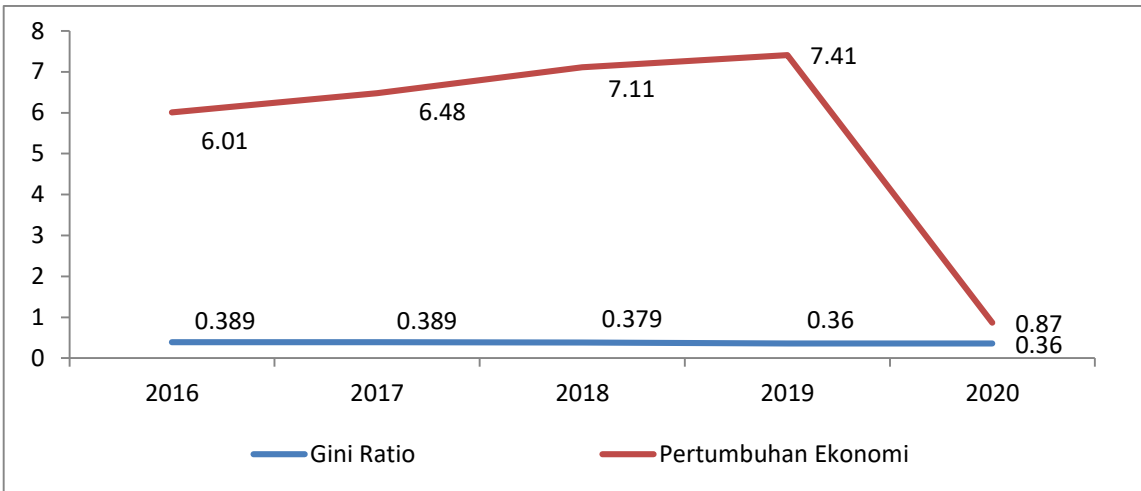
Sumber : BPS 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2017 meningkat sebesar 0.389, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 0.360. Penurunan Indeks Gini menunjukkan semakin meratanya pendapatan masyarakat yang berarti semakin inklusif nya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.

Berdasarkan Data yang disajikan diatas, Kabupaten Barru memiliki pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhannya cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten wilayah sekitar dengan Indeks Gini yang setiap tahunnya menunjukkan trend yang semakin menurun. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2016 – 2020 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi

ketimpangan pendapatan. Konsen pemerintah Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar. Pada grafik berikut menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks gini, dimana pada grafik 2.7 memperlihatkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 – 2017 tidak terlalu mempengaruhi penurunan Indeks Gini, meskipun pada tahun 2018 – 2019 dengan meningkatnya Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi menurunnya indeks gini Kabupaten Barru, ini berarti bahwa semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru.

Grafik 2.11
 Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kab.Barru

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Tingkat Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin

mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program;

- 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

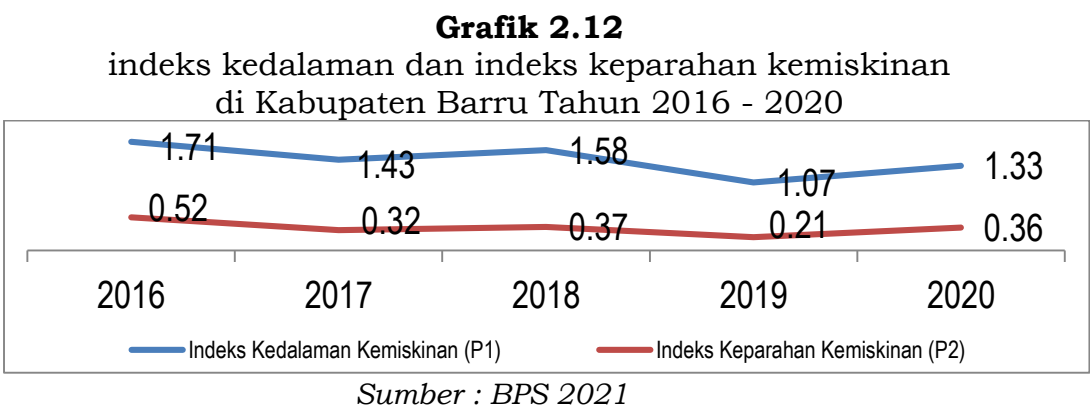
Tabel. 2.7
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)
1	2016	16.245	178.168	9,45	90,55
2	2017	16.760	174.871	9,71	90,29
3	2018	15.680	173.451	9,04	90,96
4	2019	14.920	182.373	8,57	91,43
5	2020	15.479	187.392	8,26	91,74

Sumber : BPS 2021

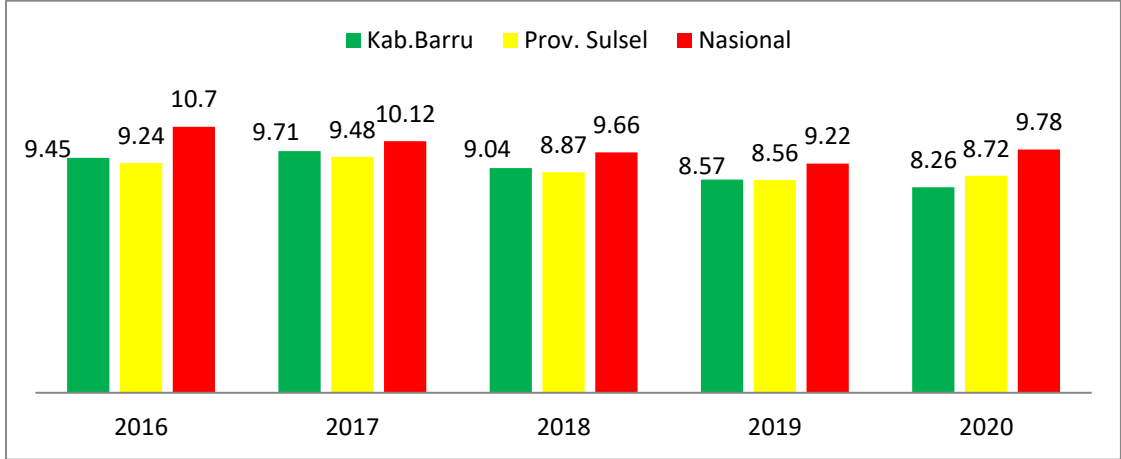
Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten Barru menurun, keberhasilan pembangunan di kabupaten Barru berkontribusi menyebabkan trend pertumbuhan penduduk miskin semakin menurun. Selain itu fokus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung maupun

program-program prioritas pembangunan lainnya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru. Disisi lain kondisi kemiskinan dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kinerja yang menurun. Adapun indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada grafik berikut.



Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas terlihat bahwa angka P1 dan P2 Kabupaten Barru berfluktuatif, namun pada Tahun 2020 mengalami peningkatan kembali. Peningkatan indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan ini dipengaruhi oleh Pandemic Covid 19. Adapun perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Prov.Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

Grafik 2.13
 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab.Barru dengan Capaian Provinsi
 Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020

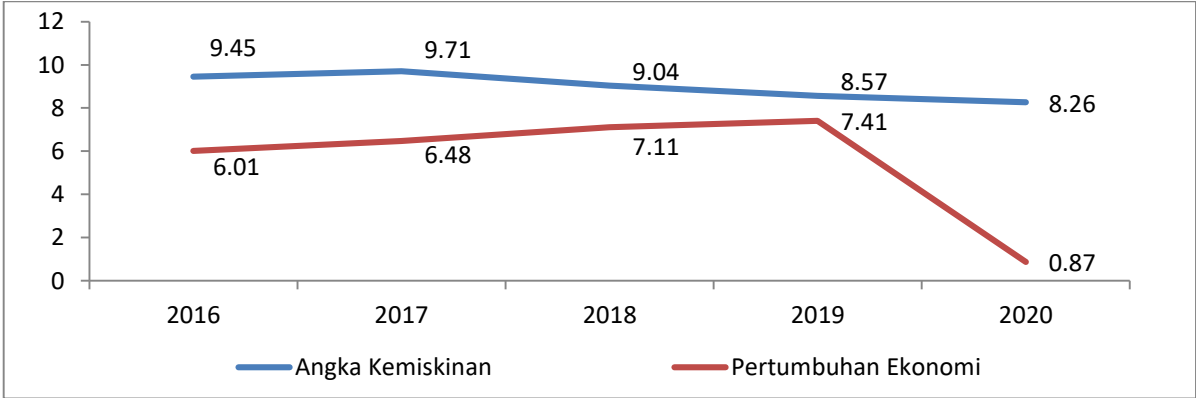


Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Barru selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional, sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2020 berhasil berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan presentase penduduk miskin Kabupaten Barru.

Grafik 2.14
 Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi
 Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat korelasi sangat erat antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 - 2019. Pada periode tersebut, terlihat bahwa dengan meningkatnya Pertumbuhan ekonomi hal ini sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Meskipun pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga di titik 0,87, namun tingkat kemiskinan justru menurun di angka 8,26. Peningkatan kesejahteraan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

2.2 Evaluasi Pagu Indikatiff dan Realisasi Belanja

Informasi tentang realisasi pelaksanaan kegiatan per urusan menunjukkan besaran penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 2 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD 2021 dan APBD 2021. Gambaran tentang capaian realisasi keuangan per urusan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Barru
Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PAGU	REALISASI	(Rp)	(%)
	BELANJA DAERAH	946.898.713.502,00	315.625.225.777,00	(631.273.487.725,00)	33,33
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	592.214.281.175,00	184.551.161.742,00	(407.663.119.433,00)	31,16
	URUSAN PENDIDIKAN	301.248.253.566,00	110.083.402.745,00	(191.164.850.821,00)	36,54
	DINAS PENDIDIKAN	301.248.253.566,00	110.083.402.745,00	(191.164.850.821,00)	36,54
	URUSAN KESEHATAN	210.045.210.210,00	61.048.171.642,00	(148.997.038.568,00)	29,06
	DINAS KESEHATAN	129.599.425.972,00	40.136.525.090,00	(89.462.900.882,00)	30,97
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	80.445.784.238,00	20.911.646.552,00	(59.534.137.686,00)	25,99
	URUSAN PEKERJAAN UMUM	60.712.515.089,00	6.275.770.626,00	(54.436.744.463,00)	10,34
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	57.623.342.089,00	5.924.720.626,00	(51.698.621.463,00)	10,28

	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.089.173.000,00	351.050.000,00	(2.738.123.000,00)	11,36
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6.038.855.360,00	1.478.503.812,00	(4.560.351.548,00)	24,48
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6.038.855.360,00	1.478.503.812,00	(4.560.351.548,00)	24,48
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.434.731.870,00	4.068.895.770,00	(6.365.836.100,00)	38,99
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.745.048.376,00	3.223.595.957,00	(4.521.452.419,00)	41,62
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.689.683.494,00	845.299.813,00	(1.844.383.681,00)	31,43
	SOSIAL	3.734.715.080,00	1.596.417.147,00	(2.138.297.933,00)	42,75
	DINAS SOSIAL	3.734.715.080,00	1.596.417.147,00	(2.138.297.933,00)	42,75
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	62.185.169.200,00	18.127.246.113,00	(44.057.923.087,00)	29,15
	TENAGA KERJA	424.517.500,00	0,00	(424.517.500,00)	0,00
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	424.517.500,00	0,00	(424.517.500,00)	0,00
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	507.847.300,00	34.355.950,00	(473.491.350,00)	6,77
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	507.847.300,00	34.355.950,00	(473.491.350,00)	6,77
	PANGAN	3.663.617.408,00	1.138.018.199,00	(2.525.599.209,00)	31,06
	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.663.617.408,00	1.138.018.199,00	(2.525.599.209,00)	31,06
	PERTANAHAN	5.928.900,00	1.762.500,00	(4.166.400,00)	29,73
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.928.900,00	1.762.500,00	(4.166.400,00)	29,73
	LINGKUNGAN HIDUP	10.964.071.464,00	3.002.700.986,00	(7.961.370.478,00)	27,39
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.994.586.000,00	1.694.648.200,00	(2.299.937.800,00)	42,42
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.969.485.464,00	1.308.052.786,00	(5.661.432.678,00)	18,77
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	4.636.321.586,00	1.470.580.505,00	(3.165.741.081,00)	31,72
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.520.397.836,00	1.498.195.294,00	(4.022.202.542,00)	27,14
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.520.397.836,00	1.498.195.294,00	(4.022.202.542,00)	27,14
	STATISTIK	172.059.800,00	17.511.950,00	(154.547.850,00)	10,18
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	172.059.800,00	17.511.950,00	(154.547.850,00)	10,18
	PERSANDIAN	103.938.000,00	3.865.500,00	(100.072.500,00)	3,72
	DINAS KOMUNIKASI	103.938.000,00	3.865.500,00	(100.072.500,00)	3,72

	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	4.636.321.586,00	1.470.580.505,00	(3.165.741.081,00)	31,72
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.185.713.434,00	1.928.124.884,00	(3.257.588.550,00)	37,18
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.185.713.434,00	1.928.124.884,00	(3.257.588.550,00)	37,18
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.167.463.500,00	302.373.500,00	(2.865.090.000,00)	9,55
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.167.463.500,00	302.373.500,00	(2.865.090.000,00)	9,55
	PERHUBUNGAN	7.918.678.871,00	2.088.385.504,00	(5.830.293.367,00)	26,37
	DINAS PERHUBUNGAN	7.918.678.871,00	2.088.385.504,00	(5.830.293.367,00)	26,37
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.207.626.418,00	1.896.271.442,00	(4.311.354.976,00)	30,55
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	6.207.626.418,00	1.896.271.442,00	(4.311.354.976,00)	30,55
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.424.149.536,00	1.278.384.898,00	(3.145.764.638,00)	28,90
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	4.424.149.536,00	1.278.384.898,00	(3.145.764.638,00)	28,90
	PENANAMAN MODAL	4.073.363.211,00	1.491.667.420,00	(2.581.695.791,00)	36,62
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4.073.363.211,00	1.491.667.420,00	(2.581.695.791,00)	36,62
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.520.397.836,00	1.498.195.294,00	(4.022.202.542,00)	27,14
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.520.397.836,00	1.498.195.294,00	(4.022.202.542,00)	27,14
	STATISTIK	172.059.800,00	17.511.950,00	(154.547.850,00)	10,18

	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	172.059.800,00	17.511.950,00	(154.547.850,00)	10,18
	PERSANDIAN	103.938.000,00	3.865.500,00	(100.072.500,00)	3,72
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	103.938.000,00	3.865.500,00	(100.072.500,00)	3,72
	KEBUDAYAAN	1.252.170.200,00	198.512.900,00	(1.053.657.300,00)	15,85
	DINAS PENDIDIKAN	1.252.170.200,00	198.512.900,00	(1.053.657.300,00)	15,85
	PERPUSTAKAAN	3.949.680.236,00	1.776.534.681,00	(2.173.145.555,00)	44,98
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.949.680.236,00	1.776.534.681,00	(2.173.145.555,00)	44,98
	KEARSIPAN	7.624.000,00	0,00	(7.624.000,00)	0,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.624.000,00	0,00	(7.624.000,00)	0,00
3	URUSAN PILIHAN	32.504.823.806,00	10.173.199.307,00	(22.331.624.499,00)	31,30
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.744.507.009,00	1.905.251.823,00	(3.839.255.186,00)	33,17
	DINAS PERIKANAN	5.744.507.009,00	1.905.251.823,00	(3.839.255.186,00)	33,17
	PARIWISATA	6.515.138.386,00	2.031.872.558,00	(4.483.265.828,00)	31,19
	DINAS PARIWISATA	6.515.138.386,00	2.031.872.558,00	(4.483.265.828,00)	31,19
	PERTANIAN	18.438.308.110,00	5.855.236.601,00	(12.583.071.509,00)	31,76
	DINAS PERTANIAN	18.438.308.110,00	5.855.236.601,00	(12.583.071.509,00)	31,76
	PERDAGANGAN	1.400.495.801,00	380.038.325,00	(1.020.457.476,00)	27,14
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1.400.495.801,00	380.038.325,00	(1.020.457.476,00)	27,14
	PERINDUSTRIAN	406.374.500,00	800.000,00	(405.574.500,00)	0,20
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	406.374.500,00	800.000,00	(405.574.500,00)	0,20
4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG	259.994.439.321,00	102.773.618.615,00	(157.220.820.706,00)	39,53
	ADMINISTRASI PEMRINTAHAN	49.105.063.100,00	19.032.956.207,00	(30.072.106.893,00)	38,76
	SEKRETARIAT DAERAH	49.105.063.100,00	19.032.956.207,00	(30.072.106.893,00)	38,76
	PENGAWASAN	7.282.560.506,00	2.132.131.278,00	(5.150.429.228,00)	29,28
	INDPEKTORAT	7.282.560.506,00	2.132.131.278,00	(5.150.429.228,00)	29,28
	PERENCANAAN	4.220.976.938,00	1.577.206.553,00	(2.643.770.385,00)	37,37
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.220.976.938,00	1.577.206.553,00	(2.643.770.385,00)	37,37
	KEUANGAN	133.104.304.222,00	53.899.220.435,00	(79.205.083.787,00)	40,49
	SEKRETARIAT DAERAH	109.990.500,00	0,00	(109.990.500,00)	0,00

	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.839.134.329,00	1.729.407.746,00	(4.109.726.583,00)	29,62
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	127.155.179.393,00	52.169.812.689,00	(74.985.366.704,00)	41,03
	KEPEGAWAIAN	4.501.831.774,00	1.637.703.643,00	(2.864.128.131,00)	36,38
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.501.831.774,00	1.637.703.643,00	(2.864.128.131,00)	36,38
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.909.160.500,00	868.372.500,00	(1.040.788.000,00)	45,48
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.909.160.500,00	868.372.500,00	(1.040.788.000,00)	45,48
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	28.763.000,00	2.156.500,00	(26.606.500,00)	7,50
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	28.763.000,00	2.156.500,00	(26.606.500,00)	7,50
	SEKRETARIAT DPRD	25.539.734.551,00	11.290.552.891,00	(14.249.181.660,00)	44,21
	SEKRETARIAT DPRD	25.539.734.551,00	11.290.552.891,00	(14.249.181.660,00)	44,21
	KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	31.424.152.662,00	11.349.039.057,00	(20.075.113.605,00)	36,12
	KECAMATAN TANETE RIAJA	3.968.559.771,00	1.544.402.140,00	(2.424.157.631,00)	38,92
	KECAMATAN MALLUSETASI	5.909.346.142,00	1.958.071.368,00	(3.951.274.774,00)	33,14
	KECAMATAN SOPPENG RIAJA	3.887.629.162,00	1.313.942.967,00	(2.573.686.195,00)	33,80
	KECAMATAN BALUSU	2.884.375.513,00	1.081.589.800,00	(1.802.785.713,00)	37,50
	KECAMATAN BARRU	7.484.169.625,00	2.691.610.411,00	(4.792.559.214,00)	35,96
	KECAMATAN PUJANANTING	2.743.020.167,00	1.070.808.066,00	(1.672.212.101,00)	39,04
	KECAMATAN TANETE RILAU	4.547.052.282,00	1.688.614.305,00	(2.858.437.977,00)	37,14
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.877.892.068,00	984.279.551,00	(1.893.612.517,00)	34,20
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.877.892.068,00	984.279.551,00	(1.893.612.517,00)	34,20

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan semester I, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan total belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp. 946.898.713.502,- sampai dengan triwulan 2 baru terealisasi sebesar 33, 33

persen atau sekitar Rp. 315.625.225.777,-. Terbagi atas 4 (empat) urusan dengan 29 (dua puluh Sembilan) perangkat daerah ditambah dengan 7 (tujuh) kecamatan. Adapun organisasi perangkat daerah yang berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 40 % antara lain :

- 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 45,48 persen
- 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 44,98 persen
- 3. Sekretariat DPRD sebesar 44,21 persen
- 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 41,03 Persen
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 41,62 Persen

Sebagian besar realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan triwulan 2 masih dalam kategori sedang yaitu berada pada kisaran 20 % - 40 % dengan jumlah OPD sebanyak 27 OPD atau 55% dari jumlah dari Keseluruhan OPD, selebihnya sebanyak 4 OPD dengan realisasi anggaran dikategorikan rendah dengan serapan anggapan dibawah 20%

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

2.3.1 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyesuaian program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Pokok Tahun 2021 dengan permendagri 90 tahun 2019 serta pemuktahiran permendagri 050.308 Tahun 2019 menyebabkan terjadinya perubahan jumlah program/kegiatan/subkegiatan yang dipetakan berdasarkan indicator kinerja dan diinput dalam aplikasi SIPD. Adapun perubahan jumlah program/kegiatan dalam RKPD pokok Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.9
Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan RKPD Pokok Tahun 2021 dan RKPD Perubahan Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	RKPD POKOK TAHUN 2021		PEMUKTAHIRAN PERMENDAGRI 050.308 TAHUN 2019		
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah program	Jumlah kegiatan	Jumlah sub kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN	8	58	2	10	49
2	DINAS KESEHATAN	19	96	5	14	53
3	RSUD	2	12	2	3	3

4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	56	7	15	58
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12	31	5	10	20
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	42	2	9	30
7	SATPOL PP DAN DAMKAR	7	37	3	10	31
8	DINAS SOSIAL	10	40	5	11	23
9	DINAS PMPTSPNAKER	9	41	8	17	39
10	DINAS PMDPPKBPPPA	20	61	5	7	7
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	32	5	12	25
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	38	10	17	29
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	4	22	5	10	19
14	DINAS PERHUBUNGAN	9	40	2	7	15
15	DINAS KOMINFO STATISTIK	11	37	5	8	20
16	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	13	48	11	17	32
17	DINAS PEMUDA OLAHRAGA	11	37	3	12	28
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8	27	3	11	19
19	DINAS PERIKANAN	8	36	4	15	31
20	DINAS PARIWISATA	7	24	4	11	22
21	DINAS PERTANIAN	11	51	7	20	41
21	SEKRETARIAT DAERAH	25	81	4	16	87
22	SEKRETARIAT DPRD	4	32	2	11	29
23	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11	34	4	14	27

24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	31	3	10	27
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6	29	2	7	22
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SDM	8	29	3	17	23
27	INSPEKTORAT DAERAH	7	36	3	10	28
28	KECAMATAN	9	25	4	11	22
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	32	6	11	18

Sumber : RKPD Pokok 2021, Pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi penguraangan jumlah program dari 285 program menjadi 134 program begitupun dengan jumlah kegiatan yang berkurang dari 1195 kegiatan menjadi 353 kegiatan serta sub kegiatan sebanyak 877.

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Informasi tentang capaian kinerja pendanaan memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada masing – masing kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu Kategori rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0-20%. Kategori sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari 20%-40% dan Kategori tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 40 %. Penetapan batas realisasi yang diharapkan berdasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan sampai dengan triwulan II yaitu lebih dari 40% Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan masing-masing OPD terlihat pada table berikut :

Tabel 2.10
Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan RKPD Pokok Tahun 2021 dan RKPD Perubahan Tahun 2021

Perangkat Daerah	PAGU	Jumlah kegiatan	JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENDANAAN		
			0 - 20%	20% - 40%	> 40 %
DINAS PENDIDIKAN	302.500.423.766	10	2	5	3
DINAS KESEHATAN	129.599.425.972	14	1	9	4

RSUD	80.445.784.238	3	2	1	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	57.623.342.089	15	14	1	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.128.543.260	10	6	4	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.689.683.494	9	2	6	1
SATPOL PP DAN DAMKAR	7.745.048.376	10	1	6	3
DINAS SOSIAL	3.734.715.080	11	2	4	5
DINAS PMPTSPNAKER	4.497.880.711	17	3	10	4
DINAS PMDPPKBPPPA	8.861.024.234	7	2	3	2
DINAS KETAHANAN PANGAN	3.663.617.408	5	2	3	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.969.485.464	17	8	6	3
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	4.636.321.586	10	3	6	1
DINAS PERHUBUNGAN	7.918.678.871	7	4	3	
DINAS KOMINFO STATISTIK	6.483.624.218	8	3	5	
DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	6.231.019.837	17	6	9	2
DINAS PEMUDA OLAHRAGA	5.520.397.836	12	5	6	1
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.957.304.236	11	2	4	5
DINAS PERIKANAN	5.744.507.009	15	4	9	2
DINAS PARIWISATA	6.515.138.386	11	2	8	1
DINAS PERTANIAN	18.438.308.110	20	8	10	2
SEKRETARIAT DAERAH	49.215.053.600	16	4	9	3
SEKRETARIAT DPRD	25.539.734.551	11	2	5	6
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.249.739.938	14	3	8	3
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	127.155.179.393	10	2	5	3

BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.839.134.329	7	2	4	1
BADAN KEPEGAWAIAN DAN SDM	6.410.992.274	17	3	6	8
INSPEKTORAT DAERAH	7.282.560.506	10	2	7	1
KECAMATAN	31.424.152.662	11	1	8	2
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.877.892.068	11	2	8	1

Sumber : Data Olahan Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 336 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 30,06 % kegiatan berada pada kategori rendah yaitu 0 – 20 %. Sedangkan yang berada pada kategori sedang sebanyak 51,48 persen serta kategori tinggi sebesar 19,04 persen. Adapun organisasi perangkat daerah yang berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 40 % antara lain :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 45,48 persen melalui 3 kegiatan berkategori rendah, 6 kegiatan berkategori sedang 8 kegiatan berkategori tinggi.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 44,98 persen melalui 2 kegiatan berkategori rendah, 4 kegiatan berkategori sedang dan 5 kegiatan berkategori tinggi
3. Sekretariat DPRD sebesar 44,21 persen melalui 2 kegiatan berkategori rendah, 3 kegiatan berkategori sedang dan 6 kegiatan berkategori tinggi
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 41,03 Persen melalui 2 kegiatan berkategori rendah, 5 kegiatan berkategori sedang dan 3 kegiatan berkategori tinggi
5. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 41,62 Persen melalui 1 kegiatan berkategori rendah, 6 kegiatan berkategori sedang dan 3 kegiatan berkategori tinggi.

Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
 Capaian Kinerja Pendanaan Berdasarkan Sub Kegiatan

No	Perangkat Daerah	PAGU	Jumlah Sub Kegiatan	JUMLAH SUB KEGIATAN BERDASARKAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENDANAAN		
				0 - 20%	20% - 40%	> 40 %
1	DINAS PENDIDIKAN	302.500.423.766	49	9	25	15
2	DINAS KESEHATAN	129.599.425.972	53	4	34	15
3	RSUD	80.445.784.238	3	2	1	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	57.623.342.089	58	54	4	0
5	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.128.543.260	20	12	8	0
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.689.683.494	30	7	20	3
7	SATPOL PP DAN DAMKAR	7.745.048.376	31	3	19	9
8	DINAS SOSIAL	3.734.715.080	23	4	8	10
9	DINAS PMPTSPNAKER	4.497.880.711	39	7	23	9
10	DINAS PMDPPKBPPPA	8.861.024.234	7	2	3	2
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.663.617.408	25	10	15	0
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.969.485.464	29	14	10	5
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	4.636.321.586	19	6	11	2
14	DINAS PERHUBUNGAN	7.918.678.871	15	9	6	0
15	DINAS KOMINFO STATISTIK	6.483.624.218	20	8	13	0
16	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	6.231.019.837	32	11	17	4
17	DINAS PEMUDA OLAHRAGA	5.520.397.836	28	12	14	2
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.957.304.236	19	3	7	9
19	DINAS PERIKANAN	5.744.507.009	31	8	19	4
20	DINAS PARIWISATA	6.515.138.386	22	4	16	2
21	DINAS PERTANIAN	18.438.308.110	41	16	21	4

22	SEKRETARIAT DAERAH	49.215.053.600	87	22	49	16
23	SEKRETARIAT DPRD	25.539.734.551	29	5	8	16
24	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.249.739.938	27	6	15	6
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	127.155.179.393	27	5	14	8
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.839.134.329	22	6	13	3
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SDM	6.410.992.274	23	4	8	11
28	INSPEKTORAT DAERAH	7.282.560.506	28	6	20	3
29	KECAMATAN	31.424.152.662	22	2	16	4
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.877.892.068	18	3	13	2

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 877 sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 30,06 % kegiatan berada pada kategori rendah yaitu 0 – 20 %. Sedangkan yang berada pada kategori sedang sebanyak 51,48 persen serta kategori tinggi sebesar 19,04 persen. Adapun organisasi perangkat daerah yang berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 40 % antara lain :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 45,48 persen melalui 4 sub kegiatan berkategori rendah, 8 sub kegiatan berkategori sedang 11 sub kegiatan berkategori tinggi.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 44,98 persen melalui 3 sub kegiatan berkategori rendah, 7 sub kegiatan berkategori sedang 9 sub kegiatan berkategori tinggi.
3. Sekretariat DPRD sebesar 44,21 persen melalui 5 sub kegiatan berkategori rendah, 8 sub kegiatan berkategori sedang 16 sub kegiatan berkategori tinggi.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 41,03 Persen melalui 5 sub kegiatan berkategori rendah, 14 sub kegiatan berkategori sedang 8 sub kegiatan berkategori tinggi.

5. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 41,62 Persen melalui 3 sub kegiatan berkategori rendah, 19 sub kegiatan berkategori sedang 9 sub kegiatan berkategori tinggi.

2.4 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sampai dengan triwulan 2 tahun 2021

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan triwulan 2 dipengaruhi oleh :

1. Terdapat perubahan kebijakan terkait pengelolaan dana transfer
2. Dana alokasi umum yang dikurangi oleh pusat, membuat perangkat daerah tidak mampu mencapai indicator kinerja yang ditargetkan
3. Pemetaan permendagri 90 tahun 2019 belum dibarengi oleh perubahan struktur organisasi sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan dan kewenangan
4. Penginputan RKA perangkat daerah kedalam SIPD, masih terdapat beberapa belanja yang dimasukkan tidak sesuai dengan indicator kinerja yang akan dicapai
5. Pandemi covid 19 yang memfokuskan belanja untuk penanganan covid, membuat beberapa kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perbaikan dan penyesuaian rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Penyusunan Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan oleh Analisis Kondisi Makro Ekonomi dan Analisis Kondisi Fiskal Tahun sebelumnya, kedua analisis tersebut akan diuraikan pada bab ini.

3.1 KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro Nasional

Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi covid 19 yang masih berlangsung. Rilis PDB kuartal I/2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen. Meski demikian, proses pemulihan terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif. Secara keseluruhan, kinerja perekonomian nasional diproyeksikan akan tumbuh dikisaran 4,5 – 5,3 persen di tahun 2021. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga didorong oleh sinergi antara kebijakan otoritas fiskal, moneter, legislatif dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selain itu, Implementasi Reformasi Struktur melalui Undang – undang Cipta Karya.

Masih cukup tingginya risiko penyebaran virus Covid 19 di tahun 2021 menyebabkan tertahannya pemulihan konsumsi masyarakat di awal tahun. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang sempat naik di akhir tahun 2020, harus turun disebabkan oleh peningkatan kasus COVID 19. Merespon kenaikan kasus tersebut, pemerintah kembali menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat atau yang disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro disekeliling daerah yang rawan peningkatan kasus. Upaya mendorong konsumsi rumah tangga juga dilakukan melalui program – program untuk menjaga dan menstimulus daya beli masyarakat. Bagi

masyarakat kelompok berpendapatan rendah dan rentan terdampak pandemi, pemerintah telah memperluas program perlindungan sosial agar mampu menahan pemburukan tingkat kemiskinan dari yang telah diprediksi sebelumnya. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh positif sejak triwulan II tahun 2021 pada kisaran 3,7 – 4,3. Pemerintah terus mengembangkan kebijakan yang dapat secara efektif mendorong pemulihan dari sisi permintaan.

Melihat struktur PMTB yang didominasi oleh sektor bangunan berkontribusi 75,9 persen di tahun 2020, keberlanjutan proyek – proyek infrastruktur akan menjadi pendorong utama pemulihan kinerja PMTB di tahun 2021. Secara rinci pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran dan produksi tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Perubahan Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran
 dan Sisi Produksi Nasional Tahun 2021

Uraian	Perkiraan 2021 sebelum perubahan	Perkiraan 2021 setelah perubahan
PDB	4,5 - 5,5	4,5 - 5,3
<i>Sisi Pengeluaran</i>		
Konsumsi Rumah Tangga	4,1 - 4,9	3,7 - 4,3
Konsumsi LNPRT		0,5 - 1,9
Konsumsi Pemerintah	2,5 - 3,5	4,3 - 5,4
PMTB	6,0 - 7,1	5,7 - 7,0
Ekspor Barang dan Jasa	3,5 - 5,1	7,3 - 11, 5
Impor Barang dan Jasa	4,4 - 5,9	8,6 - 14,2
<i>Sisi Produksi</i>		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,3 - 3,9	2,9 - 3,6
Pertambangan dan Penggalian	0,7 - 1,7	0,7 - 1,2
Industri Pengolahan	3,4 - 4,3	4,2 - 4,8
Pengadaan Listrik dan Gas	4,8 - 5,8	5,0 - 6,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,6 - 5,6	5,4 - 6,4
Konstruksi	5,3 - 6,5	5,5 - 6,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,3 - 5,3	4,0 - 5,0
Transportasi dan Pergudangan	5,9 - 8,2	4,5 - 5,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,5 - 7,9	4,8 - 5,6
Informasi dan Komunikasi	8,3 - 10,1	9,1 - 10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,6 - 6,8	4,0 - 5,0

Real Estate	4,9 - 5,9	3,2 - 4,2
Jasa Perusahaan	8,9 - 9,9	4,8 - 5,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,2 - 5,2	2,0 - 3,5
Jasa Pendidikan	4,5 - 5,5	2,7 - 4,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,7 - 5,5	4,7 - 5,8
Jasa lainnya	6,6 - 7,7	4,6 5,2

Sumber : KEMPPKF 2021

Secara keseluruhan indikator makro nasional dan perubahannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Target Indikator Makro Nasional Tahun 2021

Uraian	Perkiraan sebelum perubahan Tahun 2021	Perkiraan setelah perubahan Tahun 2021
Pertumbuhan Ekonomi	4,5 - 5,5	4,5 - 5,3
Tingkat Pengangguran	7,33 - 9,02	7,7 - 9,1
Tingkat Kemiskinan	9,88 -10,98	9,2 - 9,7
Rasio Gini	0,377 - 0,379	0,377 - 0,379
IPM	72,78 - 72,95	72,78 - 72,95

Sumber : KEM – PPKF

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi hingga bulan april 2021, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat akan mengalami perbaikan di tahun 2021. Program PEN yang tetap berlanjut akan turut menjadi katalisator pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan berada pada rentang 4,5 – 5,3 persen (yoy) yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan mampu mencegah terjadinya PHK di 2021. Selain itu, program vaksinasi juga mendukung ekonomi pulih lebih cepat. Tanda – tanda pemulihan ini telah terlihat ditriwulan I – 2021, dimana kontraksi PDB mengecil menjadi 0,74 persen (yoy). Seiring dengan pulihnya ekonomi, TPT pada februari 2021 turun menjadi 6,26 persen. Pada akhirnya kondisi ini akan mendorong peningkatan penghasilan rumah tangga sehingga tingkat kemiskinan diharapkan akan membaik dan kembali menjadi single digit. Selain itu pemerataan pembangunan juga terus berjalan dengan berbagai proyek infrastruktur pemerintah diberbagai daerah dengan terus menyalurkan program perlindungan sosila bagi

penduduk miskin dan rentan. Sehingga Rasio gini diharapkan kembali turun di tahun 2021. Demikian juga dengan terus mendorong perbaikan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan. IPM ini diharapkan akan mengalami perbaikan di 2021 setelah sempat stagnan di tahun lalu.

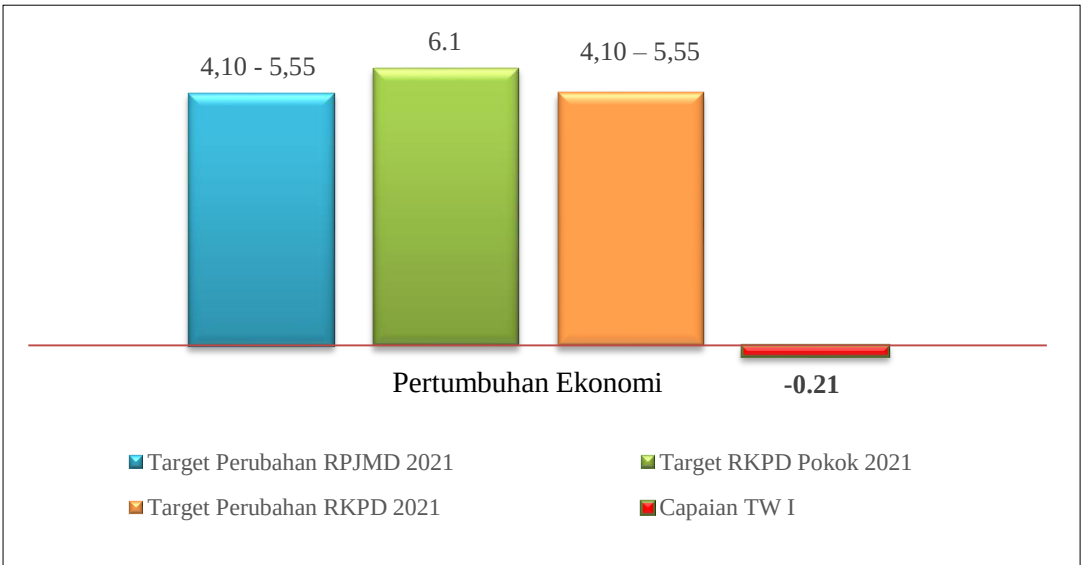
3.1.1.2 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro Provinsi

Situasi pandemi Covid 19 sepanjang tahun 2020, masih berlanjut hingga awal tahun 2021 dan menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak negative pada realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 sehingga mengalami kontraksi hingga -0,21 persen. Mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen Produk Domestik Bruto sepanjang 2020 telah memberikan tekanan lebih berat pada Sulawesi Selatan, sehingga berpengaruh signifikan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang pada awalnya ditargetkan sebesar 6,1 persen, sehingga direvisi menjadi sebesar 4,10- 5,55 persen.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, diarahkan untuk **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM”**, dengan prioritas meliputi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Berdaya Saing; Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk Akselerasi Pertumbuhan; Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Perlindungan Sosial; Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Meningkatkan Ketahananbencana dan Perubahan Iklim; serta Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik. Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang wilayah timur Indonesia berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta industri pengolahan diharapkan mampu menjadi motor di dalam pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan di sektor pertanian sebagai lumbung pangan padi dan jagung serta

kakao, pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi serta peningkatan industri pengolahan dan industri jasa dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok
Tahun 2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan
Capaian Triwulan I Tahun 2021 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan

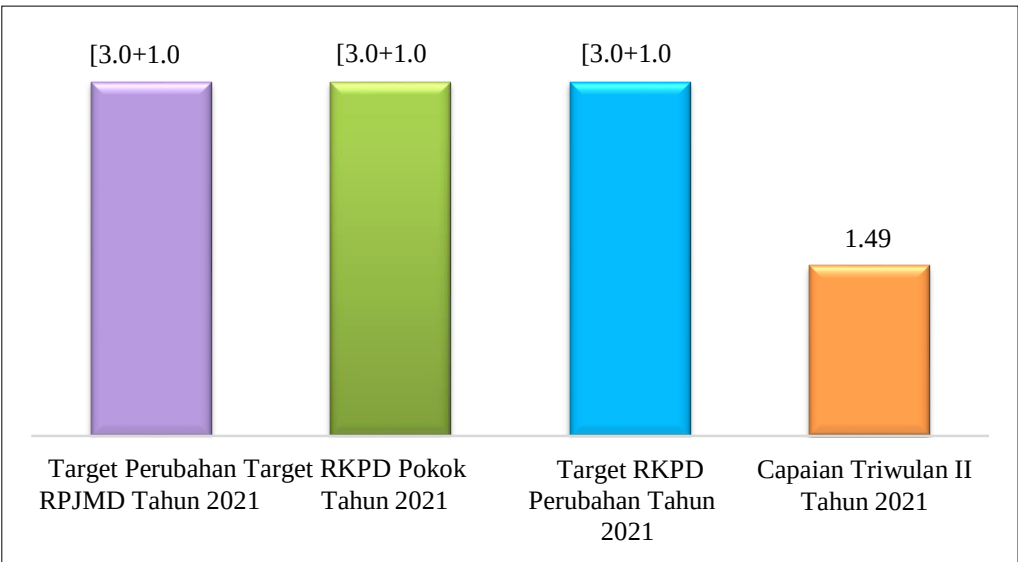
Capaian Inflasi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 1,49 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD Pokok Tahun 2021 sebesar 3,0+1,0. Penurunan terutama dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang tertahan akibat pembatasan fisik dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Aktivitas ekonomi yang menurun juga berdampak pada aktivitas bisnis dan permintaan dunia usaha terhadap barang dan jasa.

Capaian inflasi di Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 dipengaruhi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,84 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan inflasi sebesar 0,24 persen dan kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,21 persen. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau dipengaruhi dengan kenaikan harga komoditas yaitu cabai rawit dan ikan bandeng. Peningkatan harga cabe rawit diperkirakan karena meningkatnya permintaan serta terbatasnya pasokan karena tertundanya jadwal panen dan kenaikan

harga ikan bandeng dipengaruhi berkurangnya pasokan karena panen dini pada akhir 2020.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan II 2021 dapat meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran $3,0\% \pm 1,0\%$ (yoy). Terkait hal tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan akan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien.

Grafik 3.2
Inflasi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021 (Persen)



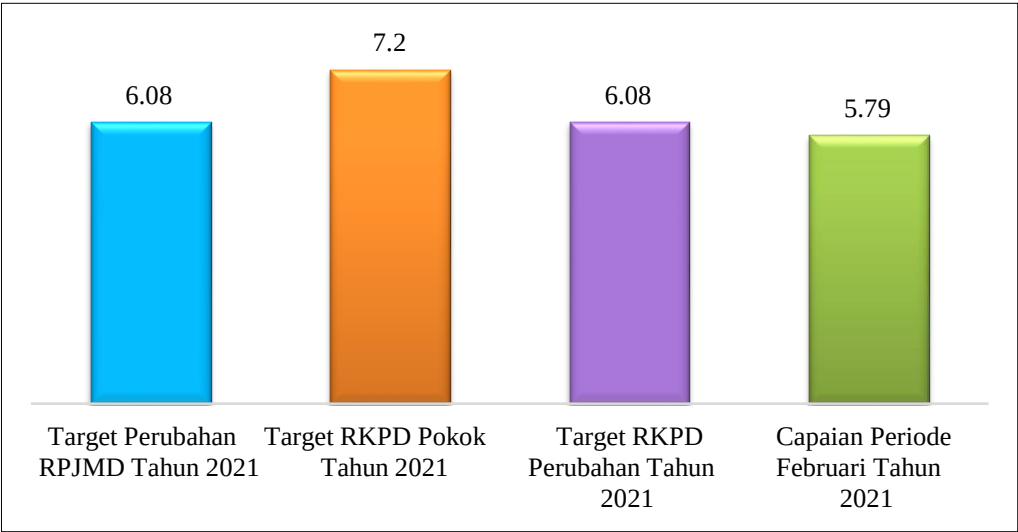
Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan pada Februari 2021 sebesar 5,79 persen. Kondisi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ada pada RKPD Pokok Tahun 2021 sebesar 7,20 persen atau lebih rendah dari target Nasional yaitu 7,5-8,2 persen.

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak terlepas dari lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan.

Persentase terbesar pada sektor konstruksi sebesar 1,50 persen poin. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga berupaya mendorong ekspor dan investasi.

Grafik 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok
Tahun 2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan
Capaian Periode Februari Tahun 2021 (Persen)



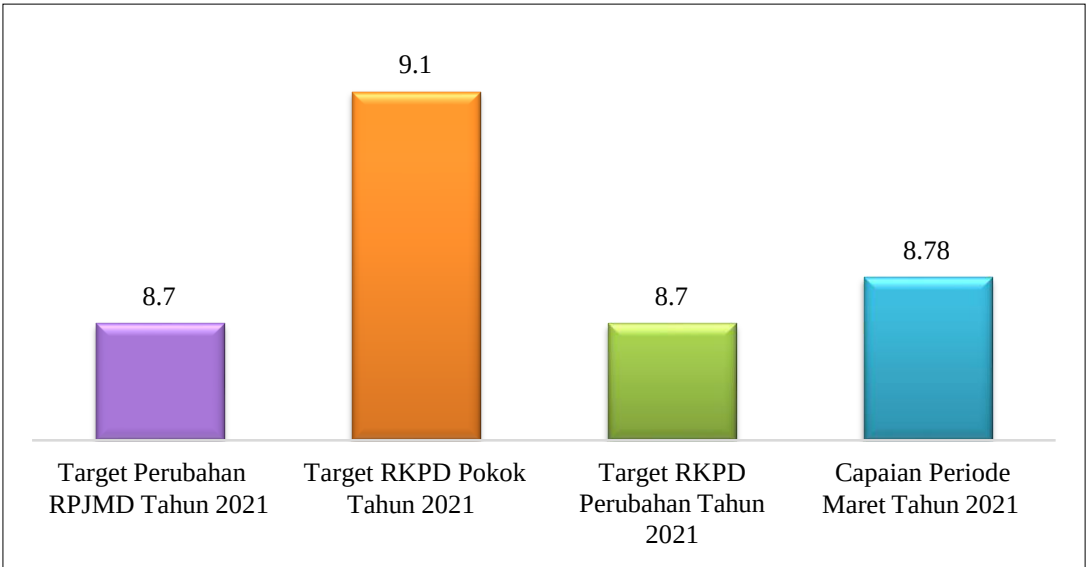
Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan

Seperti halnya dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dengan adanya pandemi COVID-19 sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan juga terkena dampaknya, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 diprediksi akan menurun menjadi 8,70 persen dibandingkan dari tahun 2020 yang mencapai 8,99 persen (menurun 0,29 persen), atau lebih rendah dari prediksi target Nasional untuk menurunkan penduduk miskin yaitu berkisar antara 9,7-10,20 persen. Pada tahun 2022, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat diharapkan lebih membaik, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,10 persen atau dibawah target Nasional yaitu 9,2-9,7 persen

Kondisi yang telah dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa rata rata pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah perdesaan atau dengan kata lain, daerah perkotaan menyediakan pendapatan yang lebih besar dengan pilihan pekerjaan beragam yang umumnya ditunjang

oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, kondisi ini ditunjang pula oleh vaksinasi dan aktivitas usaha yang perlahan aktif kembali. Hal lain yang menggembirakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan.

Grafik 3.4
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok
Tahun 2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian
Periode Maret Tahun 2021 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan

3.1.1.3 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten

Secara umum eskalasi dampak pandemic COVID 19 yang dimulai sejak pertengahan maret 2020 mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara massif dan masih berlanjut pada tahun 2021 ini. Resiko penurunan kinerja ekonomi menjadi pertimbangan pemerintah melakukan bauran kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi kontraksi yang lebih dalam. Selain Pertumbuhan ekonomi, indicator ekonomi makro lainnya yang penting untuk dijaga adalah tingkat inflasi. Terkendalnya laju inflasi ditingkat yang stabil dan rendah diharapkan dapat menopang terjaganya daya beli, konsumsi dan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi.

Pandemi COVID 19 juga mengakibatkan memburuknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah kesehatan akibat penularan COVID 19 yang sangat cepat serta langkah pembatasan social yang telah mengganggu aktivitas social ekonomi masyarakat, yang berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan. Kondisi makro ekonomi selama kurun waktu 4

tahun serta prakiraan dampak pandemic COVID 19 terhadap indicator makro ekonomi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perkiraan Perubahan Indikator Makro Kabupaten Barru
Tahun 2021

No.	Indikator Makro	Satuan	Perkiraan Tahun 2021	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	PDRB (Atas Dasar Berlaku) (dalam juta)	Rp.	7.951.074,44	8.267.527,30
2	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) (dalam juta)	Rp.	5.176.890,57	5.382.930,82
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,98	3,98
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	185.265	185.265
5	Tingkat Kemiskinan	%	8,11	9,08
6	PDRB Perkapita Penduduk	Rp.	47.147.498	41.980.000
7	Laju Inflasi	%	2,9	1,0-3,0
8	Rasio Gini	Nilai	0,34	0,36
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34	6,07
10	IPM	Nilai	70,03	71,27

Sumber : Data olahan

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa perencanaan makro Kabupaten Barru tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemic COVID-19 yang masih berlangsung. Proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indicator ekonomi cukup positif secara keseluruhan. Namun perlu dilakukan penyesuaian dengan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Penyesuaian target terhadap tren pemulihan ekonomi akan dipengaruhi oleh berbagai factor, terutama dari upaya penanganan pandemic dan program vaksinasi yang massif. Selain hal tersebut, perubahan target indicator makro ekonomi juga dipengaruhi oleh peranan APBN yang tetap ekspansif meskipun mulai konsolidatif namun masih difokuskan pada program PEN meliputi penguatan konsumsi rumah tangga dengan ekspansi belanja perlindungan social secara tunai, mendorong konsumsi pemerintah dari berbagai jenis belanja yang produktif khususnya dalam mendukung penanganan sisi kesehatan serta mendorong investasi sector public khususnya dalam bentuk infrastruktur yang didukung oleh program padat karya.

3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Di tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan pandemic covid – 19 yang. Berdampak pada ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca pandemic Covid 19. Krisis yang diakibatkan oleh pandemic COVID 19 juga menjadi momentum untuk meperkuat reformasi. Reformasi pasca pandemic mutlak diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, terutama melalui peningkatan kualitas SDM terutama dilakukan melalui reformasi perlindungan social, Kesehatan dan Pendidikan, upaya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur berbasis padat karya.

Untuk menjamin tercapainya target makro dan menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru, maka dirumuskan arah kebijakan ekonomi sebagai berikut :

1. Terjaganya konsumsi masyarakat melalui percepatan dan penguatan bantuan social masyarakat miskin dan rentan miskin
2. Pemberdayaan UMKM melalui dukungan pemerintah dalam memberi fasilitasi pengembangan UMKM melalui dukungan fiscal maupun non fiscal
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi
5. Pemulihan dan peningkatan system Kesehatan dan healty security
6. Penguatan safeguarding (monitoring, pengendalian dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid 19 termasuk penanganan Kesehatan, penguatan jaring pengaman social dan pemulihan ekonomi agar tetap berjalan transparan, akuntabel, efisien dan efektif

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan unit organisasi.

Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Kebijakan Umum Perubahan APBD merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahannya. KUPA disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah yang dipengaruhi oleh beberapa kebijakan nasional. Berbagai perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru akan dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN

Perubahan kebijakan pendapatan Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun ajaran 2020/2021

Kebijakan tersebut menjadi dasar perubahan kebijakan pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah Kabupaten Barru melakukan beberapa penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun Rencana perubahan pendapatan pada APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
 TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BARRU TAHUN 2021

NO	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2021	TARGET RKPD PERUBAHAN TAHUN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	PENDAPATAN	957.284.303.545,00	940.973.244.766,00	16.311.058.779,00
01.01	Pendapatan Asli Daerah	106.995.777.751,00	106.629.368.676,00	366.409.075,00
01.01.01	Pajak Daerah	18.670.000.000,00	18.670.000.000,00	-
01.01.02	Retribusi daerah	8.451.218.360,00	8.451.218.360,00	-
01.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	8.942.135.943,00	8.942.135.943,00	-
01.01.04	Lain - Lain PAD Yang sah	70.932.423.448,00	70.566.014.373,00	366.409.075,00
01.02	Pendapatan Transfer	779.216.072.000,00	809.922.566.090,00	(30.706.494.090,00)
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	758.464.159.528,00	762.457.767.296,00	(3.993.607.768,00)
1.2.1.1	Dana Perimbangan			-
	a. Transfer Umum			-
	a.1. Dana bagi hasil/ bagi hasil bukan pajak	13.710.482.000,00	13.940.337.000,00	(229.855.000,00)
	a.2. Dana alokasi umum	498.613.623.000,00	482.644.349.000,00	15.969.274.000,00
	b. Transfer khusus (DAK)	161.294.168.000,00	160.275.282.296,00	1.018.885.704,00
1.2.1.2.	Dana Insentif Daerah	52.320.458.000,00	52.320.458.000,00	-
	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	32.525.428.528,00	53.277.341.000,00	(20.751.912.472,00)
01.02.02	Transfer Antar Daerah	20.751.912.472,00	47.464.798.794,00	(26.712.886.322,00)
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kab./Kota	16.255.765.428,00	38.201.198.154,00	(21.945.432.726,00)

	Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	4.496.147.044,00	9.263.600.640,00	(4.767.453.596,00)
01.03	Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.377.800.000,00	24.421.310.000,00	(1.043.510.000,00)
01.03.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	23.377.800.000,00	24.421.310.000,00	(1.043.510.000,00)
01.03.01	Hibah	23.377.800.000,00	24.421.310.000,00	(1.043.510.000,00)
01.03.02	Dana darurat	-		

Sumber : BPKAD Kabupaten Barru, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas menunjukkan perubahan asumsi Pendapatan Kabupaten Barru pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan senilai Rp.940.973.244.766,00, Pos Pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan sekitar -1,70% persen atau senilai (Rp.16.311.058.779,00) dari anggaran pokok tahun 2020. Secara rinci, hal-hal yang berkenaan dengan perubahan kebijakan pendapatan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rincian perubahan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah tetap yakni sebesar Rp. 18.670.000.000,-

b. Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah tetap yakni sebesar Rp. 8.451.218.360,-

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga tetap yakni sebesar Rp. 8.942.135.943

d. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan dari Rp. 70.932.423.448,- menjadi Rp. 70.566.014.373,-

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah terbagi atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA) serta Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara transfer khusus terdiri atas Dana

Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana Perimbangan mengalami perubahan pada anggaran perubahan dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami Penurunan dari Rp. 13.710.482.000,- menjadi Rp. 13.940.337.000,-

b. Dana Alokasi Umum

Pendapatan yang berasal dari transfer Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan dari Rp. 498.613.623.000,- menjadi Rp. 482.644.349.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mengalami penurunan dari Rp. 161.294.168.000,-menjadi Rp. 160.275.282.296,-

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain lain pendapatan Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya :

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah mengalami peningkatan dari Rp. 23.377.800.000,- menjadi Rp. 24.421.310.000,-

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memfasilitasi kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas dan diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan, Pemerintah Kabupaten Barru telah merumuskan kebijakan belanja daerah. Pada perubahan Anggaran tahun 2021 dialokasikan untuk belanja kegiatan yang secara spesifik bersumber dari tambahan Dana Alokasi Khusus, serta adanya Sisa Lebih Pembiayaan Tahun sebelumnya (SILPA) tahun

2020. Perubahan pagu belanja Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
 TARGET PERUBAHAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BARRU TAHUN 2021

NO	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2021	TARGET RKPD PERUBAHAN TAHUN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
2	BELANJA	961.414.272.281,00	1.006.286.013.721,10	(44.871.741.440,10)
02.01	Belanja Operasi	734.427.860.619,00	761.815.104.059,79	(27.387.243.440,79)
02.01.01	Belanja Pegawai	427.046.274.110,00	442.175.734.074,79	(15.129.459.964,79)
02.02.02	Belanja Barang dan jasa	289.386.067.823,00	285.885.032.798,00	3.501.035.025,00
02.01.03	Belanja Bunga	3.191.298.036,00	3.191.298.036,00	-
02.01.04	Belanja Subsidi			-
02.01.05	Belanja Hibah	14.804.220.650,00	26.963.039.151,00	(12.158.818.501,00)
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial		3.600.000.000,00	(3.600.000.000,00)
02.02	Belanja Modal	107.629.505.459,00	120.261.749.597,31	(12.632.244.138,31)
02.03	Belanja tidak Terduga	12.083.800.456,00	18.584.213.964,00	(6.500.413.508,00)
02.04	Belanja Transfer	107.273.105.747,00	105.624.946.100,00	1.648.159.647,00
02.04.01	Belanja Bagi Hasil			-
02.04.03	Belanja Bantuan Keuangan	107.273.105.747,00	105.624.946.100,00	1.648.159.647,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	21.222.420.342,01	71.365.800.219,10	(50.143.379.877,09)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Barru, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas menunjukkan bahwa terjadi perubahan Pagu Belanja Daerah Kabupaten Barru meliputi :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp734.427.860.619 menjadi Rp 761.815.104.059,79. Rincian belanja operasi sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diproyeksikan mengalami perubahan dari anggaran pokok tahun 2021 yakni dari sebesar 427.046.274.110,- meningkat menjadi Rp442.175.734.074,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan mengalami perubahan dari anggaran pokok tahun 2021 yakni sebesar Rp 289.386.067.823 menjadi Rp 285.885.032.798

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari anggaran pokok tahun 2020 yakni sebesar Rp 3.191.298.036

d. Belanja Hibah

Belanja hibah diproyeksikan mengalami perubahan dari anggaran pokok tahun 2021 yakni sebesar Rp 14.804.220.650,-meningkat menjadi Rp 26.963.039.151,-

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial yang di anggaran pokok tahun 2021 tidak dianggarkan, pada perubahan dianggarkan sebesar 3.650.000.000.

2) Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan mengalami Peningkatan dari Rp 107.629.505.459 menjadi Rp 120.261.749.597.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja modal diproyeksikan mengalami Peningkatan dari Rp 12.083.800.456 menjadi Rp 18.584.213.964.

4) Belanja Transfer

Belanja modal diproyeksikan mengalami Penurunan dari Rp 107.273.105.747 menjadi Rp 105.624.946.100.

Arah Kebijakan penguatan kualitas belanja melalui :

1. Fokus pada prioritas dan dan orientasi pada hasil (result based
2. Peningkatan efektivitas birokrasi disertai dengan perbaikan pengelolaan belanja pegawai
3. Efisiensi belanja non prioritas pusat dan daerah yang meliputi :
 - a. Penghematan belanja barang antara lain : belanja barang non operasional (honor, bahan dan lata tulis kantor/ATK), perjalanan dinas dan paket meeting
 - b. Penajaman dan sinkronisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat
 - c. Penguatan belanja modal, antara lain melalui refocusing belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi (TIK, konektivitas dan pangan)

4. Belanja modal mendukung janji politik bupati terpilih
5. Fokus prioritas dan orientasi pada hasil (result based), serta value for money (efektif, efisien dan ekonomis)
6. Peningkatan efektivitas birokrasi disertai dengan perbaikan pengelolaan belanja pegawai
7. Efisiensi belanja non prioritas pusat dan daerah yang meliputi :
 - d. Penghematan belanja barang antara lain : belanja barang non operasional (honor, bahan dan jasa tulis kantor/ATK), perjalanan dinas dan paket meeting
 - e. Penajaman dan sinkronisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat
 - f. Penguatan belanja modal, antara lain melalui refocusing belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi (TIK, konektivitas dan pangan)
8. Belanja modal mendukung janji politik bupati terpilih
9. Fokus prioritas dan orientasi pada hasil (result based), serta value for money (efektif, efisien dan ekonomis)

2. Prioritas Perubahan Pembiayaan Daerah

Prioritas untuk perubahan pembiayaan daerah adalah pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yang menyesuaikan dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barru tahun 2020. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 21.222.420.342 mengalami perubahan menjadi Rp. 71.365.800.219. Berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 6.053.031.264,-. Adapun perubahan pembiayaan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
 TARGET PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
 KABUPATEN BARRU TAHUN 2021

NO	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2021	TARGET RKPD PERUBAHAN TAHUN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	21.222.420.342,01	71.365.800.219,10	(50.143.379.877,09)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.222.420.342,01	71.365.800.219,10	(50.143.379.877,09)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	3.053.031.264,26	3.053.031.264,00	0,26
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah			-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.053.031.264,26	6.053.031.264,00	0,26
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	15.169.389.077,75	65.312.768.955,10	(50.143.379.877,35)

Sumber : BPKAD Kabupaten Barru, Tahun 2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2021 merupakan dokumen perubahan RKPD Nomor 31 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021, dimana RKPD Tahun 2021 tersebut merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021. Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Kabupaten Barru. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2021 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan (tahun 2021) menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan, yang disebabkan masih adanya pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan gangguan pada aktifitas kehidupan manusia dan terganggunya aktifitas ekonomi. Perkembangan ini tentu harus dikendalikan maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan orientasi dalam perencanaan kedepan melalui perubahan RKPD Tahun 2021.

Penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud dapat dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021, sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dapat dilakukan penyesuaian.

Substansi perubahan dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2021 mendasarkan dan memperhatikan pada :

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan Rancangan RKP 2021.
2. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan di dalam Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
3. Arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2021.

Selanjutnya substansi perubahan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun perubahan rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas

pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2026 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2021.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Barru dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan dengan memperhatikan : (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barru sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021; (2) Isu strategis; dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu penyusunan prioritas pembangunan juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan antara lain : (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, (2) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat dalam hal ini pemenuhan Standart Pelayanan Maksimal (SPM), dan (3) Urgensitas Penanganan Isu strategis dan isu global dalam hal ini Sustainable Development Goals (SDGs).

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”**. Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2016-2021. Adapun penjelasan Visi disajikan pada Table 4.1 merupakan penyesuaian dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016-2021.

Tabel 4. 1

Penjelasan Visi sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021

No.	Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi RPJMD Perubahan
1	Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan	Lebih maju	Peningkatan indikator pembangunan akan lebih baik khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi angka harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan paritas daya beli serta kualitas tenaga kerja
		Sejahtera	Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.
		Taat azas	Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal
		Bermartabat	Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri
		Bernafaskan keagamaan	Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
3. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
4. Mengembangkan Interkoneksi Sinergis Antar Wilayah di Tingkat,Nasional,Regional Dan Internasional
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 2
 Penjelasan Misi sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Barru
 Tahun 2016-2021

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi RPJMD Perubahan
1	Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Ta'at Asas dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan	Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM	Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM melalui peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barru
2		Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Kemajuan pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan melalui pembangunan bidang ekonomi terutama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan memperhatikan hak-hak orang miskin dan PMKS dengan tetap memperhatikan asas pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan
3		Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif	Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan penguatan perundang-undangan, norma budaya/adat-istiadat dan kearifan lokal
4		Mengembangkan Interkoneksi Sinergis Antar Wilayah di Tingkat,Nasional,Regional Dan Internasional	Pembangunan Kabupaten Barru yang berdaya saing dan kemandirian daerah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik, pengembangan inovasi daerah, ketahanan pangan, ketahanan energi dan investasi daerah
5		Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa menggunakan prinsip antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang professional yang bernafaskan keagamaan

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan

dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C. Adapun pernyataan pernyataan tujuan dan sasaran yakni:

1. Misi 1: Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM.

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM.

Sasaran : Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagaiberikut :

1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

2. Misi 2: Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Sasaran : Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat
2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

3. Misi 3: Menciptakan lingkungan yang kondusif.

Tujuan : Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat

Sasaran : Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat.
2. Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana.

4. Misi 4: Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional

Tujuan : Meningkatkan daya saing daerah.

Sasaran : Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.
2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.
3. Berkembangnya investasi dan inovasi Daerah.

5. Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan : Terwujudnya pelayanan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Sasaran : Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religious

Tabel 4.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target RKPD Pokok 2021	Target RKPD Perubahan 2021	Capaian s/d 2020	Ket
1	Visi : Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Asas dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan								
	1	Misi 1: Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM							
		1	Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,1	71	71	
			1	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	angka harapan lama sekolah	13,65 Tahun	13,65 Tahun	13,58	
					Rata-rata lama sekolah	8,12 Tahun	8,4 Tahun	8,28	
			2	Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69 Tahun	69,03 tahun	69,02	
			3	Sasaran : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase tingkat pengangguran terbuka	5,40%	6,07%	6,39	
	2	Misi 2 : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat							
		2	Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan ekonomi		PDRB Perkapita	Rp47.147.498	Rp47.147.498	Rp40.300.000	
			4	Sasaran : Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	6,98	3,98	0,87	
					Inflasi	2,9	3,0 - 1,0	1,61	
					Indeks Gini	0,34	0,36	0,36	
					Paritas Daya Beli (PPP)	Rp10.923.600	Rp10.930.000	Rp10.930.000	
No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target RKPD Pokok 2021	Target RKPD Perubahan 2021	Capaian s/d 2020	Ket
			5	Sasaran :	Persentase Penduduk Miskin	8,11	9,08	8,26	

				Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang tertangani	100%	100%	100%	
	3	Misi 3 : Menciptakan lingkungan yang kondusif							
		3	Tujuan : Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat		Angka Kriminalitas yang tertangani	6,5	7,3	7,6	
					Jumlah korban meninggal hilang, dan terkena dampak bencana	0 Jiwa	0 Jiwa	0	
			6	Sasaran : Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 blnn terakhir	0%	0%	0,002	
			7	Sasaran : Meningkatnya penanganan dan Pengurangan resiko bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	90%	100%	100	
					Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	
					Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	
	4	Misi 4 : Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional							
		4	Tujuan : Meningkatnya daya saing daerah.		Kinerja Infrastruktur Daerah	23,33%	55,33%	55,33%	
					Pertumbuhan Industri	11%	11%	11%	
			8	Sasaran Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,72	0,82	0,81	
					Rasio Jaringan Irigasi	19,50%	51,00%	50,41%	
					Presentase Penduduk Berakses air minum	100%	100%	95,61	
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	100%	100%	
					Rasio Rumah Layak Huni	0,29	0,29	0,25	
No	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target RKPD Pokok 2021	Target RKPD Perubahan 2021	Capaian s/d 2020	Ket
			9	Sasaran :		66	66	58	

			Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan				
		10	Sasaran : Berkembangnya Investasi dan Inovasi Daerah	Total Realisasi Investasi	Rp558.336.715.695	Rp855.316.873.042	Rp855.316.873.042	
	5	Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)						
		5	Tujuan : Terwujudnya pelayanan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	
		11	Sasaran : Meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan	Penerapan E-Government : 1. ePlanning 2. eBudgeting 3. eSDM 4. ePengawasan 5. ePerizinan 6. eMas Presentase Tindak Lanjut Temuan Opini BPK Akuntabilitas Pemerintah	Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% WTP B	Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% WTP B	Ada Ada Ada Ada Ada Ada 77 WTP CC	
		12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religious	Persentase sarana peribadahan yang dibina pemerintah daerah	100%	100%	100%	

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan nasional dan daerah yang disesuaikan dengan skala prioritas yang ada dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.

Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Barru ditetapkan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan isu strategis yang berkembang serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi dan kondisi eksisting di lapangan akan dikerucutkan menjadi isu strategis Kabupaten Barru yang akan dijadikan dasar berpijak dalam merumuskan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2020-2024, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tema yakni: “Indonesia

Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang sejahterah, adil dan Berkesinambungan”.

Dalam penjabaran Tema diatas didapatkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia Melalui :

- 1. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
- 2. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Prioritas Nasional 2 : Pembangunan Ekonomi Melalui :

- 1. Pangan
- 2. Energi
- 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 4. Industri Manufaktur
- 5. Kelautan dan Kemaritiman

Prioritas Nasional 3 : Pembangunan Kewilayahan Melalui :

- 1. Sentra-Sentra Pertumbuhan
- 2. Komoditas Unggulan Daerah
- 3. Pertumbuhan Perkotaan

Prioritas Nasional 4 : Pembangunan Infrastruktur Melalui :

- 1. Transportasi
- 2. Telekomunikasi
- 3. Sumber Daya Air
- 4. Perumahan dan Pemukiman

Prioritas Nasional 5 : Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan melalui :

- 1. Hukum dan Regulasi
- 2. Pertahanan dan Keamanan
- 3. Politik

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaranutama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4
Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target Rancangan RKP Tahun 2021	Target RKP Nasional Tahun 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	4,5-5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5-8,2	7,7-9,1
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7	9,2-9,7
Rasio Gini (indeks)	0,377-0,379	0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78-72,90	72,78-72,95
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) <i>*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)</i>	23,55-24,14	23,55-24,05

- Sumber:
1. Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
 2. Perpres Nomor 86 tahun 2020 Tentang RKP Tahun 2021

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Perubahan Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan-RPJMD Tahun 2018-2023 yang telah disusun. Selanjutnya tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya pencapaiannya dilakukan dengan memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Guna tercapainya sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, harus didukung oleh strategi pembangunan yang ideal dan tepat sasaran. Ketiga hal tersebut nantinya akan menjadi acuan penyusunan program unggulan dan prioritas daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2021.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018-2023. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun perencanaan yang ke-3 (n+3) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas tahun 2021 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi (perubahan besar-besaran) pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2021 yaitu: **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
4. Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik.

Tabel 4.5
Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sesuai Perubahan RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023

No.	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi 2019	Target RKPD Tahun 2021	Target Perubahan RKPD Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,92	6,10	4,10-5,55
2	PDRB per kapita (ADHB)	57,03	65,76	59,23
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Agustus	4,97	7,20	6,08
4	Tingkat Kemiskinan (Sept.)	8,56	9,10	8,70
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,66	72,22	72,20
6	Gini Rasio (September)	0,391	0,414	0,382
7	Indeks Williamson	0,630	0,610	0,610
8	Tingkat Inflasi (%)	2,35	3,5 ± 1,0	3,0 ± 1,0

Sumber : RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2019, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, maka dirumuskan Tema RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 adalah : **“PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK BARRU YANG LEBIH MAJU”**

Tema ini juga merupakan penguatan Kabupaten Barru setelah dampak pandemic COVID 19, karena itu dibutuhkan percepatan pemulihan pembangunan dalam segala aspek di Tahun 2021. Tema ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Barru pada tahun 2021 yang meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk mewujudkan SDM berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan Lingkungan;
3. Peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat;
4. Perwujudan Keamanan dan Ketertiban;
5. Akselerasi tata kelola dan reformasi Birokrasi.

Prioritas pembangunan tahun 2021 ini kemudian diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barru kemudian dijabarkan pada strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran

akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Tahun 2021 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten barru adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Barru

Visi : Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM			
Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan	Pengembangan layanan anak usia dini
			Optimalisasi kualitas pelaksanaan wajib belajar 9 tahun
			Pengembangan layanan pendidikan kesetaraan
			Peningkatan mutu pendidik dan kependidikan serta tata kelola kependidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan dan keluarga berencana	Pengembangan layanan kesehatan
			Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
			Pengembangan keluarga berencana berbasis masyarakat
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan ketenagakerjaan	Peningkatan Kualitas SDM Pencari Kerja dan akses penempatan tenaga kerja
	Misi 2 : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat		
Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi.	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis sumberdaya lokal	Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
			Pengembangan Industri Kecil Menengah
			Peningkatan perdagangan
			Peningkatan pengelolaan pariwisata
			Pengembangan ekonomi kreatif
	Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pengawasan dan pengendalian harga	Survey Harga Pasar
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah
		Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 : Menciptakan lingkungan yang kondusif			

Mewujudkan rasa aman dan ketenteraman di lingkungan masyarakat	Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
	Meningkatnya penanganan dan Pengurangan resiko bencana	Meningkatkan antisipasi penanganan dan pengurangan resiko bencana	Peningkatan kesiagaan penanganan bencana
Misi 4 : Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional			
Meningkatnya daya saing daerah.	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur	Meningkatkan Infrastruktur dengan regulasi yang memadai dan pengembangan fasilitas dasar bagi mobilitas barang, jasa dan manusia	Peningkatan kualitas jaringan jalan
			Pemantapan ketahanan pangan dan sumberdaya air
			Peningkatan akses penduduk terhadap air minum
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan laut dan darat
			Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Peningkatan kualitas lingkungan	pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran, pemulihan akibat pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan
	Berkembangnya investasi dan inovasi daerah	Peningkatan investasi dan inovasi daerah	Peningkatan investasi
Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)			
Terwujudnya pelayanan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan umum	Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Peningkatan sarana dan prasarana peribadahan

Adapun konsistensi antara prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2021 dengan sasaran, indikator dan target kinerja seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7

Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Indikator dan Target
Kinerja Tahun 2021 Kabupaten Barru

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk mewujudkan SDM berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter;	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	angka harapan lama sekolah	13,65 Tahun
		Rata-rata lama sekolah	8,4 Tahun
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,03 tahun
	Meningkatnya penyerapan tenagakerja	Persentase tingkat pengangguran terbuka	6,07%
Percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan Lingkungan;	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,82
		Rasio Jaringan Irigasi	51,00%
		Presentase Penduduk Berakses air minum	100%
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,29
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan	66
Peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat;	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	3,98
		Inflasi	3,0 - 1,0
		Indeks Gini	0,36
		Paritas Daya Beli (PPP)	Rp10.930.000
	Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase Penduduk Miskin	9,08
		Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	100%
Perwujudan Keamanan dan Ketertiban;	Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 blnn terakhir	0%
	Meningkatnya penanganan dan Pengurangan resiko bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%
Akselerasi tata kelola dan reformasi Birokrasi.	Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan	Penerapan E-Government	ADA
		Presentase Tindak Lanjut Temuan	100%
		Opini BPK	WTP
		Akuntabilitas Pemerintah	B
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius	Persentase sarana peribadahan yang dibina pemerintah daerah	100%
	Berkembangnya investasi dan inovasi daerah	Total Realisasi Investasi	855.316.873.042

Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2021 yang meliputi antara

lain:

Tabel 4. 8
Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2021

No.	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi 2020	Target RKPD Tahun 2021	Target Perubahan RKPD Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,87	6,98	3,98
2	PDRB per kapita (ADHB)	40,3	47.14	41,98
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,39	5,40	6,17
4	Tingkat Kemiskinan	8,26	8,11	9,08
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71	70,10	71,43
6	Gini Rasio	0,36	0,34	0,36

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan di RKPD Perubahan tahun 2021 disusun dalam rangka mencapai target RPJMD tahun 2016 – 2021. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun 2021 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar, 7 urusan pilihan, dan 6 fungsi pemerintahan fungsi penunjang.

Untuk penghitungan kerangka pendanaan yang akan digunakan pada RKPD Perubahan tahun 2021 yaitu perlu diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya, dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021

NO	URAIAN	RKPD POKOK TAHUN 2021	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2021
1	Pendapatan	957.284.303.545,00	940.973.244.766,00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	21.222.420.342,01	71.365.800.219,10
	Total Penerimaan	978.506.723.887	1.012.339.044.985
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	978.506.723.887	1.012.339.044.985

Sumber : Data Olahan Bappeda Kabupaten Barru, Tahun 2021

Sebagaimana tabel di atas, proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2021 yakni sebesar Rp 1.012.339.044.985. Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021

NO	URAIAN	RKPD POKOK TAHUN 2021	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2021
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	978.506.723.887	1.012.339.044.985
1	Prioritas I	644.700.417.518,45	685.890.826.730,10
2	Prioritas II	240,144,006,456.91	237.352.870.205
3	Prioritas III	93,662,299,911.65	89.095.348.050

Sumber : Data Olahan Bappeda Kabupaten Barru, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 1.012.339.044.985. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program yang mendukung SPM, mendukung pencapaian visi misi kepala daerah dan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Selanjutnya, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini, dirumuskan

rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar yakni SPM. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada RKPD Perubahan tahun 2021 merupakan hasil dari musrenbang tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan yang dipaduserasikan dengan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2021. Rencana kerja Perangkat Daerah tersebut mengacu kepada renstra Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016-2021. Peaduserasian tersebut dilakukan melalui forum Perangkat Daerah yang dihadiri oleh delegasi kecamatan dan utusan Perangkat Daerah. Selanjutnya, hasil peaduserasian tersebut difinalisasi pada musrenbang kabupaten yang dihadiri oleh delegasi desa/kelurahan dan kecamatan, Perangkat Daerah provinsi, DPRD provinsi serta seluruh stakeholder ditingkat kabupaten, seperti LSM, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan lainnya yang berjumlah 250 orang. Hal ini ditandai dengan berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD Kabupaten Barru.

Untuk rencana program Kabupaten Barru Tahun 2021 dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021 beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 5.3

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Barru

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100%	100%	240,839,430,518	240,288,254,846	(551,175,672)	DISDIK
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	239,326,017,814	239,326,017,814	-	
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/ fungsional	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/ fungsional			100%	100%				DISDIK
1	1	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/kursus	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/kursus	Barru	Barru	5 Orang	5 Orang	55,162,500	49,158,500	(6,004,000)	DISDIK
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%				DISDIK
1	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis	8,000,000	1,770,000	(6,230,000)	DISDIK
				Jumlah Pengadaan peralatan kantor		Jumlah Pengadaan peralatan kantor		10 Jenis			5 Jenis	129,135,204	102,349,600	(26,785,604)	DISDIK	
1	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti rakor dan konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti rakor dan konsultasi	Barru	Barru	50 Orang	50 Orang	170,000,000	182,947,700	12,947,700	DISDIK
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	100%				DISDIK
1	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis	23,435,000	15,605,000	(7,830,000)	DISDIK
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pendukung Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pendukung Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 jenis	3 jenis				DISDIK
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	Barru	Barru	4 Jenis	4 Jenis	285,320,000	253,317,600	(32,002,400)	DISDIK
				Jumlah ASN yang mengikuti rakor, sosialisasi Pemkab dan konsultasi		Jumlah ASN yang mengikuti rakor, sosialisasi Pemkab dan konsultasi		150 Orang			150 Orang					
				Jumlah dokumen yang dibutuhkan		Jumlah dokumen yang dibutuhkan		1 Dokumen			1 Dokumen					

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah	
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Jumlah pelayanan administrasi yang disediakan		Jumlah pelayanan administrasi yang disediakan			250 orang	250 orang					
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis	173,580,000	170,923,074	(2,656,926)	DISDIK	
1	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Barru	Barru	2 Orang	2 Orang	21,000,000	18,016,000	(2,984,000)	DISDIK	
						Jumlah pelayanan keamanan kantor yang disediakan		Jumlah pelayanan keamanan kantor yang disediakan			2 Orang	2 Orang	15,000,000	15,000,000	-	DISDIK	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah			100%	100%				DISDIK	
1	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	Barru	Barru	22 Unit	22 Unit	19,202,000	40,433,558	21,231,558	DISDIK	
						Jumlah kendaraan operasional		Jumlah kendaraan operasional			3 Unit	3 Unit	46,078,000	15,000,000	(31,078,000)	DISDIK	
1	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Barru	Barru	4 Jenis	4 Jenis	27,500,000	23,375,000	(4,125,000)	DISDIK	
1	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dinas yang layak	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dinas yang layak	Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	490,000,000	54,635,300	(435,364,700)	DISDIK	
						Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor			2 Jenis	2 Jenis	50,000,000	19,705,700	(30,294,300)	DISDIK	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/SDLB	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/SDLB			100.00%	100.00%	53,402,267,100	59,375,019,520	(5,972,752,420)	DISDIK	
					APK SMP/Paket B		APK SMP/Paket B			100.00%	100.00%						
					Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs			100.00%	100.00%						
					Cakupan Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun		Cakupan Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun			0.967	0.967						
					Rasio guru/murid per kelas Pendidikan Dasar		Rasio guru/murid per kelas Pendidikan Dasar			0.045	0.045						
					Jumlah PTK yang menerima sertifikasi		Jumlah PTK yang menerima sertifikasi			1360 Orang	1360 Orang						
					Jumlah PTK yang berijazah S1/D4		1765 Orang			1765 Orang	1765 Orang						
					Cakupan Satuan Pendidikan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		Cakupan Satuan Pendidikan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)			100%	100%						
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Lulusan SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Lulusan SD/MI			100%	100%				DISDIK	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Jenis Pengelolaan Sistem Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Jenis Pengelolaan Sistem Pendidikan Sekolah Dasar			3 Jenis	3 Jenis								
						Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga		Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga			100%	100%								
1	1	2	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Sekolah SD yang terbangun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Sekolah SD yang terbangun	Barru	Barru	2 Unit	1 Unit	399,375,000	216,025,000	(183,350,000)	DISDIK				
1	1	2	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SD yang terbangun	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SD yang terbangun	Barru	Barru	4 RK	- RK	680,000,000	-	(680,000,000)	DISDIK				
1	1	2	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang terbangun	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang terbangun	SD Inpres Joncongan, SD Inpres Allejiang, SD Inpres 32 Burancie, SD Negeri Pacciro	SD Inpres Joncongan, SD Inpres Allejiang, SD Inpres 32 Burancie, SD Negeri Pacciro, SDI Maruala	4 Ruang	4 Ruang	550,000,000	856,025,700	306,025,700	DISDIK				
1	1	2	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir dan pagar SD yang terbangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir dan pagar SD yang terbangun	SD Innpres Lojie, SD Inpres Kompleks Ralla, SDI Cenrapole, SDN Ance, SDI Barantang Kec Mallusetasi, SDI Barang Kec Barru, SD Negeri Centre Mangkoso SDN Ralla 2 Kec Tanete Riaja	SD Innpres Lojie, SD Inpres Kompleks Ralla, SDI Cenrapole, SDN Ance, SDI Barantang Kec Mallusetasi, SDI Barang Kec Barru, SD Negeri Centre Mangkoso SDN Ralla 2 Kec Tanete Riaja	5 Unit	9 Unit	546,875,000	2,981,043,150	2,434,168,150	DISDIK				
						Jumlah Sarana Air Bersih/Sanitary SD yang terbangun		Jumlah Sarana Air Bersih/Sanitary SD yang terbangun	SD Inpres Cilellang Utara, SD Inpres Pange, SD Inpres Barantang	SD Inpres Cilellang Utara, SD Inpres Pange, SD Inpres Barantang	4 Unit	3 Unit	320,000,000		(320,000,000)	DISDIK				
						Jumlah Ruang Laboratorium/Praktikum SD yang terbangun		Jumlah Ruang Laboratorium/Praktikum SD yang terbangun	SD Inpres Allejiang, SD Inpres Camming, SD Inpres Buaka, SD Negeri Pacciro	SD Inpres Allejiang, SD Inpres Camming, SD Inpres Buaka, SD Negeri Pacciro	1 Ruang	4 Ruang	260,000,000		(260,000,000)	DISDIK				
1	1	2	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SD/SMP yang terbangun	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SD/SMP yang terbangun	Barru	SD Inpres Buaka, SD Inpres Lappadare, SD Inpres Joncongan, SD Inpres Allejiang, SD Inpres Wirtingasi, SD Negeri Pacciro, SD Inpres Camming, SD Inpres No 41 Birue	1 Ruang	9 Ruang	75,000,000	700,142,070	625,142,070	DISDIK				
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SD	Tersebar	Tersebar	4 Jenis	1 Jenis	375,000,000	2,199,346,000	1,824,346,000	DISDIK				
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubeler SD	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubeler SD	Tersebar	Tersebar	10 set	10 set	250,000,000	164,540,000	(85,460,000)	DISDIK				
1	1	2	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah RK SD yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah RK SD yang direhabilitasi	SD Inpres Padang Lampe, SD Inpres Padaelo	SDI Maruala	14 RK	0	1,365,000,000	200,000,000	(1,165,000,000)	DISDIK				

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
														Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)									
1						2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade OR dan Seni	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade OR dan Seni	Barru	Barru	600 Siswa	600 Siswa	325,000,000	246,088,700	(143,911,300)	DISDIK					
						Jumlah SP yang mengikuti Lomba UKS SD		Jumlah SP yang mengikuti Lomba UKS SD			7 SP	7 SP	32,500,000								
						Jumlah SP yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat SD		Jumlah SP yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat SD			99 SP	- SP	32,500,000								
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SD/MI yang terakreditasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SD/MI yang terakreditasi	Barru	Barru	218 SP	218 SP	45,163,800	71,412,700	26,248,900	DISDIK					
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti UAS/UAN SD/MI	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Akhir SD/MI	Barru	Barru	3518 Siswa	3518 Siswa	390,133,600	329,883,400	(60,250,200)	DISDIK					
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Buku Teks/Pelajaran SD/SMP	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Buku Teks/Pelajaran SD/SMP	Tersebar	Tersebar	10 Set	5 Set	275,000,000	283,490,000	8,490,000	DISDIK					
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SP yang mengelola BOS SD	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SP yang mengelola BOS SD	Barru	Barru	199 SP	199 SP	4,625,000,000	4,997,625,300	372,625,300	DISDIK					
						Jumlah SP yang menerima BOS Pusat pendidikan Dasar		Jumlah SP yang menerima BOS Pusat pendidikan Dasar			199 SP	199 SP	14,474,900,000	15,078,000,000	603,100,000	DISDIK					
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sosialisasi Program Pendidikan Dasar (SD)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sosialisasi Program Pendidikan Dasar (SD)	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis	90,000,000	161,680,000	71,680,000	DISDIK					
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD kurang mampu yang menerima Beasiswa	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD kurang mampu yang menerima Beasiswa	Barru	Barru	1150 Siswa	1150 Siswa	37,500,000	44,180,000	6,680,000	DISDIK					
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang mengikuti Proses Sertifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang mengikuti Proses Sertifikasi	Barru	Barru	25 Orang	25 Orang	100,000,000	509,635,400	(184,936,398)	DISDIK					
						Jumlah Guru Kelas/bidang studi/Mata Pelajaran dan Kepsek yang mengikuti pelatihan		Jumlah Guru Kelas/bidang studi/Mata Pelajaran dan Kepsek yang mengikuti pelatihan			200 Orang	200 Orang	330,000,000			DISDIK					
						Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum SD		Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum SD			211 org	211 org	264,571,798			DISDIK					
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah ketersediaan Tenaga pendidik dan kependidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah ketersediaan Tenaga pendidik dan kependidikan	Barru	Barru	105 Orang	79 Orang	1,103,197,909	928,469,000	(174,728,909)	DISDIK					
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Barru	Barru	120 Orang	120 Orang	30,000,000	46,122,000	(150,050,957)	DISDIK					
						Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Replikasi MBS		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Replikasi MBS			5 Jenis	5 Jenis	33,672,957								
						Jumlah Dokumen Data Pendidikan		Jumlah Dokumen Data Pendidikan			1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000								
						Jumlah dokumen Data dan Informasi Dinas Pendidikan		Jumlah dokumen Data dan Informasi Dinas Pendidikan			1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000								
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Lulusan SMP/MTs	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Lulusan SMP/MTs			100%	100%				DISDIK					
						Jumlah Jenis Pengelolaan Sistem Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Jenis Pengelolaan Sistem Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			3 Jenis	3 Jenis									

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah																	
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)																		
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)																			
1					2			3			4			5			6	7	8	9	10			11			12			13	
						Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga		Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga			100%	100%																			
1	1	2	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Sekolah SMP yang terbangun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Sekolah SMP yang terbangun	Barru	-	1 Unit	0	200,625,000	-	(200,625,000)	DISDIK															
1	1	2	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SMP yang terbangun	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SMP yang terbangun	SMPN 2 Soppeng Riaja	SMPN 2 Soppeng Riaja	2 RK	2 RK	340,000,000	407,756,900	67,756,900	DISDIK															
1	1	2	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	SMPN 3 Tanete Riaja	SMPN 3 Tanete Riaja	1 Ruang	1 Ruang	150,000,000	567,022,900	417,022,900	DISDIK															
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir dan pagar SMP yang terbangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir dan pagar SMP yang terbangun	SMPN 3 Tatete Riaja, SMPN 2 Tanete Rilau	SMPN 1 Soppeng Riaja	3 Unit	1 Unit	328,125,000	100,000,000	(228,125,000)	DISDIK															
						Jumlah Ruang Laboratorium/Praktikum SMP yang terbangun		Jumlah Ruang Laboratorium/Praktikum SMP yang terbangun	SMPN 1 Tanete Riaja	SMPN 1 Tanete Riaja	1 Ruang	1 Ruang	260,000,000	615,976,850	355,976,850	DISDIK															
						Jumlah Sarana Air Bersih/Sanitary SMP yang terbangun		Jumlah Sarana Air Bersih/Sanitary SMP yang terbangun	SMP N 3 Barru, SMP N 2 Soppeng Riaja	SMP N 3 Barru, SMP N 2 Soppeng Riaja	2 Unit	2 Unit	160,000,000	407,398,000	247,398,000	DISDIK															
						Jumlah Ruang UKS SMP yang terbangun		Jumlah Ruang UKS SMP yang terbangun	SMPN 3 Tanete Riaja	SMPN 3 Tanete Riaja	1 Ruang	1 Ruang	75,000,000	262,750,700	187,750,700	DISDIK															
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SMP	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SMP	Barru	Barru	4 Jenis	4 Jenis	375,000,000	337,765,750	(37,234,250)	DISDIK															
1	1	2	2.02	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubeler SMP	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubeler SMP	Barru	-	10 set	-	250,000,000	-		DISDIK															
1	1	2	2.02	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah RK SMP yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah RK SMP yang direhabilitasi	Barru	Barru	6 RK	6 RK	585,000,000	149,678,500	(435,321,500)	DISDIK															
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade OR dan Seni (SMP)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade OR dan Seni (SMP)	Barru	Barru	600 Siswa	600 Siswa	325,000,000	430,341,700	105,341,700	DISDIK															
						Jumlah SP yang mengikuti Lomba UKS SMP		Jumlah SP yang mengikti Lomba UKS SMP			7 SP	7 SP	32,500,000																		
						Jumlah SP yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat SMP		Jumlah SP yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat SMP			39 SP	39 SP	32,500,000																		
1	1	2	2.02	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi	Barru	Barru	39 SP	39 SP	24,836,200	24,388,600	(447,600)	DISDIK															
1	1	2	2.02	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Akhir SMP/MTs	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Akhir SMP/MTs	Barru	Barru	3407 Siswa	3407 Siswa	409,866,400	105,156,000	(304,710,400)	DISDIK															
1	1	2	2.02	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Buku Teks/Pelajaran SMP	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Buku Teks/Pelajaran SMP	Barru	Barru	10 Set	10 Set	275,000,000			DISDIK															
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SP yang menerima BOS Daerah pendidikan Dasar SMP	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SP yang menerima BOS Daerah pendidikan Dasar SMP	Barru	Barru	39 SP	39 SP	4,625,000,000	3,574,605,100	(1,050,394,900)	DISDIK															
						Jumlah SP yang mengelola BOS SMP		Jumlah SP yang mengelola BOS SMP			39 SP	39 SP	8,075,100,000	7,754,100,000	(1,898,500,000)	DISDIK															

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Sosialisasi Program Pendidikan Dasar (SMP)		Jumlah Sosialisasi Program Pendidikan Dasar (SMP)			3 Jenis	3 Jenis	90,000,000			
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang menerima Beasiswa	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang menerima Beasiswa	Barru	Barru	1150 Siswa	1150 Siswa	37,500,000	37,500,000	37,500,000	DISDIK
						Jumlah Mahasiswa Miskin dan Berprestasi yang diberikan beasiswa		Jumlah Mahasiswa Miskin dan Berprestasi yang diberikan beasiswa			350 orang	-	1,450,000,000	-		DISDIK
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang mengikuti Proses Sertifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang mengikuti Proses Sertifikasi	Barru	Barru	25 Orang	25 Orang	100,000,000	227,557,000	(78,050,000)	DISDIK
						Jumlah Guru Kelas/bidang studi/Mata Pelajaran dan Kepsek yang mengikuti pelatihan		Jumlah Guru Kelas/bidang studi/Mata Pelajaran dan Kepsek yang mengikuti pelatihan			200 Orang	200 Orang	165,000,000			
						Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum SMP		Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum SMP			39 org	39 org	40,607,000			
1	1	2	2.02	29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah ketersediaan Tenaga pendidik dan kependidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah ketersediaan Tenaga pendidik dan kependidikan	Barru	Barru	45 Orang	23 Orang	278,612,000	278,582,000	(30,000)	DISDIK
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Barru	Barru	30 Orang	30 Orang	10,000,000	36,953,000	(139,219,800)	DISDIK
						Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Replikasi MBS		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Replikasi MBS			5 Jenis	5 Jenis	33,672,800			
						Jumlah Dokumen Data Pendidikan		Jumlah Dokumen Data Pendidikan			1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000			
						Jumlah dokumen Data dan Informasi Dinas Pendidikan		Jumlah dokumen Data dan Informasi Dinas Pendidikan			1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000			
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga PAUD yang memiliki Gedung Permanen	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga PAUD yang memiliki Gedung Permanen			3 Lembaga	3 Lembaga				DISDIK
						Persentase Lembaga PAUD yang difasilitasi BOP		Persentase Lembaga PAUD yang difasilitasi BOP			100%	100%				
1	1	2	203	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Unit Gedung Sekolah PAUD terbangun	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Unit Gedung Sekolah PAUD terbangun	(Lingk. Pange Kel. Mattappawalie/ Kec.Pujannating, TK Citra Sepee Kec. Barru)	TK Citran Sepee Kec. Barru	3 Unit	1 Unit	400,000,000	135,650,000	(264,350,000)	DISDIK
1	1	2	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang diadakan Sarana dan Prasaranan Bermain	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang diadakan Sarana dan Prasaranan Bermain	Barru	-	10 SP	-	240,000,000	-	(240,000,000)	DISDIK
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mendapatkan BOP PAUD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mendapatkan BOP PAUD	Barru	Barru	5850 Siswa	5850 Siswa	2,617,500,000	4,104,990,400	1,487,490,400	DISDIK
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Cakupan Pendidik PAUD yang mendapatkan insentif	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Cakupan Pendidik PAUD yang mendapatkan insentif	Barru	Barru	94%	94%	2,617,500,000	5,624,372,000	3,006,872,000	DISDIK
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti Pelatihan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti Pelatihan	Barru	Barru	200 Orang	200 Orang	141,352,891	132,349,600	(9,003,291)	DISDIK
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Dokumen PAUD yang dibukukan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Dokumen PAUD yang dibukukan	Barru	Barru	7 Dokumen	7 Dokumen	50,000,000	56,249,400	(128,750,600)	DISDIK

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah pendidik/ pengelola PAUD yang mengikuti publikasi/ sosialisasi		Jumlah pendidik/ pengelola PAUD yang mengikuti publikasi/ sosialisasi			250 Orang	250 Orang	60,000,000			
						Jumlah Gugus PAUD terbentuk dan terbina		Jumlah Gugus PAUD terbentuk dan terbina			22 Gugus	22 Gugus	75,000,000			
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun			137961	137961				DISDIK
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah WB yang mengikuti program Keaksaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah WB yang mengikuti program Keaksaraan	Barru	Barru	100 WB	100 WB	235,000,000	4,433,526,700	3,236,946,955	DISDIK
				Jumlah PKBM yang dikembangkan		Jumlah PKBM yang dikembangkan		1 PKBM			1 PKBM	230,000,000				
				Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket A		Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket A		1 Klp			1 Klp	246,579,745				
				Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket B		Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket B		5 Klp			5 Klp					
				Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket C		Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket C		5 Klp			5 Klp					
				Jumlah WB Paket B/Paket C yang mengikuti pelatihan TI		Jumlah WB Paket B/Paket C yang mengikuti pelatihan TI		50 WB			50 WB	110,000,000				
				Jumlah WB yang mengikuti HAI		Jumlah WB yang mengikuti HAI		50 WB			50 WB	125,000,000				
				Jumlah jenis kegiatan lingkup UPT Pendidikan SKB		Jumlah jenis kegiatan lingkup UPT Pendidikan SKB		5 Jenis			5 Jenis	250,000,000				
1	2					BIDANG KESEHATAN										
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	3,920,399,000	3,092,114,900	(828,284,100)	DINKES
				Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana		100%			100%					
				Persentase aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi		Persentase aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi		100%			100%					
1	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
1	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	42,115,538,290	42,115,538,290	-	DINKES
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaiaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan peningkatan Disipln dan Kapasitas SDM	Administrasi Kepegawaiaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDM	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	15 org	15 org				
1	2	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	15 org	15 org	175,000,000.00	45,000,000	(130,000,000)	DINKES
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerahh	Cakupan Pelayanan Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerahrh	Cakupan Pelayanan Administrasi umum perangkat daerah	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%				DINKES
1	2	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	5 jenis	5 jenis	2,112,500	71,038,500	68,926,000	DINKES

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat rumah tangga	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	33	33	43,902,500	10,789,700	(33,112,800)	DINKES
1	2	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	135 ok	135 ok	964,800,000	2,038,000	(962,762,000)	DINKES
1	2	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	190 ok	190 ok	379,459,000	535,079,100	155,620,100	DINKES
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Dinkes	Dinkes	30 jenis	30 jenis				DINKES
1	2	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Dinkes+ UPTD	Dinkes+ UPTD	22 buah	22 buah	94,750,000	92,500,000	(2,250,000)	DINKES
1	2	1	2.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur	Pengadaan Mebel		Dinkes+ UPTD	Dinkes+ UPTD	8 jenis		50,000,000		(50,000,000)	DINKES
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan Pendukung administrasi umum	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan Pendukung administrasi umum	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	8 keg	8 keg				DINKES
1	2	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	1200	1200	1,022,400,000	976,697,500	(45,702,500)	DINKES
				Jumlah tenaga kontrak		Dinkes+UPTD		Dinkes+UPTD	110	110						
				Jumlah pegawai		Dinkes+UPTD		Dinkes+UPTD	513	513						
1	2	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	3 Jenis	3 Jenis	772,600,000	754,994,600	(17,605,400)	DINKES
1	2	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	34 unit	5 Jenis	7,275,000	14,700,000	7,425,000	DINKES
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daeah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daeah	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	3 Keg	3 Keg				DINKES
1	2	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	39 unit	41 Unit	397,600,000	576,500,000	178,900,000	DINKES
1	2	1	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	2 jenis	2 jenis	10,500,000	12,777,500	2,277,500	DINKES
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio PKM per jumlah penduduk	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio PKM per jumlah penduduk	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	0,07	0,07	24,288,672,195	13,635,544,632	(10,653,127,563)	DINKES
				Rasio Puskesmas Pembantu (pustu) persatuan Penduduk		Rasio Puskesmas Pembantu (pustu) persatuan Penduduk		0,19			0,19					
				Cakupan ketersediaan obat yang cukup dan memenuhi syarat penyimpanan		Cakupan ketersediaan obat yang cukup dan memenuhi syarat penyimpanan		100%			100%					
				Cakupan ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan		Cakupan ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan		100%			100%					
				Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		182373			182373					
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12 PKM	12 PKM				DINKES

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah faskes tingkat I yang terpenuhi dalam pengadaan obat,vaksin dan Alat kesehatan		Jumlah faskes tingkat I yang terpenuhi dalam pengadaan obat,vaksin dan Alat kesehatan			12 pkm	12 pkm				
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Cakupan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas	Cakupan Puskesmas	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	13	13	10,205,420,430	7,708,928,331	(2,496,492,099)	DINKES
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Pustu	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Pustu	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	39	39	700,000,000	224,186,667	(475,813,333)	DINKES
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Keliling, Ambulance dan Mobil jenazah	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Keliling, Ambulance dan Mobil jenazah	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	3	3	1,900,000,000	-		DINKES
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana distribusi	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana distribusi	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	2	2	600,000,000	-		DINKES
				Jumlah sarana pengolahan data		Jumlah sarana pengolahan data		1			1	25,500,000				
				Jumlah sarana penyimpanan data		Jumlah sarana penyimpanan data		1			1	6,900,000				
				Jumlah sarana pengamanan		Jumlah sarana pengamanan		1			1	50,000,000				
				Jumlah sarana telekomunikasi		Jumlah sarana telekomunikasi		1			1	7,000,000				
				Jumlah sarana penunjang		Jumlah sarana penunjang		1			1	344,170,440				
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan Perbekalan kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan Perbekalan kesehatan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100	100	4,382,681,325	1,243,646,369	(3,206,034,956)	DINKES
				Jumlah Konsultasi dan koordinasi perencanaan ke provinsi dan pusat		Jumlah Konsultasi dan koordinasi perencanaan ke provinsi dan pusat		4 kali			4 kali	67,000,000				
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	147	147	6,000,000,000	4,658,783,265	(1,341,216,735)	DINKES
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100	100				DINKES
				Jumlah Puskesmas yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan lansia		Jumlah Puskesmas yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan lansia		12 PKM			12 PKM					
				Persentase usia 15 thn - 59 tahun mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar		Persentase usia 15 thn - 59 tahun mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar		100%			100%					
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization		55 Desa/Kel			55 Desa/Kel					
				Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sebesar		Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sebesar		95%			95%					
				Penanganan terhadap kejadian masalah kesehatan pada kondisi tertentu (Matra)		Penanganan terhadap kejadian masalah kesehatan pada kondisi tertentu (Matra)		100%			100%					
				Cakupan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga		Cakupan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga		100%			100%					

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah desa melaksanakan STBM berkelanjutan		Jumlah desa melaksanakan STBM berkelanjutan			55	55				
						Cakupan Rawat Jalan		Cakupan Rawat Jalan			2,59%	2,59%				
						Cakupan Rawat inap		Cakupan Rawat inap			48,5%	48,5%				
						Persentase kepuasan pelanggan dalam gedung		Persentase kepuasan pelanggan dalam gedung			87%	87%				
						Jumlah Kemitraan dengan Kelompok Potensial		Jumlah Kemitraan dengan Kelompok Potensial			6 Klp	6 Klp				
						Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (SDGs)		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (SDGs)			12	12				
						Cakupan Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK		Cakupan Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK			100%	100%				
						Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri		Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri			73% (190) & 10% (25)	73% (190) & 10% (25)				
1	2	2	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12 PKM	12 PKM	734,690,000	761,935,400	27,245,400	DINKES
						Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4		Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4			96.90%	96.90%				
						Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani		Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani			100%	100%				
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100	100				
1	2	2	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12	12	734,690,000	900,868,500	(546,511,500)	DINKES
						Cakupan pelayanan nifas		Cakupan pelayanan nifas			100%	100%				
						Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100	100				
						Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			100%	100%	712,690,000			
						Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program jaminan persalinan		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program jaminan persalinan			12 PKM	12 PKM				
1	2	2	2.01	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12 PKM	12 PKM	51,100,000			

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			100%	100%		73,295,000	(20,923,000)	DINKES
						Cakupan kunjungan bayi		Cakupan kunjungan bayi			100%	100%				
						Persentase bayi yang mendapat Asi Eksklusif		Persentase bayi yang mendapat Asi Eksklusif			60%	60%	43,118,000			
						Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100	100				
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	39,500,000	351,520,800	302,257,915	DINKES
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12	12				
						Cakupan Pelayanan anak Balita		Cakupan Pelayanan anak Balita	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100	100				
						Cakupan balita yang datang ke posyandu (D/S)		Cakupan balita yang datang ke posyandu (D/S)	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	9,762,885			
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100	100				
1	2	2	2.01	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	45,400,000	163,253,500	117,853,500	DINKES
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			12 PKM	12 PKM				
						Cakupan Penjarangan Kesehatan siswa SD dan setingkat		Cakupan Penjarangan Kesehatan siswa SD dan setingkat			1	1				
1	2	2	2.01	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	14%	14%	638,175,000	1,543,491,400	649,710,400	DINKES
						cakupan balita kurus yang mendapat PMT		cakupan balita kurus yang mendapat PMT			100%	100%				
						Cakupan pemberian MP_ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		Cakupan pemberian MP_ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin			100%	100%				
						persentase bumil KEK mendapat PMT = 95 %		persentase bumil KEK mendapat PMT = 95 %			100%	100%	206,316,000			
						Cakupan pemberian Vit.A		Cakupan pemberian Vit.A			100%	100%	19,705,000			
						Cakupan Garam beryodium		Cakupan Garam beryodium			95%	95%	15,805,000			
						Cakupan pemberdayaan keluarga sadar gizi		Cakupan pemberdayaan keluarga sadar gizi			12 klp	12 klp	13,780,000			
						Cakupan pemantauan kerawanan pangan dan gizi		Cakupan pemantauan kerawanan pangan dan gizi			12 pkm	12 pkm				
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah posyandu lansia terintegrasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah posyandu lansia terintegrasi	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	264	264	30,700,000	219,395,000	(119,673,800)	DINKES
						Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan puskesmas santun lansia		Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan puskesmas santun lansia			12	12	266,540,000			

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan pada usia 60 thn ke atas sesuai SOP		Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan pada usia 60 thn ke atas sesuai SOP			12 PKM	12 PKM	41,828,800			
						Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100%	100%				
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan sesuai SOP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan sesuai SOP	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12	12	86,000,000	7,000,000	(79,000,000)	DINKES
						Persentase usia 60 thn keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya		Persentase usia 60 thn keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya			100%	100%				
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai SOP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai SOP	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	44,765,000	19,300,000	(25,465,000)	DINKES
						Persentase penderita Diabetes Militus (DM)] mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita Diabetes Militus (DM)] mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100%	100%				
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumah Pemantauan pelayanan penderita Diabetes Mellitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	1 Kali	100%	34,717,600	11,580,000	(58,137,600)	DINKES
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan dan pengendalian Diabetes Militus sesuai SOP		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan dan pengendalian Diabetes Militus sesuai SOP			100%	100%	35,000,000	-		
						Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan sesuai standar		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan sesuai standar			100%	100%				
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persenatse puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persenatse puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	83%	83%	23,036,000	102,881,000	79,845,000	DINKES
						Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika aktif		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika aktif			25%	25%				
						Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika aktif		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika aktif			25%	25%				
						Cakupan Deteksi dini Penyakit akibat rokok		Cakupan Deteksi dini Penyakit akibat rokok			100%	100%				
1	2	2	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Imunisasi sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Imunisasi sesuai Standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	79,376,000	30,925,000	(48,451,000)	DINKES

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			100%	100%				
						Tingkat Prevelensi Tuberkolosis (Persentase Penderita TB yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart)		Tingkat Prevelensi Tuberkolosis (Persentase Penderita TB yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart)			115 per 100.000 penduduk	115 per 100.000 penduduk				
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit TBC BTA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit TBC BTA	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	150,000,000	198,003,000	48,003,000	DINKES
						Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya penanggulangan TB terpadu		Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya penanggulangan TB terpadu			100%	100%				
						Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Persentase orang beresiko HIV AIDS yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart)		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Persentase orang beresiko HIV AIDS yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart)			< 0,005 persen	< 0,005 persen				
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan dan Penanganan Kelompok Resiko Tinggi (high Risk Group)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan dan Penanganan Kelompok Resiko Tinggi (high Risk Group)	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	79,376,000	91,596,600	12,220,600	DINKES
						Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang		Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang			100%					
						IR DBD <49 per 100.000 penduduk		IR DBD <49 per 100.000 penduduk			<49					
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100%					
						Tingkat Kematian karena Malaria (per 1000 penduduk)		Tingkat Kematian karena Malaria (per 1000 penduduk)			< 0,001 per 1000 penduduk					
						Angka Kejadian Malaria (API malaria <1 / 1000 penduduk)		Angka Kejadian Malaria (API malaria <1 / 1000 penduduk)			<1					
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis sesuai SOP	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis sesuai SOP	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	450,000,000	1,263,858,383	813,858,383	DINKES
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Rabies Centre		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Rabies Centre			4 PKM	100%				
						Persentase puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS		Persentase puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS			100%	115 per 100.000 penduduk				

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah	
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							Persentase diare yang ditangani		Persentase diare yang ditangani			100%	< 0,005 persen					
							Persentase puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS		Persentase puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS			100%	100%					39,488,000
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sesuai Standar		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sesuai Standar			12	12					
							Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 Jam		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 Jam			100%	100%					
							Jumlah penemuan kasus non Polio AFP Rate 100,000 penduduk pada umur < 15 thn		Jumlah penemuan kasus non Polio AFP Rate 100,000 penduduk pada umur < 15 thn			≥1	≥1					
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan Community Based Surveillance (CBS)	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan Community Based Surveillance (CBS)	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	55 Desa/Kel	55 Desa/Kel	159,999,436	4,264,100,900	4,104,101,464	DINKES		
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah sesuai standar		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah sesuai standar			100%	100%						
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan Perawatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%		83,500,000		(83,500,000)	DINKES		
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melakukan pembinaan STBM berkelanjutan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melakukan pembinaan STBM berkelanjutan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12	12	66,086,000	741,263,800	535,556,514	DINKES		
						Persentase TTU, TPM dan sarana air minum yang diawasi		Persentase TTU, TPM dan sarana air minum yang diawasi			TTU MS 75%, TPM MS 48%, SAM diawasi 63%	TTU MS 75%, TPM MS 48%, SAM diawasi 63%						
						Jumlah Puskesmas melaksanakan pembinaan sanitasi lingkungan TTU, TPM dan pengawasan kualitas air minum sesuai SOP		Jumlah Puskesmas melaksanakan pembinaan sanitasi lingkungan TTU, TPM dan pengawasan kualitas air minum sesuai SOP			12	12	91,943,786					
						Jumlah sarana/gedung laboratorium kesehatan lingkungan		Jumlah sarana/gedung laboratorium kesehatan lingkungan			0	0	47,677,500					
						Persentase sampel yang diperiksa		Persentase sampel yang diperiksa			50%	50%						
						Persentase tatanan kabupaten sehat terkait bidang kesehatan yang di intervensi		Persentase tatanan kabupaten sehat terkait bidang kesehatan yang di intervensi			100%	100%						
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Puskesmas s melakukan pembinaan kelembagaan desa/kelurahan sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Puskesmas s melakukan pembinaan kelembagaan desa/kelurahan sehat	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12	12	144,242,000	91,425,400	(52,816,600)	DINKES		
						Jumlah dokumen penunjang kabupaten sehat		Jumlah dokumen penunjang kabupaten sehat			1	1						
1	2	2	2.02	33	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah PKM terakreditasi	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Survei Akreditasi Paripurna dan Utama	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	5	Paripurna 2 Utama 2	789,960,000	756,077,000	(33,883,000)	DINKES		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah PKM RI & NON RRI yg melaksanakan pelayanan sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional Pelayanan Puskesmas	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12	12				DINKES
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan perkesmas sesuai standar	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan perkesmas sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12	12	1,640,368,500	2,776,872,400	496,466,700	DINKES
					Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan PSC	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan PSC		12			12					
					jumlah puskesmas yang melakukan pendataan dan pembinaan PIS-PK	jumlah puskesmas yang melakukan pendataan dan pembinaan PIS-PK		90%			90%					
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Manajemen sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Manajemen sesuai standar		12			12					
					jumlah fasyankes primer diawasi dan dibina	jumlah fasyankes primer diawasi dan dibina		17			17					
					Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional		12 PKM			12 PKM	415,446,200				
					Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional		12 PKM			12 PKM					
					Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut		12 PKM			12 PKM					
					Jumlah Puskesmas yang enyelenggarakan kesehatan haji	Jumlah Puskesmas yang enyelenggarakan kesehatan haji		12 PKM			12 PKM					
					Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan program pelayanan darah	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan program pelayanan darah										
					Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)	Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)										
					Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan olahraga	Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan olahraga		12 PKM			12 PKM					
					Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan kerja dasar	Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan kerja dasar		12 PKM			12 PKM					
					Persentase sekolah yang melaksanakan KTR	Persentase sekolah yang melaksanakan KTR		0.058			0.058	36,016,000				
					Cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera sesuai standar	Cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera sesuai standar		10 pkm			10 pkm					
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan indera sesuai SOP	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan indera sesuai SOP						16,515,000				
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan pada kondisi tertentu	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan pada kondisi tertentu		100%			100%	7,000,000				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Cakupan Pengendalian masalah kesehatan hiperbarik		Cakupan Pengendalian masalah kesehatan hiperbarik			100%	100%				
						Cakupan Pelayanan Penanggulangan bencana sesuai standar		Cakupan Pelayanan Penanggulangan bencana sesuai standar			100%	100%	120,000,000			
						Cakupan deteksi Dini dan Skreening Jemaah Haji		Cakupan deteksi Dini dan Skreening Jemaah Haji			100%	100%	7,060,000			
						Jumlah sekolah yang melaksanakan program UKS		Jumlah sekolah yang melaksanakan program UKS			198 SD/ MI, 52 SMP/ MTs, 29 SMA/ MA	198 SD/ MI, 52 SMP/ MTs, 29 SMA/ MA	38,000,000			
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kemitraan dengan kelompok potensial	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kemitraan dengan kelompok potensial	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	5 klp	5 klp	22,154,000	714,344,000	602,922,500	DINKES
						Jumlah Pembinaan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik		Jumlah Pembinaan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik			2 media	2 media	89,267,500			
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100	100	17,243,808,000			
						Jumlah masyarakat miskin yang menjadi peserta PBI		Jumlah masyarakat miskin yang menjadi peserta PBI	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	62256	62256	17,556,192,000	56,827,356,984	22,027,356,984	DINKES
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	12	12	12,339,117,790	7,333,440,604	(5,005,677,186)	DINKES
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersusunnya dokumen perencanaan tingkat puskesmas dan dinas kesehatan berbasis data	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	13 Dok	12 Dokumen				DINKES
1	2	2	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Profil kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Profil kesehatan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	13 Dok	13 Dok	20,000,000	33,533,500	(49,166,500)	DINKES
						Jumlah dokumen data dasar kesehatan		Jumlah dokumen data dasar kesehatan			1 Dok	1 Dok	50,000,000			
						Jumlah survey kesehatan		Jumlah survey kesehatan			3	3	700,000			
						Jumlah Movev		Jumlah Movev			4 kali	4 kali	12,000,000			
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Rawat Jalan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Rawat Jalan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	2,59%	2,59%	49,101,500	286,676,500	237,575,000	DINKES
						Cakupan Rawat inap		Cakupan Rawat inap			48,5%	48,5%				
						Persentase kepuasan pelanggan dalam gedung		Persentase kepuasan pelanggan dalam gedung			87%	87%				
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	1 Dok	2 Dok				DINKES
1	2	3	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen data dasar sumber daya manusia kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen data dasar sumber daya manusia kesehatan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	1	3 PKM	42,076,500	279,676,500	237,600,000	DINKES
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi dan mengikuti pelatihan kompetensi teknis	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kompetensi teknis	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	475 org	45 org				DINKES

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	03	2.04	02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	460	3 kali	7,025,000	7,000,000	(25,000)	DINKES
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	15 sarana	15 sarana	34,575,275	499,098,000	464,522,725	DINKES
						Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar		Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar			15 sarana	15 sarana				
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah sarana kefarmasian dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah sarana kefarmasian dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	39 sarana farmasi, 1 optik	39 sarana farmasi, 1 optik				DINKES
1	2	4	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah PKM yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah PKM yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	3	3	13,215,275	9,539,000	(15,036,275)	DINKES
						Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas, Klinik dan Apotik		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas, Klinik dan Apotik	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	65%	65%	11,360,000			
1	2	4	2.06		pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	jumlah sarana Industri rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan post market	pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	jumlah sarana Industri rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan post market	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	96 sarana	96 sarana				DINKES
1	2	4	2.06	01	pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah ketersediaan alat dan bahan pemeriksaan lab sampel bahan pangan yang diduga berbahaya	pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	jumlah pemeriksaan post market P-IRT yang beredar	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	5	102 sarana	10,000,000	489,559,000	479,559,000	DINKES
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan Strata Mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan Strata Mandiri	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	22% (12 Desa) & 7% (4)	22% (12 Desa) & 7% (4)	281,239,200	475,329,900	194,090,700	DINKES
						Jumlah Kemitraan dengan Kelompok Potensial		Jumlah Kemitraan dengan Kelompok Potensial			6 Klp	6 Klp				
						Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri		Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata Mandiri			73% (190) & 10% (25)	73% (190) & 10% (25)				
1	2	5	2.02		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan Strata Mandiri	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/kel Siaga Aktif strata mandiri dan purnama	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	22% (12 Desa) & 7% (4)	22 % dan 7 %				DINKES
1	2	5	2.02	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengalokarkan dana ADD/ADK untuk bidang kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengalokarkan dana ADD/ADK untuk bidang kesehatan	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	100%	100%	56,487,500	32,224,500	(24,263,000)	DINKES
2	5	2	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Posyandu	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu strata Purnama dan Mandiri	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	19	78 % dan 10 %				DINKES

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
2	5	2	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah posyandu yang dibina	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah posyandu yang dibina	Dinkes+UPTD	Dinkes+UPTD	24	24	224,751,700	443,105,400	218,353,700	DINKES				
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	RSUD Barru	RSUD Barru	100%	100%	5,000,000,000	10,303,460,296	5,303,460,296	RSUD				
1	02	02	2.01		Penyediaan fasilitas Pelayanan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota	jumlah jenis kegiatan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM	Penyediaan fasilitas Pelayanan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota	jumlah jenis kegiatan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM			2 jenis	1 jenis				RSUD				
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit/ Penambahan Gedung RS	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit/ Penambahan Gedung RS			1 Unit	1 Unit	5,000,000,000	10,303,460,296	5,303,460,296	RSUD				
1	02	01			Program Penunjang Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah jenis pelayanan kesehatan BLUD	Program Penunjang Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah jenis pelayanan kesehatan BLUD			3 Jenis Pendapatan	3 Jenis Pendapatan	68,381,323,942	70,142,323,942	1,761,000,000	RSUD				
1	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%								
1	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	20,406,323,942	20,406,323,942	-					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Yang Berkualitas	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Yang Berkualitas	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis				RSUD				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien Yang di Layani	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien Yang di Layani	Barru	Barru	76.215 Orang	76.215 Orang	47,975,000,000	49,736,000,000	1,761,000,000	RSUD				
1	03				BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100	100	44,238,976,582	44,254,053,674	15,077,092	DPUPR				
				Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		100			100									
				Presentasi aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi		Presentasi aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi		100			100									
1	03	01	2.05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%								
1	03	01	2.05	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	42,115,538,290	42,115,538,290	-					
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis				DPUPR				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal	Barru	Barru	4 Org	4 Org	49,442,672	65,000,000	15,557,328	DPUPR
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Barru	Barru	2 Org	2 Org	10,000,000	10,000,000	-	DPUPR
	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta BinteK implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta BinteK implementasi peraturan perundang-undangan	Barru	Barru	7 org	7 org	10,000,000	10,000,000	-	DPUPR
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Barru	Barru	5 Jenis	5 Jenis				DPUPR
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Barru	Barru	1 jenis	1 jenis	5,000,000	5,000,000	-	DPUPR
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	Barru	Barru	3 jenis	3 jenis	2,369,275	2,369,275	-	DPUPR
1	03	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran rekening surat kabar	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran rekening surat kabar	Barru	Barru	5 jenis	5 jenis	12,096,000	12,096,000	-	DPUPR
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Provinsi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Provinsi	Barru	Barru	57 OK	57 OK	226,142,542	240,000,000	13,857,458	DPUPR
						Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah		Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	Barru	Barru	270 OH	270 OH	42,937,694	22,000,000	(20,937,694)	DPUPR
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis				DPUPR
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Kendaraan Roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6	Pengadaan Alat Besar	Kendaraan Roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6	Barru	Barru	7 unit	7 unit	91,064,031	91,064,031	-	DPUPR
						Jumlah alat-alat berat yang diadakan		Jumlah alat-alat berat yang diadakan	Barru	Barru	1 unit	1 unit	550,000,000	550,000,000	-	DPUPR
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan bengkel alat-alat berat		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan bengkel alat-alat berat	Barru	Barru	1 unit	1 unit	100,000,000	100,000,000	-	DPUPR
						Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium Kebinamargaan yang terpenuhi		Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium Kebinamargaan yang terpenuhi	Barru	Barru					-	DPUPR
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeler kantor	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeler kantor	Barru	Barru	4 unit	4 unit	20,000,000	20,000,000	-	DPUPR
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Barru	Barru	2 unit	2 unit	20,000,000	20,000,000	-	DPUPR
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barru	Barru	4 jenis	4 jenis				DPUPR
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jenis ATKyang disediakan, jumlah makan minum harianpegawai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jenis ATKyang disediakan, jumlah makan minum harianpegawai	Barru	Barru	5426 eks	5426 eks	187,854,000	187,854,000	-	DPUPR
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air dan listrik	Barru	Barru	3 rekening	3 rekening	53,400,000	60,000,000	6,600,000	DPUPR
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan kerja	Barru	Barru	3 jenis	3 jenis	9,790,000	9,790,000	-	DPUPR
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Barru	Barru	2 org	2 org	9,600,000	9,600,000	-	DPUPR

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah																						
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)																							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)																							
1					2				3				4				5				6		7		8		9		10		11		12		13	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barru	Barru	5 jenis	5 jenis	361,871,039	361,871,039	-	DPUPR																				
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional danPembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional danPembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	Barru	Barru	17 unit	17 unit	29,783,570	29,783,570	-	DPUPR																				
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Barru	Barru	16 unit	16 unit	71,600,000	71,600,000	-	DPUPR																				
				Jumlah Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat		Jumlah Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat		Barru	Barru	6 unit	6 unit	150,000,000	150,000,000	-	DPUPR																					
				Jumlah Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat		Jumlah Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat		Barru	Barru	4 unit	4 unit	100,000,000	100,000,000	-	DPUPR																					
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Barru	Barru	10 unit	10 unit	5,000,000	5,000,000	-	DPUPR																				
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Barru	Barru	1 unit	1 unit	987,469	987,469	-	DPUPR																				
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Barru	Barru	7 unit	7 unit	4,500,000	4,500,000	-	DPUPR																				
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Barru	Barru			51,509,856,388	3,350,000,000	(48,159,856,388)	DPUPR																				
				Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang		Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang																														
				Peresentase Wilayah, Usaha, dan Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah yang berorientasi Kepada Aspek Konservasi		Peresentase Wilayah, Usaha, dan Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah yang berorientasi Kepada Aspek Konservasi																														
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan SDA dan Pengaman Pantai Yang Terbangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota		Barru	Barru						DPUPR																				
1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Penyusunan dokumen pemetaan/database sumber-sumber air tanah	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Penyusunan dokumen pemetaan/database sumber-sumber air tanah	Barru	Barru	1 dok	1 dok	30,000,000		(30,000,000)	DPUPR																				
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai		Pembangunan Tanggul Sungai		Barru	Barru						DPUPR																				
						Pembangunan tanggul sungai Dalappokkoe		Pembangunan tanggul sungai Dalappokkoe			200	200	600,000,000.00		(600,000,000)	DPUPR																				
						Tanggul Sungai		Tanggul Sungai			100	100	430,400,000.00		(430,400,000)	DPUPR																				
						Pembangunan Tanggul sungai Bojo Baru		Pembangunan Tanggul sungai Bojo Baru			120 m	120 m	380,000,000.00		(380,000,000)	DPUPR																				
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Barru	Barru						DPUPR																				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah												
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)															
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)														
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
							Pembangunan Bronjong Sungai Ajakkang		Pembangunan Bronjong Sungai Ajakkang				350	350			1,506,400,000.00								(1,506,400,000)			DPUPR
							Pembangunan Bronjong Sungai Balusu Dan Attang Salo		Pembangunan Bronjong Sungai Balusu Dan Attang Salo				300	300			1,291,200,000.00								(1,291,200,000)			DPUPR
							Lanjutan Pembuatan Tallud/Bronjong Sungai Ballewe - Labuaseppang		Lanjutan Pembuatan Tallud/Bronjong Sungai Ballewe - Labuaseppang				600	600			1,800,000,000.00								(1,800,000,000)			DPUPR
							Pengadaan brojong sungai pasar baru		Pengadaan brojong sungai pasar baru				150	150			645,600,000.00								(645,600,000)			DPUPR
							pengadaan bronjong sungai Cempae		pengadaan bronjong sungai Cempae				100	100			430,400,000.00								(430,400,000)			DPUPR
							Pembangunan Bronjong Sungai Bojo Di Banrongnge		Pembangunan Bronjong Sungai Bojo Di Banrongnge				100	100			430,400,000.00								(430,400,000)			DPUPR
							Pembangunan Berongjong depan mesjid Gellenge		Pembangunan Berongjong depan mesjid Gellenge				3 x 40	3 x 40			172,160,000.00								(172,160,000)			DPUPR
							Pemasangan Bronjong (Penahan Abrasi) di Sungai Kiru-kiru		Pemasangan Bronjong (Penahan Abrasi) di Sungai Kiru-kiru				200	200			860,800,000.00								(860,800,000)			DPUPR
							Bronjong Pinggir Sungai di Ralla		Bronjong Pinggir Sungai di Ralla				50	50			215,200,000.00								(215,200,000)			DPUPR
							Bronjong Sungai Ale Kale Desa Pujananting		Bronjong Sungai Ale Kale Desa Pujananting				150	150			645,600,000.00								(645,600,000)			DPUPR
							Bronjong sungai Leppee		Bronjong sungai Leppee				150	150			645,600,000.00								(645,600,000)			DPUPR
							Pembangunan Beronjong Sungai lanrae Desa Nepo		Pembangunan Beronjong Sungai lanrae Desa Nepo				200	200			860,800,000.00								(860,800,000)			DPUPR
							Pembangunan Beronjong Sungai Patalassang		Pembangunan Beronjong Sungai Patalassang				140	140			602,560,000.00								(602,560,000)			DPUPR
							Pemasangan Bronjong (Sungai Kiru-kiru)		Pemasangan Bronjong (Sungai Kiru-kiru)				78 m	78 m			330,000,000								(330,000,000)			DPUPR
							Pembangunan Bronjong Sungai Lisu		Pembangunan Bronjong Sungai Lisu								2,150,000,000											DPUPR
							Pembangunan Bronjong Sungai Balusu Desa Balusu		Pembangunan Bronjong Sungai Balusu Desa Balusu				176 m	176 m														DPUPR
							Pembangunan Tanggul Sungai Bojo Baru Kelurahan Bojo Baru		Pembangunan Tanggul Sungai Bojo Baru Kelurahan Bojo Baru				45 m	45 m														DPUPR
							Pembangunan Bronjong Sungai Barang		Pembangunan Bronjong Sungai Barang				100 m	100 m					350,000,000						350,000,000			DPUPR
							Pembangunan Bronjong Sungai Popongnge'		Pembangunan Bronjong Sungai Popongnge'				150 m	150 m					500,000,000						500,000,000			DPUPR
							Pembangunan Bronjong Ralla Kel. Lompo Riaja		Pembangunan Bronjong Ralla Kel. Lompo Riaja				200 m	200 m					200,000,000						200,000,000			DPUPR
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan Pintu Air (1 Daerah Irigasi)	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan Pintu Air (1 Daerah Irigasi)				1 unit	1 unit				50,000,000.00								(50,000,000)			DPUPR
1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Pembangunan Saluran pembuang Jl. Melati Kel. S.Binangae	Pembangunan Kanal Banjir	Pembangunan Saluran pembuang Jl. Melati Kel. S.Binangae				400 m	400 m				500,000,000.00								(500,000,000)			DPUPR
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Output : Terbangunnya prasarana pengaman pantai Lainnya	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Output : Terbangunnya prasarana pengaman pantai Lainnya				100 km	100 km				18,867,808,409.85			45,000,000,000				26,132,191,590			DPUPR	
							Pembangunan Tanggul Pantai Wirtingasi		Pembangunan Tanggul Pantai Wirtingasi				200	200			1,178,000,000.00			1,178,000,000.00				-			DPUPR	
							Pembangunan Tanggul penahan ombak dusun siddo		Pembangunan Tanggul penahan ombak dusun siddo				250	250			1,472,500,000.00			1,472,500,000.00				-			DPUPR	
							Pembangunan tanggul dusun ujunge-awarange		Pembangunan tanggul dusun ujunge-awarange				300	300			1,767,000,000.00			1,767,000,000.00				-			DPUPR	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Lanjutan Pembangunan Tanggul Dusun Ujunge - Dusun Palie desa madello		Lanjutan Pembangunan Tanggul Dusun Ujunge - Dusun Palie desa madello			300	300	1,767,000,000.00	1,767,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Tanggul Lingkungan Pudee Takkalasi		Pembangunan Tanggul Lingkungan Pudee Takkalasi			150	150	883,500,000.00	883,500,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan tanggul pantai dusun labattoa-bojo		Pembangunan tanggul pantai dusun labattoa-bojo			250	250	1,472,500,000.00	1,472,500,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Tanggul desa kupa		Pembangunan Tanggul desa kupa			400	400	2,356,000,000.00	2,356,000,000.00	-	DPUPR
						Tanggul penahan ombak joncongan-mallawa-tellulellange-pobbo		Tanggul penahan ombak joncongan-mallawa-tellulellange-pobbo			300	300	1,767,000,000.00	1,767,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Tanggul palanro selatan-utara		Pembangunan Tanggul palanro selatan-utara			150	150	883,500,000.00	883,500,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan / Rehab Tanggul Penahan Ombak dusun ujung-dusung		Pembangunan / Rehab Tanggul Penahan Ombak dusun ujung-dusung			200	200	1,178,000,000.00	1,178,000,000.00	-	DPUPR
						Grip Penahan Ombak butung-lasitae		Grip Penahan Ombak butung-lasitae			250	250	1,472,500,000.00	1,472,500,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak mate'ne tanete		Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak mate'ne tanete			250	250	1,470,308,409.85	1,470,308,409.85	-	DPUPR
						Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak butung (Pancana-Lasitae)		Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak butung (Pancana-Lasitae)			200 m	200 m	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Tanggul Saluran Ke luar arah laut Lapakaka		Pembangunan Tanggul Saluran Ke luar arah laut Lapakaka			30	30	150,000,000.00	150,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Pengaman Pantai Sumpang BinangaE		Pembangunan Pengaman Pantai Sumpang BinangaE					-	26,132,191,590	26,132,191,590	DPUPR
1	03	02	2.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya									DPUPR
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Output : Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Output : Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai			6000 km	6000 km				DPUPR
						Rehab tanggul sungai Lawallu		Rehab tanggul sungai Lawallu			150	150	645,600,000.00	645,600,000.00	-	DPUPR
1	03	02	2.01	37	Peningkatan Kanal Banjir	Output: Terbangunnya sal. Pengendali banjir dan saluran pembuang	Peningkatan Kanal Banjir	Output: Terbangunnya sal. Pengendali banjir dan saluran pembuang			12 Km	12 Km				DPUPR
						Pembangunan saluran Pembuangan di Lompoe		Pembangunan saluran Pembuangan di Lompoe			500	500	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Cinaga		Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Cinaga			523	523	784,500,000.00	784,500,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Saluran Pembuang		Pembangunan Saluran Pembuang			500	500	750,000,000.00	750,000,000.00	-	DPUPR
						Peningkatan Saluran Pengendali Banjir Pucue - Temmalate (Pemasangan Pondasi Sungai Temmalate)		Peningkatan Saluran Pengendali Banjir Pucue - Temmalate (Pemasangan Pondasi Sungai Temmalate)			500	500	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Saluran Jalan Poros Cilellang - Maralleng		Pembangunan Saluran Jalan Poros Cilellang - Maralleng			700	700	700,000,000.00	700,000,000.00	-	DPUPR
						Pembuatan Saluran Pembuangan Air mate'ne tanete		Pembuatan Saluran Pembuangan Air mate'ne tanete			500	500	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
					Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							300	300	300,000,000.00	300,000,000.00	-	DPUPR
							350 m x 2 m	350 m x 2 m	350,000,000.00	350,000,000.00	-	DPUPR
							205 m	205 m	205,000,000.00	205,000,000.00	-	DPUPR
							400 m	400 m	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR
							250 m	250 m	250,000,000.00	250,000,000.00	-	DPUPR
							600 m	600 m	600,000,000.00	600,000,000.00	-	DPUPR
							1 km	1 km	150,000,000.00	150,000,000.00	-	DPUPR
							2 km	2 km	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
							2 km	2 km	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
							200 m	200 m	150,000,000.00	150,000,000.00	-	DPUPR
							600 m	600 m	150,000,000.00	150,000,000.00	-	DPUPR
							2 km	2 km	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
							200 m	200 m	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
							200 m	200 m	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
							2342 m	2342 m	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR
							1 km	1 km	800,000,000	800,000,000	-	DPUPR
							500 m	500 m	500,000,000	500,000,000	-	DPUPR
							250 m	250 m	500,000,000	500,000,000	-	DPUPR
							500 m	500 m	500,000,000	500,000,000	-	DPUPR
1	03	02	2.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Rehabilitasi Kanal Banjir						DPUPR
1	03	02	2.01	46	Normalisasi / Restorasi Sungai	Normalisasi / Restorasi Sungai						DPUPR
					Pengerukan Sungai Dusun Kupa	Pengerukan Sungai Dusun Kupa	500	500	225,000,000	225,000,000	-	DPUPR
					Pengerukan Sungai Watu	watu,Desa Libureng, Kec Tanete Riaja	150 m	150 m	200,000,000	200,000,000	-	DPUPR
					Pengerukan dan Pemasangan Pondasi Sungai	Pengerukan dan Pemasangan Pondasi Sungai	1500	1500	2,550,000,000	2,550,000,000	-	DPUPR
					Normalisasi dan Pembangunan Tanggul/Jetty Muara Sungai Lajari	Normalisasi dan Pembangunan Tanggul/Jetty Muara Sungai Lajari	700	700				DPUPR

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						4,188,017,750	4,188,017,750	-	DPUPR
1	03	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir		Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir						1,114,827,978.00	208,429,478	(906,398,500)	DPUPR
						Normalisasi saluran pembuang jampue-pasar sentral		Normalisasi saluran pembuang jampue-pasar sentral			1300	1300	390,000,000.00	390,000,000.00	-	DPUPR
						Normalisasi Drainase jl.iskandar unru		Normalisasi Drainase jl.iskandar unru			800 m	800 m	300,000,000.00	300,000,000.00	-	DPUPR
						Rehabilitasi Saluran Pembuang Sepee Kelurahan Sepee Kec. Barru		Rehabilitasi Saluran Pembuang Sepee Kelurahan Sepee Kec. Barru			182 m3	182 m3	194,827,978.00	194,827,978.00	-	DPUPR
						Rehab saluran pembuan kesungai lingkunga ta kajuara landore kel sepee		Rehab saluran pembuan kesungai lingkunga ta kajuara landore kel sepee			200 m	200 m	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan OP Partisipatif GP3A/P3A	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan OP Partisipatif GP3A/P3A			1 paket	1 paket	30,000,000	7,050,000	(22,950,000)	DPUPR
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Yang Terbangun	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Yang Terbangun								DPUPR
1	03	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi		Peningkatan Bendung Irigasi									DPUPR
1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi		Pembangunan Bendung Irigasi									DPUPR
						Pembangunan Bendung/Irigasi Dusun Tokkene		Pembangunan Bendung/Irigasi Dusun Tokkene			1 unit bendung	1 unit bendung	150,000,000.00		(150,000,000)	DPUPR
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Output : Terbangunnya Jaringan Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Output : Terbangunnya Jaringan Irigasi			5 unit bendung + 6,8 km saluran	5 unit bendung + 6,8 km saluran				DPUPR
						Pembangunan Jaringan Irigasi Paddupangge (Maddo)		Pembangunan Jaringan Irigasi Paddupangge (Maddo)			1 unit bendung + 1 km	1 unit bendung + 1 km	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Jaringan Irigasi Batu Makkedae Dusun Allejiang		Pembangunan Jaringan Irigasi Batu Makkedae Dusun Allejiang			1 unit bendung + 0,15 km pipa	1 unit bendung + 0,15 km pipa	190,000,000.00	190,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Lakawerang Desa Bacu-Bacu		Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Lakawerang Desa Bacu-Bacu			1 unit bendung + 0,8 km	1 unit bendung + 0,8 km	300,000,000.00	300,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Irigasi Perpipaan Salinrae Lipukasi		Pembangunan Irigasi Perpipaan Salinrae Lipukasi			1 km	1 km	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Saluran Irigasi Bampessu, Cempa		Pembangunan Saluran Irigasi Bampessu, Cempa					100,000,000.00	100,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Saluran Irigasi Parimunrie Watu		Pembangunan Saluran Irigasi Parimunrie Watu					200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Pembangunan Saluran Irigasi Dawalian, Watu, Libureng		Pembangunan Saluran Irigasi Dawalian, Watu, Libureng					200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
							Pembuatan saluran irigasi Dusun Jempulu		Pembuatan saluran irigasi Dusun Jempulu					200,000,000.00	200,000,000		
1	03	02	2.02	08		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Barang Desa Pujananting		Peningkatan Saluran Irigasi Barang Desa Pujananting			0,7 km	0,7 km	300,000,000.00		(300,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Mattoangin Kel. Kiru-Kiru		Peningkatan Saluran Irigasi Mattoangin Kel. Kiru-Kiru			0,3 km	0,3 km	160,000,000.00		(160,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Jaringan Irigasi Gellengnge		Peningkatan Jaringan Irigasi Gellengnge			1 unit bendung + 0,2 km	1 unit bendung + 0,2 km	200,000,000.00		(200,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Sepee		Peningkatan Saluran Irigasi Sepee			0,3 km	0,3 km	150,000,000.00		(150,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Salesso Desa Balusu		Peningkatan Saluran Irigasi Salesso Desa Balusu			0,15 km	0,15 km	100,000,000.00		(100,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Iyajang Kallereng dan Tanah Maridie		Peningkatan Saluran Irigasi Iyajang Kallereng dan Tanah Maridie			0,3 km	0,3 km	160,000,000.00		(160,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Gempungnge		Peningkatan Saluran Irigasi Gempungnge			0,2 km	0,2 km	120,000,000.00		(120,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Jampue Dusun Batupute		Peningkatan Saluran Irigasi Jampue Dusun Batupute			0,25 km	0,25 km	150,000,000.00		(150,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Kampung Baru Dusun Mattirodeceng		Peningkatan Saluran Irigasi Kampung Baru Dusun Mattirodeceng			0,7 km	0,7 km	300,000,000.00		(300,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Cempa Daerah Irigasi Jalanru		Peningkatan Saluran Irigasi Cempa Daerah Irigasi Jalanru			0,2 km	0,2 km	100,000,000.00		(100,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Watu		Peningkatan Saluran Irigasi Watu			0,35 km	0,35 km	150,000,000.00		(150,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Saluran Irigasi Dawalian		Peningkatan Saluran Irigasi Dawalian			0,2 km	0,2 km	100,000,000.00		(100,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Bendung Labbase Desa Galung		Peningkatan Bendung Labbase Desa Galung			1 unit	1 unit	50,000,000.00		(50,000,000)	DPUPR
							Peningkatan Jaringan Irigasi Matajang		Peningkatan Jaringan Irigasi Matajang			3 km	3 km				DPUPR
							Peningkatan Jaringan Irigasi Maddo		Peningkatan Jaringan Irigasi Maddo			284 m	284 m				DPUPR
							Peningkatan Jaringan Irigasi Manuba (Bendung)		Peningkatan Jaringan Irigasi Manuba (Bendung)			1 Buah	1 Buah		200,000,000	200,000,000	DPUPR
1	03	02	2.02	14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Irigasi			10 unit bendung + 9,5 km saluran	10 unit bendung + 9,5 km saluran	3,010,000,000.00	7,376,852,300	4,366,852,300	DPUPR
							1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Soreang D.I Batubessi		1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Soreang D.I Batubessi			0,6 km	0,6 km	300,000,000.00	300,000,000.00	-	DPUPR
							2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lempang		2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lempang			0,55 km	0,55 km	250,000,000.00	250,000,000.00	-	DPUPR
							3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paterengnge		3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paterengnge			1 unit bendung + 0,5 km	1 unit bendung + 0,5 km	300,000,000.00	300,000,000.00	-	DPUPR
							4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pejiengnge		4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pejiengnge			1 unit bendung + 0,4 km	1 unit bendung + 0,4 km	250,000,000.00	250,000,000.00	-	DPUPR
							5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Luppereng Kajoe		5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Luppereng Kajoe			1 unit bendung + 0,4 km	1 unit bendung + 0,4 km	250,000,000.00	250,000,000.00	-	DPUPR
							6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ere		6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ere			1 unit bendung + 0,8 km	1 unit bendung + 0,8 km	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DPUPR
							7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pattalassang		7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pattalassang			1 unit bendung +1,8 km	1 unit bendung +1,8 km	300,000,000.00	300,000,000.00	-	DPUPR

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah																																																
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)																																																			
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)																																																
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13				
							8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Salopuru		8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Salopuru				1 unit bendung + 0,8 km	1 unit bendung + 0,8 km		200,000,000.00	200,000,000.00		-		DPUPR																																											
							9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mare-Mare		9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mare-Mare				0,35 km	0,35 km		150,000,000.00	150,000,000.00		-		DPUPR																																											
							10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanggasoe		10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanggasoe				1 unit bendung + 2 km	1 unit bendung + 2 km		140,000,000.00	140,000,000.00		-		DPUPR																																											
							11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bontorea		11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bontorea				1 unit bendung + 0,15 km	1 unit bendung + 0,15 km		100,000,000.00	100,000,000.00		-		DPUPR																																											
							12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Passengereng		12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Passengereng				1 unit bendung + 0,2 km	1 unit bendung + 0,2 km		200,000,000.00	200,000,000.00		-		DPUPR																																											
							13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bulu Sipitto		13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bulu Sipitto				1 unit bendung + 0,2 km	1 unit bendung + 0,2 km		200,000,000.00	200,000,000.00		-		DPUPR																																											
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Polewali, Kiru-kiru		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Polewali, Kiru-kiru				200 m	200 m		170,000,000	170,000,000		-		DPUPR																																											
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	13. OP Pada 8 Daerah Irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	13. OP Pada 8 Daerah Irigasi				1 paket	1 paket		150,000,000	624,572,900	474,572,900		DPUPR																																													
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Air Minum				100%	100%		-	1,393,649,500	1,393,649,500		DPUPR																																													
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Air Minum				100%	100%							DPUPR																																												
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Dokumen RISPAM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				1 Dokumen				652,600,000	652,600,000		DPUPR																																														
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air minum	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				1092 RT				741,049,500	741,049,500		DPUPR																																														
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Air Limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LI MBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Air Limbah				100%	100%		-	1,745,523,500	1,745,523,500		DPUPR																																													
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Air Limbah				100%	100.00%							DPUPR																																												
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Penyediaan Sistem Pengelolaan air limbah	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Penyediaan Sistem Pengelolaan air limbah				1050 RT	1050 RT		1,645,115,000	1,645,115,000		DPUPR																																														
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas Sarana dan Prasarana IPLT		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas Sarana dan Prasarana IPLT								100,408,500	100,408,500		DPUPR																																														
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Gedung Negara yang terbangun dan terpelihara	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Gedung Negara yang terbangun dan terpelihara							48,299,495,092	48,299,495,092	-	DPUPR																																														

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung									DPUPR
1	03	08	2.01	02	Perencanaaa, Pembangunan,Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaaa, Pembangunan,Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						48,299,495,092	556,919,495,092	508,620,000,000	DPUPR
						Pembangunan Balai Latihan Kerja Kab. Barru		Pembangunan Balai Latihan Kerja Kab. Barru			1 unit	1 unit	1,599,495,092	1,599,495,092	-	DPUPR
						pembangunan gedung kejaksaan		pembangunan gedung kejaksaan			1 unit	1 unit	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Tempat penampungan sementara (Rumah Singgah)		Pembangunan Tempat penampungan sementara (Rumah Singgah)			1 unit	1 unit	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR
						pembangunan gedung pengadilan		pembangunan gedung pengadilan			1 unit	1 unit	-	-		DPUPR
						Pembangunan Gedung Pendidikan Kerjasama dengan UNHAS (Kelas D4)		Pembangunan Gedung Pendidikan Kerjasama dengan UNHAS (Kelas D4)			1 unit	1 unit	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	-	DPUPR
						Pembangunan Kantor Polres Barru		Pembangunan Kantor Polres Barru					13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	-	DPUPR
						Rehabilitasi Kantor Camat Mallusetasi		Rehabilitasi Kantor Camat Mallusetasi			1 Unit	1 Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR
						Rehabilitasi Kantor Camat Tanete Riaja		Rehabilitasi Kantor Camat Tanete Riaja			1 Unit	1 Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR
						Rehabilitasi Kantor Camat Tanete Rilau		Rehabilitasi Kantor Camat Tanete Rilau			1 unit	1 unit	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR
						Rehabilitasi Pasar Ajakkang Kec. S. Riaja		Rehabilitasi Pasar Ajakkang Kec. S. Riaja			1 unit	1 unit	500,000,000.00	500,000,000.00	-	DPUPR
						Perluasan Ruamg Data Kantor Bupati		Perluasan Ruamg Data Kantor Bupati			1 Unit	1 Unit			-	DPUPR
						Pembangunan Tempat Parkir Kantor DPRD		Pembangunan Tempat Parkir Kantor DPRD			1 Unit	1 Unit		620,000,000	620,000,000	DPUPR
						Interior Lantai 5 Gedung Tower Kantor Bupati		Interior Lantai 5 Gedung Tower Kantor Bupati			1 Unit	1 Unit		3,500,000,000	3,500,000,000	DPUPR
						Rehab Berat Kantor Bupati Barru		Rehab Berat Kantor Bupati Barru			1 Unit	1 Unit		2,500,000,000	2,500,000,000	DPUPR
						Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bupati		Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bupati			1 Unit	1 Unit		250,000,000	250,000,000	DPUPR
						Rehab Pintu Gerbang Pangkep Barru		Rehab Pintu Gerbang Pangkep Barru			1 Unit	1 Unit		200,000,000	200,000,000	DPUPR
						Pembangunan Pintu Gerbang Batas Kota Soppeng - Barru		Pembangunan Pintu Gerbang Batas Kota Soppeng - Barru			1 Unit	1 Unit		200,000,000	200,000,000	DPUPR
						Pembuatan Tempat Parkir Di Sumpang BinangaE		Pembuatan Tempat Parkir Di Sumpang BinangaE			1 Unit	1 Unit		200,000,000	200,000,000	DPUPR
						Rehabilitasi Gedung BLK + Jalan dan Saluran BLK		Rehabilitasi Gedung BLK + Jalan dan Saluran BLK			1 Unit	1 Unit		500,000,000,000	500,000,000,000	DPUPR
						Lounge Kantor Bupati Barru		Lounge Kantor Bupati Barru			1 Unit	1 Unit		750,000,000	750,000,000	DPUPR
						Taman Tanggul Sumpang		Taman Tanggul Sumpang			1 Unit	1 Unit		200,000,000	200,000,000	DPUPR
						Pembersihan Puing Tanggul Sungai		Pembersihan Puing Tanggul Sungai			1 Unit	1 Unit		200,000,000	200,000,000	DPUPR

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah	
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
									Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik					71,129,798,135	17,828,014,607	(53,301,783,528)	DPUPR	
						Persentasae Jalan dan jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat		Persentasae Jalan dan jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat									
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										DPUPR
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan										DPUPR
						Rencana panjang jalan yang akan dibangun		Rencana panjang jalan yang akan dibangun			17 km	17 km	300,000,000.00	300,000,000.00	-		DPUPR
						Jumlah jembatan yang direncanakan		Jumlah jembatan yang direncanakan			1 unit	1 unit	-	-	-		DPUPR
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang survey kontur jalan dan jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang survey kontur jalan dan jembatan			17 km	17 km	50,000,000.00	306,746,000	256,746,000		DPUPR
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan		Pembangunan Jalan						67,710,591,528.00	67,710,591,528.00	-		DPUPR
						Peningkatan Jalan Balusu Padummpu		Peningkatan Jalan Balusu Padummpu			6 km	6 km					DPUPR
						Peningkatan Jalan Barang - Kalompie		Peningkatan Jalan Barang - Kalompie			1,65 km	1,65 km					DPUPR
						Saluran air/Perbaikan Jalan		Saluran air/Perbaikan Jalan			1 km	1 km					DPUPR
						Peningkatan Jalan dan Drainase Lappabila-Bacu bacu		Peningkatan Jalan dan Drainase Lappabila-Bacu bacu			3 km	3 km					DPUPR
						Peningkatan Jalan Jembulu- Mattirodeceng (ke SMP 2 Pujananting)		Peningkatan Jalan Jembulu- Mattirodeceng (ke SMP 2 Pujananting)			2 km	2 km					DPUPR
						Peningkatan Jalan Mattorowalie - Bonto Payung		Peningkatan Jalan Mattorowalie - Bonto Payung			1 km	1 km					DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Jempulu - SMPN 2 Pujananting		Peningkatan Jalan Ruas Jempulu - SMPN 2 Pujananting			2 km	2 km					DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Jempulu-Dengeng Dengeng		Peningkatan Jalan Ruas Jempulu-Dengeng Dengeng			1 km	1 km					DPUPR
						Peningkatan jalan Lawallu- Tanrabalana		Peningkatan jalan Lawallu- Tanrabalana			1,2 km	1,2 km					DPUPR
						Peningkatan jalan Bottolai - Salomoni		Peningkatan jalan Bottolai - Salomoni			3,2 km	3,2 km					DPUPR
						Peningkatan jalan Cilellang Batumarajae (bawah trowongan)		Peningkatan jalan Cilellang Batumarajae (bawah trowongan)			27 m	27 m					DPUPR
						Peningkatan jalan Panincong Pacciro Waesai		Peningkatan jalan Panincong Pacciro Waesai			1,7 km	1,7 km					DPUPR
						Peningkatan jalan Ralla- Jalanru-Waesai		Peningkatan jalan Ralla- Jalanru-Waesai			1,85 km	1,85 km					DPUPR
						Peningkatan jalan dusun Barantang Desa Manuba		Peningkatan jalan dusun Barantang Desa Manuba			3 km	3 km					DPUPR
						Peningkatan jalan ralla Kel.Lompo Riaja		Peningkatan jalan ralla Kel.Lompo Riaja			3 km	3 km					DPUPR
						Peningkatan jalan Bujung Lita-- Bujung Palla		Peningkatan jalan Bujung Lita-- Bujung Palla			1 km	1 km					DPUPR

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Peningkatan Jalan Doi Doi - Gattareng (Punranga- Gattareng)		Peningkatan Jalan Doi Doi - Gattareng (Punranga- Gattareng)			2 km	2 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Birue - Ballewe (R.119)		Peningkatan Jalan Ruas Birue - Ballewe (R.119)			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Cilellang - Barantang (R.41)		Peningkatan Jalan Ruas Cilellang - Barantang (R.41)			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Kampung Baru - LasisiE Tompo		Peningkatan Jalan Ruas Kampung Baru - LasisiE Tompo			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Lajoanging - Lemo (R.109)		Peningkatan Jalan Ruas Lajoanging - Lemo (R.109)			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Watu - Daccipong/Celebes Canyon (R.85)		Peningkatan Jalan Ruas Watu - Daccipong/Celebes Canyon (R.85)			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Pattanrongge - Topporeng (R.79)		Peningkatan Jalan Ruas Pattanrongge - Topporeng (R.79)			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Limpo - Lappadare (R.112) (Tille)		Peningkatan Jalan Ruas Limpo - Lappadare (R.112) (Tille)			1 km	4 x 0,25 x 1000 m		2,300,000,000	2,300,000,000	DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Barru - Kamara/Batubessi (R.06)		Peningkatan Jalan Ruas Barru - Kamara/Batubessi (R.06)			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Buludua - Ampiri / Lappalaona - Bacubacu (R.32)		Peningkatan Jalan Ruas Buludua - Ampiri / Lappalaona - Bacubacu (R.32)			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Takkalasi - Labuangnge (R.133)		Peningkatan Jalan Ruas Takkalasi - Labuangnge (R.133)			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Bacu Bacu - Tapong/Batas Kab. Bone		Peningkatan Jalan Ruas Bacu Bacu - Tapong/Batas Kab. Bone			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Doi Doi - Gattareng (R.21) (Punranga-Gattareng)		Peningkatan Jalan Ruas Doi Doi - Gattareng (R.21) (Punranga-Gattareng)			1 km	1 km				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Maruala- BatumallopiE (R.129)		Peningkatan Jalan Ruas Maruala- BatumallopiE (R.129)			1 km	1 km				DPUPR
						Pemeliharaan Rabat Beton Paninie Dusun Kalompi Desa Galung		Pemeliharaan Rabat Beton Paninie Dusun Kalompi Desa Galung			1 km	1 km				DPUPR
						Perbaikan Jalan/Rabat Beton Dusun Ujung Desa Cilellang		Perbaikan Jalan/Rabat Beton Dusun Ujung Desa Cilellang			1 km	1 km				DPUPR
						Jalan Beton Allupange - Wiringtasi		Jalan Beton Allupange - Wiringtasi			1 km	1 km				DPUPR
						Jalan beton poros bujung lita ke bujung palla (SMK 2)		Jalan beton poros bujung lita ke bujung palla (SMK 2)			1 km	1 km				DPUPR
						Perintisan jalan baera		Perintisan jalan baera			150 m	150 m				DPUPR
						Perbaikan jalan kota kec.barru (Jalan Belakang SD Inpres Coppo)		Perbaikan jalan kota kec.barru (Jalan Belakang SD Inpres Coppo)			100 m	100 m				DPUPR
						Peningkatan Jalan Maddo - Sikapa (R.72) - DAK Kec. Tanete Riaja		Peningkatan Jalan Maddo - Sikapa (R.72) - DAK Kec. Tanete Riaja			1 Paket	1 Paket				DPUPR

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Peningkatan Jalan Takkalasi Tompo (R.09) - DAK Kec. Balusu		Peningkatan Jalan Takkalasi Tompo (R.09) - DAK Kec. Balusu			1 Paket	1 Paket				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Lappabila - Bujung Awo (R.115)		Peningkatan Jalan Ruas Lappabila - Bujung Awo (R.115)			1 km	1 km		3,000,000,000	3,000,000,000	DPUPR
						Peningkatan Jalan Ruas Baenangnge-Lawo		Peningkatan Jalan Ruas Baenangnge-Lawo								DPUPR
						Drainase Jalan Barru - Lakonrae		Drainase Jalan Barru - Lakonrae			378 m	378 m				DPUPR
						Drainase Lingkungan Ralla Kota Kec. Tanete riaja		Drainase Lingkungan Ralla Kota Kec. Tanete riaja			283 m	283 m				DPUPR
						Normalisasi Drainase Jalan Depa Rujab Wakil Ketua I DPRD Ruas Kota Kec. Barru		Normalisasi Drainase Jalan Depa Rujab Wakil Ketua I DPRD Ruas Kota Kec. Barru			189 m	189 m				DPUPR
						Pembangunan Drainase di sisi kiri/kanan Jalan Ruas Kota Kec. Barru		Pembangunan Drainase di sisi kiri/kanan Jalan Ruas Kota Kec. Barru			378 m	378 m				DPUPR
						Pembangunan Drainase Jampue Kota Kec. Barru		Pembangunan Drainase Jampue Kota Kec. Barru			378 m	378 m				DPUPR
						Pembangunan drainase Kota Kec. Mallusetasi		Pembangunan drainase Kota Kec. Mallusetasi			283 m	283 m				DPUPR
						Pembuatan Saluran Drainase Takkalasi - Tompo		Pembuatan Saluran Drainase Takkalasi - Tompo			283 m	283 m				DPUPR
						Peningkatan Drainase Jalan Lingkungan Palanro - Lanrae		Peningkatan Drainase Jalan Lingkungan Palanro - Lanrae			283 m	283 m				DPUPR
						Peningkatan Jalan Cempaga-Bulo - bulo Kec. Pujananting		Peningkatan Jalan Cempaga-Bulo - bulo Kec. Pujananting			521 m	521 m				DPUPR
						Peningkatan Jalan Coppeng-coppeng-Butung (Samping SMK 2) Kec. Tanete Rilau		Peningkatan Jalan Coppeng-coppeng-Butung (Samping SMK 2) Kec. Tanete Rilau			868 m	868 m				DPUPR
						Peningkatan Jalan doi-doi - Gattareng (Mattirodeceng) Kec. Pujananting		Peningkatan Jalan doi-doi - Gattareng (Mattirodeceng) Kec. Pujananting			868 m	868 m				DPUPR
						Peningkatan Jalan Kampung Baru Ajjakkang (WiraE) Kec. Soppeng Riaja		Peningkatan Jalan Kampung Baru Ajjakkang (WiraE) Kec. Soppeng Riaja			173 m	173 m				DPUPR
						Peningkatan Jalan Kota Kec. Tanete Rilau (Allupange)		Peningkatan Jalan Kota Kec. Tanete Rilau (Allupange)			868 m	868 m				DPUPR
						Peningkatan Jalan Lalabata - Matajang Kec. Tanete Rilau		Peningkatan Jalan Lalabata Matajang Kec. Tanete Rilau			868 m	868 m				DPUPR
						Peningkatan Jalan Ujung Cilellang Kec. Mallusetasi		Peningkatan Jalan Ujung Cilellang Kec. Mallusetasi			260 m	260 m				DPUPR
						Peningkatan Jalan Kota Kec. Soppeng Riaja		Peningkatan Jalan Kota Kec. Soppeng Riaja			700 x 4	700 x 4		1,611,932,000	1,611,932,000	DPUPR
						Peningkatan Jalan Bojo Baru Kec. Mallusetasi		Peningkatan Jalan Bojo Baru Kec. Mallusetasi			4 x 0,2 x 130 m	4 x 0,2 x 130 m		300,000,000	300,000,000	DPUPR
						Peningkatan Jalan Liange Desa Bojo		Peningkatan Jalan Liange Desa Bojo			4 X 0,20 X 220 M	4 X 0,20 X 220 M		500,000,000	500,000,000	DPUPR
						Peningkatan Jalan Pertanian Tanete Riaja		Peningkatan Jalan Pertanian Tanete Riaja			4 X 0,20 X 220 M	4 X 0,20 X 220 M		500,000,000	500,000,000	DPUPR
						Peningkatan Jalan Bungi Tanete Rilau		Peningkatan Jalan Bungi Tanete Rilau			4 X 0,20 X 220 M	4 X 0,20 X 220 M		500,000,000	500,000,000	DPUPR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
					Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
					Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Peningkatan Jalan Salomoni		Peningkatan Jalan Salomoni			4 X 0,20 X 220 M	4 X 0,20 X 220 M		500,000,000	500,000,000	DPUPR		
		Peningkatan Jalan Pao-pao		Peningkatan Jalan Pao-pao			4 X 0,20 X 220 M	4 X 0,20 X 220 M		500,000,000	500,000,000	DPUPR		
		Peningkatan Jalan Ruas Mangkoso - Paccekke		Peningkatan Jalan Ruas Mangkoso - Paccekke			5 x 0,05 x 1800 m	5 x 0,05 x 1800 m		1,500,000,000	1,500,000,000	DPUPR		
		Peningatan Jalan Ruas Kota Kec Barro		Peningatan Jalan Ruas Kota Kec Barro			4 x 0,20 x 217 m	4 x 0,20 x 217 m		500,000,000	500,000,000	DPUPR		
		Peningkatan Jalan Maruala - Batu Mallopie (Jl Pertanian)		Peningkatan Jalan Maruala - Batu Mallopie (Jl Pertanian)			1700 m x 5 m x 0,25 m	1700 m x 5 m x 0,25 m		4,446,876,000	4,446,876,000	DPUPR		
		Peningkatan jalan setapak banronge		Peningkatan jalan setapak banronge			100m	100m		200,000,000	200,000,000	DPUPR		
		Peningkatan jalan ujung desa cilellang		Peningkatan jalan ujung desa cilellang			150 m	150 m		200,000,000	200,000,000	DPUPR		
		Peningkatan Jalan Desa MattirowaliE		Peningkatan Jalan Desa MattirowaliE			100m	100 m		200,000,000	200,000,000	DPUPR		
		Peningkatan jalan tanru tedong desa kamiri		Peningkatan jalan tanru tedong desa kamiri			100m	100 m		200,000,000	200,000,000	DPUPR		
		Peningkatan Jalan Dusun Cenne Desa Palakka		Peningkatan Jalan Dusun Cenne Desa Palakka			200 m	200 m		200,000,000	200,000,000	DPUPR		
		Pembangunan Jalan Rabat Beton desa siddo		Pembangunan Jalan Rabat Beton desa siddo			250 m	250 m		200,000,000	200,000,000	DPUPR		
		Pembangunan Jalan Rabat Beton Kelurahan Coppo		Pembangunan Jalan Rabat Beton Kelurahan Coppo			200 m	200 m		200,000,000	200,000,000	DPUPR		
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar						DPUPR		
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan						DPUPR		
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang pemeliharaan jalan	30 km	30 km	1,069.206,607.00	1,069,206,607	-	DPUPR
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan							DPUPR	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah akses jembatan yang terbangun	Pembangunan Jembatan	Jumlah akses jembatan yang terbangun	2 Unit	2 Unit	1,500,000,000.00	(1,500,000,000)	DPUPR	
					Pembangunan jembatan gantung Panasae-Jawae Kel.Lompo Riaja		Pembangunan jembatan gantung Panasae-Jawae Kel.Lompo Riaja	1 Unit	1 unit			DPUPR		
					Pembangunan jembatan gantung Balleanging Desa Lasitae		Pembangunan jembatan gantung Balleanging Desa Lasitae	1 Unit	1 unit			DPUPR		
					Pembuatan Jembatan Bottolai		Pembuatan Jembatan Bottolai	1 Unit	1 unit			DPUPR		
					Pembuatan Jembatan Pange Desa Palakka		Pembuatan Jembatan Pange Desa Palakka	1 Unit	1 unit			DPUPR		
					Pembangunan Jembatan Umpunge Kec. Tanete Riaja		Pembangunan Jembatan Umpunge Kec. Tanete Riaja	1 Unit	1 unit			DPUPR		
					Pembangunan Jembatan Bette - Pangi 1 & 2 Kec. Pujananting		Pembangunan Jembatan Bette - Pangi 1 & 2 Kec. Pujananting	1 Unit	1 unit			DPUPR		
					Pembangunan Jembatan Pange		Pembangunan Jembatan Pange	1 Unit	1 unit		600,000,000	600,000,000	DPUPR	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang pemeliharaan jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang pemeliharaan jembatan	30 km	30 km	500,000,000.00	500,000,000	-	DPUPR

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah												
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)															
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)													
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang					410,903,280	1,810,661,109	1,399,757,829													DPUPR
						Penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang		Penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang																				
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten/Kota																					DPUPR
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penyusunan KLHS, Materi Teknis dan PERDA RDTR Kec.Barru	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penyusunan KLHS, Materi Teknis dan PERDA RDTR Kec.Barru				1 dok	1 dok	338,465,061.00	1,714,611,000	1,376,145,939												DPUPR
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																					DPUPR
1	03	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pengawasan Pemanfaatan Ruang				7 kec.	7 kec.	36,219,110.00	59,831,000	23,611,890												DPUPR
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																					DPUPR
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang																					DPUPR
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah PERDA yang ditetapkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah PERDA yang ditetapkan				1 dok	1 dok	36,219,109.00	36,219,109	-												DPUPR
1	04				BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																							
1	04	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100%	100%	2,897,762,104	2,916,998,771	19,236,667													Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
						Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman																	
						Persentase Sumber Daya Aparatur yang telah mengikuti Diklat dan Pelatihan		Persentase Sumber Daya Aparatur yang telah mengikuti Diklat dan Pelatihan	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman																	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN			23 Orang	23 Orang																Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN							2,243,602,415	2,243,602,415	-											Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Kantor				4 Jenis	4 Jenis	16,500,000	33,929,600	17,429,600	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor				67 Unit	67 Unit	46,118,197	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman				
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga				25 Buah	25 Buah	5,902,174	5,079,900	(822,274)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				3 Jenis	3 Jenis	10,493,750	9,175,000	(1,318,750)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Provinsi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Provinsi				291 Kali	291 Kali	132,730,000	197,171,200	64,441,200	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Perjalanan Dinas Dalam Daerah			171 Kali	171 Kali	20,905,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
						Belanja Makanan dan Minuman		Belanja Makanan dan Minuman					12,433,500	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				1 Unit	1 Unit	28,000,000.00		(28,000,000)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK				43 Jenis	43 Jenis	23,146,568	58,706,750	35,560,182	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
						Honorarium Pegawai Tidak tetap		Honorarium Pegawai Tidak tetap			120 OB	120 OB	60,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
						Jumlah Makan dan Minum		Jumlah Makan dan Minum			1350 OH	1350 OH	6,300,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon, air dan listrik				6 Rek.	6 Rek.	84,180,000	65,589,906	(18,590,094)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor				24 OB	24 OB	9,600,000	9,600,000	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2			2 Unit	2 Unit	5,500,000	20,130,000	14,630,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
						Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			8 Unit	8 Unit	16,000,000			
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2			28 Unit	28 Unit	62,350,000	230,980,000	168,630,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			30 Unit	30 Unit	2,750,000	4,350,000	1,600,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
						Jumlah Perbaikan peralatan kerja		Jumlah Perbaikan peralatan kerja			10 Unit	10 Unit	2,587,500			
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor			2 Unit	2 Unit	79,000,000	-	(79,000,000)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal			8 Orang	8 Orang	29,663,000	38,684,000	9,021,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah bantuan perumahan layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah bantuan perumahan layak huni			15 Unit	15 Unit	510,000,000	92,920,000	417,080,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana				10 Unit		510,000,000	92,920,000	(417,080,000)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							-		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH					3,100,000,000	34,099,400	(3,065,900,600)	Dinas Perumahan dan Kawasan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								Pemukiman
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							34,099,400	34,099,400	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah MBR	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	235 Unit			235 Unit		3,100,000,000.00	-	(3,100,000,000)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah sarana infrastruktur permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah sarana infrastruktur permukiman					10,614,058,200	5,434,200,000	(5,179,858,200)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Panjang sarana drainase Perkotaan dan Perdesaan yang terbangun		Panjang sarana drainase Perkotaan dan Perdesaan yang terbangun										
				Persentase Pembangunan Penerangan Jalan		Persentase Pembangunan Penerangan Jalan										
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	panjang jalan lingkungan yang terbangun	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	panjang jalan lingkungan yang terbangun			2,5 Km	2,5 Km	2,544,729,100.00	5,934,200,000	(4,679,858,200)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
					Panjang Drainase dan Gorong-gorong terbangun		Panjang Drainase dan Gorong-gorong terbangun			2567 meter	2567 meter	2,609,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
					Jumlah Lampu penerangan jalan yang terpasang		Jumlah Lampu penerangan jalan yang terpasang			2500 titik	2500 titik	2,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
					panjang jalan lingkungan yang terbangun		panjang jalan lingkungan yang terbangun			2,5 Km	3,5 Km	2,544,729,100.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
					Jumlah taman yang terbangun		Jumlah taman yang terbangun			1 Taman	1 Taman	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
					Jumlah taman yang terpelihara		Jumlah taman yang terpelihara			4 Taman	4 Taman	255,600,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman		Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman			3 Unit	3 Unit	460,000,000			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	05				BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Barru	Barru	100%	100%	6,400,182,864	5,510,687,458	(889,495,406)	Satpol.PP/ Damkar	
					Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi			100%	100%					Satpol.PP/ Damkar
					Cakupan peningkatan disiplin aparatur		Cakupan peningkatan disiplin aparatur			100%	100%					Satpol.PP/ Damkar
					Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur			100%	100%					Satpol.PP/ Damkar
1	05	01	2.08		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	4,380,540,758	4,380,540,758	-	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	Barru	Barru	100%	100%				Satpol.PP/ Damkar
1	05	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim,tenaga honorer yang terbayar,alat tulis kantor,prangko, materai, dan benda pos lainnya ,Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran,Jasa Dokumentasi,Jasa Dekorasi,Cetakan Kantor,Penggandaan,Makan an Dan Minuman Harian Pegawai, Makan Minum HUT Satpol PP dan Damkar Tingkat Provinsi	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim,tenaga honorer yang terbayar,alat tulis kantor,prangko, materai, dan benda pos lainnya ,Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran,Jasa Dokumentasi,Jasa Dekorasi,Cetakan Kantor,Penggandaan,Makan an Dan Minuman Harian Pegawai, Makan Minum HUT Satpol PP dan Damkar Tingkat Provinsi	Barru	Barru	650 surat	650 surat	1,200,714,420	67,830,200	(1,132,884,220)	Satpol.PP/ Damkar
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telfon, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telfon, air dan listrik	Barru	Barru	3 Jenis		96,245,000	96,245,000	-	Satpol.PP/ Damkar
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Barru	Barru	6 Jenis	6 Jenis	23,950,000	23,950,000	-	Satpol.PP/ Damkar
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pembersih kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pembersih kantor	Barru	Barru	2 orang	2 orang	4,800,000	9,600,000	4,800,000	Satpol.PP/ Damkar
1	05	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Barru	Barru	100%	100%				Satpol.PP/ Damkar
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Barru	Barru	6 jenis	6 jenis	2,400,000	2,400,000	-	Satpol.PP/ Damkar
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Barru	Barru	2 Jenis	2 Jenis	33,300,000	33,300,000	-	Satpol.PP/ Damkar
						Jumlah Pembinaan Tim Korsik untuk pelaksanaan upacara / hari-hari besar nasional		Jumlah Pembinaan Tim Korsik untuk pelaksanaan upacara / hari-hari besar nasional			18 Kali	18 Kali	30,000,000	30,000,000	-	Satpol.PP/ Damkar

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Barru	Barru	5 jenis	5 jenis	3,470,000	3,470,000	-	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Barru	Barru	37 OK	37 OK	50,000,000	215,067,500	165,067,500	Satpol.PP/ Damkar				
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah			194 OK	194 OK	87,000,000	35,500,000	(51,500,000)	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	Barru	Barru	100%	100%				Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur	Barru	Barru	4 Jenis	4 Jenis	29,375,000	46,238,000	16,863,000	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Barru	Barru	9 Jenis	9 Jenis	58,547,940	36,740,000	(21,807,940)	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Barru	Barru	100%	100%				Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	Barru	Barru	20 unit	20 unit	30,000,000	30,270,000	270,000	Satpol.PP/ Damkar				
						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / opsional		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / opsional	Barru	Barru	22 unit	22 unit	118,067,046	215,250,000	97,182,954	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala Meubeler	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala Meubeler	Barru	Barru	3 jenis	3 jenis	9,686,000	10,656,000	970,000	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Barru	Barru	6 jenis	6 jenis	7,980,000	9,130,000	1,150,000	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Barru	Barru	2 jenis	2 jenis				Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Barru	Barru	100%	100%				Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PDH	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PDH	Barru	Barru	5 Jenis	5 Jenis	150,000,000	96,756,500	(53,243,500)	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian kompetensi japing	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian kompetensi japing	Barru	Barru	18 orang	18 orang	68,106,700	81,679,000	13,572,300	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Barru	Barru	2 orang	2 orang	16,000,000	86,064,500	70,064,500	Satpol.PP/ Damkar				
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Barru	Barru	100%	100%	337,246,000	1,072,434,600	735,188,600	Satpol.PP/ Damkar					
					Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3			100%	100%									
					Jumlah satuan keamanan lingkungan yang terdapat di masyarakat		Jumlah satuan keamanan lingkungan yang terdapat di masyarakat			100%	100%									
					Persentase Perda Yang Ditegakkan		Persentase Perda Yang Ditegakkan			100%	100%									
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Barru	Barru	100%	100%				Satpol.PP/ Damkar				

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umumPencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pengamanan Dan Patroli Yang Dilaksanakan dalam 3 x 24 Jam	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umumPencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pengamanan Dan Patroli Yang Dilaksanakan dalam 3 x 24 Jam	Barru	Barru	365 Kali	365 Kali	20,000,000	43,350,000	23,350,000	Satpol.PP/ Damkar
1		05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penegakan Hukum Larangan Merokok di tempat Tertentu	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penegakan Hukum Larangan Merokok di tempat Tertentu	Barru	Barru	6 Kawasan	6 Kawasan	15,246,000	17,050,000	1,804,000	Satpol.PP/ Damkar
1		05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Kententeraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Kententeraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	Barru	Barru	585 OK	585 OK	60,000,000	65,435,900	5,435,900	Satpol.PP/ Damkar
							Jumlah data poskamling		Jumlah data poskamling	Barru	Barru	380 pos	380 pos	12,000,000	8,000,000	(4,000,000)	Satpol.PP/ Damkar
1		05	02	2.01	07	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Razia/Penertiban dan Pencegahan Kejahatan	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Razia/Penertiban dan Pencegahan Kejahatan	Barru	Barru	30 kali	30 kali	24,000,000	19,112,000	(4,888,000)	Satpol.PP/ Damkar
1		05	02	2.01	08	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah petugas jaga	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah petugas jaga	Barru	Barru	100 OK	100 OK	50,000,000	792,015,000	742,015,000	Satpol.PP/ Damkar
1	05	02	2.02			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	PersentasePenyelesaian Pelanggaran K3	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	PersentasePenyelesaian Pelanggaran K3	Barru	Barru	100%	100%				Satpol.PP/ Damkar
1		05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai Rokok	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai Rokok	Barru	Barru	15 Sekolah(SLTP/SLT A)	15 Sekolah(SLTP/SLT A)	76,000,000	49,819,100	(26,180,900)	Satpol.PP/ Damkar
1		05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan Peredaran Cukai Rokok Ilegal	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan Peredaran Cukai Rokok Ilegal	Barru	Barru	7 kecamatan	7 kecamatan	65,000,000	34,217,600	(30,782,400)	Satpol.PP/ Damkar
1		05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penegakan Perda dan Penyuluhan dimasyarakat	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penegakan Perda dan Penyuluhan dimasyarakat	Barru	Barru	6 Kali	6 Kali	15,000,000	43,435,000	28,435,000	Satpol.PP/ Damkar
1	05					Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran	Barru	Barru	100%	100%	770,000,000	1,646,340,000	876,340,000	Satpol.PP/ Damkar

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	04	2.01		Pencegahan Pengendalian,Pemadaman,penyelamatan,dan Penanggulangan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan Pengendalian,Pemadaman,penyelamatan,dan Penanggulangan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran			100%	100%				Satpol.PP/ Damkar
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah petugas damkar bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah petugas damkar bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas	Barru	Barru	150 OK	150 OK	100,000,000	1,462,200,000	1,362,200,000	Satpol.PP/ Damkar
1	05	04	2.01	06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Barru	Barru	1 unit	1 unit	570,000,000	115,595,200	(454,404,800)	Satpol.PP/ Damkar
1	05	04	2.01	07	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah aparatur damkar yang mengikuti pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah aparatur damkar yang mengikuti pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Barru	Barru	70 orang	70 orang	40,000,000	32,083,350	(7,916,650)	Satpol.PP/ Damkar
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan,antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan,penanggulangan,penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah naskah kerjasama dengan daerah tetangga dalam penanganan bahaya kebakaran	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan,antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan,penanggulangan,penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah naskah kerjasama dengan daerah tetangga dalam penanganan bahaya kebakaran	Barru	Barru	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	7,500,000	(2,500,000)	Satpol.PP/ Damkar
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	Barru	Barru	100%	100%				Satpol.PP/ Damkar
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah lokasi penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah lokasi penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	Barru	Barru	7 kecamatan	7 kecamatan	50,000,000	28,961,450	(21,038,550)	Satpol.PP/ Damkar
1	05	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi			100%	100%	2,139,178,514	2,160,162,644	20,984,130	BPBD
						Cakupan sarana dan prasaran perkantoran yang terpenuhi		Cakupan sarana dan prasaran perkantoran yang terpenuhi			100%	100%				
						Cakupan peningkatan disiplin aparatur		Cakupan peningkatan disiplin aparatur			100%	100%				
						Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur			100%	100%				
1	05	1	2.05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
1	05	1	2.05	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	1,702,588,434	1,702,588,434	-	
1	05	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3 kegiatan	3 kegiatan				BPBD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan bagi pegawai dan TRC BPBD.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan bagi pegawai dan TRC BPBD.	Barru	Barru			16,200,000	19,200,000	3,000,000	BPBD
1	05	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Keikutsertaan Aparat mengikuti DIKLAT Formal.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Keikutsertaan Aparat mengikuti DIKLAT Formal.					5,000,000			BPBD
1	05	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Keikutsertaan Aparat mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Keikutsertaan Aparat mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Barru	Barru			2,000,000	2,611,000	611,000	BPBD
1	05	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparat mengikuti Bimbingan Teknis.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparat mengikuti Bimbingan Teknis.	Barru	Barru			9,000,000	54,603,500	45,603,500	BPBD
1	05	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi			100%	100%				BPBD
1	05	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor berdasarkan jenisnya.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor berdasarkan jenisnya.	Barru	Barru			88,474,280	36,122,960	(52,351,320)	BPBD
1	05	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor.	Barru	Barru						BPBD
1	05	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Barru	Barru			99,217,000	129,318,000	30,101,000	BPBD
						Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah		Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah								
1	05	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2 kegiatan	2 kegiatan				BPBD
1	05	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional.	Barru	Barru			44,000,000	36,365,000	(7,635,000)	BPBD
1	05	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur Kantor.	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur Kantor.	Barru	Barru			22,500,000	2,000,000	(20,500,000)	BPBD
1	05	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			3 kegiatan	3 kegiatan				BPBD
1	05	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim,	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim,	Barru	Barru		5 Jenis	70,907,500	57,725,600	(13,181,900)	BPBD
1	05	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar.	Barru	Barru		2 Jenis	21,840,000	64,764,468	42,924,468	BPBD
1	05	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia.	Barru	Barru		2 Orang	12,162,300	9,600,000	(2,562,300)	BPBD
1	05	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara			3 kegiatan	3 kegiatan				BPBD
1	05	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan pemeliharaan dan pengurusan perizinan. (per tahun)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan pemeliharaan dan pengurusan perizinan. (per tahun)	Barru	Barru			32,200,000	43,405,500	11,205,500	BPBD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel		Barru	Barru			3,760,000	900,000	(2,860,000)	BPBD
1	05	1	2.09	0.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi layak.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi layak.	Barru	Barru						BPBD
1	05	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi layak.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi layak.	Barru	Barru			9,329,000	2,958,182	(6,370,818)	BPBD
1	05	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase bencana daerah yang ditanggulangi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase bencana daerah yang ditanggulangi			100%	100%	485,490,972	436,270,350	(49,220,622)	BPBD
1	05	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat			100%	100%				BPBD
1	05	3	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jenis media informasi pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Barru.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jenis media informasi pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Barru.	Barru	Barru		135737 orang	25,000,000	24,187,200	(812,800)	BPBD
1	05	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan			6 kegiatan	6 kegiatan				BPBD
1	05	3	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Desa Tangguh Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Desa Tangguh Bencana	Barru	Barru			92,200,500	92,200,500	-	BPBD
1	05	3	2.02	03	Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		Barru	Barru			80,000,000	83,356,250	3,356,250	BPBD
###	###	###	2.02	04	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Alat Pelindung Diri Rescuer,Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Alat Pelindung Diri Rescuer,Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana.	Barru	Barru			30,000,000	37,100,000	7,100,000	BPBD
###	###	###	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan dilaksanakan perbaikan darurat jalan dan biaya operasional perbaikan darurat dampak	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan dilaksanakan perbaikan darurat jalan dan biaya operasional perbaikan darurat dampak	Barru	Barru			227,745,486	155,947,800	(71,797,686)	BPBD
						Jumlah Kecamatan dilaksanakan perbaikan darurat Jembatan dan biaya operasional perbaikan darurat dampak		Jumlah Kecamatan dilaksanakan perbaikan darurat Jembatan dan biaya operasional perbaikan darurat dampak								BPBD
1	05	3	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana tingkat Desa.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana tingkat Desa.	Barru	Barru			40,000,000	43,257,400	3,257,400	BPBD
1	05	3	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana.	Barru	Barru						BPBD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			4 kegiatan					BPBD
1	05	3	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai dan dapat digunakan dalam penanganan darurat bencana.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai dan dapat digunakan dalam penanganan darurat bencana.	Barru	Barru		1 posko	83,356,250	83,356,250	-	BPBD
1	05	3	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per-100.000 Orang	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per-100.000 Orang	Barru	Barru		1623 orang	62,745,486	40,959,700	(21,785,786)	BPBD
						Jumlah paket pengadaan lokasi penampungan sementara disertai rambu dan Peta Jalur Evakuasi di daerah rawan bencana.		Jumlah paket pengadaan lokasi penampungan sementara disertai rambu dan Peta Jalur Evakuasi di daerah rawan bencana.								
1	05	3	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket penyediaan Kebutuhan Dasar dan Logistik bagi korban bencana.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket penyediaan Kebutuhan Dasar dan Logistik bagi korban bencana.	Barru	Barru		150 Paket	20,000,000	51,462,000	31,462,000	BPBD
1	05	3	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Barru	Barru		1 sistem koordinasi Komando Penanganan Darurat Bencana				BPBD
1	05	3	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana non alam.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana non alam.	Barru	Barru						BPBD
1	06				BIDANG SOSIAL											
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terpenuhi			100%	100%	2,768,303,080.00	2,744,234,448	(24,068,632)	Dinas Sosial
1	6	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
1	6	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	2,356,425,348	2,356,425,348	-	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaiaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan yang mendukung Administrasi Kepegawaiaan	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan yang mendukung Administrasi Kepegawaiaan			1 Jenis	1 Jenis				Dinas Sosial
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yg mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			6 Org	6 Org	35,552,000.00	35,552,000	-	Dinas Sosial

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah			4 jenis	4 jenis				Dinas Sosial
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik dan penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			6 Jenis	6 Jenis	3,598,200.00	8,570,400	4,972,200	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor			6 Unit	6 Unit	47,906,832.00	9,372,000	(38,534,832)	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga			7 Jenis	7 Jenis	2,920,000.00	2,789,200	(130,800)	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			73 OK	73 OK	170,753,500.00	144,268,000	(26,485,500)	Dinas Sosial
						Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah			151 OH	151 OH				
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2 Jenis	2 Jenis				Dinas Sosial
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan surat menyurat			1150	1150	113,141,200.00	115,056,500	1,915,300	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon air dan listrik			3 Rekening	3 Rekening	22,806,000.00	22,685,400	(120,600)	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 jenis	4 jenis				Dinas Sosial
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			1 Unit	1 Unit	1,000,000.00	31,036,000	30,036,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			4 Unit	4 Unit	6,500,000.00	7,345,000	845,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			4 Unit	4 Unit	4,100,000.00	7,676,600	3,576,600	Dinas Sosial

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor			6 Unit	6 Unit	3,600,000.00	3,458,000	(142,000)	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos dan TKSK yang memahami teknis pendampingan PMKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos dan TKSK yang memahami teknis pendampingan PMKS			100%	100%	21,875,455.00	21,505,800	(369,655)	Dinas Sosial
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pengembangan Potensi	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pengembangan Potensi			4 Jenis	4 Jenis				Dinas Sosial
	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah karang taruna (KT) yg mendapatkan bantuan dan bimbngan melalui paket usaha ekonomi produktif	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah karang taruna (KT) yg mendapatkan bantuan dan bimbngan melalui paket usaha ekonomi produktif			1 Org	1 Org	5,378,800.00	21,505,800	(369,655)	Dinas Sosial
					Jumlah PSM yg mendapatkan bantuan/bimbingan melalui bantuan paket usaha ekonomi produktif		Jumlah PSM yg mendapatkan bantuan/bimbingan melalui bantuan paket usaha ekonomi produktif			1 Org	1 Org	5,378,800.00	Dinas Sosial			
					Jumlah tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) 7 Org/Kecamatan		Jumlah tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) 7 Org/Kecamatan			7 Org	7 Org	5,378,800.00	Dinas Sosial			
					JumlahORSOS yg mendapatkan pembinaan melalui usaha ekonomi produktif		JumlahORSOS yg mendapatkan pembinaan melalui usaha ekonomi produktif			1 Org	1 Org	5,739,055.00	Dinas Sosial			
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Anak dan LansiaTerlantar yang memperoleh bantuan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Anak dan LansiaTerlantar yang memperoleh bantuan sosial			100%	100%	228,785,620.00	200,115,300	(28,670,320)	Dinas Sosial
					Presentase Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang memperoleh bantuan sosial	Presentase Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang memperoleh bantuan sosial			100%	100%						
					Cakupan Eks penyandang penyakit sosial yang dibina	Cakupan Eks penyandang penyakit sosial yang dibina			100%	100%						

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Cakupan Eks penyandang penyakit sosial yang dibina		Cakupan Eks penyandang penyakit sosial yang dibina			100%	100%				
1	06	04	2.01				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				28 Orang				Dinas Sosial
1	06	04	2.01	01			Penyediaan Permakanan	Jumlah Pendataan dan pendampingan anak dan lansia terlantar	Penyediaan Permakanan			4 Kasus	4 Kasus	27,208,413.00	100,809,800	73,601,387	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelatihan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			10 Org	41496087	41,496,087.00	20,080,500	(21,415,587)	Dinas Sosial
1	06	04	2.02				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			0	4 Orang				Dinas Sosial
1	06	04	2.02	07			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Pencegahan Narkoba, HIV/AIDS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			400 Orang	400 Orang	129,087,850.00	50,000,000	(79,087,850)	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Ratzia PSK di Kecamatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			3 kali	3 kali	30,993,270.00	29,225,000	(1,768,270)	Dinas Sosial
1	06	05					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100%	100%	503,169,636.00	833,191,240	330,021,604	Dinas Sosial
							Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (SDGs)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (SDGs)				6332	6332				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah B40 yang mendapatkan pelayanan data dan Fasilitas Bantuan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah B40 yang mendapatkan pelayanan data dan Fasilitas Bantuan			71970 orang	71970 orang				Dinas Sosial
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan PKH	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan PKH			16556 KPM	16556 KPM	129,585,875.00	646,878,900	517,293,025	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelatihan pendataan dan pemutakhiran data PMKS	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelatihan pendataan dan pemutakhiran data PMKS			103928 KK	103928 KK	135,351,866.00	124,473,500	(228,725,061)	Dinas Sosial
						Jumlah PACA yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha		Jumlah PACA yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha			46 Org	46 Org	54,849,635.00			
						Jumlah Paca yg mendapatkan pelatihan		Jumlah Paca yg mendapatkan pelatihan			20 Org	20 Org	36,849,635.00			
						Jumlah Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin		Jumlah Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin			120 Org	120 Org	126,147,425.00			
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bimbingan KUBE Keluarga Miskin	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bimbingan KUBE Keluarga Miskin			10 Org	10 Org	20,385,200.00	61,838,840	41,453,640	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan darurat pada daerah bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan darurat pada daerah bencana			100%	100%	175,266,200.00	249,235,000	73,968,800	Dinas Sosial
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial			250 orang	250 orang				Dinas Sosial
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Dapur Umum yang beroperasi	Penyediaan Makanan	Jumlah Dapur Umum yang beroperasi			1 Unit	1 Unit	40,000,000.00	39,000,000	(1,000,000)	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yg menerima bantuan logistik	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yg menerima bantuan logistik			100 KK	100 KK	75,266,200.00	150,235,000	74,968,800	Dinas Sosial
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase keterlibatan TAGANA Pada penanganan Darurat Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase keterlibatan TAGANA Pada penanganan Darurat Bencana			100%	100%				Dinas Sosial
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana Terlatih	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana Terlatih			10 Orang	10 Orang	60,000,000.00	60,000,000	-	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07				BIDANG TENAGA KERJA											
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi keahlian	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi keahlian	Kec.Barru	Kec.Barru	100%	20%	780,164,000	1,309,198,500	529,034,500	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	03	2.1		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kerja	Kec. Barru	Kec. Barru	4 Pelatihan	2 Pelatihan				DPMPTSP
2	07	03	2.1	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja	Kecamatan Barru	Kecamatan Barru	80 orang	80 orang	780,164,000	409,198,500	(370,965,500)	DPMPTSP
2	07	03	2.5		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan laporan pengukuran produktivitas yang terselesaikan	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan laporan pengukuran produktivitas yang terselesaikan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	0%				DPMPTSP
2	07	03	2.5	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	7 Kecamatan	7 Kecamatan	2 Dok.	0 Dok.	-	-	-	DPMPTSP
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja		Kec.Barru	100%	20%	-	15,319,000	15,319,000	DPMPTSP
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersampainya Peraturan Perselisihan, Perjanjian Kerja dan Keselamatan Kerja Bagi Perusahaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersampainya Peraturan Perselisihan, Perjanjian Kerja dan Keselamatan Kerja Bagi Perusahaan		Kec. Barru	100%	100%				DPMPTSP
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sosialisasi	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sosialisasi		Kecamatan Barru	40 orang	40 orang	-	7,887,000	7,887,000	DPMPTSP
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja		Kecamatan Barru	40 orang	40 orang	-	7,432,000	7,432,000	DPMPTSP
2	08				BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2	8	2			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Kasus KDRT	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Kasus KDRT			7 Kss	7 Kss	103,213,292	108,328,300	5,115,008	DPMDPPKBP3A

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam PUG		Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam PUG			36 PD	36 PD				
							Jumlah Perempuan yang telah memaham Kesetaraan Gender yang mendapatkan keterampilan		Jumlah Perempuan yang telah memaham Kesetaraan Gender yang mendapatkan keterampilan			620 Org	620 Org				
2	8	2	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Keiatan pendukung Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Keiatan pendukung Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			1 Kegiatan	1 Kegiatan				DPMDPPKBP3A
2	8	2	2.01	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data terpilah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data terpilah	Barru	Barru	36 PD	36 PD	75,190,660	34,109,300	(41,081,360)	DPMDPPKBP3A
2	8	2	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana	Barru	Barru	4 jenis	4 jenis				DPMDPPKBP3A
2	8	2	2.02	2		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok yang difasilitasi dalam Advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja		Jumlah kelompok yang difasilitasi dalam Advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja	Barru	Barru	2 klp	2 klp	28,022,632	74,219,000	(75,726,857)	DPMDPPKBP3A
				Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina		Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	10 organisasi		10 organisasi			54,000,000					
				Jumlah Peserta Pelatihan Kesetaraan Gender		Jumlah Peserta Pelatihan Kesetaraan Gender	20 org		20 org			28,000,000					
				Jumlah masyarakat yang berperan pada P2WKSS		Jumlah masyarakat yang berperan pada P2WKSS	1 Keg		1 Keg			39,923,225					
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Kasus KDRT	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Kasus KDRT				7 Kss	7 Kss	17,500,000	306,359,000	288,859,000	DPMDPPKBP3A
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan				1 jenis	1 jenis				DPMDPPKBP3A

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	03	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan operasional pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk TPPO	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan operasional pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk TPPO	Barru	Barru	4 kegiatan	4 kegiatan	-	52,530,000	52,530,000	DPMDPPKBP3A
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Barru	Barru	1 jenis	1 jenis				DPMDPPKBP3A
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT	Barru	Barru	2 Keg	2 Keg	17,500,000	253,829,000	236,329,000	DPMDPPKBP3A
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina			1 Lbg	1 Lbg	45,081,279	-	(45,081,279)	DPMDPPKBP3A
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dilaksanakan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dilaksanakan			1 Keg	1 Keg				DPMDPPKBP3A
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kabijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelengkapan dan Prasarana P2TP2A memenuhi Standar pelayanan	Advokasi Kabijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelengkapan dan Prasarana P2TP2A memenuhi Standar pelayanan	Barru	Barru	4 Jns	4 Jns	45,081,279	-	(45,081,279)	DPMDPPKBP3A
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi			4 Org	4 Org	63,353,340	63,339,500	(13,840)	DPMDPPKBP3A
2	8	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana			2 jenis	2 jenis				DPMDPPKBP3A

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Kegiatan Hari Anak Nasional dan kreatifitas forum anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Kegiatan Hari Anak Nasional dan kreatifitas forum anak	Barru	Barru	6 keg	6 keg	63,353,340	63,339,500	13,840	DPMDPPKBP3A
						- Jumlah Keg Forum Anak Tkt Nasional/prop		- Jumlah Keg Forum Anak Tkt Nasional/prop			41 org	41 org				
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah remaja yang ikut pembinaan dan Konseling yang dilaksanakan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah remaja yang ikut pembinaan dan Konseling yang dilaksanakan			300 Org	300 Org	43,805,500	29,820,500	(13,985,000)	DPMDPPKBP3A
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			4 Jns	4 Jns				DPMDPPKBP3A
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelengkapan dan Prasarana P2TP2A mem enuhi Standar pelayanan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelengkapan dan Prasarana P2TP2A mem enuhi Standar pelayanan		Barru	4 Jns	4 Jns	43,805,500	29,820,500	(13,985,000)	DPMDPPKBP3A
2	09				BIDANG PANGAN											
2	09	01			PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi	Kab.Barru	Kab.Barru	100%	100%	2,495,738,808	2,318,875,364	(176,863,444)	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab.Barru	Kab.Barru						Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Barru	Kab.Barru	22 Orang	22 Orang	2,151,092,364	2,151,092,364	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Kab.Barru	Kab.Barru	100%	100%				Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	Kab.Barru	Kab.Barru	2 Orang	2 Orang	33,796,000	33,796,000	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi	Kab.Barru	Kab.Barru	100%	100%				Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Barru	Kab.Barru	15 Unit	15 Unit	2,155,000	2,155,000	-	Dinas Ketahanan Pangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kab.Barru	Kab.Barru	10 Jenis	10 Jenis	2,559,000	2,559,000	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kab.Barru	Kab.Barru	357 Kali	357 Kali	123,240,000	123,240,000	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Terpenuhi	Kab.Barru	Kab.Barru	100%	100%				Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor	Kab.Barru	Kab.Barru	2 Unit	2 Unit	3,825,000	2,250,000	(1,575,000)	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Barru	Kab.Barru	1 Unit	1 Unit	1,900,000	-	(1,900,000)	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kab.Barru	Kab.Barru	3 Unit	3 Unit	27,441,700	3,783,000	(23,658,700)	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi	Kab.Barru	Kab.Barru	100%	100%				Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK	Kab.Barru	Kab.Barru	40 Jenis	40 Jenis	40,529,800	40,529,800	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik	Kab.Barru	Kab.Barru	3 Rekening	3 Rekening	20,077,200	20,077,200	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pegawai Tidak Tetap	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pegawai Tidak Tetap	Kab.Barru	Kab.Barru	16 OK	16 OK	61,500,000	61,500,000	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi	Kab.Barru	Kab.Barru	100%	100%				Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 2). Penggantian Suku Cadang Roda Empat dan Roda Dua	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 2). Penggantian Suku Cadang Roda Empat dan Roda Dua	Kab.Barru	Kab.Barru	18 Unit	18 Unit	16,294,144	16,294,144	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung dan Pagar Kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung dan Pagar Kantor	Kab.Barru	Kab.Barru	11 Jenis	11 Jenis	6,578,600	6,578,600	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	Kab.Barru	Kab.Barru	4 Jenis	4 Jenis	4,750,000	4,750,000	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			100%	100%	128,127,500	101,529,500	(26,598,000)	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	100%				Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dibina	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dibina			7 Desa	7 Desa	128,127,500	101,529,500	(26,598,000)	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skoring Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skoring Pola Pangan Harapan			93	93	980,887,800	763,683,500	(217,204,300)	Dinas Ketahanan Pangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan yang Disalurkan pada Daerah Rawan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan yang Disalurkan pada Daerah Rawan Pangan			3 Desa	3 Desa	101,988,000	92,478,000	(9,510,000)	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Bahan Pangan yang diawasi Keamanan Kesegarannya	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Bahan Pangan yang diawasi Keamanan Kesegarannya					54,069,000	44,469,000	(9,600,000)	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota									Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pangan yang Diperiksa	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pangan yang Diperiksa			100 Sampel	100 Sampel	54,069,000	44,469,000	(9,600,000)	Dinas Ketahanan Pangan
2	10				BIDANG PERTANAHAN											
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prensentasi penyelesaian konflik pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						35,928,000	35,928,000	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	10	05	2.01		Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupataen/Kota		Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupataen/Kota									Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan					35,928,000	35,928,000	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	11				BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Barru	Barru	100%	100%	2,477,731,969	2,514,929,015	37,197,046	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab.Barru	Kab.Barru						Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Barru	Kab.Barru	12 bulan	12 bulan	2,199,725,492	2,199,725,492	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Barru	Barru	100%	100%				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Barru	Barru			20,091,150	29,591,150	9,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Barru	Barru	100%	100%				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Barru	Barru			4,692,374	4,383,750	(308,624)	Dinas Lingkungan Hidup

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Barru	Barru			123,500,500	129,260,500	5,760,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Barru	Barru	100%	100%				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Barru	Barru			30,718,507	29,412,300	(1,306,207)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Barru	Barru			18,500,000	17,160,000	(1,340,000)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Barru	Barru			35,901,936	62,321,550	26,419,614	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.03	14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Barru	Barru			9,600,000	9,600,000	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Barru	Barru	100%	100%				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Barru	Barru			26,496,630	25,665,000	(831,630)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Barru	Barru			5,008,750	4,462,273	(546,477)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Barru	Barru			3,496,630	3,347,000	(149,630)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran air	Barru	Barru	100%	100%	245,848,280	108,574,500	(137,273,780)	Dinas Lingkungan Hidup
						Tingkat Pencemaran Udara		Tingkat Pencemaran Udara	Barru	Barru	19%	19%				
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tingkat Pencemaran air	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tingkat Pencemaran air	Barru	Barru	100%	100%				Dinas Lingkungan Hidup
						Tingkat Pencemaran Udara		Tingkat Pencemaran Udara	Barru	Barru	19%	19%				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	Barru	Barru	1 Dok	1 Dok	116,234,300	51,685,500	(64,548,800)	Dinas Lingkungan Hidup
									Barru	Barru						Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengendalian dampak perubahan iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengendalian dampak perubahan iklim	Barru	Barru	1 Dok	1 Dok	13,113,980	6,893,000	(6,220,980)	Dinas Lingkungan Hidup

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	02	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Barru	Barru									Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Barru	Barru				60,000,000	3,752,000		(56,248,000)		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah lokasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lahan dan/atau tanah akibat biomassa	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah lokasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lahan dan/atau tanah akibat biomassa	Barru	Barru	1 Lokasi	1 Lokasi		56,500,000	46,244,000		(10,256,000)		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Barru	Barru	0,004	0,004		260,664,865	196,464,500		(64,200,365)		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Barru	Barru	0,004	0,004							Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan RTH yang dibuat dan ditata	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan RTH yang dibuat dan ditata	Barru	Barru	0.00005	0.00005		260,664,865	196,464,500		(64,200,365)		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan	Barru	Barru	100%	100%		113,000,000	16,144,000		(96,856,000)		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan	Barru	Barru	100%	100%							Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	05	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	tertibnya pelaku usaha dalam pengelolaan b3 dan lb3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	tertibnya pelaku usaha dalam pengelolaan b3 dan lb3	Barru	Barru	1 Izin	1 Izin		42,000,000	2,623,000		(39,377,000)		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Barru	Barru									Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	tercapainya pembinaan dan pengawasan lb3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	tercapainya pembinaan dan pengawasan lb3	Barru	Barru	10 Loks	10 Loks		71,000,000	13,521,000		(57,479,000)		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase usaha yang mendapatkan pembinaan dapengawasan izin lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase usaha yang mendapatkan pembinaan dapengawasan izin lingkungan	Barru	Barru	100%	100%		31,452,624	31,435,500		(17,124)		Dinas Lingkungan Hidup	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase usaha yang mendapatkan pembinaan dapengawasan izin lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase usaha yang mendapatkan pembinaan dapengawasan izin lingkungan	Barru	Barru	100 %	100%				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	jumlah rekomendasi lingkungan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	jumlah rekomendasi lingkungan	Barru	Barru	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	6,182,649	6,172,500	(10,149)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek yang diawasi	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek yang diawasi	Barru	Barru	6 Objek	6 Objek	25,269,975	25,263,000	(6,975)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PRESENTASE MHA YANG DIAKUI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PRESENTASE MHA YANG DIAKUI	Barru	Barru	100 %	100 %	14,500,000	3,750,000	(10,750,000)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	PENETAPAN PENGAKUAN MHA	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	PENETAPAN PENGAKUAN MHA	Barru	Barru	1 PERBUP	1 PERBUP				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	pendampingan pengakuan masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	pendampingan pengakuan masyarakat Hukum Adat	Barru	Barru	1 KLP	1 KLP	14,500,000	3,750,000	(10,750,000)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Barru	Barru	100%	100%	153,085,080	90,983,500	(62,101,580)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Barru	Barru	100 %	100 %				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Tercapainya indikator penilaian penghargaan kota sehat/adipura	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Tercapainya indikator penilaian penghargaan kota sehat/adipura	Barru	Barru	3 Indikator	3 Indikator	109,726,580	67,592,500	(42,134,080)	Dinas Lingkungan Hidup
										Barru	Barru					
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lokasi pelaksanaan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lokasi pelaksanaan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Barru	Barru	4 lokasi	4 lokasi	43,358,500	23,391,000	(19,967,500)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	Barru	Barru	100%	100%	12,475,000	10,574,500	1,900,500	Dinas Lingkungan Hidup

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan	Barru	Barru	100%	100%				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lomba Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lomba Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Barru	Barru	2 Lomba	2 Lomba	12,475,000	10,574,500	(1,900,500)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yangditangani	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yangditangani	Barru	Barru	100%	100%	12,544,070	9,076,000	(3,468,070)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Barru	Barru						Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	Barru	Barru	1 Kasus	1 Kasus	12,544,070	9,076,000	(3,468,070)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani	Barru	Barru	75%	75%	1,111,388,500	4,052,352,499	2,940,963,999	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	BERTAMBAHNYA VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI	Pengelolaan Sampah	BERTAMBAHNYA VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI	Barru	Barru	20.000 TON	20.000 TON				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan persampahan	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan persampahan	Barru	Barru	1 Dok	1 Dok	31,675,000	31,675,000	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah MoU kerjasama pengelolaan persampahan	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah MoU kerjasama pengelolaan persampahan	Barru	Barru	8 MoU	8 MoU	63,691,980	16,665,000	(47,026,980)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah unit prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah unit prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Barru	Barru	124 Unit	124 Unit	1,006,579,020	3,994,569,999	2,987,990,979	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	DATA/INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	DATA/INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Barru	Barru	1 dok	1 dok				Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		Barru	Barru			9,442,500	9,442,500	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	12				BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	3,588,301,926	4,444,958,186	856,656,260	Dukcapill
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				Dukcapill
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	2,986,585,586	2,441,466,360	(545,119,226)	Dukcapill
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah			3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan			-	Dukcapill
2	12	01.2.	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Makassar	Makassar	3 Org	0 org	15,000,000	-	(15,000,000)	Dukcapill
2	12	01.2.	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan/diikuti	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan/diikuti	Barru	Barru-Makassar	3 Org	3 Org	14,260,000	46,838,000	32,578,000	Dukcapill
2	12	01.2.	05	11	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	Barru-Makassar	Barru-Makassar	8 Org	8 Org	27,872,000	150,371,000	122,499,000	Dukcapill
2	12	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan				Dukcapill
2	12	01.2.	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Barru	Barru	3 Jenis	0 Jenis	725,000	-	(725,000)	Dukcapill
2	12	01.2.	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	Barru	Barru			47,274,000	480,820,000	433,546,000	Dukcapill
2	12	01.2.	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga	Barru	Barru	13 Jenis	13 Jenis	1,167,500	-	(1,167,500)	Dukcapill
2	12	01.2.	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Keluar dan Kedalam Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Keluar dan Kedalam Daerah	Barru-Makassar-dll	Barru-Makassar-dll	43 Org/Kali	43 Org/Kali	60,916,000	144,081,500	83,165,500	Dukcapill
2	12	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan			15 Unit	100%				Dukcapill
2	12	01.2.	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleu	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleu	Barru	Barru	6 Unit	6 Unit	50,000,000	-	(50,000,000)	Dukcapill
2	12	01.2.	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Barru	Barru	7 Unit	7 Unit	222,926,000	397,850,000	174,924,000	Dukcapill
2	12	01.2.	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Barru	Barru	2 Unit	2 Unit	15,200,000	12,540,000	(2,660,000)	Dukcapill

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah						
								Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1				2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2 jenis	2 jenis			-	Dukcapill			
2	12	01.2.	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim	Barru	Barru	200 Lembar	200 Lembar	110,670,840	186,652,100	75,981,260	Dukcapill			
				Jumlah Jasa Kebersihan kantor		Jumlah Jasa Kebersihan kantor					12 Org/Bln	12 Org/Bln							
2	12	01.2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara			29 Unit	29 Unit			-	Dukcapill			
2	12	01.2.	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	Barru	Barru	10 Unit	10 Unit	12,305,000	34,300,000	21,995,000	Dukcapill			
2	12	01.2.	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis	11,700,000	-	(11,700,000)	Dukcapill			
2	12	01.2.	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebeuler yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebeuler yang dipelihara	Barru	Barru	5 Unit	5 Unit	11,700,000	4,920,000	(6,780,000)	Dukcapill			
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang dilayani administrasi kependudukan (KTP KK)	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang dilayani administrasi kependudukan (KTP KK)			3 laporan	3 laporan	750,000,000	55,979,700	(694,020,300)	Dukcapill			
2	12	02.2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Pendudukan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk			17602 Orang	4 Dokumen				Dukcapill			
2	12	02.2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan KTP	Barru	Barru	6102	6102	762,379,985	55,979,700	706,400,285	Dukcapill			
				Jumlah Pelayanan SKPWNI				9500			9500								
				Jumlah Pelayanan KK				2000			2000								
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang dilayani Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang dilayani Pencatatan Sipil			3 laporan	3 laporan	134,942,000	43,958,000	(90,984,000)	Dukcapill			
2	12	03.2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil			9307 Orang	9307 Orang				Dukcapill			
2	12	03.2	01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Akta Kelahiran	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Akta Kelahiran	Barru	Barru	8500	8500	134,942,000	43,958,000	(90,984,000)	Dukcapill			
				Jumlah Pelayanan Akta Nikah		Jumlah Pelayanan Akta Nikah		2			2								
				Jumlah Pelayanan Akta Kematian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan		Jumlah Pelayanan Akta Kematian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan		805			805								
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang Dikelolah	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola			7 Kecamatan	7 Kecamatan	64,543,000	25,747,200	(38,795,800)	Dukcapill			

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	04.2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang Diselenggarakan			7 Kecamatan	1 sistem				Dukcapill
2	12	04.2	03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi kebijakan kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi kebijakan kependudukan	Barru	Barru	7 Kecamatan	7 Kecamatan	64,543,000	25,747,200	(38,795,800)	Dukcapill
2	12	04			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan Yang dijalankan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan Yang dijalankan			1 Sistem	1 Sistem	48,580,500	16,989,000	(31,591,500)	Dukcapill
2	12	05.2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang Disusun	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang Disusun			1 Buku	1 Buku				Dukcapill
2	12	05.2	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan	Barru	Barru	1 Buku	1 Buku	48,580,500	16,989,000	(31,591,500)	Dukcapill
2	13				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	100 %	3,485,120,223	3,601,988,226	116,868,003	DPMDPPKBP3A
				Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi				100%	100 %					
				Cakupan kebutuhan kompetensi Spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya		Cakupan kebutuhan kompetensi Spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya				100%	100 %					
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	3,248,255,653	3,248,255,653	-	
2	13	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang terlaksana			3 jenis	3 jenis				DPMDPPKBP3A
2	13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat Fungsional dan struktural	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat Fungsional dan struktural			3 orang	3 orang	9,500,000	-	(9,500,000)	DPMDPPKBP3A

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
2	13	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengiriman aparat mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengiriman aparat mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan	Barru	Barru	3 orang	3 orang	13,493,970	32,450,000	18,956,030	DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Barru	Barru	5 Jenis	5 Jenis				DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Barru	Barru	10 Buah	10 Buah	2,500,000	900,000	(1,600,000)	DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Barru	Barru	12 Buah	12 Buah	1,500,000	497,000	(1,003,000)	DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dan Provinsi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dan Provinsi	Barru	Barru	20 Kali	20 Kali	12,500,000	108,543,200	96,043,200	DPMDPPKBP3A				
				Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		250 Kali			250 Kali									
2	13	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis				DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler Kantor	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler Kantor	Barru	Barru	5 Jenis	5 Jenis	5,000,000	12,029,000	7,029,000	DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis	36,500,000	53,840,000	17,340,000	DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Barru	Barru	5 Jenis	5 Jenis	44,870,600	-	(44,870,600)	DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis				DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis kegiatan yg mendukung administrasi umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis kegiatan yg mendukung administrasi umum	Barru	Barru	17 jenis	17 jenis	45,000,000	67,177,000	22,177,000	DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Barru	Barru	3 Rekening	3 Rekening	17,500,000	17,490,600	(9,400)	DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran jasa kebersihan kantor	Barru	Barru	1 OK	2 orang	3,500,000	9,600,000	6,100,000	DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 jenis	4 jenis				DPMDPPKBP3A				
2	13	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	Barru	Barru	11 Unit	11 Unit	9,000,000	42,723,500	33,723,500	DPMDPPKBP3A				

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	13	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Barru	Barru	2 jenis	2 jenis	25,000,000	687,273	(24,312,727)	DPMDPPKBP3A	
2	13	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeler yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeler yang dipelihara	Barru	Barru	43 Buah	43 Buah	3,000,000	-	(3,000,000)	DPMDPPKBP3A	
2	13	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Barru	Barru	1 jenis	1 jenis	8,000,000	7,795,000	(205,000)	DPMDPPKBP3A	
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan adimistrasi desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan adimistrasi desa			100%	100%	19,000,000	14,238,000	(4,762,000)	DPMDPPKBP3A	
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam kabupaten	Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam kabupaten	Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa			40 desa	40 desa				DPMDPPKBP3A	
2	13	3	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam kabupaten	jumlah desa yang difasilitasi dalam kerjasama desa	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam kabupaten	jumlah desa yang difasilitasi dalam kerjasama desa	Barru	Barru	40 desa	40 desa	19,000,000	14,238,000	(4,762,000)	DPMDPPKBP3A	
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan adimistrasi desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan adimistrasi desa			100%	100%	505,020,100	1,130,972,308	625,952,208	DPMDPPKBP3A	
					cakupan desa yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa		cakupan desa yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa			100%	100%						
					Jumlah desa yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan sesuai standar		Jumlah desa yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan sesuai standar			40 Desa	40 Desa						
					cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi		cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi			100%	100%						
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			11 jenis	11 jenis				DPMDPPKBP3A	
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Barru	Barru	40 Desa	40 Desa	113,310,629	855,054,308	741,743,679	DPMDPPKBP3A	
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Barru	Barru	40 desa	40 desa	10,000,000	4,740,000	(5,260,000)	DPMDPPKBP3A	
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapaitas pemerintahan desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapaitas pemerintahan desa	Barru	Barru	40 desa	40 desa	26,000,000	14,826,000	(11,174,000)	DPMDPPKBP3A	
2	13	4	2.01	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	jumlah desa di fasilitasi dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	jumlah desa di fasilitasi dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Barru	Barru	40 Desa	40 Desa	50,164,745	29,665,500	(20,499,245)	DPMDPPKBP3A	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan pengembangan BUMDESA	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan pengembangan BUMDESA	Barru	Barru	40 Desa	40 Desa	40,599,651	22,830,000	(17,769,651)	DPMDPPKBP3A	
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan profil desa/ kel	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan profil desa/ kel	Barru	Barru	55 desa/ kel	55 desa/ kel	70,000,000	43,876,500	(26,123,500)	DPMDPPKBP3A	
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas BPD	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas BPD	Barru	Barru	40 Desa	40 Desa	60,000,000	60,000,000	-	DPMDPPKBP3A	
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa /kel yang di fasilitasi dalam Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa /kel yang di fasilitasi dalam Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Barru	Barru	55 desa/ kel	55 desa/ kel	134,945,075	99,980,000	(34,965,075)	DPMDPPKBP3A	
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)			100%	100%	451,296,721	438,513,900	(12,782,821)	DPMDPPKBP3A	
				Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat		Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat		100%			100%						
				cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi		cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi		100%			100%						
				cakupan desa yang menerapkan TTG		cakupan desa yang menerapkan TTG		100%			100%						
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa d yang dilaksanakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa d yang dilaksanakan			7 jenis	7 jenis				DPMDPPKBP3A	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah desa/ kel yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaannya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah desa/ kel yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaannya	Barru	Barru	55 desa/ kel	55 desa/ kel	75,591,681	32,751,300	(42,840,381)	DPMDPPKBP3A
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah desa yang masyarakatnya mendapatkan keterampilan usaha	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah desa yang masyarakatnya mendapatkan keterampilan usaha	Barru	Barru	2 desa/kel	2 desa/kel	30,000,000	95,145,500	65,145,500	DPMDPPKBP3A
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna	Barru	Barru	40 Desa	40 Desa	35,087,940	-	(35,087,940)	DPMDPPKBP3A
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah desa/ kel dan kec yang mendapatkan Pembinaan; pemberdayaan perempuan dan kelompok dasawisma, dan pelaksanaan HKG,	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah desa/ kel dan kec yang mendapatkan Pembinaan; pemberdayaan perempuan dan kelompok dasawisma, dan pelaksanaan HKG,	Barru	Barru	55 desa/ kel	55 desa/ kel	310,617,100	310,617,100	-	DPMDPPKBP3A
2	14				BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif			3000 Org	3000 Org	827,800,000	3,150,621,000	2,322,821,000	DPMDPPKBP3A
						Jumlah PIK KR yang terbentuk		Jumlah PIK KR yang terbentuk			5 Klp	5 Klp				
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan			5 Jenis	5 Jenis				DPMDPPKBP3A
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Kec yang dipasilitasi dalam pelayanan Khiba	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Kec yang dipasilitasi dalam pelayanan Khiba	Barru	Barru	7 Kec	7 Kec	28,800,000	37,305,000	8,505,000	DPMDPPKBP3A
						Jumlah Kegiatan Advokasi KRR		Jumlah Kegiatan Advokasi KRR			5 klp	5 klp	25,000,000			
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Sosialisasi Pembentukan PIK KR Luar Sekolah	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Sosialisasi Pembentukan PIK KR Luar Sekolah	Barru	Barru	2 Klp	2 Klp	21,000,000	21,000,000	-	DPMDPPKBP3A

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang terlaksana	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang terlaksana			1 jenis	1 jenis				DPMDPPKBP3A
2	14	3	2.02	3	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Wkt terbayarkan insentif PPKBD dan Sub PPKBD dan PKB Gaya Baru	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Wkt terbayarkan insentif PPKBD dan Sub PPKBD dan PKB Gaya Baru	Barru	Barru	4 Trw	4 Trw	655,000,000	657,120,000	2,120,000	DPMDPPKBP3A
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB terlaksana	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB terlaksana			5 jns	5 jns				DPMDPPKBP3A
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana dan Operasiona Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana dan Operasiona Pelayanan KB	Barru	Barru	5 jns	5 jns	2,435,196,000	2,435,196,000	-	DPMDPPKBP3A
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah jenis kegiatan Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah jenis kegiatan Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			1 Jenis	1 Jenis				DPMDPPKBP3A
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pada Pelayanan KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pada Pelayanan KB	Barru	Barru	200 org	200 org	98,000,000	-	(98,000,000)	DPMDPPKBP3A
2	14	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina			810 Klp	810 Klp	20,257,685	16,842,500	(3,415,185)	DPMDPPKBP3A
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2 Jenis	2 Jenis				DPMDPPKBP3A

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kec yang difasilitasi Pelatihan kader kelompok BKB BKR BKL	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kec yang difasilitasi Pelatihan kader kelompok BKB BKR BKL	Barru	Barru	7 Kec	7 Kec	20,257,685	16,842,500	(3,415,185)	DPMDPPKBP3A
2	15				BIDANG PERHUBUNGAN											
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	Barru	Barru	100%	100%	4,429,461,230	4,429,461,230		DINAS PERHUBUNGAN
				Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana		100%			100%					
				cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur		cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur		100%			100%					
				Tingkat pencapaian disiplin aparatur		Tingkat pencapaian disiplin aparatur		1			1					
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Barru	Barru	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Barru	Barru	41 Orang	41 Orang	3,617,196,530	3,617,196,530		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya dan Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya dan Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Barru	Barru	107 Orang	107 Orang				
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan beserta kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan beserta kelengkapannya	Barru	Barru	87 Pasang	87 Pasang	50,000,000	50,000,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah staf yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah staf yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Barru	Barru	10 Orang	10 Orang	70,470,000	70,470,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah staf yang mengikuti bimbingan teknis, Implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah staf yang mengikuti bimbingan teknis, Implementasi peraturan perundang-undangan	Barru	Barru	3 Orang	3 Orang	13,800,000	13,800,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kaegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kaegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Barru	Barru	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia/terpasang	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia/terpasang	Barru	Barru	28 unit	28 unit	12,000,000	12,000,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Barru	Barru	30 ok	30 ok	167,191,950	167,191,950		DINAS PERHUBUNGAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Barru	Barru	165 OH	165 OH	24,800,000	24,800,000	-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Barru	Barru	3 kegiatan	3 kegiatan				DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	Barru	Barru	3 Kendaraan Roda Dua	3 Kendaraan Roda Dua	120,000,000	120,000,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor	Barru	Barru	10 unit	10 unit	53,240,000	53,240,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor	Barru	Barru	3 unit	3 unit	35,000,000	35,000,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Barru	Barru	2 kegiatan	2 kegiatan				DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Barru	Barru	550 Surat	550 Surat	57,523,250	57,523,250	-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Barru	Barru	10 Rekening	10 Rekening	86,000,000	86,000,000	-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Barru	Barru	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	Penggantian Suku Cadang Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	Penggantian Suku Cadang Kendaraan	Barru	Barru	17 kendaraan	17 kendaraan	100,000,000	100,000,000	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Belanja STNK		Belanja STNK	Barru	Barru	15 kendaraan	15 kendaraan	13,000,000	13,000,000	-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Barru	Barru	30 unit	30 unit	9,239,500	9,239,500	-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabitasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabitasi	BARRU	BARRU	0.94	0.94	2,034,965,000	2,034,965,000	-	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Rambu Jalan		Jumlah Rambu Jalan			193 unit	193 unit				
						Jumlah Marka Jalan		Jumlah Marka Jalan			26 km	26 km				

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah								
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)											
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)										
1						2		3		4		5		6	7	8	9	10		11		12		13	
							Pagar Jalan		Pagar Jalan							1 km	1 km								
					Ketersediaan fasilitas pendukung angkutan darat dan sarana Terminal sebagai simpul moda transportasi		Ketersediaan fasilitas pendukung angkutan darat dan sarana Terminal sebagai simpul moda transportasi		0.64							0.64									
					Persentase penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Persentase penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		0.67							0.67									
2	15	2	2.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
2	15	2	2.02	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Pengadaan Rambu Lalu Lintas		Pengadaan Rambu Lalu Lintas							28 km (192 Unit)	28 km (192 Unit)			220,000,000	220,000,000			-	DINAS PERHUBUNGAN
							Pengadaan Rambu Lalu Lintas		Pengadaan Rambu Lalu Lintas							1 UNIT	1 UNIT			254,000,000	254,000,000			-	DINAS PERHUBUNGAN
							Pengadaan Marka Jalan		Pengadaan Marka Jalan							7,3 km	7,3 km			245,499,000	245,499,000			-	DINAS PERHUBUNGAN
							Pengadaan Pagar Pengaman Jalan		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan							260 meter	260 meter			273,226,000	273,226,000			-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	- Pembangunan Terminal Angkutan Darat Tipe C Ralla	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	- Pembangunan Terminal Angkutan Darat Tipe C Ralla																
2	15	2	2.03	2		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang diadakan	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang diadakan															-	DINAS PERHUBUNGAN
							- Pembangunan Terminal Angkutan Darat Tipe C Palanro		- Pembangunan Terminal Angkutan Darat Tipe C Palanro							3 org	3 org			550,000,000	550,000,000			-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.03	3		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Halte Bus dan shelter yang diadakan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Halte Bus dan shelter yang diadakan							3 org	3 org			30,202,500	30,202,500			-	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal		Jumlah Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal															-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.03	4		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal /pelabuhan /prasarana perhubungan lainnya yang terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal /pelabuhan /prasarana perhubungan lainnya yang terpelihara							7 jenis	7 jenis			14,000,000	14,000,000			-	DINAS PERHUBUNGAN
																4 jenis	4 jenis			3,000,000	3,000,000			-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								63 OH	63 OH								DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05	7		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang di kalibrasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang di kalibrasi							24 kali	24 kali			25,240,000	25,240,000			-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								150 org	150 org								DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.06	1		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan											310,001,500	310,001,500			-	DINAS PERHUBUNGAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota			6000 lembar/ 250 eks	6000 lembar/ 250 eks				DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah kegiatan pengendalian pengoperasian angkutan umum di jalan	Jumlah kegiatan pengendalian pengoperasian angkutan umum di jalan				261 hari	261 hari	73,350,000	73,350,000			
					Jumlah kegiatan pelaksanaan sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah kegiatan pelaksanaan sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan				10 rapat	10 rapat	9,658,000	9,658,000			
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemilihan dan pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemilihan dan pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan			6 STNK	6 STNK	26,788,000	26,788,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal			2 kendaraan	2 kendaraan	24,089,400	24,089,400		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				7 unit	7 unit				DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	2.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			100%	100%	24,089,400	24,089,400		DINAS PERHUBUNGAN
2	16				BIDANG KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA											
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	BARRU	BARRU	100%	100%	3,148,210,978	3,276,996,918	128,785,940	DINAS KOMINFO
						Cakupan Sarana dan Prasarana aparatur yang terlaksana		Cakupan Sarana dan Prasarana aparatur yang terlaksana			100%	100%				
						Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur			100%	100%				
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									DINAS KOMINFO
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta			2,726,890,418	2,726,890,418	-	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta						DINAS KOMINFO
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	3 org	3 org	11,000,000	50,759,500	39,759,500	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah staf yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah staf yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	3 org	3 org	23,182,000	41,347,000	18,165,000	DINAS KOMINFO

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah									DINAS KOMINFO
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia/terpasang	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia/terpasang	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	7 jenis	7 jenis	3,000,000	2,334,500	(665,500)	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga, alat pembersih	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga, alat pembersih	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	4 jenis	4 jenis	1,808,250	1,964,200	155,950	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Dalam Daerah Kab Barru	Dalam Daerah Kab Barru	63 OH	63 OH	25,440,000	10,200,000	(15,240,000)	DINAS KOMINFO
						Jumlah perjalanan dinas luar daerah		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luar Kab. Barru	Luar Kab. Barru	24 kali	24 kali	102,812,000	173,391,000	70,579,000	DINAS KOMINFO
						jumlah makan minum rapat tamu		jumlah makan minum rapat tamu	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	150 org	150 org	3,375,000	1,800,000	(1,575,000)	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									DINAS KOMINFO
2	16	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	4 jenis	4 jenis	24,500,000	110,092,500	85,592,500	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									DINAS KOMINFO
2	16	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembayaran honorarium pegawai honororer	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Pembayaran honorarium pegawai honororer	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	17 org	19 org	150,000,000	86,000,000	(64,000,000)	DINAS KOMINFO
						Jumlah Alat Tulis Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	40 jenis	40 jenis	38,794,550	21,254,300	(17,540,250)	DINAS KOMINFO
						Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen		Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	6000 lembar/ 250 eks	6000 lembar/ 250 eks	3,999,900	4,250,000	250,100	DINAS KOMINFO
						Makan minum harian pegawai		Makan minum harian pegawai	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	261 hari	261 hari	6,825,000	23,788,000	16,963,000	DINAS KOMINFO
						Makan minum rapat tamu		Makan minum rapat tamu	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	10 rapat	10 rapat	3,375,000	-	(3,375,000)	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									DINAS KOMINFO
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional/lapangan	JumlahPembayaran surat tanda nomor kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional/lapangan	jumlah Pembayaran surat tanda nomor kendaraan	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	6 STNK	6 STNK	3,208,860	2,925,500	(283,360)	DINAS KOMINFO
						Jumlah penggantian suku cadang		Jumlah penggantian suku cadang			2 kendaraan	2 kendaraan	16,500,000	16,500,000	-	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	7 unit	7 unit	3,500,000	3,500,000	-	DINAS KOMINFO
2	16	02			Program Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Kegiatan Operasional Kehumasan dan data dan Informasi		Persentase Kegiatan Operasional Kehumasan dan data dan Informasi	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	100%	100%	1,963,468,000	1,566,056,500	(397,411,500)	DINAS KOMINFO

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									DINAS KOMINFO
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi publik	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	3 jenis	3 jenis	1,282,783,000	1,044,177,500	(238,605,500)	DINAS KOMINFO
2	16	02	2.01	07	Layanan hubungan media	Jumlah media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	Layanan hubungan media	Jumlah media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	3 media		547,020,500	485,042,000	(61,978,500)	DINAS KOMINFO
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerjasama antar lembaga pemerintah dalam penyebarluasan informasi	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerjasama antar lembaga pemerintah dalam penyebarluasan informasi			2 jenis	2 jenis	11,976,000	-	(11,976,000)	DINAS KOMINFO
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Jumlah Jenis informasi publik yang dipublikasikan dan kelola PPID	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Jumlah Jenis informasi publik yang dipublikasikan dan kelola PPID	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	6 jenis	6 jenis	21,338,000	3,942,000	(17,396,000)	DINAS KOMINFO
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	350 kali	350 kali	100,350,500	32,895,000	(67,455,500)	DINAS KOMINFO
2	16	03			Program aplikasi Informatika	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program aplikasi Informatika	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	100%	100%	2,150,742,800	1,360,173,000	(790,569,800)	DINAS KOMINFO
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah		Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta						DINAS KOMINFO
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan internet dan intranet	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan internet dan intranet	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	10 jenis	2 jenis	693,655,000	93,500,000	(600,155,000)	DINAS KOMINFO
						Jumlah sewa bandwidth dan lisensi zoom		Jumlah sewa bandwidth dan lisensi zoom			2 jenis	2 jenis	1,148,079,800	1,024,000,000	(124,079,800)	DINAS KOMINFO
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	tersedianya sumberdaya pengelola TIK lingkup pemerintah daerah	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah honorarium pegawai tidak tetap pengelola TIK	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	5 org	5 org	294,000,000	210,000,000	(84,000,000)	DINAS KOMINFO
					Pengelolaan Government Chief information Officer (GCIO)	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan dibidang e-Government	Pengelolaan Government Chief information Officer (GCIO)	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan dibidang e-Government	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	2 org	2 org	15,008,000	32,673,000	17,665,000	DINAS KOMINFO
2	17				BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						3,398,411,820	3,634,666,136	236,254,316	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Barrtu	Barrtu	27 Org	27 Org	2,884,845,722	2,884,845,722	-	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Managerial;	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Managerial;	Barrtu	Barrtu						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Barrtu	Barrtu	4 Orang	4 Orang	22,624,920	51,762,000	29,137,080	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Perundang-Undangan	Barrtu	Barrtu			-			Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Barrtu	Barrtu						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	Barrru	Barrru	4 Jenis	4 Jenis	750,000	24,317,000	23,567,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Barrru	Barrru	220 OK	220 OK	141,477,000	220,382,500	78,905,500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barrrru	Barrrru						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Barrru	Barrru						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Barrru	Barrru	27 Unit	18 Unit	10,000,000	57,000,000	47,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gegung Kantor	Pengadaan Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gegung Kantor	Barrru	Barrru	2 Unit	2 Unit	10,000,000	32,675,000	22,675,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Barrru	Barrru	3 Unit	2 Unit	10,000,000	8,037,000	(1,963,000)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat yang dikelola selama satu tahun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat yang dikelola selama satu tahun	Barrrru	Barrrru						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola selama satu tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola selama satu tahun	Barrru	Barrru	400 Surat	400 Surat	76,747,000	106,062,500	29,315,500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Barrru	Barrru	2 Rekening	2 Rekening	10,200,000	33,905,500	23,705,500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barrrru	Barrrru						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang layak pakai dan STNK yang diperpanjang perizinannya	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang layak pakai dan STNK yang diperpanjang perizinannya	Barrru	Barrru	12 Unit	12 Unit	20,200,000	28,975,500	8,775,500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang layak pakai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang layak pakai	Barrru	Barrru	12 Unit	12 Unit	3,500,000	4,900,000	1,400,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	Barrru	Barrru	3 Unit	3 Unit	205,567,178	179,803,414	(25,763,764)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	Barrru	Barrru	4 Unit	4 Unit	2,500,000	2,000,000	(500,000)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP, KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP, KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	7 Kec.	7 Kec.	55	55	75,441,300	55,602,900	(19,838,400)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		7 Kec.	7 Kec.						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	7 Kec.	7 Kec.	36	36	75,441,300	55,602,900	(19,838,400)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang mendapat penghargaan	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang mendapat penghargaan	7 Kec.	7 Kec.						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	7 Kec.	7 Kec.	66	66	70,000,000	268,300,000	198,300,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	7 Kec.	7 Kec.						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Tersedianya Tenaga kerja koperasi yang profesional	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Tersedianya Tenaga kerja koperasi yang profesional	7 Kec.	7 Kec.	10 Kop	10 Kop	70,000,000	268,300,000	198,300,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	7 Kec.	7 Kec.			227,565,365	156,239,000	(71,326,365)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitas bantuan modal usaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitas bantuan modal usaha	7 Kec.	7 Kec.						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMK yang difasilitasi kemitraan usaha dalam peningkatan permodalan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMK yang difasilitasi kemitraan usaha dalam peningkatan permodalan	7 Kec.	7 Kec.						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan	7 Kec.	7 Kec.	12 UMK	12 UMK	177,565,365	136,014,000	(41,551,365)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UMK yang dipromosikan produknya/Jumlah Pameran Promosi UMK yang diikuti	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UMK yang dipromosikan produknya/Jumlah Pameran Promosi UMK yang diikuti	7 Kec.	7 Kec.	4 Kali	4 Kali	50,000,000	20,225,000	(29,775,000)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	7 Kec.	7 Kec.	0.46	0.46	42,483,500	309,341,500	266,858,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	7 Kec.	7 Kec.	0.46	0.46				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi, standarisasi, Promosi, sertifikasi produk usaha dan Pengembangan SDM	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi, standarisasi, Promosi, sertifikasi produk usaha dan Pengembangan SDM	7 Kec.	7 Kec.	100	100	42,483,500	309,341,500	266,858,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Bantuan fasilitasi sertifikasi produk		Bantuan fasilitasi sertifikasi produk	7 Kec.	7 Kec.	5 Klp	5 Klp				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	18				BIDANG PENANAMAN MODAL											
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	7 Kec.	7 Kec.	100%	100%	3,160,343,011	3,384,501,589	224,158,578	DPMPTSP
2	18	01	2:02		Administrasi Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	Administrasi Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	Kec. Barru	Kec. Barru	100%	100%				DPMPTSP
2	18	1	0:28	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayar kannya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayar kannya gaji dan tunjangan ASN	Kec. Barru	Kec. Barru	12 bulan	12 bulan	2,568,871,231	2,568,871,231	-	DPMPTSP
2	18	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	7 Kecamatan, Makassar, Jawa & Sumatera	7 Kecamatan, Makassar, Jawa & Sumatera	100%	100%				DPMPTSP
2	18	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Barru	Kec. Barru	20 Jenis	0 Jenis	3,372,000	2,382,000	(990,000)	DPMPTSP
2	18	01	02.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor	Kec. Barru	Kec. Barru	66 Jenis	6 Jenis	7,261,500	30,310,600	23,049,100	DPMPTSP
2	18	01	02.06	08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan Minum	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan Minum	7 Kec.	7 Kec.	1340 OH	0 OH	19,569,000	-		DPMPTSP
2	18	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah	Makassar, Jawa, Sumatera	Makassar, Jawa, Sumatera	30 OK	92 OK	259,205,000	251,935,762	(7,269,238)	DPMPTSP
								Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah				85 OK		9,000,000	9,000,000	DPMPTSP
2	18	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuh	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuh	Kec. Barru	Kec. Barru	100%	100%				DPMPTSP
2	18	01	02.07	05	Pengadaan Mebel		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel			0 Set	1 Set	-	11,049,310	11,049,310	DPMPTSP
2	18	01	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sapras Gedung Kantor yang tersedia	Kec. Barru	Kec. Barru	9 Unit	109 unit	-	349,192,106	349,192,106	DPMPTSP
2	18	01	02.07	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Barru	Kec. Barru	12 Unit	0 Unit	96,190,000	-		DPMPTSP
2	18	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Kec. Barru	Kec. Barru	100%	100%				DPMPTSP
2	18	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun	7 Kec.	7 Kec.	600 eks	600 eks	47,265,100	43,354,400	(3,910,700)	DPMPTSP
2	18	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Kec. Barru	Kec. Barru	3 Rekening	3 Rekening	17,400,000	2,080,000	(15,320,000)	DPMPTSP
2	18	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai	Kec. Barru	Kec. Barru	100%	100%				DPMPTSP
2	18	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kec. Barru	Kec. Barru	12 Unit	12 Unit	37,673,680	26,188,680	(11,485,000)	DPMPTSP
2	18	01	02.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kec. Barru	Kec. Barru	1 Unit	1 Unit	9,536,000	-	(9,536,000)	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	01	02.03	32	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kec. Barru	Kec. Barru	11 Unit	11 Unit	2,550,000	-	(2,550,000)	DPMPTSP
2	18	01	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Barru	Kec. Barru	22 Unit	25 Unit	11,450,000	9,350,000	(2,100,000)	DPMPTSP
2	18	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	Makassar, Jawa	Makassar, Jawa	100%	100%				DPMPTSP
2	18	01	02.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur dan penanaman modal dan Tenaga Kerja yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan Tenaga Kerja	Makassar, Jawa	Makassar, Jawa	5 Orang	5 Orang	38,750,500	28,303,000	(10,447,500)	DPMPTSP
2	18	01	02.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Makassar, Jawa	Makassar, Jawa	3 Orang	21 Orang	41,249,000	54,866,500	13,617,500	DPMPTSP
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pedoman Investasi dan system informasi Perizinan Penanaman Modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun dan dilaksanakan	Barru	Barru	55.88%	11.11%	202,658,000	56,283,500	(146,374,500)	DPMPTSP
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan laporan Fasilitas / insentif Penanaman Modal yang terselesaikan	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	0%				DPMPTSP
2	18	2	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	7 Kecamatan	7 Kecamatan	2 Dok	0 Dok.	11,000,000		(11,000,000)	DPMPTSP
2	18	2	2:02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Penyajian informasi potensi unggulan	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Peta Potensi investasi dari jumlah potensi investasi	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	20%			-	DPMPTSP
2	18	02	2:02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah / Kabupaten (RUPMD)	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah / Kabupaten (RUPMD)	7 Kecamatan	7 Kecamatan	0	0	19,840,000	-	(19,840,000)	DPMPTSP
2	18	02	2:02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku potensi unggulan Penanaman Modal	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku potensi unggulan Penanaman Modal	Kec. Barru	7 Kecamatan	200	200	171,818,000	56,283,500	(115,534,500)	DPMPTSP
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang mengenal potensi investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi	7 Kec.	Kec. Barru, Makassar, Jawa dan Sumatera	420 Investor	80.00%	360,826,150	63,511,000	(297,315,150)	DPMPTSP
2	18	03	2:01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Kec. Barru, Makassar, Jawa dan Sumatera	Kec. Barru, Makassar, Jawa dan Sumatera						DPMPTSP
2	18	03	2:01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		7 Kec.	-			75,000,000	-	(75,000,000)	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	03	2:01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kec. Barru, Makassar, Jawa dan Sumatera	Jawa			285,826,150	63,511,000	(222,315,150)	DPMPTSP
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai SOP	7 Kec.	7 Kec.	85	96.98%	529,895,000	507,175,538	(22,719,462)	DPMPTSP
2	18	04	2:01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		7 Kec.	7 Kec.						DPMPTSP
2	18	04	2:01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kec. Barru	Kec. Barru			325,395,000	366,752,538	41,357,538	DPMPTSP
2	18	04	2:01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		7 Kec.	7 Kec.			204,500,000	140,423,000	(64,077,000)	DPMPTSP
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Kec. Barru	Kec. Barru	780 Milyar	120 Milyar	65,907,000	322,573,000	256,666,000	DPMPTSP
2	18	05	2:01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang mengenal potensi investasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	7 Kec.	7 Kec.	420 Investor	12.74%				DPMPTSP
2	18	05	2:01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	7 Kec.	7 Kec.	0	0		111,580,000	111,580,000	DPMPTSP
						-		Jumlah Profile Pemantauan Perusahaan PMDN/PMA	7 Kec.	7 Kec.	-	81 Profile Perusahaan		-		DPMPTSP
2	18	05	2:01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/PMA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/FMA	7 Kec.	7 Kec.	4	4%	47,450,000	141,983,000	94,533,000	DPMPTSP
								Persentase Penyelesaian MOU Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/FMA	7 Kec.	7 Kec.	-	300 Orang		-		DPMPTSP
2	18	05	2:01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan / Pengendalian (LKPM) yang terselesaikan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan / Pengendalian (LKPM) yang terselesaikan	7 Kec.	7 Kec.	35 Laporan	35 Laporan	18,457,000	69,010,000	50,553,000	DPMPTSP
								Jumlah Profile Pengawasan Perusahaan PMDN/PMA	7 Kec.	7 Kec.		80 Profile Pengawasan		-	-	DPMPTSP
2	19				BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA											

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1					2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Barru	Barru	100%	100%	2,963,071,662.00	2,963,071,662	-	DIKPORA		
				Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana		100%			100%							
				Persentase kualitas SDM aparatur Budparpora		Persentase kualitas SDM aparatur Budparpora		100%			100%							
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%						
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	2,488,969,712	2,488,969,712	-			
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			3 Jenis	3 Jenis					DIKPORA	
2	19	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pembayaran jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pembayaran jasa surat menyurat	Barru	Barru	500 Surat	500 Surat					DIKPORA	
						Jumlah tenaga honorer		Jumlah tenaga honorer	Barru	Barru	6 Ok	6 Ok	36,000,000.00	36,000,000	-	DIKPORA		
						Jumlah Jenis alat tulis kantor		Jumlah Jenis alat tulis kantor	Barru	Barru	41 Jenis	41 Jenis	10,500,000.00	10,500,000	-	DIKPORA		
						Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Barru	Barru	6 Jenis	6 Jenis	12,500,000.00	12,500,000	-	DIKPORA		
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air	Barru	Barru	3 rekening	3 rekening	13,800,000.00	13,800,000	-	DIKPORA		
2	19	1	2.08	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis	7,200,000.00	7,200,000	-	DIKPORA		
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Sub kegiatan yang mendukung kegiatan adm umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Sub kegiatan yang mendukung kegiatan adm umum			5 Jenis	5 Jenis					DIKPORA	
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disiapkan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disiapkan	Barru	Barru	4 Jenis	4 Jenis	771,000.00	771,000	-	DIKPORA		
2	19	1	2.03	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis	14,028,200.00	14,028,200	-	DIKPORA		
						Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor			3 Jenis	3 Jenis	42,369,200.00	42,369,200	-	DIKPORA		
2	19	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	Barru	Barru	12 Jenis	12 Jenis	2,369,550.00	2,369,550	-	DIKPORA		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Barru	Barru	102 Kali	102 Kali	150,000,000.00	150,000,000	-	DIKPORA
2	19	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah			1 Jenis	1 Jenis				DIKPORA
2	19	1	2.07	5	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan meubeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan meubeleur	Barru	Barru	8 Jenis	8 Jenis	56,459,000.00	56,459,000	-	DIKPORA
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah			4 Jenis	4 Jenis				DIKPORA
2	19	1	2.09	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	12,500,000.00	12,500,000	-	DIKPORA
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Barru	Barru	2 Unit	2 Unit	2,500,000.00	2,500,000	-	DIKPORA
						Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Barru	Barru	2 Unit	2 Unit	20,540,000.00	20,540,000	-	DIKPORA
						Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Barru	Barru	2 Unit	2 Unit	15,800,000.00	15,800,000	-	DIKPORA
						Volume Penyediaan Bahan Bakar (BBM) operasional kendaraan		Volume Penyediaan Bahan Bakar (BBM) operasional kendaraan	Barru	Barru	600 Liter	600 Liter	4,740,000.00	4,740,000	-	DIKPORA
2	19	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Barru	Barru	3 Unit	3 Unit	1,500,000.00	1,500,000	-	DIKPORA
2	19	1	2.09	2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mobilieur yang telah diperbaiki	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mobilieur yang telah diperbaiki	Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	3,075,000.00	3,075,000	-	DIKPORA
2	19	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			6 Orang	6 Orang				DIKPORA
2	19	1	2.04	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Barru	Barru	3 Orang	3 Orang	32,000,000.00	32,000,000	-	DIKPORA
2	19	1	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Barru	Barru	2 Orang	2 Orang	21,000,000.00	21,000,000	-	DIKPORA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	1	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BinteK implementasi perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BinteK implementasi perundang-undangan	Barru	Barru	1 Orang	1 Orang	14,450,000.00	14,450,000	-	DIKPORA
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya lapangan kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya lapangan kerja			100 orang	100 orang	1,185,996,400.00	1,153,485,400	(32,511,000)	DIKPORA
						Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina		Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina			100%	100%				
						Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik			100%	100%				
						Jumlah atlet yang tangguh dan handal		Jumlah atlet yang tangguh dan handal			192	192				
						Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina		Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina			100%	100%				
						Jumlah Organisasi Pemuda Yang aktif		Jumlah Organisasi Pemuda Yang aktif			105	105				
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kualitas SDM	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kualitas SDM			220 Orang	220 Orang				DIKPORA
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Barru	Barru	50 orang	50 orang	29,794,000.00	29,794,000	-	DIKPORA
						Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan		Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan	Barru	Barru	50 orang	50 orang	21,904,000.00	21,904,000	-	DIKPORA
						Pelatihan Keterampilan Pemuda		Pelatihan Keterampilan Pemuda	5 lingkungan/Kec. Mallusetasi	5 lingkungan/Kec.M allusetasi	± 20 Orang	± 20 Orang				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan			100 orang	100 orang	12,763,000.00	12,763,000	-	DIKPORA
2	19	2	2.01	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang terpelihara	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang terpelihara	Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	136,600,000.00	136,600,000	-	DIKPORA
2	19	2	2.01	8	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka)	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka)	Barru, Makassar, Jakarta	Barru, Makassar, Jakarta	70 Orang	70 Orang	741,645,000.00	741,645,000	-	DIKPORA
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2 Jenis	2 Jenis				DIKPORA
2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Data Potensi Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Data Potensi Kepemudaan	Barru	Barru	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000.00	20,000,000	-	DIKPORA
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pengkaderan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pengkaderan			3 OKP	3 OKP	180,068,000.00	147,557,000	(32,511,000)	DIKPORA
						Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan		Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan			50 orang	50 orang	16,146,600.00	16,146,600	-	DIKPORA
						Jumlah orang yang mengikuti Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah		Jumlah orang yang mengikuti Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah			100 orang	100 orang	16,528,000.00	16,528,000	-	DIKPORA
						Jumlah kegiatan pameran yang diikuti		Jumlah kegiatan pameran yang diikuti			50 orang	50 orang	10,547,800.00	10,547,800	-	DIKPORA
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Olah Raga yang dilaksanakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Olah Raga yang dilaksanakan			100	100	36,140,756,500	2,466,656,500	(33,674,100,000)	DIKPORA
						Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik			100%	100%				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah atlet yang tangguh dan handal	Jumlah atlet yang tangguh dan handal	Jumlah atlet yang tangguh dan handal	Jumlah atlet yang tangguh dan handal			192	192				
				Jumlah atlet yang tangguh dan handal							192	192				
				Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik							100%	100%				
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang dilaksanakan			1 Jenis	1 Jenis				DIKPORA
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pelatihan wasit sepak bola	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pelatihan wasit sepak bola	Regional Nasional	Regional Nasional	10 Orang	10 Orang				DIKPORA
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun		Barru	Barru	6 Unit	6 Unit			-	DIKPORA
					Pembangunan Stadion Olahraga Ramang (Tahap 1)		Pembangunan Stadion Olahraga Ramang (Tahap 1)		Barru, Makassar,Jakarta	Barru, Makassar,Jakarta	1 Unit	1 Unit	33,505,445,000.00	-	(33,505,445,000)	DIKPORA
					Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola		Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola		Barru / Makassar	Barru / Makassar	1 Unit	1 Unit	537,825,000.00	537,825,000	-	DIKPORA
					Pembangunan Pagar dan Fasilitas Pendukung		Pembangunan Pagar dan Fasilitas Pendukung		Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	537,825,000.00	537,825,000	-	DIKPORA
					Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola		Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola				1 Unit	1 Unit	644,825,000.00	644,825,000	-	DIKPORA
					Pembangunan Lapangan Volly		Pembangunan Lapangan Volly		Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	95,800,000.00	95,800,000	-	DIKPORA
					Pembangunan Lapangan Takraw		Pembangunan Lapangan Takraw		Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	64,600,000.00	64,600,000	-	DIKPORA
					Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola A. Abd. Muis		Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola A. Abd. Muis		5 lingkungan/Kec. Mallusetasi	5 lingkungan/Kec.M allusetasi	520 Meter	520 Meter				DIKPORA
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara				3 Unit	3 Unit				DIKPORA
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	40,000,000.00	40,000,000	-	DIKPORA
					Pemeliharaan GOR Sport Centre Barru Pemasangan Tegel		Pemeliharaan GOR Sport Centre Barru Pemasangan Tegel				1 Unit	1 Unit	207,080,000.00	207,080,000	-	DIKPORA
					Pemeliharaan Lapangan Basket Kel. S. Binangae		Pemeliharaan Lapangan Basket Kel. S. Binangae		Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	205,000,000.00	205,000,000	-	DIKPORA
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegaitan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegaitan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah			1 Jenis	1 Jenis				DIKPORA
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti POPDA dan KEJURDA Pelajar	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti POPDA dan KEJURDA Pelajar	Barru, Makassar, Jakarta	Barru, Makassar, Jakarta	60 Atlet	60 Atlet	168,655,000.00	-	(168,655,000)	DIKPORA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumleh Jenis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasu Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumleh Jenis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasu Tingkat Daerah Provinsi			2 Jenis	2 Jenis				DIKPORA
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet pelajar yang berbakat dan berpotensi	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet pelajar yang berbakat dan berpotensi	Barru	Barru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,872,000.00	75,872,000	-	DIKPORA
2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang berfungsi baik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang berfungsi baik			1 Kegiatan	1 Kegiatan	21,590,000.00	21,590,000	-	DIKPORA
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2 Jenis	2 Jenis				DIKPORA
2	19	3	2.04	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Wasit / Pelatih yang mengikuti sertifikasi dan standarisasi profesi	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Wasit / Pelatih yang mengikuti sertifikasi dan standarisasi profesi	Barru	Barru	5 orang	5 orang	19,000,000.00	19,000,000	-	DIKPORA
2	19	3	2.04	5	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi cabang olahraga yang dibina	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi cabang olahraga yang dibina			5 organisasi	5 organisasi	17,239,500.00	17,239,500	-	DIKPORA
2	20				BIDANG STATISTIK											
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data Statistik sesuai standar baku dan tepat waktu	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data Statistik sesuai standar baku dan tepat waktu			100%	100%	272,553,600	172,059,800	(100,493,800)	DINAS KOMINFO
2	20	02	2.02		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota									DINAS KOMINFO
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	6 dokumen	6 dokumen	272,553,600	172,059,800	(100,493,800)	DINAS KOMINFO
2	21				BIDANG PERSANDIAN											
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi			100%	100%	50,000,000	103,938,000	53,938,000	DINAS KOMINFO
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan informasi Pemerintah daerah kabupaten/Kota		Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan informasi Pemerintah daerah kabupaten/Kota									DINAS KOMINFO
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non elektronik	Jumlah dokumen yang dikirim dan diterima serta diamankan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non elektronik	Jumlah dokumen yang dikirim dan diterima serta diamankan	Kantor Diskominsta	Kantor Diskominsta	1000 surat	1000 surat	50,000,000	103,938,000	53,938,000	DINAS KOMINFO
2	22				BIDANG KEBUDAYAAN											
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan			0.067	0.067	170,000,000	53,947,000	(116,053,000)	DISDIK

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	05	201		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya			1 Jenis	1 Jenis				DISDIK
2	22	05	201	02	Penetapan cagar budaya	Jumlah peninggalan sejarah dan situs-situs bersejarah yang dilestarikan	Penetapan cagar budaya	Jumlah peninggalan sejarah dan situs-situs bersejarah yang dilestarikan	Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	170,000,000	53,947,000	(116,053,000)	DISDIK
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan			0.067	0.067	657,000,000	858,045,200	201,045,200	DISDIK
						Jumlah budaya lokal yang dilestarikan		Jumlah budaya lokal yang dilestarikan			1	1				
2	22	02	202		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional			2 Jenis	2 Jenis				DISDIK
2	22	02	202	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan: Kesenian Daerah, Karnaval budaya, Festival Budaya, Pentas budaya, Permainan Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan: Kesenian Daerah, Karnaval budaya, Festival Budaya, Pentas budaya, Permainan Tradisional	Barru	Barru	6 Event	6 Event	420,000,000	643,038,900	223,038,900	DISDIK
2	22	02	202	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah tenaga juru budaya yang difasilitasi dan dibina	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah tenaga juru budaya yang difasilitasi dan dibina	Barru	Barru	20 orang	20 orang	102,000,000	92,260,000	(9,740,000)	DISDIK
2	22	02	203		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat			1 Keg	1 Keg				DISDIK
2	22	02	203	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan	Barru	Barru	1 Lembaga	1 Lembaga	135,000,000	122,746,300	(12,253,700)	DISDIK
2	22	03	203		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan			300 orang	300 orang	631,736,010	335,947,000	(295,789,010)	DISDIK
2	22	03	203		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian Masyarakat	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian Masyarakat			15 Group	15 Group				DISDIK

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	03	203	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni taradisional dan seni keagamaan yang terbina	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni taradisional dan seni keagamaan yang terbina	Barru	Barru	15 group	15 group	631,736,010	335,947,000	(295,789,010)	DISDIK
2	23				BIDANG PERPUSTAKAAN											
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100%	100%	3,466,477,492	3,366,899,736	(99,577,756)	DINAS PERPUS & ARSIP
				Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		100%			100%					
				Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparatur		Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparatur		100%			100%					
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	3,087,759,042	3,087,759,042	-	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase PNS yang mengikuti Diklat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase PNS yang mengikuti Diklat	Barru	Barru	20%	20%				DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal	Barru	Barru	13 Orang	13 Orang	9,600,000	4,480,000	(5,120,000)	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Barru	Barru	4 Orang	4 Orang	45,745,000	33,420,000	(12,325,000)	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah			2 Jenis	2 Jenis				DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Barru	Barru	6 jenis	386,500	386,500	386,500	-	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat -rapat dan Koordinasi Keluar Daerah	Barru	Barru	16 kali	57,083,000	57,083,000	39,851,000	(17,232,000)	DINAS PERPUS & ARSIP
								Jumlah Rapat - Rapat dan Koordinasi Kedalam Daerah			118 kali	6,580,000	6,580,000			

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	01.	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pendukung pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pendukung pengadaan barang milik daerah			1 jenis	1 jenis				DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Barru	Barru	2 Unit	0	36,000,000	-	(36,000,000)	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pendukung Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pendukung Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			3 jenis	3 jenis				DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Barru	Barru	500 Surat	500 Surat	134,183,200	125,652,400	(8,530,800)	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Barru	Barru	3 Rek	3 Rek	32,340,000	32,339,994	(6)	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.	2.08	04	Penyediaan jasa pelayananan umum kantor	Jumlah pegawai kebersihan kantor	Penyediaan jasa pelayananan umum kantor	Jumlah pegawai kebersihan kantor	Barru	Barru	2 Orang	2 Orang	9,600,000	9,600,000	-	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.2.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peeizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peeizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Barru	Barru	12 Unit	12 Unit	20,979,750	17,789,300	(3,190,450)	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Barru	Barru	80 buah	-	2,510,000	-	(2,510,000)	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	01.2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Barru	Barru	14 unit	14 unit	13,900,000	10,400,000	(3,500,000)	DINAS PERPUS & ARSIP
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			14 unit	14 unit					
2	23	01.2.09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	9,811,000	5,221,500	(4,589,500)	DINAS PERPUS & ARSIP
2	23	2			Porgram Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum perpustakaan Kel/Desa Taman Baca	Porgram Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum perpustakaan Kel/Desa Taman Baca	Barru	Barru	1-55-105	1-55-105	1,221,000,400	582,780,500	(638,219,900)	DINAS PERPUS & ARSIP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah						
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	02.	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan Pepustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan Pepustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik	Barru	Barru	100%	100%							DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	02.	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku (Eks)	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku (Eks)	Barru	Barru	6.000 Eks	6.000 Eks	615,000,000		7,613,500	(607,386,500)		DINAS PERPUS & ARSIP		
				Jumlah abstrak buku yang diterbitkan		Jumlah abstrak buku yang diterbitkan		6 Abstrak			6 Abstrak	4,000,000								
				Jumlah surat kabar yang dijilid		Jumlah surat kabar yang dijilid		3 Judul			3 Judul	4,000,000								
2	23	02.	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah/Kab/Kota yang terlaksana dengan baik	Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah/Kab/Kota yang terlaksana dengan baik			100%	100%							DINAS PERPUS & ARSIP	
2	23	02.	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah jenis kegiatan yang mendukung pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah jenis kegiatan yang mendukung pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca			3 jenis	3 jenis	598,000,400		575,167,000		(22,833,400)		DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24				BIDANG KEARSIPAN															
2	24	02			Program Pengelolaan Arsip	Presentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Presentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan	Barru	Barru	14.998 Dok	14.998 Dok	16,257,000		10,352,000		(5,905,000)		DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Barru	Barru	1 Kegiatan	1 Kegiatan							DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dipelihara	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dipelihara	Barru	Barru	13.998 Dok	13.998 Dok	2,728,000		2,728,000		-		DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Barru	Barru	2 Kegiatan	2 Kegiatan							DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah jenis dokumen kearsipan	Pengumpulan dan penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah jenis dokumen kearsipan	Barru	Barru	2 Jenis	2 Jenis	5,920,000		4,118,000		(1,802,000)		DINAS PERPUS & ARSIP	
2	24	02.			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Barru	Barru	3 Kegiatan	3 Kegiatan							DINAS PERPUS & ARSIP	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah												
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)															
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)													
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi Akses Layanan , Kearsipan dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN	Jumlah dokumen katalog data yang disusun	Penyediaan Informasi Akses Layanan , Kearsipan dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN	Jumlah dokumen katalog data yang disusun	Barru	Barru	1 Eks	2,152,200	2,152,200	-	(2,152,200)	DINAS PERPUS & ARSIP												
				Jumlah naskah sumber arsip		Jumlah naskah sumber arsip		1 eks			1,711,200	1,711,200	(1,711,200)															
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan	Barru	Barru	70 Orang	70 Orang	3,745,600	3,506,000	(239,600)	DINAS PERPUS & ARSIP												
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
2	25				BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
3	25	01			Program Penunjang Urusan Peemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terenuhi	Program Penunjang Urusan Peemerintahan Daerah	Terpenuhinya dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Barru	Barru	100%	100%	2,903,995,336	2,958,108,308	54,112,972	Dinas Perikanan												
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24	25				Dinas Perikanan												
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,744,109,308			24	25	2,510,641,336	2,510,641,336	-	Dinas Perikanan												
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah yang terlaksana				100%				Dinas Perikanan												
3	25	01	2.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			3 Orang	3 Orang	34,000,000	36,619,500	2,619,500	Dinas Perikanan												
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pendukung administrasi umum perangkat daerah			13 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan				Dinas Perikanan												
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/peerangan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik			3 jenis	3 Jenis	700,000	4,883,000	4,183,000	Dinas Perikanan												
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat dan perlengkapan kantor			9 Jenis	9 Jenis	3,709,700	4,278,200	568,500	Dinas Perikanan												
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan konsultasi SPKD	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan konsultasi SPKD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Provinsi dan dalam Daerah			193 Kali	280 kali	250,000,000	273,022,000	23,022,000	Dinas Perikanan												
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan								Dinas Perikanan												
3	25	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnnya	Jumlah barang milik daerah yang diadakan			7 Jenis	3 jenis	18,000,000	14,058,000	(3,942,000)	Dinas Perikanan												
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 Sub kegiatan					Dinas Perikanan												
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis surat menyurat			5 jenis	3 Jenis	36,142,000	28,449,100	(7,692,900)	Dinas Perikanan												
3	25	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Kantor			12 Bulan	2 rekening	12,000,000	11,998,572	(1,428)	Dinas Perikanan												
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penyuluh bantu, clining servis dan sopir			2 Orang	7 orang	4,800,000	27,000,000	22,200,000	Dinas Perikanan												

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara								Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional			15 unit	21 unit	30,700,000	39,900,000	9,200,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan diperbaiki	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara			5 unit	11 unit	5,212,000	4,760,000	(452,000)	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung dan Pagar, penataan taman, perbaikan instalasi air, telepon dan listrik	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 unit	1 unit	2,500,000	2,498,600	(1,400)	Dinas Perikanan
3	25	03			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Hasil Penangkapan ikan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			20.546,53 ton	19863,55 Ton	2,543,404,451	1,696,265,879	(847,138,572)	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01		Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah kelompok yang mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan	Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah kelompok yang mendapatkan armada Penangkapan ikan, alat tangkap ikan, Mesin perahu dan sarana pendukung penangkapan ikan								Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi sumberdaya ikan	Jumlah dokumen data informasi statistik perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan	Penyediaan Data dan Informasi sumberdaya ikan	Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan yang akurat dan tepat waktu			3 Dokumen	3 Dokumen	52,000,000	44,714,600	(7,285,400)	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapatkan armada perikanan tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapatkan armada perikanan tangkap				4 Kelompok/ 1 dermaga		500,000,000	500,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapatk bantuan Mesin armada Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapatk bantuan Mesin armada Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan			8 Kelompok	9 Kelompok	900,000,000	910,000,000	10,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan sarana penangkapan ikan	Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha								Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan dan Pembinaan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan dan Pembinaan			4 Kelompok		1,200,000,000	430,902,275	(769,097,725)	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan dan Pembinaan	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok Perikanan tangkap yang terbentuk			4 kelompok	4 kelompok	276,404,451	8,924,875	(267,479,576)	Dinas Perikanan
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Cakupan Jumlah TPI yang dikelola	Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Jumlah TPI Yang terkelola			50%					Dinas Perikanan
3	25	03	2.03	02	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang di bangun	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang di bangun	Desa Siddo	Desa Siddo	1 Unit	1 Unit	115,000,000	98,500,729	(16,499,271)	Dinas Perikanan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang beroperasi disungai,Danau,Waduk, Rawa, dan Genagan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota	Jumlah kapal yang terdaftar	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang beroperasi disungai,Danau,Waduk, Rawa, dan Genagan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota	Jumlah kapal yang terdaftar			50 Dokumen	50 Dokumen				Dinas Perikanan
3	25	03	2.06	02	Pelayanan penertiban Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dukumen TPUI dan TPKPIH	Pelayanan penertiban Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dukumen TPUI dan TPKPIH			50 Dokumen	50 Dokumen	14,458,500	14,458,500	-	Dinas Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Hasil Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			7.539,48 ton	6327,97 Ton	1,120,485,050	1,053,158,822	(67,326,228)	Dinas Perikanan
3	25	04	2.01		Penerbitan izin Usaha Perikanan diBidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan surat izin Usaha	Penerbitan izin Usaha Perikanan diBidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan								Dinas Perikanan
3	25	04	2.01	07	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam satu Daerah Kabupaten Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Smei Intensif, dan Intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	Jumlah rekomendasi Izin Perikanan yang terlaksana	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam satu Daerah Kabupaten Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Smei Intensif, dan Intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Budidaya yang terbitkan	Barru	Barru	50 surat	5 Rekomendasi	20,000,000	15,955,700	(4,044,300)	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan pengembangan Usaha	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha								Dinas Perikanan
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan Kecil	Jumlah kelompok yang menerapkan kegiatan budidaya komoditi unggulan perikanan	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan Kecil	Jumlah Kelompok (POKDAKAN) yang ditingkatkan Kapasitas kelembagaannya	Desa Manuba, lalabata, Soreang T.Rilau, Ajakkang, Lawallu	Barru	6 Kelompok	6 Kelompok	150,000,000	750,000	(149,250,000)	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02	02	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pembudidaya ikan yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Barru	Barru	5 Kelompok	20 Orang		19,694,500	19,694,500	Dinas Perikanan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah	
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana Budidaya ikan	Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha								Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana Budiadaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana Budiadaya	Lipukasi , Corawali	Lipukasi , Corawali	5 Kelompok	5 Kelompok	150,000,000	146,884,622	(3,115,378)	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana Budiadaya	Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan	Jumlah sarana Pembudidaya ikan (kincir, mesin pompa air, blower, Kolam terpal, KJA,	Maralleng (Pao-Pao), MinangaToa (Ajakkang)	Maralleng (Pao-Pao), MinangaToa (Ajakkang), Harapan, Lipukasi,Coppo, Takkalasi, Lawallu, Cilellang	5 Kelompok	10 Kelompok	487,050,000	582,237,500	95,187,500	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang menerapkan kegiatan budidaya komoditi unggulan perikanan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang menerapkan kegiatan budidaya komoditi unggulan perikanan	Desa Manuba, lalabata, Soreang T.Rilau, Ajakkang, Lawallu	Barru	4 Kelompok	4 Kelompok	100,000,000	19,694,500	(80,305,500)	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	Jumlah kawasan perikanan budidaya yang dikembangkan	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	Jumlah kawasan perikanan budidaya yang dikembangkan	Lawallu	Lawallu	1 kawasan	1 kawasan	113,435,050	73,116,000	(40,319,050)	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Panjang (km) saluran tambak yang dibangun / rehabilitasi	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Panjang (km) saluran tambak yang dibangun / rehabilitasi	Siawung	Bulo-bulo, Bacu-bacu,Siawung	2 km	2 km	100,000,000	194,826,000	94,826,000	Dinas Perikanan	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMESARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Kelompok pengolah dan pemasar yang mandiri	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMESARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Produk Olahah perikanan			4 kelompok	1352,37 Ton	125,000,000	36,974,000	(88,026,000)	Dinas Perikanan	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan sumberdaya Manusia	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana Pengolahan ikan			3 kegiatan	4 Kelompok				Dinas Perikanan	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar Pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kegiatan pameran dan lomba kelompok perikanan yang diikuti	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar Pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan hasil Produksi Perikanan			3 kegiatan	4 Kelompok	35,000,000	-	(35,000,000)	Dinas Perikanan	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Kelompok yang mendapatkan sarana dan prasarana Pengolahan dan pemasaran ikan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Kelompok yang mendapatkan sarana dan prasarana Pengolahan dan pemasaran ikan			4 kelompok	6 jenis				Dinas Perikanan	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi dan Usaha Pengolahan dalam satu Daerah	Jumlah Kelompok yang mendapatkan sarana dan prasarana pemasaran ikan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi dan Usaha Pengolahan dalam satu Daerah	Jumlah jenis sarana pengolahan ikan komsumsi			2 kelompok	2 Jenis	45,000,000	36,974,000	(8,026,000)	Dinas Perikanan	
3	25	06	2.03	02	Pemberian fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Kelompok pemasaran ikan	Pemberian fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah jenis sarana dan prasarana pengolahan dan Pemasaran ikan untuk POKLAKSAR			2 kelompok	4 Jenis	45,000,000	-	(45,000,000)	Dinas Perikanan	
2	26				BIDANG PARIWISATA												

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah												
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)															
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)															
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
3	26	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100%	100%	3,001,429,178	2,861,150,505	(140,278,673)	Dinas Pariwisata												
						Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur									100%	100%										
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji pegawai dinas pariwisata	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji pegawai dinas pariwisata			24 orang	25 Orang				Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji pegawai dinas pariwisata	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji pegawai dinas pariwisata	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	24 Orang	25 orang	2,642,750,961	2,406,119,732	(236,631,229)	Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			2 orang	2 orang				Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forman	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forman	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	2 orang	2 orang	10,383,390	27,872,000	17,488,610	Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah			100%	100%				Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disiapkan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disiapkan	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	5 jenis	5 jenis	1,493,887	1,484,000	(9,887)	Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	15 jenis	12 jenis	1,102,500	1,086,000	(16,500)	Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	310 kali	272 kali	143,096,782	146,258,500	3,161,718	Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya barang milik daerah yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya barang milik daerah yang diadakan			100%	100%				Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	22 Unit	28 unit	22,392,840	33,042,000	10,649,160	Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	2 Unit	8 unit	24,000,000	91,657,200	67,657,200	Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%				Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yg dikelola selama satu tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yg dikelola selama satu tahun	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	500 surat	500 surat	59,754,943	53,220,800	(6,534,143)	Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	6 rekening	8 rekening	45,643,500	49,972,500	4,329,000	Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%				Dinas Pariwisata												
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1 unit	9 unit	20,286,000	20,610,000	324,000	Dinas Pariwisata												

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	5 unit	11 unit	4,340,000	4,340,000	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	9 unit	11 unit	4,134,375	3,905,000	(229,375)	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1 unit	1 unit	17,529,750	17,480,871	(48,879)	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah mobilieur yang telah diperbaiki dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah mobilieur yang telah diperbaiki dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	11 unit	17 unit	4,520,250	4,101,902	(418,348)	Dinas Pariwisata
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan berkembang	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan berkembang			1 lokasi	1 lokasi	3,261,554,509	2,351,566,081	(909,988,428)	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola			1 objek	1 objek				Dinas Pariwisata
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Obyek Wisata yang dikembangkan	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Obyek Wisata yang dikembangkan	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	60 unit	15 unit	2,686,569,795	2,003,135,900	(683,433,895)	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri pariwisata	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	40 Orang	40 Orang	50,000,000	50,203,000	203,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata			6 bjek	6 bjek				Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daerah tujuan wisata yg berkembang	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daerah tujuan wisata yg berkembang	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	6 objek	6 objek	524,984,714	298,227,181	(226,757,533)	Dinas Pariwisata
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata			35.000 orang	35.000 orang	661,900,760	439,843,800	(222,056,960)	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata			4 kali					Dinas Pariwisata

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Media	1 Media	69,130,060	27,138,000	(41,992,060)	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi wisata melalui pameran yang diikuti	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi wisata melalui pameran yang diikuti	Kab.Barru, Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	Kab.Barru, Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	4 kali	4 kali	592,770,700	412,705,800	(180,064,900)	Dinas Pariwisata
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						620,369,600	862,578,000	242,208,400	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Lembaga yang bermitra dengan pengembangan destinasi	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Lembaga yang bermitra dengan pengembangan destinasi								Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pariwisata	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	250 orang	200 orang	464,723,000	619,756,800	155,033,800	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah lokasi wisata kuliner yang berkembang	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah lokasi wisata kuliner yang berkembang	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	5 lokasi	5 lokasi	124,769,000	121,228,600	(3,540,400)	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Lembaga yang bermitra dengan pengembangan destinasi	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Lembaga yang bermitra dengan pengembangan destinasi			1 lembaga	1 lembaga				Dinas Pariwisata
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dilatih	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dilatih	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	Kab.Barru, semua kecamatan, semua kelurahan	40 orang	40 orang	30,877,600	121,592,600	90,715,000	Dinas Pariwisata
2	27				BIDANG PERTANIAN											
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100%	100%	10,998,870,044	10,880,108,844	(92,521,200)	DINAS PERTANIAN
				Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%					
				Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100%	100%					
3	27	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24	25				Dinas Pertanian
3	27	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,744,109,308			24	25	10,438,658,813	10,438,658,813	-	Dinas Pertanian
3	27	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja, Evaluasi, Data Komoditi Pertanian yang tersedia tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja, Evaluasi, Data Komoditi Pertanian yang tersedia tepat waktu			5 Jenis dan 12 Bulan	5 Jenis dan 12 Bulan				DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data yang tersedia Perencanaan, Evaluasi Kinerja , Data Komoditi Pertanian yang tersedia	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data yang tersedia Perencanaan, Evaluasi Kinerja , Data Komoditi Pertanian yang tersedia	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis 12 Bulan	5 Jenis 12 Bulan	150,000,000	100,342,000	(49,658,000)	DINAS PERTANIAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)									
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber daya dan Aparatur yang di tingkatkan kapasitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber daya dan Aparatur yang di tingkatkan kapasitasnya			2 Orang	5 Orang							DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	2 Orang	5 Orang	10,934,190	21,098,000	10,163,810	DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			3 Jenis/kegiatan	3 Jenis/kegiatan				DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor dan Konsultasi Luar Daerah yang dihadiri	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor dan Konsultasi Luar Daerah yang dihadiri	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	54 OK	39 OK	130,000,000	144,392,500	(14,392,500)	DINAS PERTANIAN				
						Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah yang dihadiri		Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah yang dihadiri	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	142 OH	192 OH	20,000,000		DINAS PERTANIAN					
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	20 Buah	1 Sey	3,500,000	4,250,000	750,000	DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	2 Jenis	11 Jenis	3,500,000	1,358,325	(2,141,675)	DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13 Unit	5 Unit				DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Barru	Barru	4 Unit	0	20,000,000	-		DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Barru	Barru	4 Unit	5 Unit	40,000,000	35,285,000	(4,715,000)	DINAS PERTANIAN				
						Jumlah pengadaan meubeleu		Jumlah pengadaan meubeleu	Barru	Barru	5 Unit		15,025,000							
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 Jenis/Kegiatan	3 Jenis/Kegiatan				DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis ATK Jumlah Pegawai yang terpenuhi Makan dan Minum Harian Jumlah surat keluar Jumlah Tenaga Honor yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis ATK Jumlah Pegawai yang terpenuhi Makan dan Minum Harian Jumlah surat keluar Jumlah Tenaga Honor yang dibayarkan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	37 Jenis 52 Orang 1000 Surat 6 Orang	37 Jenis 52 Orang 1000 Surat 6 Orang	67,388,530	63,095,900	(4,292,630)	DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	25,198,926	(4,801,074)	DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	3 Orang	3 Orang	14,400,000	14,400,000	-	DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85 Unit	38 Unit				DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	27 Unit	17 Unit	33,600,000	20,525,000	(13,075,000)	DINAS PERTANIAN				
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan gesung dan pagar, penataan taman, perbaikan instalasi air, telepon dan listrik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan gesung dan pagar, penataan taman, perbaikan instalasi air, telepon dan listrik	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	8 Unit	2 Unit	7,363,511	4,189,380	(3,174,131)	DINAS PERTANIAN				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Barru, Semua Kelurahan	40 Unit	13 Unit	10,500,000	4,750,000	(5,750,000)	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	10 Unit	6 Unit	4,000,000	2,565,000	(1,435,000)	DINAS PERTANIAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			2.313 Kasus	2.313 Kasus	1,082,600,000	1,204,109,600	121,509,600	DINAS PERTANIAN
						Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			3.516.677 Ekor	3.516.677 Ekor				
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak/Serta Pakan dalam Daerah	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak/Serta Pakan dalam Daerah			6 Jenis	6 Jenis				
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah benih padi bersertifikat Jumlah bibit/ benih unggul hortikultura yang tersedia Jumlah bibit unggul Hortikultura dan Perkebunan Jumlah KK miskin difasilitasi bibit hortikultura dan perkebunan	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah benih padi bersertifikat Jumlah bibit/ benih unggul hortikultura yang tersedia Jumlah bibit unggul Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	332 Ton 4423 Pohon 15855 Pohon 200 KK	966 Pohon, 332 Ton, 19 Sasset, 175 Pohon, 1.000 Kg, 200 KK	685,000,000	422,636,600	(262,363,400)	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kab/ kota	Jumlah Pengelolaan SDG Hewan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kab/ kota	Jumlah Pengelolaan SDG Hewan			750 Ekor	750 Ekor				
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak yang mendapatkan Inseminasi Buatan (IB)	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak yang mendapatkan Inseminasi Buatan (IB)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Ekor	750 Ekor	200,000,000	141,500,500	(58,499,500)	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh dalam Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh dalam Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota			20 Orang	0				
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Penyuluhan dalam pengendalian dan pengawasan yang terdidik dan terlatih	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Penyuluhan dalam pengendalian dan pengawasan yang terdidik dan terlatih	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	0	10,500,000	-	(10,500,000)	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelompok Penerima Benih/Bibit Ternak Non Rumanisia dan Rumanisia serta jumlah luasan hijauan makanan ternak	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelompok Penerima Benih/Bibit Ternak Non Rumanisia dan Rumanisia serta jumlah luasan hijauan makanan ternak			4 Klp, 3 Ha	6, Klp, 2 Ha				
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kab/Kota lain	Jumlah Kelompok Penerima Non Rumanisia Jumlah Kelompok Penerima Rumanisia	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kab/Kota lain	Jumlah Kelompok Penerima Non Rumanisia Jumlah Kelompok Penerima Rumanisia	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kelompok 1 Kelompok	8 Kelompok	152,000,000	1,128,704,500	976,704,500	DINAS PERTANIAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Luas Penanaman Hijauan Makanan Ternak	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Luas Penanaman Hijauan Makanan Ternak	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Ha	2 Ha	35,100,000	21,268,000	(13,832,000)	DINAS PERTANIAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			100%	100%	5,103,480,500	5,317,065,266	213,584,766	DINAS PERTANIAN
				Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		100%	100%							
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan pertanaman padi, alsintan dan terbentuknya Kawasan Agro Tekno Park	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan pertanaman padi, alsintan dan terbentuknya Kawasan Agro Tekno Park	Jumlah Produksi Tanaman Pangan		32.639 Ha. 1 Kawasan	32.639 Ha. 1 Kawasan				
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah luas tanam padi dan palawija Pelaksanaan Musyawarah Mappalili Tingkat Kabupaten	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah luas tanam padi dan palawija Pelaksanaan Musyawarah Mappalili Tingkat Kabupaten	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.639 Ha 1 Kali	31.639 Ha 1 Kali	337,456,000	145,851,000	(191,605,000)	DINAS PERTANIAN
					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Alsintan pendukung penanggulangan kemiskinan Luas Tambah Tanam	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas Tambah Tanam	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Unit 1000 Ha	1000 Ha	185,000,000			
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah kawasan Agro Tekno Park yang terbentuk	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah kawasan Agro Tekno Park yang terbentuk	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan	1 Kawasan	1,080,024,500	347,523,844	(732,500,656)	DINAS PERTANIAN
	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian			14 Unit, 700 M, 240 Ekor, 3 BPP (6 Jenis/kegiatan)	14 Unit, 700 M, 240 Ekor, 7 BPP (6 Jenis/kegiatan)				
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yang dibangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yang dibangun	Kab. Barru, Tanete Rilau, Lalolang Kab. Barru, Tanete Rilau, Tanete Kab. Barru, Tanete Rilau, Lalabata Kab. Barru, Tanete Rilau, Pao Pao Kab. Barru, Tanete Rilau, Lipukasi Kab. Barru, Tanete Rilau, Garessi Kab. Barru, Balusu, Takkalasi	Kab. Barru, Tanete Rilau, Lalolang Kab. Barru, Tanete Rilau, Tanete Kab. Barru, Tanete Rilau, Lalabata Kab. Barru, Tanete Rilau, Pao Pao Kab. Barru, Tanete Rilau, Lipukasi Kab. Barru, Tanete Rilau, Garessi Kab. Barru, Balusu, Takkalasi	7 Unit	7 Unit	1,995,000,000	2,040,260,000	45,260,000	DINAS PERTANIAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang dibangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang dibangun	Kab. Barru, Tanete Riaja, Lompo Riaja Kab. Barru, Tanete Riaja, Kading Kab. Barru, Tanete Riaja, Lempang Kab. Barru, Pujananting, Pujananting	Kab. Barru, Tanete Riaja, Lompo Riaja Kab. Barru, Tanete Riaja, Kading Kab. Barru, Tanete Riaja, Lempang Kab. Barru, Pujananting, Pujananting	4 Unit	4 Unit	480,000,000	517,980,000	37,980,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani	Kab. Barru, Tanete Riaja, Lompo Riaja	Kab. Barru, Tanete Riaja, Dusun matajang desa lalabata	700 Meter	1,5 KM	200,000,000	950,000,000	750,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun	Kab. Barru, Tanete Riaja, Harapan Kab. Barru, Pujananting, Mattappawalie Kab. Barru, Pujananting, Pujananting	Kab. Barru, Tanete Riaja, Harapan Kab. Barru, Pujananting, Mattappawalie Kab. Barru, Pujananting, Pujananting	3 Unit	3 Unit	360,000,000	394,980,000	34,980,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah ternak yang dipotong dalam RPH	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah ternak yang dipotong dalam RPH	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240 Ekor	240 Ekor	16,000,000	12,411,500	(3,588,500)	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Pemenuhan Sarana dan Prasarana BPP	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Pemenuhan Sarana dan Prasarana BPP	Kab. Barru, Tanete Riaja, Lompo Riaja Kab. Barru, Tanete Rilau, Lalolang Kab. Barru, Balusu, Takkalasi	Kab. Barru, Tanete Riaja, Lompo Riaja Kab. Barru, Tanete Rilau, Lalolang Kab. Barru, Balusu, Takkalasi	3 BPP	7 BPP	450,000,000	1,152,146,147	702,146,147	DINAS PERTANIAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			100%	100%	736,000,000	503,186,300	(232,813,700)	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan Hewan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan Hewan			3 Jenis/Kegiatan	3 Jenis/Kegiatan				
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Layanan Respon Pencegahan Penyakit Menular pada Ternak	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Layanan Respon Pencegahan Penyakit Menular pada Ternak	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30000 Dosis	30000 Dosis	240,000,000	243,563,750	(213,436,250)	DINAS PERTANIAN
					Pemeriksaan Ternak Secara Rutin		Pemeriksaan Ternak Secara Rutin		Kab. Barru, Tanete Rilau, Lasitae	Kab. Barru, Tanete Rilau, Lasitae	1 Daerah	1 Daerah	52,000,000			
					Jumlah penyakit zoonosis yang ditangani		Jumlah penyakit zoonosis yang ditangani		Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Penyakit	4 Penyakit	165,000,000			

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Dokumen Informasi Produksi Peternakan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Dokumen Informasi Produksi Peternakan					7 Kec, 4 Kali dam 1 Dok	7 Kec, 4 Kali dam 1 Dok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Perizinan Usaha Pertanian			100%	100%	10,000,000	9,409,000	(591,000)	DINAS PERTANIAN
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan									
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10,000,000	9,409,000	(591,000)	DINAS PERTANIAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Jumlah Pelaksanaan Program Penyuluhan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Jumlah Pelaksanaan Program Penyuluhan			100%	100%	388,587,775	422,096,000	33,508,225	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			3 Jenis/Kegiatan	3 Jenis/Kegiatan				
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen programa penyuluhan Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan ketenagaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen programa penyuluhan Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan ketenagaan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 Dokumen 60 Orang	63 Dokumen 60 Orang	211,358,275	247,917,000	36,558,725	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah peserta pelatihan usaha agribisnis Pembinaan Kelompok Pemuda (Pelatihan Usaha Tani) Jumlah Kelompok Tani Berprestasi Jumlah Dokumen Rembug KTNA	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah peserta pelatihan usaha agribisnis Pembinaan Kelompok Pemuda (Pelatihan Usaha Tani) Jumlah Kelompok Tani Berprestasi Jumlah Dokumen Rembug KTNA	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Orang 1Kelompok 11 Kelompok 8 Dokumen	90 Orang 1Kelompok 11 Kelompok 8 Dokumen	105,979,500	102,429,000	(3,550,500)	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang terpenuhi Operasionalnya	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang terpenuhi Operasionalnya	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 BPP	7 BPP	71,250,000	71,750,000	500,000	DINAS PERTANIAN
2	30				BIDANG PERDAGANGAN											
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		7 Kec.	7 Kec.			4,212,748,297	1,189,376,901	(3,023,371,396)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	7 Kec.	7 Kec.						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar dalam kondisi baik	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar dalam kondisi baik	7 Kec.	7 Kec.	3 Pasar	3 Pasar	3,313,548,297	228,513,501	(3,085,034,796)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah dimanfaatkan	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah dimanfaatkan	7 Kec.	7 Kec.	8 Pasar	8 Pasar	899,200,000	960,863,400	61,663,400	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya		Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya		7 Kec.	7 Kec.						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				7 Kec.	7 Kec.							Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pembentukan dan Pemberdayaan Tim Pokja Pengelola Pasar		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pembentukan dan Pemberdayaan Tim Pokja Pengelola Pasar		7 Kec.	7 Kec.					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				7 Kec.	7 Kec.			51,467,200	40,643,000	(10,824,200)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase koefisien variasi harga antar waktu		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase koefisien variasi harga antar waktu		7 Kec.	7 Kec.					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar yang dilakukan		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar yang dilakukan		7 Kec.	7 Kec.	24 Kali		51,467,200	40,643,000	(10,824,200)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				7 Kec.	7 Kec.			650,000,000	161,658,900	(488,341,100)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		7 Kec.	7 Kec.					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang		7 Kec.	7 Kec.	508		633,602,000	137,370,300	(496,231,700)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		7 Kec.	7 Kec.	100%		16,398,000	24,288,600	7,890,600	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				7 Kec.	7 Kec.			10,167,000	8,817,000	(1,350,000)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase promosi dan kerjasama perdagangan		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase promosi dan kerjasama perdagangan		7 Kec.	7 Kec.					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah promosi produk yang diikuti		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah promosi produk yang diikuti		7 Kec.	7 Kec.					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				7 Kec.	7 Kec.	-		10,167,000	8,817,000	1,350,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	31				BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				7 Kec.	7 Kec.			599,391,645	373,628,000	(225,763,645)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK		7 Kec.	7 Kec.					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelaku IKM yang mengikuti pelatihan dan/atau magang industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelaku IKM yang mengikuti pelatihan dan/atau magang industri	7 Kec.	7 Kec.	70 Orang	70 Orang	64,259,467	69,297,500	5,038,033	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pengembangan Sarana dan Prasarana IKM	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pengembangan Sarana dan Prasarana IKM	7 Kec.	7 Kec.	5 Klp/100 Orang	5 Klp/100 Orang	203,729,278	107,499,000	(96,230,278)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang dibina dalam pengembangan dan penguatan usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang dibina dalam pengembangan dan penguatan usaha	7 Kec.	7 Kec.	20 IKM	20 IKM	331,402,900	196,831,500	(134,571,400)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data dan informasi industri yang tersaji secara lengkap dan terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data dan informasi industri yang tersaji secara lengkap dan terkini	7 Kec.	7 Kec.			15,000,000	32,746,500	17,746,500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri	7 Kec.	7 Kec.						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistim Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang terupdate datanya di aplikasi SIINas dan SIIda	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistim Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang terupdate datanya di aplikasi SIINas dan SIIda	7 Kec.	7 Kec.	112		15,000,000	32,746,500	17,746,500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	7 Kec.	7 Kec.	1 Dokumen					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH											
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Kab. Barru	Kab. Barru	100%	100%	36,724,065,644	40,011,442,170	3,287,376,526	Sekretariat Daerah
					Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana	100%			100%					
					cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur		cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%			100%					
					Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur		Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur	100%			100%					
					Terjalinnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder		Terjalinnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder	453			453					

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	12,122,992,668	12,122,992,668	-	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pendkung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pendkung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7 Kegiatan	7 Kegiatan				
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur			1 orang	0	14,099,000	-	(14,099,000)	Bagian Perekonomian
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan			45 orang	45 orang	5,940,000	5,742,000	(198,000)	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan			2 jenis	2 jenis	34,488,000	36,791,000	2,303,000	Bag. Adm. Pemb
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan			17 OK	20 OK	110,053,000	81,083,500	(28,969,500)	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang- undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang- undangan			4 Orang	4 Orang	37,588,000	42,729,500	5,141,500	Bagian Protokol
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bintek Iplementasi Peraturan Perundang undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bintek Iplementasi Peraturan Perundang undangan			8 orang	8 orang	51,961,000	51,558,000	(403,000)	Bagian Hukum
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan			12	27	103,556,000	155,287,500	51,731,500	Bagian Umum
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pendukung Administrasi Umum Pernagkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pendukung Administrasi Umum Pernagkat Daerah			12 kegiatan	12 kegiatan				
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan			7 Jenis	12 Jenis	65,000,000	74,950,000	9,950,000	Bagian Umum
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga			20 Jenis	4 Jenis	27,500,000	44,116,125	16,616,125	Bagian Umum
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai			77 OK	77 OK	19,536,000	157,958,000	7,687,000	Bagian Umum
						Rapat dan pertemuan		Rapat dan pertemuan			23640 OK	23640 OK	130,735,000			
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi			23,693 OK	32,075 OK	1,331,275,000	1,735,775,000	404,500,000	Bagian Umum
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas, Rapat dan pertemuan Dalam Kabupaten	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas, Rapat dan pertemuan Dalam Kabupaten			140 OK	140 OK	54,643,000	49,860,000	(4,783,000)	Bag. Adm. Pemb

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam daerah			37 Kali	37 Kali	129,251,000	146,319,500	(3,243,500)	Bag. Kesejahteraan Rakyat
				Rapat dan pertemuan Dalam Kabupaten		Rapat dan pertemuan Dalam Kabupaten		6 Kali			6 Kali	17,162,000				
				Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai		Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai		14 Orang/Tahun			14 Orang/Tahun	3,150,000				
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah			30 OK	2 Jenis	87,809,000	66,636,700	(21,172,300)	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah			30 OK	138 OK	76,740,512	89,188,000	(32,512)	Bag. Pemerintahan
				Perjalanan Dinas, Rapat dan pertemuan Dalam Kabupaten		Perjalanan Dinas, Rapat dan pertemuan Dalam Kabupaten		108 OK			12,480,000					
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah			119 OK	101 OK	149,706,000	146,825,600	(2,880,400)	Bagian Perekonomian
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam daerah			8 OK	17 OK	40,087,000	5,836,500	(34,250,500)	Bagian Protokol
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah			1043	409 OK	1,543,151,000	1,476,728,500	(66,422,500)	Bagian Umum
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Perjalanan Dinas Dalam Daerah		92								
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah			38 OK	30 OK	87,155,000	17,228,000	(69,927,000)	Bagian Organisasi
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan yang mendukung Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan yang mendukung Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8 jenis	8 jenis				
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil yang dibeli	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil yang dibeli			1 Unit	1 Unit	650,000,000	3,359,125,000	2,709,125,000	Bagian Umum
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia			23 Jenis	3 jenis	413,404,000	59,871,920	(353,532,080)	Bagian Umum
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor			2 Unit	1 Unit	24,000,000	11,765,000	(12,235,000)	Bag. Adm. Pemb
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor			2 Jenis	2 Jenis	27,691,000	21,216,000	(6,475,000)	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor			3 Buah	5 buah	30,457,000	21,450,000	(9,007,000)	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor			4 Unit	4 Jenis	37,395,000	17,955,000	(19,440,000)	Bagian Protokol
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas			5 Jenis	8 jenis	114,650,000	194,485,000	(21,785,000)	Bagian Umum

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor			22 Jenis			101,620,000						
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas			12 Jenis	9 jenis	200,000,000	914,470,000	226,278,000	Bagian Umum				
					Jumlah perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan kantor		24 Jenis		488,192,000									
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan pendukung Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan pendukung Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Jenis	12 Jneis								
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			200 Surat	200 Surat	18,059,189	14,699,500	(3,359,689)	Bag. Adm. Pemb				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			75 Surat	75 Surat	22,246,020	23,895,000	1,648,980	Bag. Kesejahteraan Rakyat				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			8 Surat	2 Jenis	22,519,310	12,902,500	(9,616,810)	Bag. Pengadaan Barang/Jasa				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			10	4 Jenis	10,346,240	9,888,500	(457,740)	Bag. Pemerintahan				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			60 Surat	23 Jenis	4,929,600	7,644,800	2,715,200	Bagian Perekonomian				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			50 Surat	25 Jenis	12,917,100	12,915,500	(1,600)	Bagian Protokol				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			2.735 surat	2.735 surat	187,437,300	202,436,500	14,999,200	Bagian Umum				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			9 Jenis	500 Surat	19,565,700	12,779,500	(6,786,200)	Bagian Organisasi				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			4 jenis	4 jenis	3,000,000	3,000,000	-	Bagian Hukum				
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening Listrik, Telepon dan Air	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening Listrik, Telepon dan Air			4 jenis	3 jenis	5,592,000,000	5,562,077,467	(29,922,533)	Bagian Umum				
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Sarana dan prasarana kantor			4 jenis	3 jenis	637,700,000	509,655,040	(128,044,960)	Bagian Umum				
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			7000 Lembar	-	4,460,000	3,460,000	(1,000,000)	Bag. Adm. Pemb				
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aset daerah yang diasuransikan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aset daerah yang diasuransikan			2	49 Orang	1,374,513,700	1,373,665,500	(848,200)	Bagian Umum				
					Jumlah tenaga honorer yang terbayar		Jumlah tenaga honorer yang terbayar		49	6 gdg, 3 mobil										
					Cleaning Servis taman, Kantor dan Rujab Bupati/Wakil Bupati		Cleaning Servis taman, Kantor dan Rujab Bupati/Wakil Bupati		35											
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			18 Jenis	18 Jenis								

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan, Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan, Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas			5 unit	5 unit	379,530,000	461,936,000	82,406,000	Bagian Umum
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional			68 unit	68 unit	485,336,000	401,300,000	(84,036,000)	Bagian Umum
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional			2 Unit	2 Unit	13,696,150	9,000,000	(4,696,150)	Bag. Adm. Pemb
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara			1 Unit	1 Unit	10,800,000	10,000,000	(800,000)	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional			1 Unit	2 Unit	8,800,000	7,500,000	(1,300,000)	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional			3 Unit	3 Unit	3,800,000	7,500,000	3,700,000	Bagian Perekonomian
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara			2 uniy	1 Unit	13,000,000	12,500,000	(500,000)	Bagian Protokol
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service, pemeliharaan, dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional			1 Unit	1 Unit	7,750,000	7,500,000	(250,000)	Bagian Hukum
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4			1 Unit	1 Unit	5,500,000	10,000,000	4,500,000	Bagian Organisasi
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor			2 Unit	4 Jenis	24,000,000	3,210,000	(20,790,000)	Bag. Adm. Pemb
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis			-	2 Unit	2,500,000	2,565,000	65,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor			2 Jenis	2 Jenis	1,450,000	1,450,000	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor			5 Unit	5 Unit	7,500,000	4,630,000	(2,870,000)	Bag. Pemerintahan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor			4 unit	5 Unit	3,100,000	2,355,000	(745,000)	Bagian Perekonomian	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			6 jenis	6 jenis	24,500,000	13,275,000	(11,225,000)	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Service dan Penggantian Suku Cadang perlengkapan gedung kantor			2 Unit	-	2,500,000	2,565,000	65,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rumah jabatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung terpeliharaan			3 unit	8 unit	1,436,754,000	2,330,173,500	893,419,500	Bagian Umum	
						Jumlah gedung kantor					5						
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Service dan Penggantian Suku Cadang perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Service dan Penggantian Suku Cadang perlengkapan gedung kantor			3 unit	3 unit	159,000,000	631,220,000	167,140,000	Bagian Umum	
						Jumlah Rumah jabatan/dinas		Jumlah Rumah jabatan/dinas			3 unit	3 unit	35,200,000				
						Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor		Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor			36 unit	36 unit	125,000,000				
						Jumlah Rumah jabatan/dinas		Jumlah Rumah jabatan/dinas			3 unit	3 unit	144,880,000				
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3 Jenis	3 Jenis					
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda			5 jenis	9 jenis	250,000,000	432,800,000	6,400,000	Bagian Umum	
						Jumlah pakaian KORPRI untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda		Jumlah pakaian KORPRI untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda			1 jenis		3,900,000				
						Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda			3 jenis		172,500,000				
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			8 Kali	6 jenis	136,400,000	290,000,000	153,600,000	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dialog/ audiensi dengan stake holder kemasyarakatan	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dialog/ audiensi dengan stake holder kemasyarakatan			65 jenis	65 jenis	1,453,500,000	4,673,053,600	249,553,600	Bagian Umum	
						Jumlah Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Negara/ Non Departemen		Jumlah Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Negara/ Non Departemen			30 jenis	30 jenis					
						Jumlah Rapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA		Jumlah Rapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA			5 jenis	5 jenis					

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah						
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)								
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah		Jumlah Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah			6 jenis	6 jenis	95,000,000							
						Jumlah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah		Jumlah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah			180 jenis	180 jenis	1,350,000,000							
						Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya		Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya			96 jenis	96 jenis	1,440,000,000							
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan yang mendukung Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan yang mendukung Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			2 jenis	2 jenis								
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Dialog/ audiensi dengan stake holder kemasyarakatan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Dialog/ audiensi dengan stake holder kemasyarakatan			65 jenis	1 RT	796,600,000	465,494,000	(331,106,000)	Bagian Umum				
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dialog/ audiensi dengan stake holder kemasyarakatan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dialog/ audiensi dengan stake holder kemasyarakatan			65 jenis	1 RT	646,000,000	339,993,000	(306,007,000)	Bagian Umum				
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentasi Pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Aturan dan tujuan penyusunannya serta Implementasi Ketatalaksana	Penataan Organisasi	Persentasi Pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Aturan dan tujuan penyusunannya serta Implementasi Ketatalaksana			100%	100%								
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Hasil kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Hasil kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah			1 dok	6 Jenis	49,673,000	210,343,000	(50,338,200)	Bagian Organisasi				
					penyusunan pra rancangan regulasi kelembagaan perangkat daerah	penyusunan pra rancangan regulasi kelembagaan perangkat daerah		2 dok	37,814,800											
					Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		2	117,445,600											
					Kelas Jabatan	Kelas Jabatan		1	55,747,800											
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tata Naskah Dinas	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tata Naskah Dinas			1 Dok	36 OPD	65,762,600	151,928,000	628,165	Bagian Organisasi				
					Standarisasi Kinerja dan Implementasi Ketatalaksanaan	Standarisasi Kinerja dan Implementasi Ketatalaksanaan		1 Dok	-											
					Jumlah OPD yang mengikuti	Jumlah OPD yang mengikuti		36 OPD	85,537,235											
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	SKPD yang dikoordinasikan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	SKPD yang dikoordinasikan			37	37	10,319,000	167,861,000	6,580,000	Bagian Organisasi				
					Penerapan SAKIP dan Workshop Penerapan SAKIP	Penerapan SAKIP dan Workshop Penerapan SAKIP		40	40	150,962,000										

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprorotokolsn, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprorotokolsn, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan			100%	100%				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Pelatihan dan Bimtek yang dilaksanakan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Pelatihan dan Bimtek yang dilaksanakan			2 Jenis	2 Jenis	92,400,000	262,855,000	102,262,700	Bagian Protokol
				Jumlah Alat Studio dan Komunikasi		Jumlah Alat Studio dan Komunikasi		1 Unit			1 Unit	68,192,300				
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan			1 Jenis	1 Jenis	66,260,750	70,512,500	(259,780,570)	Bagian Protokol
				Jumlah Kegiatan Operasional Keprotokoleran Daerah		Jumlah Kegiatan Operasional Keprotokoleran Daerah		2 Jenis			2 Jenis	264,032,320				
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan			2 jenis	2 jenis	86,260,750	179,983,750	93,723,000	Bagian Protokol
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab. Kepada Pemerintah Pusat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab. Kepada Pemerintah Pusat	Kab. Barru	Kab. Barru	8	8	16,148,061,511	16,346,761,500	198,699,989	
						Persentase Organisasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien		Persentase Organisasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Kab. Barru		10%	10%				
						Presentase Pembinaan Tim Pembina UKS		Presentase Pembinaan Tim Pembina UKS	Kab. Barru		55	55				
						Jumlah Fakir Miskin Yang difasilutasi mendapatkan dana dari BAZ Kab.Barru		Jumlah Fakir Miskin Yang difasilutasi mendapatkan dana dari BAZ Kab.Barru	Kab. Barru		5638	5638				
						Cakupan Rekomendasi yang disediakan oleh tim tindak lanjut		Cakupan Rekomendasi yang disediakan oleh tim tindak lanjut	Kab. Barru		100%	100%				
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Tatat Pemerintahan Yang dilaksanakan	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Tatat Pemerintahan Yang dilaksanakan			3 Jenis	3 Jenis				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			4 Kali	4 Kali	55,939,500	143,398,500	(172,901,000)	Bag. Pemerintahan
				Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten		Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten		100%			100%	130,180,000				
				Jumlah Aparat Desa/Kelurahan dan kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pengelolaan manajemen pemerintahan		Jumlah Aparat Desa/Kelurahan dan kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pengelolaan manajemen pemerintahan		44 Orang			44 Orang	130,180,000				
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Penataan, Pemetaan, dan Penetapan Batas Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Penataan, Pemetaan, dan Penetapan Batas Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan			10 Pilar	10 Pilar	95,494,050	92,397,000	(3,097,050)	Bag. Pemerintahan
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik			2 Kerjasama	2 Kerjasama	60,000,000	306,985,500	(246,985,500)	Bag. Pemerintahan
						Jumlah LPPD, LKPj, IKK, EKPOD dan Laporan Akhir Masa Jabatan		Jumlah LPPD, LKPj, IKK, EKPOD dan Laporan Akhir Masa Jabatan			4	4	256,280,800			
						Jumlah Laporan Reguler		Jumlah Laporan Reguler			4	4	20,376,800			
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Jenis Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Jenis Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			3 Jenis	3 Jenis				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kehidupan umat beragama	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kehidupan umat beragama			5 Pembinaan	5 Pembinaan	4,815,832,561	12,275,540,900	(2,285,420,261)	Bag. Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah kegiatan Pembinaan Lembaga Pendidikan Formal, Informal, Pengajian Dasar dan Majelis Taklim yang dibina oleh Pemda Barru		Jumlah kegiatan Pembinaan Lembaga Pendidikan Formal, Informal, Pengajian Dasar dan Majelis Taklim yang dibina oleh Pemda Barru			5 Pembinaan	5 Pembinaan	4,861,025,600			
						Jumlah pembinaan kehidupan beragama aparatur		Jumlah pembinaan kehidupan beragama aparatur			2 jenis	2 jenis	9,885,000			
						Jumlah Regulasi Keagamaan		Jumlah Regulasi Keagamaan			18 Dok	18 Dok	38,558,000			
						Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Keagamaan		Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Keagamaan			7 kegiatan	7 kegiatan	4,835,660,000			

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Monev Kegiatan Tim Pembina UKS/M	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Monev Kegiatan Tim Pembina UKS/M			4 Kali	4 Kali	30,000,000	2,679,074,000	2,649,074,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah koordinasi Tim Pembina UKS/M	Jumlah koordinasi Tim Pembina UKS/M		4 Kali			4 Kali					
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan dana dari BAZ Kabupaten Barru	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan dana dari BAZ Kabupaten Barru			5638	5638	49,000,000	38,148,500	(10,851,500)	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			10	10				Bagian Hukum
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersedianya program legislasi daerah kabupaten	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersedianya program legislasi daerah kabupaten			1	1	37,000,000	465,352,500	30,534,500	Bagian Hukum
				Jumlah dokumen legislasi Penyusunan Dan Perumusan Ranperda, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, konsultasi, koordinasi dan evaluasi		Jumlah dokumen legislasi Penyusunan Dan Perumusan Ranperda, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, konsultasi, koordinasi dan evaluasi		10			10	300,000,000				
				Jumlah kajian dan penelitian produk hukum daerah		Jumlah kajian dan penelitian produk hukum daerah		4			4	97,818,000				
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pengaduan yang akan ditangani	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pengaduan yang akan ditangani			2	2	87,306,000	191,580,600	(53,807,100)	Bagian Hukum
				Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas yang ditindaklanjuti		Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas yang ditindaklanjuti		5			5	77,491,500				
				Jumlah Pembinaan Kelompok Kadarikum		Jumlah Pembinaan Kelompok Kadarikum		55 Desa/Kel			55 Desa/Kel	55,000,000				
				Jumlah laporan pelaksanaan Aksi HAM		Jumlah laporan pelaksanaan Aksi HAM		5			5	25,590,200				
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah kerjasama berkala JDIH	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah kerjasama berkala JDIH			1	1	35,000,000	154,284,000	74,840,500	Bagian Hukum
					Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	142 WL	142 WL	44,443,500						
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja perekonomian daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja perekonomian daerah	Kab. Barru	Kab. Barru	100%	100%	1,023,948,430	771,708,100	(252,240,330)	
				Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH		Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH		100%			100%					
				Transparansi dan akuntabilitas penyediaan Barang dan Jasa Pemda		Transparansi dan akuntabilitas penyediaan Barang dan Jasa Pemda		150			150					
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Jenis Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Jenis Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			3 Jenis	3 Jenis				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen Pengembangan Perekonomian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen Pengembangan Perekonomian Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	156,115,780	65,245,700	(90,870,080)	Bagian Perekonomian
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Intensitas Koordinasi dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Intensitas koordinasi dan Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan			1 Laporan	1 Laporan	19,800,000	19,314,000	(486,000)	Bagian Perekonomian
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Koordinasi	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Koordinasi			1	1	57,200,000	43,375,800	(13,824,200)	Bagian Perekonomian
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Jenis Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Jenis Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			2 Jenis	2 Jenis				
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sosialisasi dan Rapat-rapat Koordinasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra)	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sosialisasi dan Rapat-rapat Koordinasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra)			7	7	389,478,150	300,344,000	(89,134,150)	Bag. Adm. Pemb
						Sosialisasi, Pembinaan dan Pengendalian Jasa Konstruksi		Sosialisasi, Pembinaan dan Pengendalian Jasa Konstruksi			3	3				
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan			100	100	18,420,000	50,000,000	31,580,000	Bag. Pemerintahan
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2 Jenis	2 Jenis				
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			150	150	283,874,500	218,055,600	(65,818,900)	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pembinaan dan Pengembangan SPSE dan SIRUP	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pembinaan dan Pengembangan SPSE dan SIRUP			3	3	99,060,000	75,373,000	(23,687,000)	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	02				SEKRETARIAT DPRD											
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Kec. Barru	Kec. Barru	100%	100%	15,837,579,800	18,704,122,651	2,866,542,851	SEKRETARIAT DPRD
						Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi		Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi			100%	100%				
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	12,143,691,744	12,143,691,744	-	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah jenis kegiatan pendukung fasilitas pelayanan administrasi kepegawaian	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah jenis kegiatan pendukung fasilitas pelayanan administrasi kepegawaian			3 jenis	2 jenis				SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			5 orang	5 orang	44,332,910.00	80,153,000	35,820,090	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			5 orang	5 orang	12,700,000.00	12,700,000	-	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis kegiatan administrasi umum yang terlaksana			5 Jenis	5 jenis				SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			5 jenis	5 jenis	5,000,000.00	3,276,000	(1,724,000)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan			2 jenis	2 jenis	8,000,000.00	7,154,000	(846,000)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			2 jenis	2 jenis	115,000,000.00	269,000,000	154,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah yang di laksanakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah yang di laksanakan			469 OK	469 OK	420,277,785.00	682,722,500	262,444,715	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana			4 Jenis	4 Jenis				SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan perlengkapan mebeleur rumah jabatan/ gedung kantor	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan perlengkapan mebeleur rumah jabatan/ gedung kantor			7 Unit	7 Unit	60,634,000.00	555,738,820	495,104,820	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan dan mesin lainnya rumah jabatan/ gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan dan mesin lainnya rumah jabatan/ gedung kantor			7 Unit	7 Unit	582,492,893.00	553,573,286	(28,919,607)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Di Sediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Di Sediakan			3 Jenis	3 Jenis				SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat yang tepat sasaran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat yang tepat sasaran			5 Kegiatan	5 Kegiatan	162,426,400.00	275,870,000	113,443,600	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			4 Jenis	4 Jenis	191,440,000.00	263,587,576	72,147,576	SEKRETARIAT DPRD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			3 Jenis	3 Jenis	33,600,000.00	292,551,000	258,951,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana			4 Jenis	4 Jenis				SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan / Perorangan Yang Dipeihara dan Pajaknya Terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan / Perorangan Yang Dipeihara dan Pajaknya Terbayarkan			6 Unit	6 Unit	57,500,000.00	48,720,000	(8,780,000)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dipeihara dan Pajaknya Terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dipeihara dan Pajaknya Terbayarkan			12 Unit	12 Unit	70,250,000.00	114,390,000	44,140,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang di perbaiki	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang di perbaiki			5 Jenis	5 jenis	4,000,000.00	20,775,000	16,775,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rumah Jabaran dan Gedung Kantor Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rumah Jabaran dan Gedung Kantor Lainnya			7 Unit	7 Unit	644,536,068.00	1,884,159,725	1,239,623,657	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Jenis Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Jenis Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			2 jenis	2 jenis				SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya			125 org/psg	125 org/psg	288,198,000.00	194,400,000	(93,798,000)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan general check up	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan general check up			25 org	25 org	113,000,000.00	113,050,000	50,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Jenis Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Jenis Kegiatan Layanan Administrasi DPRD			2 jenis	2 jenis				SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya Hearing/Dialog, Koordinasi dan Konsultasi serta Rapat-Rapat Paripurna	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya Hearing/Dialog, Koordinasi dan Konsultasi serta Rapat-Rapat Paripurna			92 Kali	92 Kali	316,500,000.00	168,610,000	(147,890,000)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang disediakan			36 OB	36 OB	564,000,000.00	1,020,000,000	456,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terpenuhi	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terpenuhi	Kec. Barru	Kec. Barru	100%	100%	6,369,285,500	10,618,399,500	4,249,114,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Perda dan Peraturan DPRD Yang Diajukan	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Perda dan Peraturan DPRD Yang Diajukan			10 Ranperda	10 Ranperda				SEKRETARIAT DPRD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah				
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	2	2	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi			15 Kali	15 Kali	34,312,500.00	33,000,000	(1,312,500)	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi peraturan perundang-undangan			125 OH	100 OH	27,375,000.00	1,206,600,000	1,179,225,000	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD			4 Ranperda	4 Ranperda	600,000,000.00	750,000,000	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitas SDM nya	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitas SDM nya			25 Orang	25 Orang				SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti whorkshop dalam Peningkatan kapasitas	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti whorkshop dalam Peningkatan kapasitas			25 Orang	25 Orang	1,007,750,000.00	1,413,866,000	406,116,000	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar dan Tenaga Ahli Pimpinan DPRD yang di sediakan	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar dan Tenaga Ahli Pimpinan DPRD yang di sediakan			36 org/bln	36 org/bln	126,000,000.00	126,000,000	-	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Pendamping Fraksi dan Komisi yang di sediakan	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Pendamping Fraksi dan Komisi yang di sediakan			108 org.bl	108 org.bl	216,000,000.00	378,000,000	162,000,000	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Jenis Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Jenis Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat			2 jenis	2 jenis				SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			755 OH	755 OH	133,150,000.00	66,250,000	(66,900,000)	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang difasilitasi	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang difasilitasi			3 Kali	3 Kali	1,540,470,000.00	1,720,925,000	180,455,000	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.08		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi			100%	100%				SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan Kunjungan Kerja DPRD yang di fasilitasi	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan Kunjungan Kerja DPRD yang di fasilitasi			356 OK	356 OK	2,684,228,000.00	4,923,758,500	2,239,530,500	SEKRETARIAT DPRD				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN															
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100%	100%	3,625,604,687.00	3,365,727,538.00	(259,877,149)	BAPPEDA				
						Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi			100%	100%								
						Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya		Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya			100%	100%								
5	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana			1 kegiatan	1 kegiatan								
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Barru	Barru	26 orang	27 orang	2,642,605,087	2,690,035,838	47,430,751	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			1 kegiatan	1 kegiatan				
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti diklat formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti diklat formal	Barru	Barru	4 orang	4 orang	84,395,000	54,298,000	(30,097,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana			3 kegiatan	3 kegiatan				
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/peneranganbanguna n kantor	Barru	Barru	2 jenis	2 jenis	1,285,600	1,530,000	244,400	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Barru	Barru	2 jenis	2 jenis	1,330,000	10,068,200	8,738,200	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar daerah ; Perjalanan dinas dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar daerah ; Perjalanan dinas dalam daerah	Barru	Barru	307 OK	307 OK	588,022,000	352,633,000	(235,389,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			1 kegiatan	2 kegiatan				
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	-	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel			0 unit	4 unit	0	10,000,000	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	Barru	Barru	5 unit	5 unit	51,450,000	31,980,000	(19,470,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			2 kegiatan	2 kegiatan				
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang dikelola selama satu tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang dikelola selama satu tahun	Barru	Barru	4500 Surat	4500 Surat	77,642,000	109,637,500	31,995,500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening pembayaran, telepon, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening pembayaran, telepon, air dan listrik	Barru	Barru	2 rekening	2 rekening	127,800,000	64,200,000	(63,600,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			3 kegiatan	3 kegiatan				

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
										Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya	Barru	Barru	4 unit	4 unit	28,560,000	21,350,000	(7,210,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perlengkapan kantor yang dipelihara ; Peralatan kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perlengkapan kantor yang dipelihara ; Peralatan kantor yang dipelihara	Barru	Barru	48 unit	48 unit	21750000	19,250,000	(2,500,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	Barru	Barru	1 unit	1 unit	765,000	745,000	(20,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan			3 dokumen	3 dokumen	355,697,500.00	358,428,450.00	2,730,950	BAPPEDA
					Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan		Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan		100%	100%							
					Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah		Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah		14 dokumen	14 dokumen							
5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan daerah			3 dokumen	3 dokumen				
5	01	02	2.01	05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Dokumen berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Jumlah peserta Musrenbang RKPD Jumlah peserta Musrenbang RPJMD	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Dokumen berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Jumlah peserta Musrenbang RKPD Jumlah peserta Musrenbang RPJMD	Barru	Barru	500 orang ; 2 dokumen	500 orang ; 2 dokumen	44,401,000	56,086,000	11,685,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rancangan Akhir RKPD Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Dokumen rancangan awal RKPD Dokumen rancangan awal RPJMD Dokumen RKPD Perubahan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rancangan Akhir RKPD Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Dokumen rancangan awal RKPD Dokumen rancangan awal RPJMD Dokumen RKPD Perubahan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Barru	Barru	3 dokumen	3 dokumen	571,893,500	602,802,400	30,908,900	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah			2 dokumen	2 dokumen				
5	01	02	2.02	01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Barru	Barru	2 dokumen	2 dokumen	29,570,500	23,534,500	(6,036,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah			14 dokumen	14 dokumen				
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen LKIP dan PK Kabupaten	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen LKIP dan PK Kabupaten	Barru	Barru	2 dokumen	2 dokumen	32,765,000	5,416,000	(27,349,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Barru	Barru	12 dokumen	12 dokumen	32,765,000	29,018,000	(3,747,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan OPD bidang sosial budaya yang dikoordinasikan dan difasilitasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan OPD bidang sosial budaya yang dikoordinasikan dan difasilitasi			100%	100%	269,422,350	120,725,500	(148,696,850)	BAPPEDA
				Cakupan OPD bidang ekonomi yang dikoordinasikan dan difasilitasi		Cakupan OPD bidang ekonomi yang dikoordinasikan dan difasilitasi		100%			100%					
				Cakupan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dikoordinasikan dan difasilitasi		Cakupan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dikoordinasikan dan difasilitasi		100%			100%					
				Cakupan OPD yang terkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan		Cakupan OPD yang terkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan		100%			100%					
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya								
				Jumlah OPD pengampu kemiskinan yang dikoordinasikan		Jumlah OPD pengampu kemiskinan yang dikoordinasikan										
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	Barru	Barru	8 OPD	8 OPD	75,989,000	28,047,000	(47,942,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	Barru	Barru	5 OPD	5 OPD	28,165,500	16,883,000	(11,282,500)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	OPD terkait penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	OPD terkait penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi	Barru	Barru	10 OPD	10 OPD	67,159,500	70,000,000	2,840,500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah OPD bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah OPD bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya			9 OPD	9 OPD				

[illegible]

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Non formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	BARRU	BARRU	8 org	7 Diklat		150,882,000	150,882,000	BPKAD
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia	Administrtasi Umum Perangkat Daerah									BPKAD
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	BARRU	BARRU	1 Jenis	3 Jenis		3,845,000	3,845,000	BPKAD
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas dalam dan Luar Provinsi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	BARRU	BARRU	54 kali	12 Bulan		241,628,000	241,628,000	BPKAD
						Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					288 kali					BPKAD
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									BPKAD
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BARRU	BARRU	8 Unit	-	42,250,000.00	-	(42,250,000)	BPKAD
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	BARRU	BARRU	4 jenis	1	69,000,000.00	7,000,000	(62,000,000)	BPKAD
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									BPKAD
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdistribusinya persuratan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis jasa surat menyurat yang disediakan	BARRU	BARRU	5500 surat	4 Jenis	399,937,400.00	316,517,300	(83,420,100)	BPKAD
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayarkan	BARRU	BARRU	17 Orang	35 Orang	4,800,000.00	210,000,000	205,200,000	BPKAD
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									BPKAD
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	BARRU	BARRU	24 unit	23 Unit	10,000,000	7,975,000	(2,025,000)	BPKAD
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	BARRU	BARRU	7 unit	1 Unit	36,500,000.00	9,500,000	(27,000,000)	BPKAD
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Terpelihara	BARRU	BARRU		10 Unit		2,000,000	2,000,000	BPKAD
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor yang dipelihara	BARRU	BARRU	62 unit	-	45,500,000.00	60,721,962	15,221,962	BPKAD
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan APBD			100%		4,895,621,036	125,071,283,640	120,175,662,604	BPKAD
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu								BPKAD

[illegible]

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		BARRU	BARRU	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman		3,191,298,036.00	3,191,298,036	-	BPKAD
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		BARRU	BARRU	Jumlah Validasi Administrasi/DokumenPenerima			105,000,000,000	105,000,000,000	BPKAD
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							14,141,400,604	14,141,400,604	BPKAD
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD								BPKAD
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		BARRU	BARRU			170,000,000.00	150,000,000	(20,000,000)	BPKAD
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan Aset Daerah sesuai Prosedur	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan Aset Daerah sesuai Prosedur			43 SKPD		1,183,522,000	589,774,060	(593,747,940)	BPKAD
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola								BPKAD
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Regulasi Pengelolaan Aset dan BMD yang tersusun dan tersosialisasikan	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan aset BMD yang tersusun dan tersosialisasi	BARRU	BARRU	4 DOK	2 Perbup	99,149,600	12,299,000	(86,850,600)	BPKAD
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan aset daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data aset daerah	BARRU	BARRU	5 dokumen	6 dokumen	144,037,600	337,768,400	193,730,800	BPKAD
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang memiliki ketersediaan data yang optimal	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang memiliki ketersediaan data yang optimal	BARRU	BARRU	10 SKPD	7 Entitas	819,689,400	126,992,660	(692,696,740)	BPKAD
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BinteK Pengelolaan Aset Daerah yang dilaksanakan	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BinteK Pengelolaan Aset Daerah yang dilaksanakan	BARRU	BARRU	1 Perbup	36 Entitas	120,645,400.00	112,714,000	(7,931,400)	BPKAD
5	02	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Yang Terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Yang Terpenuhi			100%	100%	4,989,766,783	4,740,352,829	(249,413,954)	Bapenda
5	02	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Jenis	1 Jenis				Bapenda
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Bapenda	Bapenda	28 Orang	28 Orang	4,339,181,783	4,030,289,079	(308,892,704)	Bapenda
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengembangan SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengembangan SDM			1 Jenis	1 Jenis				Bapenda
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Bapenda	Bapenda	6 orang	6 orang	59,148,000	58,739,500	(408,500)	Bapenda
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana			3 jenis	3 jenis				Bapenda
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Bapenda	Bapenda	3 jenis	3 jenis	950,000	950,000	-	Bapenda

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah									
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)										
													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10		11		12		13
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Bapenda	Bapenda	7 jenis	7 jenis	866,500	862,000	(4,500)	Bapenda							
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah	Bapenda	Bapenda	231 kali	271 kali	231,640,000	184,178,000	(47,462,000)	Bapenda							
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan			1 jenis	2 jenis				Bapenda							
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	Bapenda	Bapenda	0 jenis	1 jenis	-	110,000,000	110,000,000	Bapenda							
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Bapenda	Bapenda	2 jenis	2 jenis	19,870,500	19,669,000	(201,500)	Bapenda							
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan			3 jenis	3 jenis				Bapenda							
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Bapenda	Bapenda	400 surat	400 surat	203,847,000	199,721,000	(4,126,000)	Bapenda							
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang terbayarkan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang terbayarkan	Bapenda	Bapenda	2 rekening	2 rekening	75,000,000	74,875,500	(124,500)	Bapenda							
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai kebersihan kantor	Bapenda	Bapenda	1 orang	1 orang	4,800,000	4,800,000	-	Bapenda							
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara			3 jenis	3 jenis				Bapenda							
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Bapenda	Bapenda	15 Unit	16 Unit	39,010,000	40,950,000	1,940,000	Bapenda							
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bapenda	Bapenda	3 jenis	3 jenis	9,375,000	9,300,000	(75,000)	Bapenda							
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bapenda	Bapenda	1 gedung	1 gedung	6,078,000	6,018,750	(59,250)	Bapenda							
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			100%	100%	1,516,703,000	1,170,781,500	(345,921,500)	Bapenda							
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jenis-jenis Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jenis-jenis Intensifikasi dan Ekstensifikasi			9 jenis	9 jenis				Bapenda							
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jenis pendapatan asli daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jenis pendapatan asli daerah	Bapenda	Bapenda	4 jenis	4 jenis	678,408,000	354,947,000	(323,461,000)	Bapenda							
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi pajak perundang-undangan yang terlaksana	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi pajak perundang-undangan yang terlaksana	Bapenda	Bapenda	7 kali	7 kali	10,180,000	9,929,000	(251,000)	Bapenda							
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis pemungutan pajak dan retribusi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis pemungutan pajak dan retribusi	Bapenda	Bapenda	6 jenis	6 jenis	220,250,000	265,750,000	45,500,000	Bapenda							
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan Obyek Pajak	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan Obyek Pajak	Bapenda	Bapenda	1 dokumen	1 dokumen	5,030,000	4,850,000	(180,000)	Bapenda							
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem jaringan yang terpelihara	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem jaringan yang terpelihara	Bapenda	Bapenda	1 sistem	1 sistem	50,000,000	-		Bapenda							
						Jumlah Jenis data pajak		Jumlah Jenis data pajak	Bapenda	Bapenda	3 jenis	3 jenis	38,185,000	38,185,000	-	Bapenda							
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Obyek Pajak	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Obyek Pajak	Bapenda	Bapenda	1 dokumen	1 dokumen	44,520,000	34,000,000	(10,520,000)	Bapenda							
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaporan monitoring PAD	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaporan monitoring PAD	Bapenda	Bapenda	4 laporan	4 laporan	38,210,000	31,614,000	(6,596,000)	Bapenda							
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penagihan dan penindakan	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penagihan dan penindakan	Bapenda	Bapenda	19 kali	19 kali	397,130,000	392,156,500	(4,973,500)	Bapenda							

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Evaluasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Evaluasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	Bapenda	Bapenda	11 kali	11 kali	34,790,000	39,350,000	4,560,000	Bapenda
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketersediaan data aset yang akurat	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketersediaan data aset yang akurat	Kab. Barru	Kab. Barru	100%	100%	110,000,000	133,314,500	23,314,500	Bagian Umum
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Jenis	1 Jenis				Bagian Umum
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan standar satuan harga	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan standar satuan harga			2 Buku	1 Dokumen	110,000,000	133,314,500	23,314,500	Bagian Umum
5	03				KEPEGAWAIAN											
5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Kab. Barru	Kab. Barru	100 %	100 %	3,583,607,910	3,274,927,274	(308,680,636)	BKPSDM
				Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		100 %			100 %					
				Cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur		100 %			100 %					
				Cakupan penyebarluasan informasi dan peraturan perundang-undangan		Cakupan penyebarluasan informasi dan peraturan perundang-undangan		100 %			100 %					
5	03	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan			100 %	100 %				BKPSDM
5	03	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan			31 orang	32 orang	2,810,750,230	2,810,750,230	-	BKPSDM
5	03	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi aparatur BKPSDM	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi aparatur BKPSDM			45 diklat	22 orang				
				Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		3 peraturan								
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			45 orang	22 orang	226,704,000	117,431,000	(109,273,000)	BKPSDM
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			150 orang	0 orang	34,279,980	-	(34,279,980)	BKPSDM
5	03	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pendukung administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah			2 jenis	100 %				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah						
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
5	03	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan			2 jenis	2 jenis	7,800,000	6,639,400	(1,160,600)	BKPSDM				
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah dan jumlah perjalanan dinas kedalam daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah dan jumlah perjalanan dinas kedalam daerah			105 OK, 74 OH	142 kali	258,515,000	205,519,500	(52,995,500)	BKPSDM				
5	03	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah			26 unit	0 unit								
5	03	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan meubeleur	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan meubeleur			16 unit	0 unit	18,480,000	-	(18,480,000)	BKPSDM				
5	03	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			10 unit	0 unit	83,140,000	-	(83,140,000)	BKPSDM				
5	03	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			1 jenis	1 jenis								
5	03	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun			3780	3780	111,103,700	106,992,500	(4,111,200)	BKPSDM				
5	03	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara			40 unit	40 unit								
5	03	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah STNK kendaraan dinas/opearsional yang diperpanjang perizinannya, dan jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah STNK kendaraan dinas/opearsional yang diperpanjang perizinannya, dan jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara			10 unit, 9 unit	19 unit	23,850,000	20,694,644	(3,155,356)	BKPSDM				
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			21 unit	21 unit	8,985,000	6,900,000	(2,085,000)	BKPSDM				
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS	Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS			100%	100%	1,881,731,100	1,222,450,300	(659,280,800)	BKPSDM				
					Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang diisi		Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang diisi			35 jabatan	35 jabatan									
					Persentase aparatur yang dilayani pada bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi		Persentase aparatur yang dilayani pada bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi			100%	100%									
					Persentase aparatur yang dilayani pada bidang mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi		Persentase aparatur yang dilayani pada bidang mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi			100%	100%									

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Persentase aparatur yang dilayani pada bidang diklat, penilaian kinerja dan penghargaan		Persentase aparatur yang dilayani pada bidang diklat, penilaian kinerja dan penghargaan			100%	100%				
5	03	02	2.01		Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, dan jumlah dokumen data kepegawaian dan kebutuhan PNS	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, dan jumlah dokumen data kepegawaian dan kebutuhan PNS			688 orang, 4 dokumen	688 orang, 4 dokumen				BKPSDM
5	03	02	2.01	02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan PNS	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan PNS			2 dokumen	2 dokumen	52,545,700	19,368,500	(33,177,200)	BKPSDM
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS dan seleksi PPPK, dan jumlah ASN yang diangkat dan ditempatkan sesuai ketentuan	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS dan seleksi PPPK, dan jumlah ASN yang diangkat dan ditempatkan sesuai ketentuan			120 orang, 269 orang	168 SK	538,782,340	367,092,050	(171,690,290)	BKPSDM
5	03	02	2.01	06	Koordinasi pelaksanaan pemberhentian	Jumlah aparatur yang menerima SK pensiun	Koordinasi pelaksanaan pemberhentian	Jumlah aparatur yang menerima SK pensiun			125 orang	170 orang	110,000,000	68,817,850	(41,182,150)	BKPSDM
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengurusan administrasi kepegawaian bidang pengembangan (cuti, karpeg, taspen, karis, karsu, karip, persemayaman, izin cerai, pertimbangan/telaahan staf)	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengurusan administrasi kepegawaian bidang pengembangan (cuti, karpeg, taspen, karis, karsu, karip, persemayaman, izin cerai, pertimbangan/telaahan staf)			174 orang	250 orang	7,900,000	6,825,500	(1,074,500)	BKPSDM
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumentasi data/statistik kepegawaian daerah	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumentasi data/statistik kepegawaian daerah			2 dokumen	2 dokumen	5,990,000	5,347,700	(642,300)	BKPSDM
5	03	02	2.02		Mutasi dan promosi ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam mutasi jabatan	Mutasi dan promosi ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam mutasi jabatan			281 orang	281 orang				BKPSDM
						Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengelolaan kenaikan pangkat dan jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen karier yang disusun		Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengelolaan kenaikan pangkat dan jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen karier yang disusun			950 orang, 3 dokumen	950 orang, 3 dokumen				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah aparatur yang diangkat dalam jabatan	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah aparatur yang diangkat dalam jabatan			281 orang	484 orang	580,000,000	429,753,800	(150,246,200)	BKPSDM
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah PNS yang memasukkan berkas usul kenaikan pangkat	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah PNS yang memasukkan berkas usul kenaikan pangkat			950 orang	750 orang	192,715,180	137,418,800	(55,296,380)	BKPSDM
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen karier PNS	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen karier PNS			3 dokumen	3 dokumen	127,678,380	18,469,300	(109,209,080)	BKPSDM
5	03	02	2.03		Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengelolaan pendidikan lanjutan	Pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan			35 orang	100%				BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah aparatur yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan jumlah aparatur yang menerima SK ijin belajar/tugas belajar, dan surat keterangan tidak sedang tugas belajar	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah aparatur yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan jumlah aparatur yang menerima SK ijin belajar/tugas belajar, dan surat keterangan tidak sedang tugas belajar			4 orang, 31 orang	35 orang	131,704,500	128,175,000	(3,529,500)	BKPSDM
5	03	02	2.04		Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pelaksanaan penilaian kinerja aparatur dan pemberian penghargaan	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pelaksanaan penilaian kinerja aparatur dan pemberian penghargaan			3300 orang	3300 orang				BKPSDM
						Teridentifikasinya aparatur yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin		Teridentifikasinya aparatur yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin			20 orang	20 orang				
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah PNS yang telah diinput data penilaian kerjanya dalam aplikasi E-lapkin	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah PNS yang telah diinput data penilaian kerjanya dalam aplikasi E-lapkin			3000 orang	3674 orang	32,338,000	9,257,400	(23,080,600)	BKPSDM
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah aparatur yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan			300 orang	759 orang	47,077,000	27,089,000	(19,988,000)	BKPSDM
5	03	02	2.04	07	Pembinaan disiplin ASN	Persentase keterpenuhan jam kerja aparatur	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah dokumen pembinaan disiplin			0.972	1 dokumen	55,000,000	4,835,400	(50,164,600)	BKPSDM
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah aparatur yang lulus pendidikan dan pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase SDM Aparatur yang lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan manajerial			342 orang	100%	2,358,233,120	1,909,160,500	(449,072,620)	BKPSDM
5	04	02	2.02		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah jenis pengembangan kompetensi			342 orang	2 jenis				BKPSDM
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan, jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural, dan jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan, jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural, dan jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional			168 orang, 24 orang, 150 orang	178 orang	2,358,233,120	1,909,160,500	(449,072,620)	BKPSDM
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan			1	1	37,618,000	178,763,000	141,145,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Cakupan inovasi yang diterapkan		Cakupan inovasi yang diterapkan			100%	100%				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan			36 OPD	36 OPD				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen rekomendasi kajian	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen rekomendasi kajian	Barru	Barru	1 dokumen	2 dokumen	17,627,000	163,290,000	145,663,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi			36 OPD	36 OPD				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen koordinasi inovasi yang dilaksanakan berdasarkan pada Roadmap	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen koordinasi inovasi yang dilaksanakan berdasarkan pada Roadmap	Barru	Barru	1 dokumen	1 dokumen	19,991,000	15,473,000	(4,518,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen koordinasi inovasi yang dilaksanakan berdasarkan pada Roadmap	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen koordinasi inovasi yang dilaksanakan berdasarkan pada Roadmap	Barru	Barru	1 dokumen	1 dokumen	19,991,000	15,473,000	(4,518,000)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01				INSPEKTORAT DAERAH		INSPEKTORAT DAERAH									
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Barru	Barru	100%	100%	4,837,714,156	4,498,725,411	(338,988,745)	Inspektorat
6	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji Inspektorat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji Inspektorat	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Barru	Barru	504 Orang/Tahun	504 Orang/Tahun	3,119,663,248	3,119,663,248	-	Inspektorat
6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP/Aparat Inspektorat Mengikuti Diklat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP/Aparat Inspektorat Mengikuti Diklat	Barru	Barru	36 Orang	36 Orang	854,923,000	625,837,000	(229,086,000)	Inspektorat
6	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Staf/Aparat Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Staf/Aparat Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Barru	Barru	36 Orang	36 Orang	436,039,000	247,939,000	(188,100,000)	Inspektorat
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat
6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Barru	Barru	12 Jenis	10 Jenis	11,045,048	16,755,200	5,710,152	Inspektorat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah						
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Barru	Barru	34 Kali	34 Kali	156,412,000	156,412,000	-	Inspektorat				
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat				
6	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Barru	Barru	4 Unit	4 Unit	99,488,000	19,440,000	(80,048,000)	Inspektorat				
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan	Barru	Barru	8 Unit	15 Unit	35,365,000	190,015,000	154,650,000	Inspektorat				
6	01	01	2,08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat				
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran Dalam Pengiriman Surat dan Laporan	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran Dalam Pengiriman Surat dan Laporan	Barru	Barru	1500 Surat/Laporan	1500 Surat/Laporan	50,325,400	50,655,400	330,000	Inspektorat				
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Cleaning Service yang Dibayarkan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Cleaning Service yang Dibayarkan	Barru	Barru	2 Orang	2 Orang	9,600,000	9,600,000	-	Inspektorat				
6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat				
6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang Terbayar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang Terbayar	Barru	Barru	7 Unit	7 Unit	6,435,000	22,541,000	16,106,000	Inspektorat				
6	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeler Kantor yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeler Kantor yang Dipelihara	Barru	Barru	15 Unit	15 Unit	2,750,000	2,750,000	-	Inspektorat				
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diperbaiki	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diperbaiki	Barru	Barru	27 Unit	27 Unit	20,405,000	20,405,000	-	Inspektorat				
6	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Barru	Barru	1 Kantor	1 Kantor	35,263,460	16,712,563	(18,550,897)	Inspektorat				
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan	Barru	Barru	100%	100%	4,028,688,500	2,229,038,500	(1,799,650,000)	Inspektorat				
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat				
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Pemeriksaan Kinerja	Barru	Barru	36 LHP	36 LHP	720,700,000	669,973,000	(50,727,000)	Inspektorat				
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Pemeriksaan Keuangan	Barru	Barru	7 LHP	7 LHP	156,375,000	158,190,000	1,815,000	Inspektorat				
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHP Reviu Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHP Reviu Kinerja	Barru	Barru	54 LHP	54 LHP	185,935,000	185,935,000	-	Inspektorat				
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHP Reviu Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHP Reviu Keuangan	Barru	Barru	1 Laporan	1 Laporan	28,800,000	8,425,000	(20,375,000)	Inspektorat				
6	01	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pemeriksaan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pemeriksaan Desa	Barru	Barru	7 Laporan	7 Laporan	170,225,000	170,225,000	-	Inspektorat				
6	01	02	2,01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Hasil Pengawasan	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Hasil Pengawasan	Barru	Barru	3 Laporan	3 Laporan	25,535,000	39,884,000	14,349,000	Inspektorat				
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Barru	Barru	3 Laporan	3 Laporan	1,922,835,500	178,123,500	(1,744,712,000)	Inspektorat				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat
6	01	02	2,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Kerugian Negara	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Kerugian Negara	Barru	Barru	5 Laporan	5 Laporan	35,975,000	35,975,000	-	Inspektorat
6	01	02	2,02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Barru	Barru	40 Laporan	40 Laporan	782,308,000	782,308,000	-	Inspektorat
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Kebijakan dan Sisdur yang Tertata Baik dan Cakupan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang Sistematis	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Kebijakan dan Sisdur yang Tertata Baik dan Cakupan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang Sistematis	Barru	Barru	100%	100%	869,696,350	603,865,850	(265,830,500)	Inspektorat
6	01	03	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan yang Disusun	Barru	Barru	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-		Inspektorat
6	01	03	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Sistem/Aplikasi Pengawasan yang Tersedia	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Sistem/Aplikasi Pengawasan yang Tersedia	Barru	Barru	1 Laporan	1 Laporan	38,545,500	38,545,000	(500)	Inspektorat
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Barru	Barru	100%	100%				Inspektorat
6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Barru	Barru	7 Laporan	7 Laporan	107,765,000	107,765,000	-	Inspektorat
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Reformasi Birokrasi Penanganan Pengaduan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Reformasi Birokrasi Penanganan Pengaduan	Barru	Barru	6 Laporan	6 Laporan	66,029,000	66,029,000	-	Inspektorat
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Cyber Pungli	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Cyber Pungli	Barru	Barru	4 Laporan	4 Laporan	382,167,850	292,917,850	(89,250,000)	Inspektorat
6	01	03	2,02	04	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	Survei Penilaian Integritas	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	Survei Penilaian Integritas	Barru	Barru	1 Dokumen	1 Dokumen	137,594,500	49,304,500	(88,290,000)	Inspektorat
						Survei Penilaian Integritas		Survei Penilaian Integritas	Barru	Barru	1 Dokumen	1 Dokumen	137,594,500	49,304,500	(88,290,000)	Inspektorat
7					UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN						KECAMATAN					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100%	100%	5,536,612,417	5,529,163,377	(7,449,040)	Kec. Barru
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan			100%					Kec. Barru
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Barru	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Barru	Kec. Barru	Kec. Barru	56 orang	56 orang	4,437,273,135	4,437,273,135	-	Kec. Barru
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			4 orang	4 orang				Kec. Barru

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Peubahan		Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	umlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	umlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Barru	Kec. Barru	4 orang	4 orang	39,353,500	30,343,500	(9,010,000)	Kec. Barru
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana			3 kegiatan	3 kegiatan				Kec. Barru
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik /penerangan yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik /penerangan yang disediakan	Kec. Barru	Kec. Barru	5 Jenis	5 Jenis	3,053,000	2,579,000	(474,000)	Kec. Barru
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaam dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaam dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kec. Barru	Kec. Barru	4 Jenis	4 Jenis	15,720,000	15,060,000	(660,000)	Kec. Barru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas daerah yang dilaksanakan, Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan, Jumlah makan dan minum tamu, jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas daerah yang dilaksanakan, Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan, Jumlah makan dan minum tamu, jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Kec. Barru	Kec. Barru	4 Jenis	4 Jenis	100,402,800	109,280,800	8,878,000	Kec. Barru
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penunjang barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penunjang barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana			1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kec. Barru
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	Kec. Barru	Kec. Barru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	118,015,000	116,315,000	(1,700,000)	Kec. Barru
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 Kegiatan%	3 Kegiatan%				Kec. Barru
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jenis ATK yang disediakan, jumlah pengadaan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jenis ATK yang disediakan, jumlah pengadaan	Kec. Barru	Kec. Barru	100%	100%	646,140,200	646,140,200	-	Kec. Barru
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi sarana telekomunikasi, jaringan listrik dan air	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi sarana telekomunikasi, jaringan listrik dan air	Kec. Barru	Kec. Barru	3 Jenis	3 Jenis	36,531,837	36,531,837	-	Kec. Barru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan jasanya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan jasanya	Kec. Barru	Kec. Barru	6 Orang	6 Orang	28,800,000	28,800,000	-	Kec. Barru
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5 Kegiatan	5 Kegiatan				Kec. Barru
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya dan jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya dan jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki.	Kec. Barru	Kec. Barru	18 Unit	18 Unit	84,415,000	80,485,000	(3,930,000)	Kec. Barru
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis meubelair yang diperbaiki	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis meubelair yang diperbaiki	Kec. Barru	Kec. Barru	4 Jenis	4 Jenis	946,080	473,040	(473,040)	Kec. Barru
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Kec. Barru	Kec. Barru	5 Jenis	5 Jenis	7,195,000	7,195,000	-	Kec. Barru
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Barru	Kec. Barru	6 Unit	6 Unit	15,766,865	15,686,865	(80,000)	Kec. Barru

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlatan gedung kantor yang diperbaiki	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlatan gedung kantor yang diperbaiki	Kec. Barru	Kec. Barru	6 Jenis	6 Jenis	3,000,000	3,000,000	-	Kec. Barru
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina dan diawasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina dan diawasi			100%	100%	10,950,400	10,440,000	(510,400)	Kec. Barru
						Jumlah dukungan SOP pelayan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan		Jumlah dukungan SOP pelayan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan			100%	100%				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan			10 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan				Kec. Barru
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina	Kec. Barru	Kec. Barru	10 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	10,254,000	9,990,000	(264,000)	Kec. Barru
7	01	02	2.02		Penyelenggraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kec. Barru
7	01	02	2.02	03	Peningkatatn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang tersusun	Peningkatatn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang tersusun	Kec. Barru	Kec. Barru	4 SOP	4 SOP	696,400	450,000	(246,400)	Kec. Barru
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan			100%	100%	2,046,750,379	1,922,826,248	(123,924,131)	Kec. Barru
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			4 Kegiatan (Bidang)	4 Kegiatan (Bidang)				Kec. Barru
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan pengkoordinasian bidang perencanaan dan pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan pengkoordinasian bidang perencanaan dan pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kec. Barru	Kec. Barru	21 Kegiatan	21 Kegiatan	92,651,500	78,736,500	(13,915,000)	Kec. Barru
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur dasar yang dibangun atau dipelihara di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur dasar yang dibangun atau dipelihara di Kelurahan	Kec. Barru	Kec. Barru	15 Unit	15 Unit	1,462,704,644	1,352,695,513	(110,009,131)	Kec. Barru
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	Kec. Barru	Kec. Barru	20 Kelomok	20 Kelomok	286,146,235	286,146,235	-	Kec. Barru
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring	Kec. Barru	Kec. Barru	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	3,558,000	3,558,000	-	Kec. Barru
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			5 Kelurahan	5 Kelurahan				Kec. Barru

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah						
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
									Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Sebelum	Setelah
1					2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan/adat yang dibina	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan/adat yang dibina	Kec. Barru	Kec. Barru	25 Lembaga	25 Lembaga	201,690,000	201,690,000	-	Kec. Barru				
7	01	04			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang tertangani			100%	100%	21,740,000	21,740,000	-	Kec. Barru				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			3 Instansi	3 Instansi				Kec. Barru				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Kec. Barru	Kec. Barru	10 Aduan	10 Aduan	21,740,000	21,740,000	-	Kec. Barru				
7	01	01			PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	100%	100%	2,418,202,003	2,418,102,003	(100,000)	Kec.Balusu				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	100%	100%				Kec.Balusu				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.Balusu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.Balusu	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	25 Orang	25 Orang	2,094,120,986	2,094,120,986	-	Kec.Balusu				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatr Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatr Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	100%	100%				Kec.Balusu				
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas an Fungsi	Jumlah Peserta Diklat Formal	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas an Fungsi	Jumlah Peserta Diklat Formal	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	1 Orang	1 Orang	30,343,500	30,243,500	(100,000)	Kec.Balusu				
7	01	01	2.06		Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	4 Keg	4 Keg				Kec.Balusu				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	12 Jenis	12 Jenis	912,000	912,000	-	Kec.Balusu				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	7 jenis	7 jenis	598,000	598,000	-	Kec.Balusu				
7	01	01	2.06	06	Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Rekening Surat kabar	Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Rekening Surat kabar	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	1 jenis	1 jenis	1,440,000	1,440,000	-	Kec.Balusu				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Maka Minum Rapat,Makan Minum Tamu Dan Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Maka Minum Rapat,Makan Minum Tamu Dan Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	336 OK	336 OK	75,412,200	75,412,200	-	Kec.Balusu				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Pengadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	2 Keg	2 Keg			-	Kec.Balusu				
7	01	01	2.07	05	Pengadaa Mebel	Jumlah Mobeleur kantor	Pengadaa Mebel	Jumlah Mobeleur kantor	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	40 Jenis	40 Jenis	6,500,000	6,500,000	-	Kec.Balusu				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	3 jenis	3 jenis	21,405,000	21,405,000	-	Kec.Balusu				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	100%	100%				Kec.Balusu				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jassa SuratMenyurat	Jumlah Honor,ATK,Cetak,Penggandaan dan Makan Minum Harian Pegawai	Penyediaan Jassa SuratMenyurat	Jumlah Honor,ATK,Cetak,Penggandaan dan Makan Minum Harian Pegawai	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	5 jenis	5 jenis	135,146,200	135,146,200	-	Kec.Balusu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telepon,Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telepon,Air dan Listrik	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	2 rekening	2 rekening	21,412,117	21,412,117	-	Kec.Balusu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	2 OB	2 OB	9,600,000	9,600,000	-	Kec.Balusu
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	4 Keg	4 Keg				Kec.Balusu
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pembayaran STNK,Kendaraan Roda 2 dan 4,Service,BBM dan Penggantian Suku Cadang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pembayaran STNK,Kendaraan Roda 2 dan 4,Service,BBM dan Penggantian Suku Cadang	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	6 Unit	6 Unit	15,075,000	15,075,000	-	Kec.Balusu
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mobeleur Yang Dipelihara	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mobeleur Yang Dipelihara	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	21 Unit	21 Unit	527,000	527,000	-	Kec.Balusu
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	5 Unit	5 Unit	1,300,000	1,300,000	-	Kec.Balusu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung,pagar dan penataan halaman	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung,pagar dan penataan halaman	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	1 Paket	1 Paket	4,410,000	4,410,000	-	Kec.Balusu
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	100%	100%	2,380,000	2,380,000		Kec.Balusu
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel				Kec.Balusu
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	2,380,000	2,380,000	-	Kec.Balusu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Wilayah Yang Dikembangkan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Wilayah Yang Dikembangkan	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	100%	100%	493,859,267	449,041,600	44,817,667	Kec.Balusu
7	01	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	4 Keg	4 Keg				Kec.Balusu
7	01	02	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pncanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan,Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pncanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan,Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	4 Keg	4 Keg	104,880,250	104,880,250	-	Kec.Balusu
7	01	02	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Yang Dibangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Yang Dibangun	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	1 Paket	1 Paket	198,304,317	153,486,650	44,817,667	Kec.Balusu
7	01	02	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	33 orang	33 orang	151,694,700	151,694,700	-	Kec.Balusu
7	01	02	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	2,380,000	2,380,000	-	Kec.Balusu
7	01	02	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	3 Lembaaga	3 Lembaaga				Kec.Balusu
7	01	02	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	3 Lembaaga	3 Lembaaga	36,600,000	36,600,000	-	Kec.Balusu

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	100%	100%	14,752,000	14,752,000	-	Kec.Balusu
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	3 Instansi	3 Instansi				Kec.Balusu
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unit khusus Yang Dibentuk	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unit khusus Yang Dibentuk	Kantor Camat Balusu	Kantor Camat Balusu	1 Unit	1 Unit	14,752,000	14,752,000	-	Kec.Balusu
7	01	01			PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100%	100%	3,694,097,126	3,694,097,126	-	
7	01	01	2.05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan			100%	100%				Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.tanete riaja	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.tanete riaja			25 Orang	25 Orang	3,111,174,086	3,111,174,086	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			3 Orang	3 Orang				Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	umlah Peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	umlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	3 Orang	3 Orang	35,377,000	35,377,000	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	06	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana			4 kegiatan	4 kegiatan	159,361,200	159,361,200	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan yang disediakan	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	5 Jenis	5 Jenis	1,401,000	1,401,000	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	2 Jenis	2 Jenis	3,647,000	3,647,000	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	06	Penyediaanaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembayaran Rekening Surat Kabar	Penyediaanaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembayaran Rekening Surat Kabar	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	7 Jenis	7 Jenis	5,040,000	5,040,000	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, dan jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan dalam Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, dan jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan dalam Daerah	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	46 OK	46 OK	149,273,200	149,273,200	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.07		Pengadaaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.07	05	Pengadaaa Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor	Pengadaaa Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	2 Jenis	2 Jenis	8,000,000	8,000,000	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Jumlah perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Jumlah perlengkapan Kantor	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	5 Jenis	5 Jenis	16,332,000	16,332,000	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2 Kegiatan%	2 Kegiatan%				Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jassa Surat Menyurat	Jumlah Honor ATK,Materai, Cetak Penggandaan dan Makan Minum harian Pegawai	Penyediaan Jassa Surat Menyurat	Jumlah Honor ATK,Materai, Cetak Penggandaan dan Makan Minum harian Pegawai	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	5 Jenis	5 Jenis	144,104,450	144,104,450	-	Kec. Tanete Riaja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah																																																		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)																																																			
													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)																																																
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)																																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	6 rekening	6 rekening	26,693,190	26,693,190	-	Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeiharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pembayaran STNK Kendaraan Roda 4 dan 2 Service,BBM, dan Penggantian Suku Cadang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeiharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pembayaran STNK Kendaraan Roda 4 dan 2 Service,BBM, dan Penggantian Suku Cadang	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	6 Unit	6 Unit	26,560,000	26,560,000	-	Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	01	2.09	09	Pemeilharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara, jumlah Perlengkapan Kantor, Pengecatan Rumah dan perbaikan Plafon dan pintu, pengecatan gedung dan pagar penataan halaman	Pemeilharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara, jumlah Perlengkapan Kantor, Pengecatan Rumah dan perbaikan Plafon dan pintu, pengecatan gedung dan pagar penataan halaman	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	11 jenis	11 jenis	7,134,000	7,134,000	-	Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina dan diawasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina dan diawasi			100.00%	100.00%	4,454,000	4,454,000	-	Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	02				Jumlah dukungan SOP pelayan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan			Jumlah dukungan SOP pelayan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan			100%	100%				Kec. Tanete Riaja																																															
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan			7 Desa/Kel	7 Desa/Kel				Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	7 Desa/Kel	7 Desa/Kel	3,954,000	3,954,000	-	Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan			4 SOP	4 SOP				Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP yang Tersusun	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP yang Tersusun	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	4 SOP	4 SOP	500,000	500,000	-	Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan			100.00%	100.00%	468,219,220	416,631,795		Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			3 Kegiatan	3 Kegiatan				Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Mustawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan pengkoordinasian bidang perencanaan dan pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Mustawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan pengkoordinasian bidang perencanaan dan pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	9 Jenis	9 Jenis	98,199,300	98,199,300	-	Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur yang dibangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur yang dibangun	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	6 Paket	6 Paket	260,424,320	208,836,895	51,587,425	Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	30 Orang	30 Orang	89,020,000	89,020,000	-	Kec. Tanete Riaja																																																
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			1 Kelurahan	1 Kelurahan				Kec. Tanete Riaja																																																

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	3 Lembaga	3 Lembaga	20,575,600	20,575,600	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang Tertangani			100.00%	100.00%	12,738,050	12,738,050	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			3 Instansi	3 Instansi				Kec. Tanete Riaja
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unit Khusus yang dibentuk	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unit Khusus yang dibentuk	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	1 Unit	1 Unit	12,738,050	12,738,050	-	Kec. Tanete Riaja
						Jumlah Unit Khusus yang dibentuk		Jumlah Unit Khusus yang dibentuk	Kantor Camat Tanete Riaja	Kantor Camat Tanete Riaja	1 Unit	1 Unit	12,738,050	12,738,050	-	Kec. Tanete Riaja
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan kebutuhan adminstrasi yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan kebutuhan adminstrasi yang terpenuhi			1	1	3,685,198,442	3,638,014,032	(47,184,410)	Kec. Tanete Rilau
						Cakupan sarana dan prasarana yang terpenuhi		Cakupan sarana dan prasarana yang terpenuhi			100%	100%				
						Cakupan peningkatan kapasitas SDM apatur		Cakupan peningkatan kapasitas SDM apatur			100%	100%				
7	01	01	2.05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan			100%	100%				Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.05	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.tanete rilau	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.Tanete rilau			25 Orang	25 Orang	3,161,810,434	3,161,810,434	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya dan aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya dan aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			1 kegiatan	1 kegiatan				Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	6 orang	6 orang	38,347,500	38,347,500	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana			4 kegiatan	4 kegiatan				Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik /penerangan gedung kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik /penerangan gedung kantor yang disediakan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	2 Jenis	2 Jenis	1,709,500	1,709,500	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	2 Jenis	2 Jenis	4,935,350	4,935,350	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaam dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dipenuhi	Penyediaan Bahan Bacaam dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dipenuhi	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	7 Jenis	7 Jenis	6,960,000	6,960,000	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah yang terlaksana,Jumlah makan minum rapat yang terpenuhi ,Jumlah makan minum tamu yang tersedia,Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah yang terlaksana	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah yang terlaksana,Jumlah makan minum rapat yang terpenuhi ,Jumlah makan minum tamu yang tersedia,Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah yang terlaksana	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	340 OK	340 OK	110,912,100	83,915,100	(26,997,000)	Kec. Tanete Rilau

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	4 jenis	4 jenis	34,736,400	15,778,800	(18,957,600)	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	5 jenis	5 jenis	3,057,000	3,057,000	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim, cetak, pengandan Makan Minum Harian Pegawai, jumlah tenaga honor yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim, cetak, penggandan Makan Minum Harian Pegawai, jumlah tenaga honor yang dibayarkan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	atk, 47 jenis, 20 meter,peggandaan 20000 lbr, honor 29 orang, 13872 OH	atk, 47 jenis, 20 meter,peggandaan 20000 lbr, honor 29 orang, 13872 OH	242,401,350	242,401,350	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air & listrik yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air & listrik yang dibayarkan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	6 rekening	6 rekening	32,811,918	32,811,918	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas / operasional yang terpelihara secara rutin dan STNK yang terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas / operasional yang terpelihara secara rutin dan STNK yang terbayarkan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	6 unit	6 unit	25,740,000	25,740,000	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair yang terpelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair yang terpelihara	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	2 Jenis	2 Jenis	2,488,390	1,258,580	(1,229,810)	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung dan Pagar dan penataan halaman	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung dan Pagar dan penataan halaman	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	3 paket	3 paket	13,223,500	13,223,500	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperlihara dan jumlah peralatan gedung kantor yang diperlihara	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperlihara dan jumlah peralatan gedung kantor yang diperlihara	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	8 Jenis	8 Jenis	6,065,000	6,065,000	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina dan diawasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina dan diawasi			100%	100%	6,695,400	6,695,400	-	Kec. Tanete Rilau
						Jumlah dukungan SOP pelayan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan		Jumlah dukungan SOP pelayan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan			100%	100%				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggraaan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggraaan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan				Kec. Tanete Rilau
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	10 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	6,264,000	6,264,000	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	02	2.02		Penyelenggraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kec. Tanete Rilau

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.02	03	Peningkatn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang tersusun	Peningkatn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang tersusun	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	4 SOP	4 SOP	431,400	431,400	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan			100%	100%	904,956,050	882,422,050	22,534,000	Kec. Tanete Rilau
						Persentase pemerintahan desa/kel yang dibina dan diawasi		Persentase pemerintahan desa/kel yang dibina dan diawasi			100%	100%				
						Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan		Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan			100%	100%				
7	01	03	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan			4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	4 Kegiatan	4 Kegiatan	145,998,400	123,464,400	(22,534,000)	Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur dasar yang dibangun atau dipelihara di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur dasar yang dibangun atau dipelihara di Kelurahan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	6 paket	6 paket	642,293,650	642,293,650	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	48 orang	48 orang	57,600,000	57,600,000	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	6,264,000	6,264,000	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			1 kegiatan	1 kegiatan				Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	22 Lembaga	22 Lembaga	52,800,000	52,800,000	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	19,920,800	19,920,800	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			3 Instansi	3 Instansi	19,920,800	19,920,800	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Kec. Tanete Rilau	Kec. Tanete Rilau	1 unit	1 unit	19,920,800	19,920,800	-	Kec. Tanete Rilau
7	01	01			PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	100%	100%	3,558,434,728	3,558,434,728	-	
7	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja						Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.Soppeng Riaja	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	32 Orang	32 Orang	2,708,841,908	2,708,841,908	-	Kec.Soppeng Riaja

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah						
								Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)							
1				2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatr Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatr Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	1	1							Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.05	09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	8 Orang	8 Orang	53,155,800	53,155,800				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.06		Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	4 Keg	4 Keg							Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	6 Jenis	6 Jenis	5,000,000	5,000,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	7 jenis	7 jenis	11,000,000	11,000,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Rekening Surat kabar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Rekening Surat kabar	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	5 jenis	5 jenis	8,400,000	8,400,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Maka Minum Rapat,Makan Minum Tamu Dan Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Maka Minum Rapat,Makan Minum Tamu Dan Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	7440 OK	7440 OK	213,672,200	213,672,200				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.07		Pengadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Pengadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	3 Keg	3 Keg							Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.07	05	Pengadaa Mebel	Jumlah Mobeleur kantor	Pengadaa Mebel	Jumlah Mobeleur kantor	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	5 Jenis	5 Jenis	11,307,000	11,307,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	5 jenis	5 jenis	61,999,000	61,999,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor/bangunan lainnya	Jumlah kegiatan perencanaan yang dilaksanakan	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor/bangunan lainnya	Jumlah kegiatan perencanaan yang dilaksanakan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	4 jenis	4 jenis	65,000,000	65,000,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	1	1							Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jassa SuratMenyurat	Jumlah Honor,ATK,Cetak,Pengandaan dan Makan Minum Harian Pegawai	Penyediaan Jassa SuratMenyurat	Jumlah Honor,ATK,Cetak,Pengandaan dan Makan Minum Harian Pegawai	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	3 jenis	3 jenis	130,898,900	130,898,900				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telepon,Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telepon,Air dan Listrik	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	3 rekening	3 rekening	40,959,920	40,959,920				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	3 OB	3 OB	14,400,000	14,400,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	5 Keg	5 Keg							Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pembayaran STNK,Kendaraan Roda 2 dan 4,Service,BBM dan Penggantian Suku Cadang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pembayaran STNK,Kendaraan Roda 2 dan 4,Service,BBM dan Penggantian Suku Cadang	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	5 unit	15 unit	130,350,000	130,350,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mobeleur Yang Dipelihara	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mobeleur Yang Dipelihara	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	4 unit	4 unit	2,350,000	2,350,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	5 Unit	5 Unit	17,500,000	17,500,000				-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung,pagar dan penataan halaman	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung,pagar dan penataan halaman	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	4 unit	4 Paket	25,750,000	25,750,000				-	Kec.Soppeng Riaja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Sarana Prasarana gedung Kantor yang dipelihara		Jumlah Sarana Prasarana gedung Kantor yang dipelihara	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	4 unit	4 unit	57,850,000	57,850,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	1	1	70,100,000	70,100,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	8 keg.	8 keg.				Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	2 Kel.	2 Kel.	17,350,000	17,350,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah SOP Kecamatan yang tersusun	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah SOP Kecamatan yang tersusun	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	4 SOP	4 SOP	52,750,000	52,750,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kewilayahan Yang Dikembangkan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kewilayahan Yang Dikembangkan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	1	1	438,429,000	438,429,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	03	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kewilayahan Yang Dikembangkan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kewilayahan Yang Dikembangkan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	1 Keg	1 Keg				Kec.Soppeng Riaja
7	01	03	1.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang dikoordinasikan Musyawarah Perencanaannya	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang dikoordinasikan Musyawarah Perencanaannya	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	5 Desa	5 Desa	7,500,000	7,500,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	4 Keg	4 Keg				Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perncaanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan,Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perncaanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan,Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	2 Keg	2 Keg	143,879,000	143,879,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.02	02	Pembanguan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan Yang Dibangun	Pembanguan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan Yang Dibangun	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	2 jenis	2 Jenis	15,000,000	15,000,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	4 kelompok	4 kelompok	200,000,000	200,000,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	2 Kel.	2 Kel.	12,700,000	12,700,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	1 Keg	1 Keg				Kec.Soppeng Riaja
7	01	02	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	3 Lembaga	3 Lembaga	59,350,000	59,350,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	1	1	33,400,000	33,400,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	3 Instansi	3 Instansi				Kec.Soppeng Riaja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unit khusus Yang Dibentuk	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unit khusus Yang Dibentuk	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	04	2.01	04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	2 keg	2 keg	8,400,000	8,400,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peresentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peresentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	1	1	23,500,000	23,500,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana			1 Keg	1 Keg				Kec.Soppeng Riaja
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pengamalan Pancasila,	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,			3 Keg	3 Keg	23,500,000	23,500,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peresentase Pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peresentase Pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi			1	1	7,500,000	7,500,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana			1 Keg	1 Keg				Kec.Soppeng Riaja
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	Kantor Camat Soppeng Riaja	Kantor Camat Soppeng Riaja	5 Desa	5 Desa	7,500,000	7,500,000	-	Kec.Soppeng Riaja
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi			100%	100%	2,310,191,077	2,307,589,077	(2,602,000)	Kec. Pujananting
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan			100%	100%				Kec. Pujananting
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Pujananting	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Pujananting	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	24 orang	24 orang	1,997,237,822	1,997,237,822	-	Kec. Pujananting
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			2 orang	2 orang				Kec. Pujananting
7	01	01	2.05	09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	2 orang	2 orang	26,426,000	26,426,000	-	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana			4 kegiatan	4 kegiatan				Kec. Pujananting

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik /penerangan yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik /penerangan yang disediakan	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	5 Jenis	5 Jenis	1,973,380	1,973,380	-	Kec. Pujananting
7	01	01	2	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	2 unit	2 unit	1,055,000	255,000	(800,000)	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaam dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaam dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	3 Jenis	3 Jenis	3,060,000	3,060,000	-	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas daerah yang dilaksanakan, Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan, Jumlah makan dan minum tamu, jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas daerah yang dilaksanakan, Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan, Jumlah makan dan minum tamu, jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	18 ok, 8342 ok/oh	18 ok, 8342 ok/oh	73,950,500	72,148,500	(1,802,000)	Kec. Pujananting
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penunjang barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penunjang barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana			1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kec. Pujananting
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22,000,000	22,000,000	-	Kec. Pujananting
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 Kegiatan%	3 Kegiatan%				Kec. Pujananting
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jenis ATK yang disediakan, jumlah pengadaan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jenis ATK yang disediakan, jumlah pengadaan	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	100%	100%	141,909,800	141,909,800	-	Kec. Pujananting
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi sarana telekomunikasi, jaringan listrik dan air	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi sarana telekomunikasi, jaringan listrik dan air	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	3 Jenis	3 Jenis	15,358,575	15,358,575	-	Kec. Pujananting
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan jasanya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan jasanya	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	1 Orang	1 Orang	4,800,000	4,800,000	-	Kec. Pujananting
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5 Kegiatan	5 Kegiatan				Kec. Pujananting
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya dan jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya dan jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki.	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	5 Unit	5 Unit	20,920,000	20,920,000	-	Kec. Pujananting
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	8 Jenis	8 Jenis	1,500,000	1,500,000	-	Kec. Pujananting
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina dan diawasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina dan diawasi			100%	100%	8,665,800	8,665,800	-	Kec. Pujananting
						Jumlah dukungan SOP pelayan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan			Jumlah dukungan SOP pelayan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan			100%				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggraaan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan			10 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan				Kec. Pujananting
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	7 Des/Kel	7 Des/Kel	8,562,800	8,562,800	-	Kec. Pujananting

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.02		Penyelenggraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kec. Pujananting
7	01	02	2.02	03	Peningkatatn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang disusun	Peningkatatn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang disusun	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	4 sop	4 sop	103,000	103,000	-	Kec. Pujananting
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan			100%	100%	448,289,690	410,565,290	(37,724,400)	Kec. Pujananting
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			3 Kegiatan (Bidang)	3 Kegiatan (Bidang)				Kec. Pujananting
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur dasar yang dibangun atau dipelihara di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur dasar yang dibangun atau dipelihara di Kelurahan	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	3 paket	3 paket	321,902,290	321,902,290	-	Kec. Pujananting
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	2 jenis	2 jenis	42,600,000	39,600,000	(3,000,000)	Kec. Pujananting
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	7 Des/Kel	7 Des/Kel	550,000	-	(550,000)	Kec. Pujananting
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			5 Kelurahan	5 Kelurahan				Kec. Pujananting
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan/adat yang dibina	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan/adat yang dibina	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	8 Lembaga	8 Lembaga	83,237,400	49,063,000	(34,174,400)	Kec. Pujananting
7	01	04			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang tertangani			100%	100%	32,400,000	32,400,000	-	Kec. Pujananting
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			3 Instansi	3 Instansi				Kec. Pujananting
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	10 Aduan	10 Aduan	16,200,000	16,200,000	-	Kec. Pujananting
						Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Unit Khusus Pengaduan Masyarakat		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Kec. Pujananting	Kec. Pujananting	10 Aduan	10 Aduan	16,200,000	16,200,000	-	Kec. Pujananting
7	1	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Prosentase kebutuhanPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah yangg Terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Prosentase kebutuhanPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah yangg Terpenuhi			100%	100%	4,793,218,590	4,770,759,590	-	Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan			100%	100%				Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.05	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan mallusetasi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Mallusetasi			24 orang	24 orang	3,840,099,930	3,840,099,930	-	Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN			14.58%	14.58%				Kec. Mallusetasi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Kec/Kel. Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Kec/Kel. Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan			7 orang	7 orang	24,500,000	24,500,000	-	Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	1				Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlahaah makan minum aktifitas lapangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlaah makan minum aktifitas lapangan			14300 OH	14300 OH	12,315,000	12,315,000	-	Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			8 jenis	8 jenis	11,913,600	11,913,600		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/media cetak yang tersedia selama 1 tahun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/media cetak yang tersedia selama 1 tahun			5 jenis	5 jenis	10,560,000	10,560,000		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi penyediaan kebutuhan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi penyediaan kebutuhan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi tamu			12 bulan	12 bulan	14,470,000	14,470,000		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi yang dilaksanakan			786 kali	786 kali	331,225,000	331,225,000		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	1				Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubel yang tersedia	Pengadaan Mebel	Jumlah meubel yang tersedia			6 jenis	6 jenis	31,178,000	25,403,000		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang tersedia	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang tersedia			5 jenis	5 jenis	65,460,960	54,276,960		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor			1	1				Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk			1.800 surat	1.800 surat	12,094,800	12,094,800		Kec. Mallusetasi
						Jumlah surat Keluar		Jumlah surat Keluar			1.500 surat	1.500 surat	16,000,000	16,000,000		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik			12 bulan	12 bulan	48,971,000	48,971,000		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS yang menerima gaji untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS yang menerima gaji untuk tiap bulannya selama 1 tahun			48 orang	48 orang	296,100,000	296,100,000		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara			1	1				Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara			6 unit	6 unit	48,875,000	43,375,000		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara			18 unit	18 unit	12,500,000	12,500,000		Kec. Mallusetasi
7	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			5 unit	5 unit	16,955,300	16,955,300		Kec. Mallusetasi
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan berbasis kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan berbasis kepuasan masyarakat			0.2	0.2	34,742,000	33,492,000	(1,250,000)	Kec. Mallusetasi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah																	
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)																				
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Sebelum Peubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)																		
1					2				3				4				5				6	7	8		9		10		11		12		13
7	1	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di desa dan Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di desa dan Kecamatan			8 desa/Kel.		8 desa/Kel.																	Kec. Mallusetasi			
7	1	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun			2 dok		2 dok				34,242,000		32,992,000							(1,250,000)			Kec. Mallusetasi				
7	1	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			baik		baik																Kec. Mallusetasi				
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang Tersusun dan diimplementasikan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang Tersusun dan diimplementasikan			4 SOP		4 SOP				500,000		500,000			-							Kec. Mallusetasi				
7	1	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase program pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase program pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga			1		1				1,798,391,535		1,761,891,535							(36,500,000)			Kec. Mallusetasi				
7	1	03	2'02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelompok masyarakat yang diberdayakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelompok masyarakat yang diberdayakan			0.5		0.5																Kec. Mallusetasi				
7	1	03	2'02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang tersusun	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang tersusun			9 dok.		9 dok.				34,242,000		32,992,000							(1,250,000)			Kec. Mallusetasi				
7	1	03	2'02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun			6 unit		6 unit				884,185,617		884,185,617			-							Kec. Mallusetasi				
7	1	03	2'02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan yang Diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan yang Diberdayakan			30 klp		30 klp				451,823,384		451,823,384			-							Kec. Mallusetasi				
7	1	03	2'02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi			8 desa/ kel.		8 desa/ kel.				7,500,000		7,500,000			-							Kec. Mallusetasi				
7	1	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase lembaga Kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase lembaga Kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat			1		1																Kec. Mallusetasi				
7	1	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina			5 lembaga		5 lembaga				420,640,534		385,390,534							(35,250,000)			Kec. Mallusetasi				
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan			1		1				28,058,900		27,158,900							(900,000)			Kec. Mallusetasi				
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 keg.		2 keg.																Kec. Mallusetasi				
7	1	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terbentuknya Satuan Tugas penanganan kasus	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terbentuknya Satuan Tugas penanganan kasus			1 Satgas		1 Satgas				16,835,400		16,835,400			-							Kec. Mallusetasi				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan harmonisasi dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan harmonisasi dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2 kegiatan	2 kegiatan	11,223,500	10,323,500	(900,000)	Kec. Mallusetasi
7	1	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah n Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahana Umum dilaksanakan di kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah n Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahana Umum dilaksanakan di kecamatan			1	1	29,865,000	29,865,000	-	Kec. Mallusetasi
7	1	05	2'01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan wawasan kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan wawasan kebangsaan			1	1				Kec. Mallusetasi
7	1	05	2'01	01	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KESatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KESatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional			1 keg.	1 keg.	29,865,000	29,865,000	-	Kec. Mallusetasi
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi.			100%	100%	2,178,270,333	1,994,322,018	(183,948,315)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Barru	Barru	100%	100%				
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tuynjangan ASN	Periodesasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	12 Bulan	12 Bulan	1,655,351,160	1,689,583,018	34,231,858	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah Yang terlaksana	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah Yang terlaksana	Barru	Barru	1 Jenis	1 Jenis				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah yang mengikuti kegiatan pelatihan formal.	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah yang mengikuti kegiatan pelatihan formal.	Barru	Barru	8 Org	8 Orang	64,259,677	59,463,500	(4,796,177)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terlaksana	Barru	Barru	3 Jenis	3 Jenis				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Barru	Barru	12 Jenis	5 Jenis	1,484,000	1,482,200	(1,800)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga		Barru	12 Jenis	9 Jenis	1,709,000	1,703,000	(6,000)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD		Barru	181 Kali	181 Kali	275,149,988	136,313,200	(138,836,788)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang terlaksana		Barru	1 Jenis	1 Jenis				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya		Barru	5 jenis	8 jenis	33,580,000	3,850,000	(29,730,000)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana		Barru	2 Jenis	2 Jenis				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim		Barru	210 Surat	210 Surat	43,909,700	41,301,900	(2,607,800)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Barru	3 Jenis	3 Jenis	18,600,000	18,314,700	(285,300)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terlaksana		Barru	3 Jenis	3 Jenis				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		Barru	5 Unit	5 Unit	36,877,640	37,388,000	510,360	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja		Barru	4 Unit	7 Unit	1,000,000	2,000,000	1,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Barru	1 unit	1 unit	46,349,168	2,922,500	(43,426,668)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021				Pagu Indikatif			Perangkat Daerah
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Barru	Barru	4 Kali	4 Kali	2,055,000	9,131,000	7,076,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01		Perumusa Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila	Jumlah kegiatan kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan	Perumusa Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila	Jumlah kegiatan kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan	Barru	Barru	2 Kegiatan	1 Kegiatan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Saiah Bangsa	Jumlah Forum Pembauran kebangsaan yang dilaksanakan	Pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Saiah Bangsa	Jumlah Forum Pembauran kebangsaan yang dilaksanakan	Barru		4 kali	4 kali	2,055,000	9,131,000	(30,695,100)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah peserta Forum Komunikasi, Sosialisasi dan Dialog wawasan kebangsaan		Jumlah peserta Forum Komunikasi, Sosialisasi dan Dialog wawasan kebangsaan			100 Orang	100 Orang	18,914,800			
						Jumlah peserta Penguatan konsensus nasional berbangsa dan bernegara		Jumlah peserta Penguatan konsensus nasional berbangsa dan bernegara			100 Orang	100 Orang	18,856,300			
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Steckholder yang mengetahui dan paham tentang undang-undang Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Steckholder yang mengetahui dan paham tentang undang-undang Politik	Barru	Barru	135371 Orang	135371 Orang	39,531,900	518,439,150	478,907,250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi daerah		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi daerah		Barru	Barru						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah		Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah			Barru			39,531,900	518,439,150	478,907,250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi.	Barru	Barru	55 Ormas	55 Ormas	33,650,600	15,621,000	(18,029,600)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2.01		Perumusa Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).	Jumlah Dokumen Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).	Perumusa Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).	Jumlah Dokumen Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).	Barru	Barru	2 Dokumen	2 Dokumen				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Ormas yang terdaftar.	Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Ormas yang terdaftar.		Barru	55 Ormas	55 Ormas	-	8,300,000	8,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah.	Jumlah ormas dan orpol yang dibina	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah.	Jumlah ormas dan orpol yang dibina		Barru	55 Ormas dan 9 Parpol.	55 Ormas dan 9 Parpol.	33,650,600	7,321,000	(26,329,600)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	Prosentase pelaksanaan kebijakan permbinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	Prosentase pelaksanaan kebijakan permbinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.	Barru	Barru	100%	100%	167,433,500	51,933,800	(115,499,700)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	Jumlah Jenis Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya yang Terlaksana	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	Jumlah Jenis Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya yang Terlaksana	Barru	Barru	1 Jenis	1 Jenis				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Jumlah peserta penyuluhan tentang bahaya narkoba dan minuman keras	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Jumlah peserta penyuluhan tentang bahaya narkoba dan minuman keras		Barru	100 org	100 org	167,433,500	51,933,800	(135,166,200)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2021		Pagu Indikatif			Perangkat Daerah		
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah peserta Penyuluhan pencegahan Tindak pidana perjudian dan prostitusi		Jumlah peserta Penyuluhan pencegahan Tindak pidana perjudian dan prostitusi			100 org	100 org	19,666,500			
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah Kasus Ipolexsusbudhankam yang difasilitasi.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah Kasus Ipolexsusbudhankam yang difasilitasi.	Barru	Barru	5 Kasus	5 Kasus	344,114,434	264,762,900	(79,351,534)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.	Jumlah Jenis Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial Yang Terlaksana	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.	Jumlah Jenis Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial Yang Terlaksana	Barru	Barru	2 Jenis	2 Jenis				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewasdaan dini, kerjasama INTElejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah tim FKDM yang dibentuk	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewasdaan dini, kerjasama INTElejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah tim FKDM yang dibentuk	Barru		8 tim	8 tim	119,741,600	112,614,100	(69,920,334)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial	3 Kali			3 Kali	34,008,834				
				Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pencegahan dan resolusi konflik	Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pencegahan dan resolusi konflik	Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pencegahan dan resolusi konflik	Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pencegahan dan resolusi konflik	100 org			100 org	17,146,000				
				Jumlah Pemantauan Orang Asing dan Lembaga LSM Asing yang dilakukan selama setahun	Jumlah Pemantauan Orang Asing dan Lembaga LSM Asing yang dilakukan selama setahun	Jumlah Pemantauan Orang Asing dan Lembaga LSM Asing yang dilakukan selama setahun	Jumlah Pemantauan Orang Asing dan Lembaga LSM Asing yang dilakukan selama setahun	12 Kali			12 Kali	11,638,000				
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Institusi Fokmas/Forkopimda yang difasilitasi.	Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Institusi Fokmas yang dipasilitasi	Barru		7 Fokmas	161580000	161,580,000	152,148,800	(9,431,200)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH													961,414,272,281	1,006,286,013,721	44,871,741,440	

BAB VI

KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.

Target Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2021 berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahunan 2020	Target RKPD Pokok 2021	Target RKPD Perubahan 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71	71,43	71,43
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,26	9,08	9,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,39	6,17	6,17
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,87	3,98	3,98
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	40,3	41,98	41,98
6	Rasio Gini	Angka	0,36	0,36	0,36

Sumber: Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2021

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barru

No	Indikator	Capaian Tahun 2020	Target RKPD Pokok 2021	Target Perubahan RKPD 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71	70,10	70,10
2	angka harapan lama sekolah	13,58	13,65	13,65
3	Rata-rata lama sekolah	8,23	8,12	8,12
4	Angka harapan hidup	69,02	69	69
5	Persentase tingkat pengangguran terbuka	6,39	5,40	5,40
6	PDRB Perkapita	40.300.000	47.147.498	47.147.498
7	Pertumbuhan Ekonomi	0,87	6,98	6,98
8	Inflasi	1,61	2,9	2,9
9	Indeks Gini	0,36	0,34	0,34
10	Paritas Daya Beli (PPP)	10.920.000	10.923.600	10.923.600
11	Persentase Penduduk Miskin	8,26	8,11	8,11
12	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	100 %	100%	100%
13	Angka Kriminalitas yang tertangani	7,25	6,5	6,5
14	Jumlah korban meninggal hilang, dan terkena dampak bencana	0	0	0
15	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0,004	0	0
16	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	90	90
17	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100
18	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100
19	Kinerja Infrastruktur Daerah	55,33	23,33	23,33
20	Pertumbuhan Industri	11	11	11

21	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,651	0,72	0,72
22	Rasio Jaringan Irigasi	27,73	19,50	19,50
23	Presentase Penduduk Berakses air minum	95,61	100	100
25	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	100
26	Rasio Rumah Layak Huni	0,24	0,29	0,29
27	Indeks Kualitas Lingkungan	69,85	66	66
28	Total Realisasi Investasi	554.148.072.556	558.336.715.695	558.336.715.695
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
30	Penerapan E-Government			
	1. ePlanning	Ada	Ada	Ada
	2. eBudgeting	Ada	Ada	Ada
	3. eSDM	Ada	Ada	Ada
	4. ePengawasan	Ada	Ada	Ada
	5. ePerizinan	Ada	Ada	Ada
	6. eMas	Ada	Ada	Ada
31	Presentase Tindak Lanjut Temuan	97,2	100	100
32	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
33	Akuntabilitas Pemerintah	B	B	B
34	Persentase sarana peribadahan yang dibina pemerintah daerah	100	100	100

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penetapan indikator kinerja kunci ini menggunakan perpaduan IKK pada Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 18 Tahun 2020 yang selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) RKPD Tahun 2020

No	Indikator	Target 2020	Capaian 2020
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Pertumbuhan PDRB	6,64	0,87
2	Laju inflasi	3,1	1,61
3	PDRB per kapita (rp)	43.411.694	42.43.000
4	Indeks Gini	0,35	0,36
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	8,51	8,26
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,97	70
7	Angka Harapan Lama Sekolah	13,58	13,58
8	Angka rata-rata lama sekolah	7,98	8,23
9	Angka usia harapan hidup	68,9	69,02
10	Persentase balita gizi buruk	0,06	0,02
11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	61,51	57,17
12	Tingkat pengangguran terbuka	5,49	6,39
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	10,78	11,53
15	Opini BPK	WTP	WTP
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93	91,2
17	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	15.56%	15.87%
18	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0.08	8.46%
19	Produksi sektor pertanian	146.792 ton	155.172,43 Ton
20	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan	1.82%	1.86%
21	Produksi sektor perkebunan	3.759 Ton	3.815 Ton
22	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	90.65%	90.81%
23	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,5	1,5
24	Pertumbuhan Industri	11	11
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka kriminalitas yang tertangani	7	7,25
2	Rasio ketergantungan	53,86	49,15
C	ASPEK PELAYANAN UMUM		
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan		
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	80	85,05
1. 2	Angka Partisipasi Kasar		
1.2.1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	106,5	100,67
1.2.2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	107	112,09
1.3	Angka Partisipasi Murni		
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	93,85	93.99
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,5	90.50
1.4	Angka partisipasi sekolah		
1.4.1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	94	97,69
1.4.2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	90	93,41
1.5	Angka Putus Sekolah:		

1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,32	0,44
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,53	1,19
1.6	AngkaKelulusan:		
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100
1.7	Angka Melanjutkan		
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,95	122,23
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93,75	NA
1.8	Fasilitas Pendidikan:		
1.8.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94,23	89
1.8.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	98,30	55
1.8.3	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	122,39	102,63
1.8.4	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	55,90	40,59
1.9	Rasio guru/murid		
1.9.1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)	1065	1.100,34
1.9.2	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)	730,00	1,216,47
1.1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,15	99,03
1.11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88	94,89
2	Kesehatan		
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	1,94	3
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,86	99,7
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,24	1
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5	2
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	65,4	98
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk	0,02	0.13
2.7	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	0,39	0.30
2.8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83	100
2.9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97,5	98
2.10	Persentase Balita Gizi buruk	0,06	0,04
2.11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100
2.12	Cakupan kunjungan bayi	100	95.51
2.13	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	93,2	93.21
2.14	Cakupan pelayanan nifas	98,2	98.87
2.15	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	52,40	100
2.16	Cakupan pelayanan anak balita	89	60.60
2.17	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	8	0
2.18	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	93	64
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,72	0,651

3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	3,96	
3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	79,39	73,55
3.4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1,66	
3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	93,07	100
3.6	Presentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	100	3,88
3.7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	47,10	50,41
3.8	Rasio Jaringan Irigasi	21,31	27,73
3.9	Presentase penduduk berakses air minum	87,19	95,61
3.1	Persentase areal kawasan kumuh	0,11	0,02
3.11	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	3.194	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman		
4.1	Rasio rumah layak huni	0,3	0,24
4.2	Rasio permukiman layak huni	0,1	0,99
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	0,49	0,47
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100	100
C5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	65,75	100
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100
5.3	Penegakan PERDA	100	100
6	Sosial		
6.1	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%	45,15
6.2	Presentase PMKS yang tertangani	100%	45,15
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja		
1.1	Angka sengketa pengusaha- pekerja pertahun	2	0
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	0
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%	52,8
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	70	79,27
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah	0	0
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	85	100
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	30	0

2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	29,33	18,55
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30	20
2.3	Rasio KDRT	0,009	0,02
3	Pangan		
3.1	Ketersediaan pangan utama	45.87	43,79
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0,423	0,423
5	Lingkungan Hidup		
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	Ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Ada	Ada
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	ADA	0
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	1	50
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	95	90,59
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan Lahan	51,4	69,77
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	5,4%	0,05
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah	1	1
5.9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ADA	ADA
5.1	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampak nya di daerah	100	100
5.13	Presentase jumlah sampah yang tertangani	99%	99%
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0.97	0,999
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.96	0,92
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	100	100
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ADA	Ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan Penerbitan KTP	97	99,99
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	100%
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1 Kelompok Binaan LPM	1 Kelompok Binaan

7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	32,36	39,44
7.4	Presentase LSM Aktif	100%	100%
7.5	Presentase LPM Berprestasi	25,45%	100%
7.6	Presentase PKK aktif	100%	100%
7.7	Presentase Posyandu aktif	100%	100%
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	83%	30%
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100%	50%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.5	Rasio akseptor KB	73,50	66,63
8.6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73,70 %	66.63
8.7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1,51	1,51
8.8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	16,00 %	16,71
8.9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17,04%	13,9
8.1	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	42,00	50.09
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	59,20	45,13
8.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	48	30,1
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	43,20	33,16
8.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100%	100
8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	1571,42	900
8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100
8.17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	38,85	51,15
8.18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100
8.19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100
8.2	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%
8.21	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%
8.22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%
9	Perhubungan		
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.756.272	1,682,943
9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	2.026	2,24
9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	5/0/6	9
9.4	Presentase layanan Angkutan darat	0,10	0.076
9.7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	1.720.437	917.909

9.8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	4.808.655/23.765	9,694,239
10	Komunikasi dan Informasi		
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	98%	
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
11.1	Persentase koperasi aktif	58.25	62,5
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM UKM	9.9	96,46
11.3	Presentase BPR/LKM Aktif	71.43	71,43
11.4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	99.74	99,27
12	Penanaman Modal		
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	400	118
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	750.000.000.000	855.316.873.042
12.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	242	
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	0,9	17,06
13	Kepemudaan dan Olahraga		
13.1	Presentase organisasi pemuda yang aktif	55	100
13.2	Presentase wirausaha muda	36	13.33
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	85	93,1
13.4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	16,70%	76
13.5	Jumlah atlet berprestasi	1	0
13.6	Cakupan pembinaan atlet muda	50	70,9
13.7	Jumlah Prestasi olahraga	1	0
14	Statistik		
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada
14.3	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada
15	Persandian		
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	10%	2,7%
16	Kebudayaan		
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	9	5
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	80	100
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	6	3
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	28	15
17	Perpustakaan		
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	201,960	121.286
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	120,849	58.685
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.93%	0,30%
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	8,400	0,64
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	6,134	11.676

17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1 org	3 org
18	Kearsipan		
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	80,5
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	0
III	Urusan Pilihan		
1	Pariwisata		
1.1	Kunjungan wisata	100%	186
1.2	Lama kunjungan Wisata	1 Hari	1 Hari
1.3	PAD Sektor Pariwisata	0,072	0,89
2	Pertanian		
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	15.56%	
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0.08	
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1.82%	
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	90.65%	
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	57.9	59,8
2.6	Cakupan bina kelompok petani	41.05	11,94
5	Perdagangan		
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	95.767.000	95.776.576.939
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	14,28	30,77
6	Perindustrian		
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	14.28%	14%
7	Transmigrasi		
7.1	Presentase Transmigran swakarsa		
8	Kelautan dan Perikanan		
8.1	Produksi perikanan	100	28086,01
8.2	Konsumsi ikan	100	46
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	48.3	108
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	36.9	11.300,60
IV	Urusan Penunjang		
1	Perencanaan Pembangunan		
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPDyg telah ditetapkan dgn PERDA	ADA	ADA
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ADA	ADA
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ADA	ADA
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100,00	100,00
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100,00	100,00
2	Kuangan		
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA	10%	10%

2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	10%	10%
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	20%
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	10%
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	BTL= 50% --- BL= 50%	BTL= 50% --- BL= 50%
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	8,94	8,94
2.9	Penetapan APBD	29 Desember 2019	27 Desember 2020
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	15 JP	17 JP
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0.07	10%
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0.93	95%
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34 orang	34 orang
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	600 orang	610 orang
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2.750 orang	2.800 orang
4	Penelitian dan Pengembangan		
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100%	100%
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100%	87,5%
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	58,33	90,90
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	58,33	64,93
5	Pengawasan		
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	97.2	76,74
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	0.16	0
5.3	Jumlah temuan BPK	12	10
6	Sekretariat Dewan		
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada

Tabel 6.4
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) RKPD Pokok dan RKPD
Perubahan Tahun 2021

No	Indikator	Target RKPD Pokok 2021	Target RKPD Perubahan 2021
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Pertumbuhan PDRB	6,98	6,98
2	Laju inflasi	2,9	2,9
3	PDRB per kapita (rp)	47.147.498	47.147.498
4	Indeks Gini	0,34	0,34
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	8,11	8,11
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,10	70,10
7	Angka Harapan Lama Sekolah	13,65	13,65
8	Angka rata-rata lama sekolah	8,12	8,12
9	Angka usia harapan hidup	69	69
10	Persentase balita gizi buruk	0,05	0,05
11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	61,78	61,78
12	Tingkat pengangguran terbuka	5,40	5,40
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	10,78	10,78
15	Opini BPK	WTP	WTP
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95	95
17	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	15.87%	15.87%
18	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	8.46%	8.46%
19	Produksi sektor pertanian	150.939 Ton	150.939 Ton
20	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan	1.86%	1.86%
21	Produksi sektor perkebunan	3.815 Ton	3.815 Ton
22	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	90.81%	90.81%
23	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,5	1,5
24	Pertumbuhan Industri	11	11
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka kriminalitas yang tertangani	6,5	6,5
2	Rasio ketergantungan	53,41	53,41
C	ASPEK PELAYANAN UMUM		
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan		
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	86,78	86,78
1. 2	Angka Partisipasi Kasar		
1.2.1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	106	106
1.2.2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	106,5	106,5
1.3	Angka Partisipasi Murni		
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	94	94
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	90	90
1.4	Angka partisipasi sekolah		
1.4.1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	94	94
1.4.2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	94	94
1.5	Angka Putus Sekolah:		

1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,3	0,3
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,5	0,5
1.6	AngkaKelulusan:		
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100
1.7	Angka Melanjutkan		
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99	99
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	94	94
1.8	Fasilitas Pendidikan:		
1.8.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94,73	94,73
1.8.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	98,30	98,30
1.8.3	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	122,39	122,39
1.8.4	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	55,90	55,90
1.9	Rasio guru/murid		
1.9.1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)	1080	1080
1.9.2	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)	740,00	740,00
1.1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,15	99,15
1.11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,30	95,30
2	Kesehatan		
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	1,93	1,93
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,88	99,88
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,21	0,21
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,7	4,7
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	65,3	65,3
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk	0,27	0,27
2.7	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	0,43	0,43
2.8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87	87
2.9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98	98
2.1	Persentase Balita Gizi buruk	0,05	0,05
2.11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100
2.12	Cakupan kunjungan bayi	100	100
2.13	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	93,8	93,8
2.14	Cakupan pelayanan nifas	98,8	98,8
2.15	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	52,8	52,8
2.16	Cakupan pelayanan anak balita	92	92
2.17	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	8,7	8,7
2.18	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,72	0,72

3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	3,96	3,96
3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	83,04	83,04
3.4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1,67	1,67
3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	93,29	93,29
3.6	Presentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	100	100
3.7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	47,26	47,26
3.8	Rasio Jaringan Irigasi	22,23	22,23
3.9	Presentase penduduk berakses air minum	95,85	95,85
3.1	Persentase areal kawasan kumuh	0,06	0,06
3.11	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	3.179	3.179
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman		
4.1	Rasio rumah layak huni	0,3	0,3
4.2	Rasio permukiman layak huni	0,1	0,1
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	0,49	0,49
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	69,99	69,99
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100
5.3	Penegakan PERDA	100	100
6	Sosial		
6.1	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%	100%
6.2	Presentase PMKS yang tertangani	100%	100%
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja		
1.1	Angka sengketa pengusaha- pekerja pertahun	2	2
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	0
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%	30%
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	70	70
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah	0	0
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	96	96
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50	50
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30,58	30,58
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30	30
2.3	Rasio KDRT	0,005	0,005
3	Pangan		
3.1	Ketersediaan pangan utama	46.43	46.43
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	65	65
5	Lingkungan Hidup		
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	Ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Ada	Ada
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	ADA	ADA
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	1	1
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	95	95
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan Lahan	51,5	51,5
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	5,4%	5,4%
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah	1	1
5.9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ADA	ADA
5.1	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampak nya di daerah	100	100
5.13	Presentase jumlah sampah yang tertangani	99%	99%
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0.98	0.98
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.97	0.97
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	100	100
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ADA	ADA
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan Penerbitan KTP	98	98
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	100%
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1 Kelompok Binaan LPM	1 Kelompok Binaan LPM
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	32,36	32,36
7.4	Presentase LSM Aktif	100%	100%

7.5	Presentase LPM Berprestasi	25,45%	25,45%
7.6	Presentase PKK aktif	100%	100%
7.7	Presentase Posyandu aktif	100%	100%
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100	100
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.5	Rasio akseptor KB	74,90	74,90
8.6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	75,01%	75,01%
8.7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1,5	1,5
8.8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	15,89 %	15,89 %
8.9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,02%	18,02%
8.1	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	42,30	42,30
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	61,05	61,05
8.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	51,25	51,25
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	45,50	45,50
8.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100%	100%
8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	1228,57 %	1228,57 %
8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%
8.17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	39,02%	39,02%
8.18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%
8.19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%
8.2	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%
8.21	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%
8.22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%
9	Perhubungan		
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.738.710	1.738.710
9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	2.038	2.038
9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	5/0/6	5/0/6
9.4	Presentase layanan Angkutan darat	0,12	0,12
9.7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	1.703.233	1.703.233
9.8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	4.808.655/23.765	4.808.655/23.765

10	Komunikasi dan Informasi		
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	100%	100%
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
11.1	Persentase koperasi aktif	58.25	58.25
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM UKM	9.9	9.9
11.3	Presentase BPR/LKM Aktif	71.43	71.43
11.4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	99.73	99.73
12	Penanaman Modal		
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	420	420
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	780.000.000.000	780.000.000.000
12.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	258	258
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	0,97	0,97
13	Kepemudaan dan Olahraga		
13.1	Presentase organisasi pemuda yang aktif	60	60
13.2	Presentase wirausaha muda	41	41
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100
13.4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	20,29%	20,29%
13.5	Jumlah atlet berprestasi	1	1
13.6	Cakupan pembinaan atlet muda	60	60
13.7	Jumlah Prestasi olahraga	1	1
14	Statistik		
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada
14.3	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada
15	Persandian		
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	10%	10%
16	Kebudayaan		
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	9	9
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	90	90
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	6	6
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	30	30
17	Perpustakaan		
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	202,960	202,960
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	148,457	148,457
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.95%	0.95%
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	8,500	8,500
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5,521	5,521
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1 org	1 org

18	Kearsipan		
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	2
III	Urusan Pilihan		
1	Pariwisata		
1.1	Kunjungan wisata	100%	100%
1.2	Lama kunjungan Wisata	1 Hari	1 Hari
1.3	PAD Sektor Pariwisata	0,08	0,08
2	Pertanian		
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	15.87%	15.87%
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	8.46%	8.46%
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1.86%	1.86%
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	90.81%	90.81%
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	58.19	58.19
2.6	Cakupan bina kelompok petani	41.87	41.87
5	Perdagangan		
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan		
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	14,28	14,28
6	Perindustrian		
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	14.28%	14.28%
7	Transmigrasi		
7.1	Presentase Transmigran swakarsa	0	0
8	Kelautan dan Perikanan		
8.1	Produksi perikanan	100	100
8.2	Konsumsi ikan	100	100
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	58.06	58.06
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	37.06	37.06
IV	Urusan Penunjang		
1	Perencanaan Pembangunan		
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPDyg telah ditetapkan dgn PERDA	ADA	ADA
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ADA	ADA
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ADA	ADA
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	100,00	100,00
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	100,00	100,00
2	Keuangan		
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA	10%	10%
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	10%	10%
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0

2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	20%
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	10%
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	BTL= 50% --- BL= 50%	BTL= 50% --- BL= 50%
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	8,94	8,94
2.9	Penetapan APBD	27 Desember 2021	27 Desember 2021
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	17 JP	17 JP
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,1	0,1
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0.95	0.95
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34 orang	34 orang
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	610 orang	610 orang
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2.800 orang	2.800 orang
4	Penelitian dan Pengembangan		
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	1	1
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	63,88	63,88
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	63,88	63,88
5	Pengawasan		
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	100	100
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	0.16	0.16
5.3	Jumlah temuan BPK	12	12
6	Sekretariat Dewan		
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan

SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Tabel 6.5
Penetapan Target Indikator SPM (Persen) Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	Target Nasional	Capaian 2020	Target RKPD Perubahan 2021
I PENDIDIKAN					
1	pendidikan anak usia dini	%	100	85,05	100
2	pendidikan dasar				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100	93,99	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	100	90,50	100
3	pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	%	100	36,10	100
II KESEHATAN					
1	pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100
4	pelayanan kesehatan balita	%	100	61	100
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	64	100
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	57	100
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	79	100
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	100	100
9	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100	100	100
10	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	100	100
11	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100	100	100
12	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	100	72	100
III PEKERJAAN UMUM					
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	95,61	100
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100

IV PERUMAHAN RAKYAT					
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	0	100
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	0	100
V KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
2	pelayanan informasi rawan bencana	%	100	80	100
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	40	100
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	%	100	100	100
VI SOSIAL					
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	%	100	100	100
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	%	100	100	100
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	%	100	100	100
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	100	100	100
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Barru tahun 2021

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.

Tabel 6.6
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Barru Tahun 2021

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	CAPAIAN 2020	TARGET TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,26	9,08	Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas PKP; Dinas PUPR; Bappeda; Dinas Kop, UKM & Perdagangan; Dinas PMDPPKBPPPA; Dinas Pertanian; Dinas Perikanan; Dinas Ketahanan Pangan; dan Bagian Kesra.
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37131,000	37168	Dinas Sosial
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	88,02	90,13	Dinas PUPR
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	95,10	100	Dinas PUPR
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	94,71	95	Dinas Pendidikan
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	2,00	4	BPBD
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	252,00	265	BPBD dan Dinas Sosial
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0,00	0	Dinas Sosial
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2392600000,00	672.981.095,00	BPBD dan Satpol PP
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum Ada	Belum Ada	BPBD
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	13,20	9,50	Dinas Kesehatan
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	42,01	41,27	Dinas Ketahan Pangan
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	91,20	91,37	Dinas Ketahanan Pangan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1,59	0,89	Dinas Kesehatan

		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	6,37	5,62	Dinas Kesehatan
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,13	0,11	Dinas Kesehatan
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	13,62	14,44	Dinas PMD PPKB PPPA
		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0,00	0,38%	BKPSDM
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	81,24	86,19	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	74,36	79,34	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	101,70	103,54	Dinas Pendidikan
		4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	64,88	69,87	Dinas Pendidikan
		4.c.1*	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	88,54	91,01	Dinas Pendidikan
		4.c.1*	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	87,48	90,07	Dinas Pendidikan
5	Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	6,060606061	6,06	BKPSDM
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	15,32%	15,02	Dinas PMD PPKB PPPA
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	69,29	70,09	Dinas PMD PPKB PPPA
		5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	5,00	6	Dinas PMD PPKB PPPA
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	88,02	90,13	Dinas PUPR
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	1810,00	1935	Dinas PUPR
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	61,67	69,37	Dinas LH
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	41710000,00	43.705.000	Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas PTSP; Dinas Kop, UKM dan perdagangan; Dinas Pemuda Olahraga; Dinas Pertanian; Dinas Pariwisata; Dinas Perikanan
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	0,35	39,67%	Dinas Pendidikan; Dinas PTSP
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	0,33	36,87%	Dinas Pendidikan; Dinas PTSP

		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	0,34	35,19%	Dinas PTSP
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	5,79	5,77	Dinas Pendidikan; Dinas PTSP
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	693,00	59	Dinas Pariwisata
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	0,21	25,50%	Dinas Pariwisata
		8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6,13	5,13	Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas PTSP; Dinas Kop, UKM dan perdagangan;Dinas Pemuda Olahraga; Dinas Pertanian; Dinas Pariwisata; Dinas Perikanan
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Belum ada	Belum ada	Bag. Hukum Setda
		10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37131,00	37168	Dinas PTSP
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Belum Ada	Belum Ada	Dinas PUPR dan Bag. Pemerintahan Setda
		11.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,02	0,01	BPBD dan Satpol PP
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	239260000 0,00	672.981.09 5,00	BPBD dan Satpol PP
		11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	0,82	85,00	Dinas PUPR dan DLH
		11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Belum Ada	Belum Ada	BPBD
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,02	0,01	BPBD dan Satpol PP
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0,00	0	Dinas Lingkungan Hidup
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0,02	0,01	Satpol PP dan Badan Kesbangpol

	Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	CC	cc	Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat
		16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	78,01	91.2.8	Dinas Dukcapil
		16.10. 2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	1,00	1	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik
		16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Belum ada	Belum Ada	Bag. Huukum Setda
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	940707735 216,33	1.033.721.2 92.466,00	Bapenda ; BPKAD ; RSUD

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun anggaran 2021 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Kabupaten Barru Tahun 2021.

Program Kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 akan menjadi ukuran pencapaian target kinerja bagi Perangkat Daerah, terutama akselerasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi target kinerja, harapan dan aspirasi masyarakat. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2021 ini juga diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RKPD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RKPD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru agar melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021 ini;
3. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang

terdapat pada RKPD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Barru;

4. RKPD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021 akan menjadi dasar penyusunan KUPA PPAS Perubahan dan APBD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 ini diharapkan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Barru yakni Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan

